



**KEMENTERIAN PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
UNIT ORGANISASI
KEMENTERIAN PERTAHANAN
TAHUN 2020**

**DIKELUARKAN DI JAKARTA
PADA TANGGAL 3 FEBRUARI 2021**

DAFTAR ISI

	Halaman
BAB I	PENDAHULUAN
1.	Latar Belakang 1
2.	Kedudukan Tugas dan Fungsi 3
3.	Permasalahan Utama Satker/Subsatker yang bersifat Strategis..... 9
BAB II	PERENCANAAN KINERJA
4.	Umum..... 8
5.	Ikhtisar Renstra 9
6.	Ikhtisar Rencana Kinerja Tahunan 12
7.	Ikhtisar Perjanjian Kinerja 39
BAB III	AKUNTABILITAS
8.	Capaian Kinerja Organisasi..... 68
a.	Realisasi Kinerja UO Kemhan Tahun 2020 sesuai dengan IKU..... 68
b.	Perbandingan antara realisasi kinerja UO Kemhan serta capaian kinerja Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2020..... 87
c.	Analisis Kinerja..... 138
d.	Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya..... 205
e.	Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja..... 206
9.	Realisasi Anggaran..... 208
BAB IV	PENUTUP
10.	Kesimpulan dan Penekanan..... 209
a.	Kesimpulan..... 209
b.	Penekanan..... 210
LAMPIRAN	
1.	Perjanjian Kinerja UO Kemhan Tahun 2020
2.	Foto kegiatan PK

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Unit Organisasi Kementerian Pertahanan (U.O Kemhan) Tahun 2020 dapat disusun, di mana esensi dari laporan kinerja ini adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang tertuang di dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, atau dengan pengertian lain bahwa laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja ini adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta bentuk implementasi yang memadai dari hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Rancangan Renstra UO Kemhan tahun 2020-2024 telah menetapkan 4 (empat) tujuan strategis, 16 (enam belas) sasaran strategis, 11 (sebelas) sasaran program, 62 (enam puluh dua) kegiatan serta 261 (dua ratus enam puluh satu) indikator kinerja utama sehingga Laporan Kinerja UO Kemhan pada Tahun 2020 menyajikan tentang informasi kinerja, analisis faktor keberhasilan maupun kegagalan dari pencapaian sasaran program, sasaran kegiatan dan indikator kinerja serta target kinerja yang diproyeksikan ke dalam Perjanjian Kinerja UO Kemhan Tahun 2020. Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan UO Kemhan tahun 2020 yang telah dicapai merupakan wujud dari pertanggungjawaban dan keterlibatan seluruh Satker/Subsatker yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi perencanaan program dan anggaran, serta perumusan kebijakan bidang pertahanan di tahun mendatang.

Akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh Ka Satker/Subsatker yang telah bekerja keras dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja yang optimal dan akuntabel sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah UO Kemhan Tahun 2020 dapat tersusun dengan baik serta dapat dipertanggungjawabkan.

Jakarta, 3 Februari 2021

a.n. Menteri Pertahanan RI
Sekretaris Jenderal,

ttd

Donny Ermawan T., M.D.S.
Marsekal Madya TNI

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) UO Kemhan Tahun 2020 merupakan wujud pertanggungjawaban UO Kemhan atas pelaksanaan program dan kegiatan serta memberikan informasi tentang hasil kinerja yang telah dicapai dengan berpedoman kepada Perjanjian Kinerja, dimana Kementerian Pertahanan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pertahanan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dalam rangka mewujudkan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan, UO Kemhan telah menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Nomor: KEP/2011/XII/2019 tentang Rancangan Rencana Strategis UO Kemhan Tahun 2020-2024, yang memuat Visi, Misi dan Tujuan serta Sasaran Strategis yang digunakan sebagai pedoman terhadap perencanaan pembangunan pertahanan negara yang selalu dievaluasi 1 (satu) tahun sekali pada perencanaan kinerjanya. Adapun Visi pertahanan negara adalah Terwujudnya pertahanan negara yang tangguh dengan Misi adalah Mewujudkan kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI serta melindungi keselamatan segenap bangsa, untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi pertahanan negara ditetapkan 4 (empat) tujuan strategis serta dijabarkan menjadi 16 (enam belas) sasaran strategis. Laporan Kinerja UO Kemhan Tahun 2020 merupakan tahun pertama dari pelaksanaan Rancangan Rencana Strategis UO Kemhan Tahun 2020-2024. Pencapaian target kinerja UO Kemhan tahun 2020 sudah mencapai 94,93% selaras dengan Reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2020 yang memuat sasaran program dan sasaran kegiatan, indikator kinerja serta target kinerja yang akan dicapai yang terdiri dari 11 (sebelas) Program dan 62 (enam puluh dua) kegiatan dengan didukung 261 (dua ratus enam puluh satu) indikator kinerja utama.

Menindaklanjuti arahan kebijakan Pemerintah pada tahun berjalan tentang pelaksanaan *refocussing* anggaran terkait Pandemi Covid - 19 maka terjadi pemotongan anggaran sebesar Rp. 3.275.383.335.000,- sehingga anggaran semula Rp. 21.542.503.185.000,- menjadi Rp. 18.267.119.850.000,- mengakibatkan beberapa Satker merevisi program dan kegiatan, serta target kinerja output kegiatan. Seiring berjalannya waktu sampai triwulan IV tahun 2020, UO Kemhan menerima tambahan alokasi anggaran sebesar Rp.18.891.271.806.000,- untuk penanggulangan Pandemi Covid 19 bagi Pegawai Kemhan dan TNI, penyiapan fasilitas Rumah Sakit Kemhan dan TNI di seluruh Indonesia serta beberapa alat pendukung Alutsista sehingga pagu anggaran UO Kemhan tahun 2020 menjadi Rp. 37.158.391.641.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 29.991.588.572.004,- (80.71%). Sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sisa anggaran sebesar Rp. 7.166.803.068.996,- telah dikembalikan ke kas negara. Pelaksanaan program dan kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan *refocussing* anggaran dengan capaian kinerja 94,93% dan daya serap anggaran 80.71% dimana pada tahun 2019 capaian kinerja 93,42% dan daya serap anggaran 90,15%.

Saat ini Renstra UO Kemhan tahun 2020-2024 belum dapat disahkan akibat dari pengaruh Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) yang diinisiasi oleh Kementerian BPPN/Bappenas sehingga terjadi perubahan nomenklatur program dan kegiatan bagi seluruh Kementerian dan Lembaga, akan tetapi pencapaian keberhasilan program dan kegiatan tetap dilaksanakan sesuai dengan rancangan Renstra UO Kemhan tahun 2020-2024, selanjutnya perubahan tersebut telah ditindaklanjuti dalam Penyusunan Renstra UO Kemhan Tahun 2020-2024 oleh Biro Perencanaan dan Keuangan Setjen Kemhan.



**KEMENTERIAN PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
UNIT ORGANISASI KEMENTERIAN PERTAHANAN
TAHUN 2020**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1. Latar Belakang.

a. Umum.

- 1) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan seluruh instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
- 2) Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.
- 3) Unit Organisasi Kementerian Pertahanan (UO Kemhan) sebagai salah satu unsur pelaksana pemerintah di bidang pertahanan telah melaksanakan program dan kegiatan tahun 2020. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) UO Kemhan Tahun 2020 disusun dalam bentuk laporan pertanggungjawaban tentang keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi UO Kemhan dalam mencapai tujuan dan sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan dan disepakati pada dokumen perjanjian kinerja UO Kemhan Tahun 2020.

b. Maksud dan tujuan.

- 1) Maksud. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) UO Kemhan Tahun 2020 sebagai wujud pertanggungjawaban UO Kemhan atas pelaksanaan program/kegiatan serta memberikan gambaran sejauh mana hasil yang telah dicapai sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja UO Kemhan Tahun 2020.

- 2) Tujuan. Sebagai bahan masukan dan bahan pertimbangan bagi pimpinan dalam menentukan kebijakan pada periode selanjutnya.

c. Dasar.

- 1) Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Kemhan dan TNI.
- 2) Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 314).
- 3) Keputusan Menteri Pertahanan Nomor: KEP/1906/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program dan Anggaran UO Kemhan Tahun Anggaran 2020.
- 4) Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Nomor 9 Tahun 2016 tanggal 24 Oktober 2016 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bagi Satuan Kerja/Sub Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Pertahanan.
- 5) Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Nomor: KEP/2011/XII/2019 tentang Rancangan Rencana Strategis UO Kemhan Tahun 2020-2024.
- 6) Keputusan Sekretaris Jenderal Kemhan Nomor: KEP/879/VI/2019 tanggal 28 Juni 2019 tentang Kebijakan Perencanaan UO Kemhan TA. 2020.
- 7) Perjanjian Kinerja UO Kemhan Tahun 2020.

2. Kedudukan, Tugas dan Fungsi.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertahanan tugas dan fungsi Kementerian Pertahanan sebagai berikut:

- a. Kedudukan. Kemhan adalah unsur pelaksana pemerintah dipimpin oleh Menteri Pertahanan yang berkedudukan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden. Kementerian Pertahanan terdiri dari Satuan Kerja/Subsatuan Kerja sesuai dengan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemhan Tahun 2019 sebagai berikut:
 - 1) Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan selanjutnya disebut Setjen Kemhan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Setjen mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh UO Kemhan.
 - 2) Inspektorat Jenderal Kementerian Pertahanan selanjutnya disebut Itjen Kemhan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Itjen

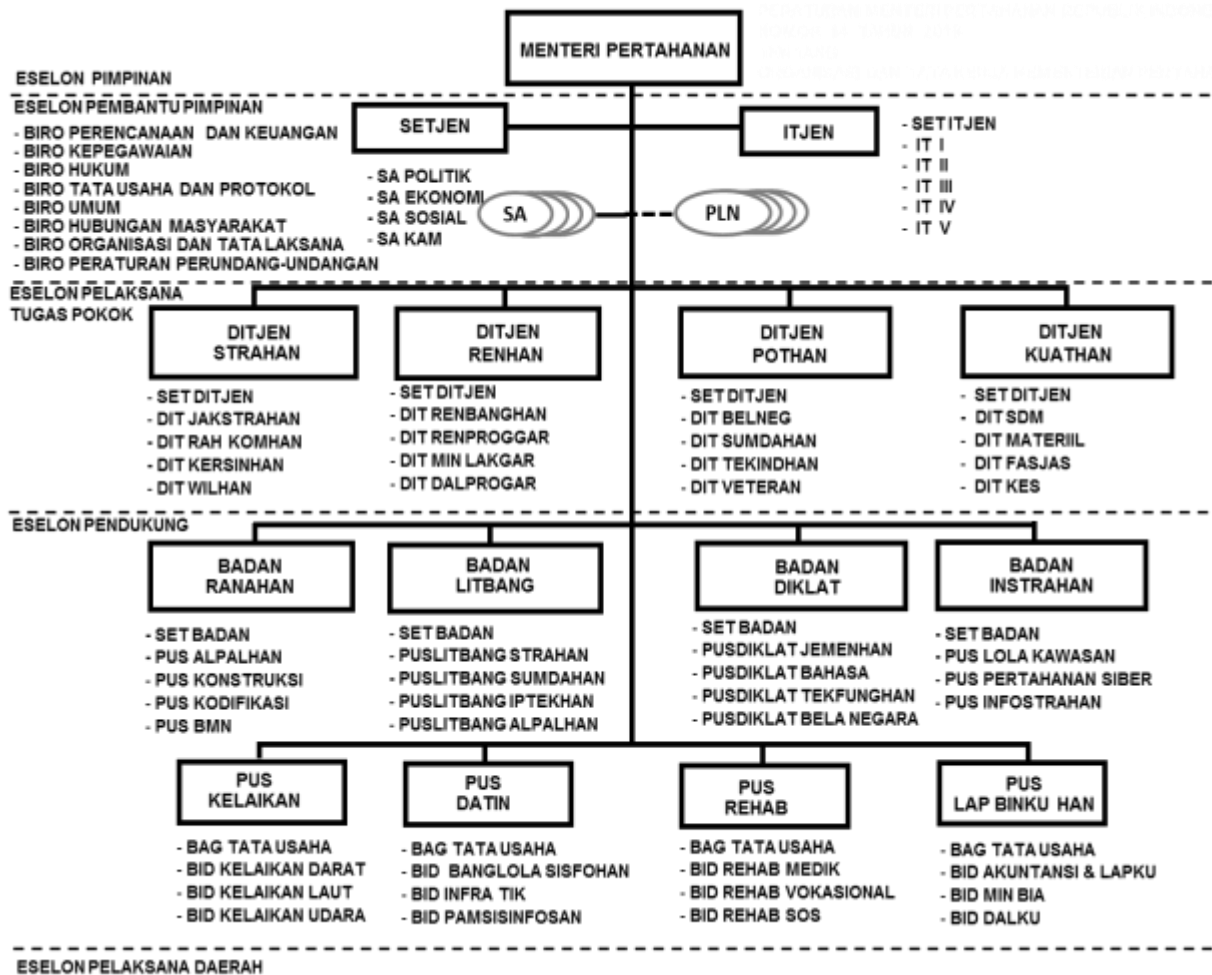
Kemhan mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kemhan.

- 3) Direktorat Strategi Pertahanan selanjutnya disebut Ditjen Strahan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Ditjen Strahan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang strategi pertahanan.
- 4) Direktorat Perencanaan Pertahanan selanjutnya disebut Ditjen Renhan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Ditjen Renhan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan dan pengelolaan anggaran pertahanan negara.
- 5) Direktorat Potensi Pertahanan selanjutnya disebut Ditjen Pothan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Ditjen Pothan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Potensi Pertahanan.
- 6) Direktorat Kekuatan Pertahanan selanjutnya disebut Ditjen Kuathan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Ditjen Kuathan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kekuatan pertahanan.
- 7) Badan Sarana Pertahanan selanjutnya disebut Baranahan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Baranahan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sarana pertahanan.
- 8) Badan Penelitian dan Pengembangan selanjutnya disebut Balitbang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Balitbang mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang pertahanan.
- 9) Badan Pendidikan dan Pelatihan selanjutnya disebut Badiklat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Badiklat mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang pertahanan.
- 10) Badan Instalasi Strategis Pertahanan selanjutnya disebut Bainstrahan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Bainstrahan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan instalasi strategis, Pertahanan Siber dan Informasi pertahanan.
- 11) Pusat Kelaikan selanjutnya disebut Puslaik berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekjen. Puslaik mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh UO Kemhan di bidang sertifikasi rancang bangun, kelaikan produk, sistem jaminan/manajemen mutu fasilitas produksi dan kontruksi serta fasilitas pemeliharaan/perbaikan sarana pertahanan matra darat, matra laut dan matra udara serta sertifikasi kualifikasi personel untuk penyelenggara kelaikan militer.
- 12) Pusat Data dan Informasi selanjutnya disebut Pusdatin berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekjen. Pusdatin mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh UO Kemhan di bidang pengembangan dan pengelolaan sistem informasi

pertahanan, infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, pengamanan sistem informasi dan persandian, dan pembinaan jabatan fungsional pranata komputer dan fungsional persandian di lingkungan Kemhan.

- 13) Pusat Rehabilitasi selanjutnya disebut Pusrehab berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekjen. Pusrehab mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh UO Kemhan di bidang rehabilitasi medik, rehabilitasi vokasional, rehabilitasi sosial dan perumahnyasakit.
 - 14) Pusat Pelaporan dan Pembinaan Keuangan Pertahanan selanjutnya disebut Puslapbinkuhan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekjen. Puslapbinkuhan mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh UO Kemhan di bidang pembinaan dan administrasi keuangan serta pendayagunaan sumber dana pertahanan.
 - 15) Universitas Pertahanan selanjutnya disebut Unhan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Unhan mempunyai tugas melaksanakan pendidikan tinggi di bidang pertahanan. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Nomor 73 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pertahanan.
- b. Tugas. Kementerian Pertahanan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pertahanan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
- c. Fungsi. Kementerian Pertahanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, menyelenggarakan 10 (sepuluh) fungsi sebagai berikut:
- 1) Perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang strategi pertahanan, perencanaan pertahanan, potensi pertahanan dan kekuatan pertahanan.
 - 2) Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kemhan.
 - 3) Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kemhan.
 - 4) Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kemhan.
 - 5) Pelaksanaan pengelolaan sarana pertahanan.
 - 6) Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pertahanan.
 - 7) Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang pertahanan.
 - 8) Pelaksanaan pengelolaan instalasi strategis pertahanan.
 - 9) Pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah.
 - 10) Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kemhan.

- d. Struktur Organisasi Kemhan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemhan Nomor 14 Tahun 2019 sebagai berikut:



- e. Komposisi dan jumlah pegawai Kemhan berdasarkan golongan dan gender:

1) ASN.

a) Tabel rincian per golongan

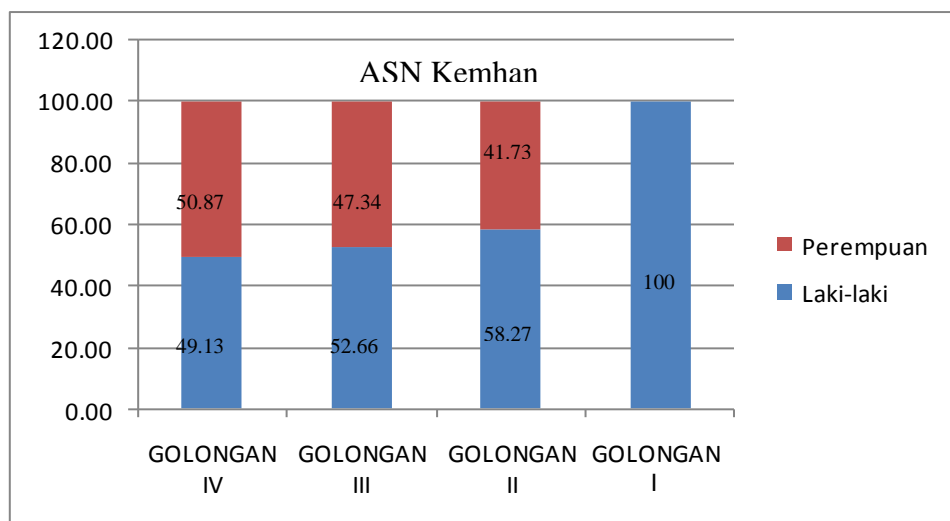
PRIA					WANITA					JUMLAH	
PANGKAT/GOLONGAN		PNS	CAPEG	JML	PANGKAT/GOLONGAN		PNS	CAPEG	JML	P+W	
PEMBINA UTAMA	IV/E	0	0	0	PEMBINA UTAMA	IV/E	2	0	2	2	
PEMBINA UTAMA MDY	IV/D	6	0	6	PEMBINA UTAMA MDY	IV/D	3	0	3	9	
PEMBINA UTAMA MUDA	IV/C	4	0	4	PEMBINA UTAMA MUDA	IV/C	14	0	4	18	
PEMBINA TINGKAT I	IV/B	35	0	5	PEMBINA TINGKAT I	IV/B	40	0	40	75	
PEMBINA	IV/A	68	0	68	PEMBINA	IV/A	58	0	58	126	
JUMLAH GOLONGAN IV		113	0	113	JUMLAH GOLONGAN IV		117	0	117	230	
PENATA TINGKAT I	III/D	188	0	188	PENATA TINGKAT I	III/D	182	0	182	370	
PENATA	III/C	189	0	189	PENATA	III/C	187	0	187	376	
PENATA MUDA TK. I	III/B	449	2	451	PENATA MUDA TK. I	III/B	364	7	371	822	
PENATA MUDA	III/A	270	2	272	PENATA MUDA	III/A	245	4	249	504	
JUMLAH GOLONGAN III		1096	4	1100	JUMLAH GOLONGAN III		978	11	989	2089	
PENGATUR TINGKAT I	II/D	111	0	111	PENGATUR TINGKAT I	II/D	37	0	37	148	
PENGATUR	II/C	90	57	147	PENGATUR	II/C	33	128	161	308	
JURU TINGKAT I	I/D	6	0	6	PENGATUR MUDA TK. I	II/B	6	0	6	12	
PENGATUR MUDA	II/A	25	0	25	PENGATUR MUDA	II/A	3	0	3	28	

JUMLAH GOLONGAN II		232	57	289	JUMLAH GOLONGAN II		79	128	207	496
JURU TINGKAT I	I/D	6	0	6	JURU TINGKAT I	I/D	0	0	0	6
JURU	I/C	1	0	1	JURU	I/C	0	0	0	1
JURU MUDA TINGKAT I	I/B	1	3	4	JURU MUDA TINGKAT I	I/B	0	0	0	4
JURU MUDA	I/A	0	0	0	JURU MUDA	I/A	0	0	0	0
JUMLAH GOLONGAN I		8	3	11	JUMLAH GOLONGAN I		0	6	6	11
JUMLAH BESAR		1502	64	1566	JUMLAH BESAR		1174	139	1313	2826

b) Rekapitulasi:

- (1) Golongan IV : 230 orang
 - (2) Golongan III : 2.089 orang
 - (3) Golongan II : 496 orang
 - (4) Golongan I : 11 orang
- Jumlah : 2.826 orang

c) Grafik Jumlah dan Presentase ASN berdasarkan gender sesuai Pangkat/Golongan UO Kementerian Pertahanan Tahun 2020.



2) TNI.

a) Tabel rincian per pangkat.

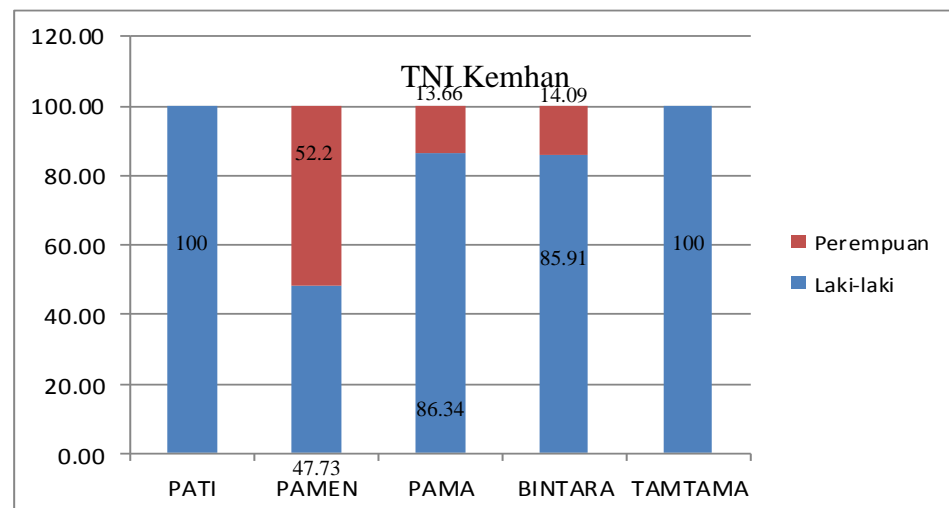
PANGKAT/GOLONGAN	PRIA				WANITA				JUMLAH P+W	
	AD	AL	AU	JML	PANGKAT/GOLONGAN	AD	AL	AU		JML
BINTANG EMPAT	0	0	0	0	BINTANG EMPAT	0	0	0	0	0
BINTANG TIGA	2	1	1	4	BINTANG TIGA	0	0	0	0	4
BINTANG DUA	17	4	3	24	BINTANG DUA	0	0	0	0	24
BINTANG SATU	48	18	12	78	BINTANG SATU	0	0	0	0	78
JUMLAH PATI	67	23	16	106	JUMLAH PATI	0	0	0	0	106
KOLONEL	353	106	110	569	KOLONEL	16	4	2	22	591
LETKOL	210	41	45	296	LETKOL	32	5	8	45	341
MAYOR	162	25	21	208	MAYOR	28	7	0	35	243
JUMLAH PAMEN	725	172	176	1073	JUMLAH PAMEN	76	16	10	102	1175
KAPTEN	112	2	12	126	KAPTEN	15	1	2	18	144
LETTU	24	5	17	46	LETTU	6	4	0	10	56
LETDA	17	1	6	24	LETDA	2	1	0	3	27
JUMLAH PAMA	153	8	35	196	JUMLAH PAMA	23	6	2	31	227
PELTU	33	4	1	38	PELTU	6	0	5	11	49
PELDA	47	9	2	58	PELDA	5	3	0	8	66
SERMA	50	6	1	57	SERMA	5	4	1	10	67
SERKA	75	5	14	94	SERKA	12	6	2	20	114
SERTU	55	5	6	66	SERTU	6	2	2	10	76
SERDA	58	5	2	65	SERDA	2	1	0	3	68
JUMLAH BINTARA	318	34	26	378	JUMLAH BINTARA	36	16	10	62	440

KOPKA	28	8	2	38	KOPKA	0	0	0	0	38
KOPTU	15	15	0	30	KOPTU	0	0	0	0	30
KOPDA	23	8	6	37	KOPDA	0	0	0	0	37
PRAKA	26	0	2	28	PRAKA	0	0	0	0	28
PRATU	3	0	2	5	PRATU	0	0	0	0	5
PRADA	1	0	0	1	PRADA	0	0	0	0	1
JUMLAH TAMTAMA	96	31	12	139	JUMLAH TAMTAMA	0	0	0	0	139
JUMLAH BESAR	1359	268	265	1892	JUMLAH BESAR	135	38	22	195	2087

b) Rekapitulasi:

- (1) Pati : 106 orang
(2) Pamen : 1.175 orang
(3) Pama : 227 orang
(4) Bintara : 440 orang
(5) Tamtama : 139 orang
Jumlah : 2.087 orang

c) Grafik Jumlah dan Presentase TNI berdasarkan gender sesuai Pangkat Kementerian Pertahanan Tahun 2020.



b. Kekuatan personel UO Kemhan adalah 4.913 orang (per 31 Desember 2020).

3. Permasalahan utama UO Kemhan bersifat strategis. Dalam program dan kegiatan UO Kemhan tahun 2020 sebagaimana ditetapkan dalam Rancangan Renstra UO Kemhan tahun 2020-2024 dengan permasalahan utama yang bersifat strategis di lingkungan UO Kemhan ada 3 (tiga) sebagai berikut:

- Komitmen pemerintah sebagai penentu kebijakan anggaran terhadap pembangun pertahanan negara masih terkendala dengan adanya beberapa kebijakan politik anggaran.
- Penyelenggaraan pembangunan MEF khususnya terkait dengan pemenuhan Alutsista masih belum optimal. Hal ini dikarenakan adanya ketergantungan dengan industri pertahanan luar negeri, disisi lain industri pertahanan dalam negeri belum mampu mendukung pemenuhan Alutsista sesuai kebutuhan.
- Belum optimalnya peningkatan kapabilitas teknologi siber yang mampu melakukan perang siber melalui siber ofensif dan defensif, pemantauan, jaminan keamanan penangkalan dan pembalasan penyusupan senjata maupun intelijen siber antara

lain disebabkan kurangnya pengembangan organisasi/ kelembagaan, SDM dan pembangunan infrastruktur dalam penguasaan teknologi informasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

4. Umum.

Dalam rangka menindaklanjuti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 yang merupakan tahapan ke empat dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025, Unit Organisasi Kementerian Pertahanan (UO Kemhan) telah menetapkan Rancangan Renstra UO Kemhan tahun 2020-2024 melalui Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Nomor : KEP/2011/XII/2019 tentang Rancangan Rencana Strategis UO Kemhan Tahun 2020-2024. Perumusan target kinerja merupakan langkah awal dalam tahapan perencanaan kinerja di lingkungan UO Kemhan, target kinerja tersebut selaras dengan arah dan tujuan UO Kemhan yang telah ditetapkan. Target kinerja UO Kemhan tahun 2020 mengacu kepada target yang ditetapkan dalam Rancangan Renstra UO Kemhan tahun 2020-2024 dan memperhatikan masukan/usulan target dari Satker/ Subsatker yang bertanggung jawab sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Adapun informasi kinerja UO Kemhan tahun 2020 dapat dijelaskan dalam beberapa ikhtisar dibawah ini:

- a. Ikhtisar Renstra.
- b. Ikhtisar Rencana Kinerja Tahunan.
- c. Ikhtisar Perjanjian Kinerja.

5. Ikhtisar Renstra.

Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan pembangunan pertahanan negara untuk periode 5 (lima) tahun, berisi tentang proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam periode 5 (lima) tahun dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Perencanaan Kinerja UO Kemhan tahun 2020 berpedoman pada sasaran dan kegiatan prioritas nasional yang hendak dicapai dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020 - 2024 serta dengan memper-timbangkan lingkungan strategis dan tantangan yang akan dihadapi maka pembangunan pertahanan negara diselenggarakan dengan tetap mengacu pada kebijakan penyelenggaraan pertahanan negara tahun 2020 - 2024. Dalam rangka menindaklanjuti RPJMN tahun 2020-2024, Pada tahun 2019 Sekjen Kemhan telah menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Nomor: KEP/2011/XII/2019 tentang Rancangan Rencana Strategis UO Kemhan Tahun 2020-2024. Rancangan Rencana Strategis UO Kemhan tahun 2020 - 2024 tersebut digunakan sebagai dokumen strategis tahun pertama dalam pelaksanaan program dan kegiatan UO Kemhan tahun 2020.

Rumusan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis UO Kemhan pada tahun 2020 selaras dengan Visi dan Misi Presiden Joko Widodo dan telah ditetapkan ke dalam Keputusan Menteri Pertahanan Nomor: KEP/104/M/I/2020 tanggal 20 Januari 2020. Adapun dokumen Renstra UO Kemhan Tahun 2020 - 2024 selaras dengan visi, misi dan tujuan serta arah kebijakan dan strategi Kementerian Pertahanan sebagai berikut:

a. Visi.

- 1) Visi Presiden yaitu “Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”.
- 2) Visi Pertahanan yaitu “Terwujudnya Pertahanan Negara yang Tangguh”.

b. Misi.

Dalam upaya mewujudkan visi, Kementerian Pertahanan telah menetapkan misinya sebagai berikut : (Rancangan Renstra Kemhan tahun 2020-2024)

- 1) Mewujudkan kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI serta melindungi keselamatan segenap bangsa.
- 2) Membangun sistem pertahanan negara yang terintegrasi dan modern.
- 3) Memberdayakan sumber daya nasional dan pemberdayaan wilayah pertahanan untuk pertahanan negara.

c. Tujuan.

Tujuan Strategis Pertahanan Negara. Dalam rangka menjamin terwujudnya Visi dan Misi Pemerintah di bidang pertahanan, dirumuskan 4 (empat) tujuan strategis pertahanan negara sebagai berikut:

- 1) Terjaganya kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI serta terlindunginya keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman.
- 2) Terbangunnya Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) yang terintegrasi dan modern.
- 3) Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN), untuk Pertahanan Negara.
- 4) Terselenggaranya pengelolaan wilayah pertahanan.

d. Sasaran Strategis Pertahanan Negara. Pemenuhan tujuan strategis pertahanan negara, dilaksanakan dengan menetapkan 16 (enam belas) sasaran strategis yang harus dicapai sebagai berikut:

- 1) Tujuan nomor 1: Terjaganya kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI serta terlindunginya keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman terdiri dari 4 (empat) sasaran strategis yaitu:
 - a) Terjaganya kedaulatan negara di wilayah darat, laut dan udara, termasuk di daerah perbatasan.
 - b) Terlindunginya keutuhan wilayah dari segala bentuk ancaman baik dari dalam maupun luar negeri.
 - c) Terlindunginya keselamatan segenap bangsa di seluruh wilayah NKRI dari segala bentuk ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri.

- d) Meningkatnya hubungan diplomasi pertahanan melalui kerja sama bilateral dan multilateral di bidang pertahanan.
- 2) Tujuan nomor 2: Terbangunnya sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta yang terintegrasi dan modern, terdiri dari 3 (tiga) sasaran strategis yaitu:
- a) Terintegrasinya pertahanan militer dan nirmiliter dalam sistem pertahanan negara yang bersifat Semesta.
 - b) Terwujudnya postur TNI yang tangguh dalam mengatasi ancaman.
 - c) Terwujudnya tata kelola sistem pertahanan negara yang baik.
- 3) Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN) untuk Pertahanan Negara, terdiri dari 4 (empat) sasaran strategis yaitu:
- a) Terwujudnya kesadaran bela negara bagi seluruh warga negara.
 - b) Terwujudnya komponen cadangan yang siap dimobilisasi dan didemobilisasi serta komponen pendukung yang ditetapkan di seluruh wilayah Indonesia.
 - c) Terwujudnya sumber daya nasional yang dapat diberdayakan untuk mendukung pertahanan negara.
 - d) Terwujudnya industri pertahanan nasional yang kuat, mandiri dan berdaya saing guna mendukung kebutuhan pertahanan negara.
- 4) Terselenggaranya pengelolaan wilayah pertahanan, terdiri dari 4 (empat) sasaran strategis yaitu:
- a) Terwujudnya Ruang, Alat dan Kondisi juang (RAK Juang) yang tangguh untuk mendukung pertahanan negara.
 - b) Terwujudnya wilayah pertahanan yang bertumpu pada pulau-pulau besar secara mandiri dan mampu melaksanakan perang berlarut.
 - c) Terwujudnya depo-depo logistik pertahanan yang terdesentralisasi.
 - d) Terwujudnya penguatan pertahanan di wilayah-wilayah *checkpoints* atau selat-selat strategis.
 - e) Terwujudnya sinergitas penataan wilayah pertahanan negara.
- e. Arah kebijakan dan strategis Kemhan dan TNI adalah:
- 1) Kegiatan prioritas wawasan kebangsaan dan bela negara diupayakan dengan kebijakan pembangunan karakter bangsa dan pembangunan kelembagaan.
 - 2) Penguatan keamanan dalam negeri, penguatan kemampuan pertahanan dan keamanan laut diupayakan dicapai dengan:

- a) Pembangunan postur TNI.
 - b) Pembangunan pertahanan negara yang terintegrasi dan sinergis.
 - c) Pembangunan Wilayah Perbatasan dan Pulau-Pulau Kecil Terluar/ Terdepan (PPKT).
 - d) Peningkatan kerja sama internasional.
 - e) Pemberdayaan kemampuan litbang Kemhan dan TNI.
- 3) Penguatan keamanan siber dilaksanakan dengan pembangunan pertahanan dan intelijen siber.

6. Ikhtisar Rencana Kinerja Tahunan.

Dalam penetapan target kinerja UO Kemhan selalu memperhatikan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang merupakan penjabaran atas Renstra. RKT bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh pelaksanaan program dan kegiatan UO Kemhan terarah dan fokus terhadap pencapaian Renstra. Dalam RKT mengatur mengenai kebijakan umum dan kebijakan operasional untuk setiap program penganggaran yang ada di lingkungan UO Kemhan. Rencana Kinerja Tahunan sangat diperlukan karena akan menghasilkan target atau tujuan kinerja yang berupa sasaran kuantitatif berdasarkan ukuran kinerja atau indikator kinerja utama yang digunakan, sehingga pelaksanaannya akan memudahkan untuk proses pengukuran program atau kegiatan maupun kinerja instansi secara keseluruhan.

- a. Program Utama. Program utama UO Kemhan dalam penyelenggaraan seluruh kegiatan didukung oleh 11 (sebelas) program sebagai berikut:
 - 1) Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kemhan.
 - 2) Program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Kemhan.
 - 3) Program strategi pertahanan.
 - 4) Program perencanaan umum dan penganggaran.
 - 5) Program potensi pertahanan.
 - 6) Program kekuatan pertahanan.
 - 7) Program penelitian dan pengembangan Kemhan.
 - 8) Program pendidikan dan pelatihan Kemhan dan TNI.
 - 9) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Kemhan.
 - 10) Program pengembangan teknologi dan industri pertahanan.
 - 11) Program pembinaan instalasi strategi nasional.

- b. Sasaran Program. Dalam Rencana Kinerja Tahunan UO Kemhan Tahun 2020, dari 11 (sebelas) program dijabarkan menjadi 11 (sebelas) sasaran program yang ingin dicapai sebagai berikut:
- 1) Sasaran program nomor 1 yaitu: Terwujudnya manajemen yang terintegrasi dan akuntabel berdasarkan data yang terkini dan akurat UO Kemhan.
 - 2) Sasaran program nomor 2 yaitu: Meningkatnya pengelolaan keuangan dan kinerja aparatur Kemhan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
 - 3) Sasaran program nomor 3 yaitu: Terwujudnya kebijakan strategis pertahanan negara yang terintegrasi dalam menghadapi ancaman, gangguan, hambatan, tantangan dan peluang baik nasional, regional dan global.
 - 4) Sasaran program nomor 4 yaitu: Terwujudnya tata kelola program dan anggaran pertahanan negara yang terintegrasi, efisien, efektif, akuntabel, dan tepat waktu.
 - 5) Sasaran program nomor 5 yaitu: Terwujudnya potensi pertahanan dalam rangka mewujudkan sistem pertahanan negara yang terintegrasi.
 - 6) Sasaran program nomor 6 yaitu: Terwujudnya penyelenggaraan kekuatan komponen utama pertahanan negara yang terintegrasi.
 - 7) Sasaran program nomor 7 yaitu: Terwujudnya teknologi dan sumber daya pertahanan sesuai kemajuan iptek dan mampu dikembangkan secara mandiri dan meningkatnya pemanfaatan teknologi hasil litbang Kemhan.
 - 8) Sasaran program nomor 8 yaitu: Terwujudnya SDM bidang pertahanan yang memiliki kompetensi dan integritas yang unggul.
 - 9) Sasaran program nomor 9 yaitu: Terwujudnya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pertahanan.
 - 10) Sasaran program nomor 10 yaitu: Terwujudnya pengadaan hasil pengembangan teknologi dan industri pertahanan dalam rangka produksi alutsista industri dalam negeri.
 - 11) Sasaran program nomor 11 yaitu: Terwujudnya keamanan dan ketertiban dalam rangka penyelenggaraan seluruh kegiatan di kawasan instalasi strategis pertahanan.
- c. Kegiatan Utama. Dalam rangka mewujudkan sasaran program yang telah direncanakan maka disusunlah 62 (enam puluh dua) kegiatan UO Kemhan Tahun 2020 berdasarkan program meliputi:
- 1) Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kemhan dengan 13 (tiga belas) kegiatan:
 - a) Pengelolaan sistem informasi pertahanan negara.

- b) Pelaksanaan administrasi pembiayaan, pembinaan, pengendalian dan pelaporan keuangan pertahanan.
 - c) Pelayanan bantuan hukum.
 - d) Pelayanan rehabilitasi dan perumahsakitkan.
 - e) Dukungan pelayanan umum UO Kemhan.
 - f) Dukungan peningkatan sarana dan prasarana aparatur UO Kemhan.
 - g) Dukungan pembinaan dan pengelolaan pegawai UO Kemhan.
 - h) Dukungan perencanaan anggaran dan keuangan UO Kemhan.
 - i) Dukungan administrasi pelayanan pimpinan dan keprotokolan UO Kemhan.
 - j) Pelayanan hubungan masyarakat.
 - k) Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan, Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja UO Kemhan.
 - l) Pelaksanaan Kelaikan Sarana Pertahanan.
 - m) Penyusunan perancangan peraturan perundang-undangan bidang pertahanan.
- 2) Program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Kemhan dengan 6 (enam) kegiatan:
- a) Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Itjen Kemhan.
 - b) Pengawasan terhadap Ditjen Renhan, Ditjen Kuathan, Baranahan, Badiklat, Bainstrahan, Puslaik, Pusrehab dan Kantor Wilhan Wil Barat.
 - c) Pengawasan terhadap Setjen, Ditjen Strahan, Pothan, Balitbang, Unhan, Pusdatin, Puslapbinkuhan dan Kantor Wilhan Wil Timur.
 - d) Pengawasan terhadap pengamanan aset UO Mabes TNI, UO TNI AU dan pengelolaan dan PNB UO TNI AU.
 - e) Pengawasan terhadap pengamanan aset UO TNI AD dan pengelolaan dan PNB UO TNI AD.
 - f) Pengawasan terhadap YKPP, PT. ASABRI, pengamanan aset UO TNI AL dan pengelolaan PNB UO TNI AL.
- 3) Program strategi pertahanan dengan 5 (lima) kegiatan:
- a) Pengelolaan kebijakan strategis pertahanan.

- b) Pengelolaan diplomasi pertahanan.
 - c) Pengelolaan kebijakan pengerahan komponen pertahanan negara dan analisa strategis pertahanan.
 - d) Pengelolaan kebijakan di bidang wilayah pertahanan.
 - e) Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen Strahan Kemhan.
- 4) Program perencanaan umum dan penganggaran dengan 5 (lima) kegiatan:
- a) Administrasi pelaksanaan anggaran.
 - b) Pengendalian program dan anggaran.
 - c) Perencanaan pembangunan pertahanan.
 - d) Perencanaan program dan anggaran.
 - e) Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen Renhan Kemhan.
- 5) Program potensi pertahanan dengan 6 (enam) kegiatan:
- a) Pembinaan keveteteranan.
 - b) Pembinaan kesadaran bela negara.
 - c) Pembinaan potensi teknologi dan industri pertahanan.
 - d) Penyiapan sumber daya pertahanan.
 - e) Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen Pothan Kemhan.
 - f) Pengembangan teknologi dan industri pertahanan dalam rangka *First Article*.
- 6) Program kekuatan pertahanan dengan 5 (lima) kegiatan:
- a) Pembinaan fasilitas dan jasa pertahanan.
 - b) Pembinaan kesehatan pertahanan.
 - c) Pembinaan materiil pertahanan.
 - d) Pembinaan sumber daya manusia pertahanan.
 - e) Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen Kuathan Kemhan.

- 7) Program penelitian dan pengembangan Kemhan dengan 5 (lima) kegiatan:
 - a) Penelitian dan pengembangan strategis pertahanan.
 - b) Penelitian dan pengembangan alat peralatan pertahanan.
 - c) Penelitian dan pengembangan iptek pertahanan.
 - d) Penelitian dan pengembangan sumber daya pertahanan.
 - e) Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Balitbang Kemhan.

- 8) Program pendidikan dan pelatihan Kemhan dan TNI dengan 6 (enam) kegiatan:
 - a) Pendidikan dan pelatihan bahasa.
 - b) Pendidikan dan pelatihan manajemen pertahanan.
 - c) Pendidikan dan pelatihan teknis fungsional pertahanan.
 - d) Pusat pendidikan dan pelatihan bela negara.
 - e) Penyelenggaraan pendidikan tinggi pertahanan (Unhan).
 - f) Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Badiklat Kemhan.

- 9) Program peningkatan sarana prasarana aparatur Kemhan dengan 6 (enam) kegiatan:
 - a) Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN).
 - b) Kodifikasi materiil pertahanan.
 - c) Pengadaan jasa konstruksi pertahanan.
 - d) Pembangunan sarana dan prasarana pertahanan di wilayah perbatasan.
 - e) Pengadaan barang dan jasa alpalhan.
 - f) Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Baranahan Kemhan.

- 10) Program pengembangan teknologi dan industri pertahanan dengan 1 (satu) kegiatan:
 - Produksi alutsista industri dalam negeri dan pengembangan peranti lunak industri pertahanan.

- 11) Program pembinaan instalasi strategis nasional dengan 4 (empat) kegiatan:

- a) Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Bainstrahan.
 - b) Pengelolaan informasi strategis pertahanan.
 - c) Pengelolaan kawasan instalasi strategis pertahanan.
 - d) Pengelolaan Sistem Pertahanan Siber yang handal, terintegrasi dan *up-to-date*.
- d. Rencana tingkat capaian (target) UO Kemhan Tahun 2020 dengan 103 (seratus tiga) sasaran kegiatan sebagai berikut:
- 1) Pusdatin Kemhan.
 - Terwujudnya pengelolaan Sisinfohaneg dan infrastrukturnya yang aman, handal dan terintegrasi, target capaian sasaran 100%.
 - 2) Puslapbinkuhan Kemhan.
 - Terwujudnya pengelolaan keuangan yang memadai dan berkelanjutan dalam rangka mendukung pertahanan negara, target capaian sasaran 100%.
 - 3) Biro Hukum Setjen Kemhan.
 - Terwujudnya bantuan hukum yang akuntabel dan tepat waktu, target capaian sasaran 100%.
 - 4) Pusrehab Kemhan.
 - a) Meningkatnya penyandang disabilitas personel TNI dan PNS Kemhan yang memperoleh pelayanan rehabilitasi terpadu hingga menjadi SDM profesional, mandiri dan *entrepreneurship*, target capaian sasaran 100%.
 - b) Meningkatnya pelayanan perumahsakitannya sesuai standar, target capaian sasaran 100%.
 - 5) Biro Umum Setjen Kemhan.
 - a) Terwujudnya pelayanan umum terhadap Satker/ Subsatker di lingkungan Kemhan, target capaian sasaran 100%.
 - b) Meningkatnya pengelolaan Sarpras UO Kemhan, target capaian sasaran 100%.
 - 6) Biro Kepegawaian Setjen Kemhan.
 - a) Terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) pegawai Kemhan yang profesional, target capaian sasaran 71% dan 77%.
 - b) Terwujudnya pegawai Kemhan yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi berdasarkan *Merit System*, target capaian sasaran 0.63%.

- 7) Biro Perencanaan dan Keuangan Setjen Kemhan.
 - Terwujudnya perencanaan, pelaksanaan, pengendalian anggaran dan pelaporan keuangan di UO Kemhan yang akuntabel dan tepat waktu, target capaian sasaran 100%.
- 8) Biro TU dan Protokol Setjen Kemhan.
 - a) Terselenggaranya pelayanan administrasi umum, kearsipan dan ketatausahaan yang akuntabel dan tepat waktu, target capaian sasaran 100%.
 - b) Terselenggaranya keprotokolan pimpinan UO Kemhan yang berjalan dengan lancar, aman dan tertib, target capaian sasaran 90%.
- 9) Biro Humas Setjen Kemhan.
 - Meningkatnya citra positif Kemhan/TNI di masyarakat, dan forum Internasional, target capaian sasaran 100%.
- 10) Biro Ortala Setjen Kemhan.
 - a) Terwujudnya penataan organisasi yang tepat ukuran, tepat fungsi dan tepat proses, target capaian sasaran 100%.
 - b) Terwujudnya ketatalaksanaan yang efektif, efisien dan akuntabel, target capaian sasaran 100%.
 - c) Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi dan berkelanjutan, target capaian sasaran 100%.
 - d) Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang akuntabel dan tepat waktu, target capaian sasaran 100%.
- 11) Biro Turdang Setjen Kemhan.
 - a) Tersusunnya regulasi di bidang pertahanan, target capaian sasaran 100%.
 - b) Terlaksananya asistensi hukum internasional bidang pertahanan, target capaian sasaran 100%.
- 12) Puslaik Kemhan.
 - Terselenggaranya sertifikasi kelaikan sarana dan prasarana pertahanan serta personel Inspektur Kelaikan Kemhan, target capaian sasaran 87,5%.
- 13) Itjen Kemhan

- a) Terwujudnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Itjen yang terkini, akurat, terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu, target capaian sasaran 100%.
- b) Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi dan berkelanjutan, target capaian sasaran 80%.
- c) Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas aparatur Kemhan di bidang Pengawasan Inspektorat I, target capaian sasaran 10%.
- d) Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas aparatur Kemhan di bidang Pengawasan Inspektorat II, target capaian sasaran 10%.
- e) Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas aparatur Kemhan di bidang Pengawasan Inspektorat III, target capaian sasaran 10%.
- f) Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas aparatur Kemhan di bidang Pengawasan Inspektorat IV, target capaian sasaran 10%.
- g) Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas aparatur Kemhan di bidang Pengawasan Inspektorat V, target capaian sasaran 10%.

14) Ditjen Strahan Kemhan.

- a) Terwujudnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen Strahan yang terkini, akurat, terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu, target capaian sasaran 100%.
- b) Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi dan berkelanjutan, target capaian sasaran 80%.
- c) Terwujudnya kebijakan strategis pertahanan negara yang dapat dipedomani dan diimplementasikan untuk kepentingan pertahanan negara, target capaian sasaran 80%.
- d) Terwujudnya peningkatan kualitas Diplomasi Pertahanan dalam rangka mencapai kepentingan nasional dalam pertahanan di forum internasional, target capaian sasaran 85%.
- e) Terwujudnya kebijakan pengerahan komponen pertahanan negara yang dapat dipedomani dan diimplementasikan untuk kepentingan pertahanan negara, target capaian sasaran 65%.
- f) Terwujudnya kebijakan wilayah pertahanan yang dapat dipedomani dan diimplementasikan untuk kepentingan pertahanan negara, target capaian sasaran 100%.
- g) Terwujudnya penataan wilayah pertahanan yang terintegrasi, target capaian sasaran 100%.
- h) Terwujudnya penetapan dan pengelolaan batas negara dan kawasan perbatasan, target capaian sasaran 100%.

15) Ditjen Renhan Kemhan.

- a) Terwujudnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen Renhan yang terkini, akurat, terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu, target capaian sasaran 100%.
- b) Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi dan berkelanjutan, target capaian sasaran 100%.
- c) Terwujudnya kebijakan di bidang administrasi pelaksanaan anggaran pertahanan UO Kemhan dan TNI yang terimplementasi, target capaian sasaran 100%.
- d) Terwujudnya peraturan di bidang Administrasi pelaksanaan anggaran pertahanan yang terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu target capaian sasaran 100%.
- e) Terwujudnya pelaksanaan dan fasilitasi kebijakan administrasi pelaksanaan anggaran yang terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu, target capaian sasaran 100%.
- f) Terwujudnya pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi pelaksanaan anggaran yang terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu target capaian sasaran 100%.
- g) Terwujudnya kebijakan di bidang pengendalian program dan anggaran pertahanan yang terimplementasikan, target capaian sasaran 100%.
- h) Terwujudnya pengendalian program dan anggaran tahunan UO Kemhan dan TNI yang terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu target capaian sasaran 100%.
- i) Terwujudnya pola pengelolaan keuangan PNBK UO Kemhan dan TNI, target capaian sasaran 100%.
- j) Terwujudnya akuntabilitas kinerja Kemhan dan TNI di bidang pelaksanaan anggaran yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, target capaian sasaran 100%.
- k) Terwujudnya kebijakan di bidang perencanaan pembangunan pertahanan yang implementatif, target capaian sasaran 100%.
- l) Terwujudnya perencanaan pembangunan pertahanan negara yang dapat diimplementasikan, target capaian sasaran 100%.
- m) Terwujudnya kebijakan di bidang perencanaan program dan anggaran pertahanan, target capaian sasaran 100%.
- n) Terwujudnya perencanaan program dan anggaran tahunan Kemhan, Mabes TNI, TNI AD, TNI AL, dan TNI AU yang terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu, target capaian sasaran 100%.

16) Ditjen Pothan Kemhan.

- a) Terwujudnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen Pothan yang terkini, akurat, terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu, target capaian sasaran 100%.
- b) Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi dan berkelanjutan, target capaian sasaran 100%.
- c) Terwujudnya kebijakan di bidang Keveteranan RI yang implementatif, target capaian sasaran 100%.
- d) Terwujudnya kesejahteraan Veteran RI, target capaian sasaran 100%.
- e) Terwujudnya kebijakan di bidang Bela Negara yang implementatif, target capaian sasaran 100%.
- f) Terwujudnya kesadaran dan pemahaman warga negara terhadap Bela Negara, target capaian sasaran 100%.
- g) Terwujudnya kesiapan kader bela negara, target capaian sasaran 100%.
- h) Terwujudnya sumber daya pertahanan yang siap digunakan untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama, target capaian sasaran 100%.
- i) Terwujudnya kebijakan di bidang tekndhan yang implementatif, target capaian sasaran 100%.
- j) Tersedianya industri pertahanan yang dapat dikembangkan secara mandiri, target capaian sasaran 100%.
- k) Terpenuhinya kebutuhan Alpalhankam produksi dalam negeri secara bertahap, target capaian sasaran 100%.
- l) Terwujudnya pengembangan teknologi dan industri pertahanan dalam rangka *First Article* (FA) , target capaian sasaran 100%.

17) Ditjen Kuathan Kemhan.

- a) Terwujudnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen Kuathan yang terkini, akurat, terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu, target capaian sasaran 100%.
- b) Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi dan berkelanjutan, target capaian sasaran 100%.
- c) Terwujudnya kebijakan di bidang fasilitas dan jasa yang implementatif, target capaian sasaran 100%.
- d) Terwujudnya kesiapan fasilitas dan jasa dalam rangka mendukung pertahanan negara, target capaian sasaran 100%.

- e) Terwujudnya kebijakan di bidang kesehatan komponen utama pertahanan negara yang implementatif, target capaian sasaran 100%.
- f) Terwujudnya kesiapan dukungan dan pelayanan kesehatan komponen utama pertahanan negara, target capaian sasaran 100%.
- g) Terwujudnya kebijakan di bidang pembinaan materiil komponen utama pertahanan yang implementatif, target capaian sasaran 100%.
- h) Terwujudnya pengelolaan Alpalhankam (BMN selain tanah, bangunan dan BMP) , target capaian sasaran 100%.
- i) Terwujudnya kebijakan di bidang Sumber Daya Manusia (SDM) komponen utama pertahanan negara, target capaian sasaran 100%.
- j) Terwujudnya sumber daya manusia komponen utama pertahanan negara yang professional, target capaian sasaran 100%.

18) Balitbang Kemhan.

- a) Terwujudnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Balitbang yang terkini, akurat, terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu, target capaian sasaran 100%.
- b) Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi dan berkelanjutan, target capaian sasaran 100%.
- c) Terwujudnya hasil Litbang Puslitbang Strahan yang dapat digunakan dalam rangka kepentingan pertahanan negara, target capaian sasaran 100%.
- d) Terwujudnya hasil Litbang Puslitbang Alpalhan yang dapat digunakan dalam rangka kepentingan pertahanan negara, target capaian sasaran 100%.
- e) Terwujudnya hasil Litbang Puslitbang Iptekhan yang dapat digunakan dalam rangka kepentingan pertahanan negara, target capaian sasaran 100%.
- f) Terwujudnya hasil Litbang Puslitbang Sumdahan yang dapat digunakan dalam rangka kepentingan pertahanan negara, target capaian sasaran 100%.

19) Badiklat Kemhan.

- a) Terwujudnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Badiklat yang terkini, akurat, terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu, target capaian sasaran 100%.
- b) Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi dan berkelanjutan, target capaian sasaran 100%.

- c) Terwujudnya SDM pertahanan yang memiliki kemampuan bahasa yang baik, target capaian sasaran 90%.
- d) Terwujudnya Serdiklat Pusdiklat Jemenhan Kemhan/TNI dan K/L lain yang memiliki kemampuan kepemimpinan dan manajerial bidang pertahanan, target capaian sasaran 90%.
- e) Terwujudnya Serdiklat Pusdiklat Tekfunghan Kemhan/TNI dan K/L lain yang memiliki kemampuan teknis dan fungsional pertahanan, target capaian sasaran 90%.
- f) Terwujudnya Serdiklat Belneg Kemhan/TNI, K/L dan organisasi lain yang memiliki pengetahuan dan sikap perilaku bela negara, target capaian sasaran 90%.
- g) Tersedianya lulusan Strata 2 bidang pertahanan yang sesuai standar nasional dan internasional, target capaian sasaran 80%.
- h) Tersedianya lulusan Strata 3 bidang pertahanan yang sesuai standar nasional dan internasional, target capaian sasaran 80%.
- i) Terwujudnya publikasi penelitian bidang pertahanan negara dan Belneg yang sesuai standar mutu, target capaian sasaran 100%.
- j) Terwujudnya pengabdian kepada masyarakat di bidang pertahanan negara dan bela negara sesuai standar nasional, target capaian sasaran 100%.

20) Baranahan Kemhan.

- a) Terwujudnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Baranahan yang terkini, akurat, terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu, target capaian sasaran 100%.
- b) Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi dan berkelanjutan, target capaian sasaran 100%.
- c) Terwujudnya pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Kemhan dan TNI yang akuntabel dan *up-to-date*, target capaian sasaran 22 laporan (100%).
- d) Terlaksananya pelaporan BMN untuk mendukung Laporan Keuangan (LK) Kemhan dan TNI, target capaian sasaran 4 dokumen (80%).
- e) Terwujudnya kodifikasi materiil pertahanan yang terintegrasi, target capaian sasaran 61 laporan (100%).
- f) Terwujudnya pengadaan jasa konstruksi pertahanan yang terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu, target capaian sasaran 16 paket (70%).
- g) Terwujudnya pembangunan sarana dan prasarana pertahanan di Wilayah Perbatasan, target capaian sasaran 1 paket (100%).

- h) Terwujudnya pengadaan barang dan jasa Alpalhan yang efektif, efisien, transparan, menjamin kerahasiaan, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel, target capaian sasaran 2 paket PDN (75%).
- i) Tersedianya Alutsista industri dalam negeri dalam rangka pertahanan negara, target capaian sasaran 100%.

21) Bainstrahan Kemhan.

- a) Terwujudnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Badan Instalasi Strategis Pertahanan yang terkini, akurat, terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu, target capaian sasaran 100%.
 - b) Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi dan berkelanjutan, target capaian sasaran 100%.
 - c) Terwujudnya pengelolaan informasi strategis pertahanan dalam dan luar negeri yang akurat, lengkap dan terkini, target capaian sasaran 100%.
 - d) Terwujudnya pengamanan kawasan instalasi strategis pertahanan, target capaian sasaran 100%.
 - e) Terwujudnya pemeliharaan dan pembangunan kawasan instalasi strategis pertahanan, target capaian sasaran 100%.
 - f) Terwujudnya kerja sama kawasan instalasi strategis pertahanan, target capaian sasaran 100%.
 - g) Terwujudnya sistem pertahanan Siber dalam rangka pertahanan negara yang mampu menghadapi ancaman dan serangan Siber Global
- e. Indikator Kinerja Utama. Dalam mewujudkan 11 (sebelas) program dan 62 (enam puluh dua) kegiatan dan 103 (seratus tiga) sasaran kegiatan, maka dirumuskan 241 (dua ratus empat puluh satu) indikator dengan urutan sebagai berikut:
- 1) Pusdatin Kemhan 4 (empat) indikator:
 - a) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kemhan.
 - b) Persentase kesiapan operasional aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi.
 - c) Persentase kesiapan operasional Infrastruktur Jaringan.
 - d) Tingkat keamanan sistem informasi pertahanan Negara dan Persandian.
 - 2) Puslapbinkuhan Kemhan 6 (enam) indikator:
 - a) Persentase Laporan Keuangan (LK) UO yang memadai.
 - b) Opini Laporan Keuangan (LK) Kemhan.
 - c) Nilai Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).

- d) Persentase kesesuaian antara neraca dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kemhan dan TNI.
 - e) Persentase kesesuaian nilai bidang keuangan dengan Laporan BMN.
 - f) Persentase rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan Satker Puslapbinkuhan yang telah ditindaklanjuti.
- 3) Biro Hukum Setjen Kemhan 3 (tiga) indikator:
- a) Persentase perkara hukum yang dapat diselesaikan.
 - b) Persentase nasihat hukum yang ditindaklanjuti.
 - c) Tingkat pemahaman peserta terhadap Peraturan Perundang-undangan yang disuluhkan.
- 4) Pusrehab Kemhan 6 (enam) indikator:
- a) Persentase penyandang disabilitas personel TNI dan PNS Kemhan yang berhasil direhabilitasi sampai profesional dan mandiri.
 - b) Persentase penyandang disabilitas personel TNI dan PNS Kemhan yang memiliki motivasi *entrepreneurship* (kewirausahaan).
 - c) Persentase penyandang disabilitas personel TNI yang direhabilitasi medik paripurna *return to combat*.
 - d) Tingkat kepuasan penyandang disabilitas personel TNI dan PNS Kemhan terhadap rehabilitasi yang diterima dari Pusrehab.
 - e) Kategori akreditasi SNARS dari Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS).
 - f) Persentase kesesuaian penarikan dana PNBK Rumah Sakit dr. Suyoto.
- 5) Biro Umum Setjen Kemhan 5 (lima) indikator:
- a) Indeks Kepuasan Pegawai terhadap pelayanan umum (*Employee Satisfaction Index*).
 - b) Persentase penggunaan *e-procurement* terhadap belanja pengadaan barang dan jasa.
 - c) Persentase aset BMN UO Kemhan yang terinventarisir dalam SIMAK BMN.
 - d) Persentase Sarpras UO Kemhan yang terpelihara.
 - e) Persentase kesesuaian nilai keuangan dengan Laporan BMN.

- 6) Biro Kepegawaian Setjen Kemhan 3 (tiga) indikator:
 - a) Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Kemhan.
 - b) Indeks Kepuasan Kepegawaian Kemhan.
 - c) Indeks *Merit System*.
- 7) Biro Perencanaan dan Keuangan Setjen Kemhan 3 (tiga) indikator:
 - a) Persentase dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian anggaran Satker/Subsatker dengan kualitas baik yang efektif dan efisien.
 - b) Nilai Laporan Keuangan Satker/ Subsatker UO Kemhan.
 - c) Nilai Laporan Keuangan UO Kemhan.
- 8) Biro TU dan Protokol Setjen Kemhan 4 (empat) indikator:
 - a) Indeks Kearsipan.
 - b) Persentase Satker/Subsatker yang menerapkan administrasi umum kearsipan dengan benar.
 - c) Persentase kegiatan keprotokolan pimpinan yang berjalan dengan lancar, aman dan tertib.
 - d) Persentase kegiatan keprotokolan pimpinan yang ditindaklanjuti oleh Satker/Subsatker Kemhan dalam rangka kerja sama di suatu bidang.
- 9) Biro Humas Setjen Kemhan 6 (enam) indikator:
 - a) Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan informasi per-tahanan negara dan pengaduan masyarakat.
 - b) Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).
 - c) Nilai kepatuhan pelaksanaan UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
 - d) Jumlah *image building* yang dipublikasikan melalui media nasional.
 - e) Indeks Keterbukaan Informasi Publik.
 - f) Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik.
- 10) Biro Ortala Setjen Kemhan 8 (delapan) indikator:
 - a) Indeks Kelembagaan.
 - b) Persentase Satker yang telah tertata secara kelembagaan yang memenuhi aspek tepat ukuran, tepat fungsi dan tepat proses di lingkungan UO Kemhan.

- c) Indeks Ketatalaksanaan.
 - d) Persentase Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah UO Kemhan yang telah dilaksanakan secara efektif dan efisien.
 - e) Nilai pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) Satker/Subsatker.
 - f) Persentase Satker yang telah melaksanakan Reformasi Birokrasi secara efektif dan efisien.
 - g) Nilai penyelenggaraan SAKIP Satker/Subsatker.
 - h) Persentase Satker yang menerapkan manajemen SAKIP secara terintegrasi dan akuntabel di lingkungan UO Kemhan.
- 11) Biro Peraturan Perundang-undangan Setjen Kemhan 2 (dua) indikator:
- a) Persentase regulasi bidang pertahanan yang dapat diselesaikan.
 - b) Persentase pelaksanaan asistensi hukum internasional bidang pertahanan yang dapat diselesaikan secara tepat waktu.
- 12) Pusat Kelaikan 3 Kemhan (tiga) indikator:
- a) Persentase sertifikasi kelaikan yang terlaksana sesuai dengan regulasi kelaikan.
 - b) Persentase Sarpras yang mendapat sertifikat kelaikan.
 - c) Jumlah personel inspektur kelaikan yang memiliki sertifikat kelaikan Kemhan.
- 13) Itjen Kemhan 17 (tujuh belas) indikator:
- a) Persentase produk perencanaan dan penganggaran Itjen yang akuntabel.
 - b) Persentase capaian target program dan kegiatan sesuai Perjanjian Kinerja (PK).
 - c) Persentase capaian target penyerapan anggaran yang tepat waktu.
 - d) Nilai pelaksanaan Reformasi Birokrasi Itjen.
 - e) Nilai Laporan Akuntabilitas Kinerja Itjen.
 - f) Nilai Laporan Keuangan Itjen.
 - g) Presentase Temuan Materiil yang ditindaklanjuti.
 - h) Presentase menurunnya temuan dibidang pengadaan barang dan jasa melalui audit, *review*, evaluasi, verifikasi dan pemantauan.

- i) Presentase jawaban Satker yang sesuai dengan rekomendasi hasil pemeriksaan terhadap Satker dalam pengawasan bidang pengadaan barang dan jasa.
 - j) Presentase menurunnya temuan di bidang keuangan dan penganggaran melalui audit, *review*, evaluasi, verifikasi dan pemantauan.
 - k) Presentase menurunnya temuan di bidang SDM, hukum, manajemen dan layanan publik melalui audit, *review*, evaluasi, verifikasi dan pemantauan.
 - l) Presentase jawaban Satker yang sesuai dengan rekomendasi hasil pemeriksaan terhadap Satker dalam pengawasan bidang SDM, hukum, manajemen dan layanan publik.
 - m) Presentase menurunnya temuan dibidang BMN dan logistik melalui audit, *review*, evaluasi, verifikasi dan pemantauan.
 - n) Presentase jawaban Satker yang sesuai dengan rekomendasi hasil pemeriksaan terhadap Satker dalam pengawasan bidang BMN dan logistik.
 - o) Presentase menurunnya temuan dibidang organisasi, tatalaksana, kinerja dan PDTT melalui audit, *review*, evaluasi, verifikasi dan pemantauan.
 - p) Presentase jawaban Satker yang sesuai dengan rekomendasi hasil pemeriksaan terhadap Satker dalam pengawasan bidang organisasi, tata laksana, kinerja dan PDTT.
 - q) Presentase Satker yang tertib dalam melaksanakan PMPRB dan e-Sakip *review* secara akuntabel dan tepat waktu.
- 14) Ditjen Strahan Kemhan 20 (dua puluh) indikator:
- a) Persentase produk perencanaan dan penganggaran Ditjen Strahan Kemhan yang akuntabel.
 - b) Persentase capaian target program dan kegiatan sesuai Perjanjian Kinerja (PK).
 - c) Persentase capaian target penyerapan anggaran yang tepat waktu.
 - d) Nilai pelaksanaan Reformasi Birokrasi Ditjen Strahan Kemhan.
 - e) Nilai Laporan Akuntabilitas Kinerja Satker.
 - f) Nilai Laporan Keuangan Ditjen Strahan Kemhan.
 - g) Presentase Temuan Materiil yang ditindaklanjuti.
 - h) Persentase K/L yang mengimplementasikan kebijakan strategis pertahanan.
 - i) Persentase K/L yang faham terhadap kebijakan strategi pertahanan.

- j) Persentase perjanjian kerja sama bilateral dengan negara sahabat di bidang pertahanan yang terealisasi.
- k) Persentase perjanjian kerja sama multilateral dengan negara sahabat di bidang pertahanan yang terealisasi.
- l) Persentase kegiatan bilateral, regional dan multilateral di bidang pertahanan yang ditindaklanjuti dalam kerja sama antar negara.
- m) Persentase negara sahabat yang melakukan pertukaran perwira siswa dengan Kemhan/TNI.
- n) Persentase K/L yang mengimplementasikan kebijakan pengerahan komponen pertahanan negara.
- o) Tingkat pemahaman K/L terhadap kebijakan pengerahan komponen pertahanan negara.
- p) Persentase keberhasilan misi pemeliharaan perdamaian dunia.
- q) Persentase K/L dan/ atau Pemda yang mengimplementasikan kebijakan wilayah pertahanan.
- r) Persentase Pemda yang mengimplementasikan wilayah pertahanan negara.
- s) Persentase batas wilayah negara di darat, laut dan udara yang telah disepakati.
- t) Persentase pelanggaran batas wilayah negara yang dapat diatasi.

15) Ditjen Renhan Kemhan 25 (dua puluh lima) indikator:

- a) Persentase produk perencanaan dan penganggaran Ditjen Renhan Kemhan yang akuntabel.
- b) Persentase capaian target program dan kegiatan sesuai Perjanjian Kinerja (PK).
- c) Persentase capaian target penyerapan anggaran yang tepat waktu.
- d) Nilai pelaksanaan reformasi birokrasi Ditjen Renhan Kemhan.
- e) Nilai laporan akuntabilitas kinerja Ditjen Renhan Kemhan.
- f) Nilai laporan keuangan Ditjen Renhan Kemhan.
- g) Presentase temuan materiil yang ditindaklanjuti.
- h) Persentase kebijakan di bidang Administrasi pelaksanaan anggaran pertahanan yang diimplementasikan oleh UO Kemhan dan TNI.

- i) Persentase peraturan di bidang Administrasi pelaksanaan anggaran pertahanan yang terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu.
- j) Persentase pelaksanaan fasilitasi kebijakan di bidang Administrasi pelaksanaan anggaran pertahanan yang terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu.
- k) Persentase pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi pelaksanaan anggaran pertahanan yang terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu.
- l) Persentase realisasi pelaksanaan anggaran UO Kemhan dan TNI dihadapkan dengan target yang ditetapkan.
- m) Persentase UO yang telah memenuhi aspek pelaksanaan anggaran dalam rangka tertib administrasi.
- n) Persentase kebijakan di bidang pengendalian program dan anggaran pertahanan yang diimplementasikan oleh UO Kemhan dan TNI.
- o) Persentase pengendalian terhadap pelaksanaan program dan anggaran tahunan UO Kemhan dan TNI yang terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu.
- p) Presentase penurunan revisi terhadap produk pengendalian program dan anggaran.
- q) Persentase realisasi penerimaan negara bukan pajak UO Kemhan dan TNI.
- r) Persentase Laporan Kinerja UO yang akuntabel dan tepat waktu.
- s) Nilai Laporan Kinerja Kemhan dan TNI dalam Indeks hasil evaluasi AKIP.
- t) Persentase kebijakan di bidang perencanaan pembangunan yang diimplementasikan UO Kemhan dan TNI.
- u) Nilai produk perencanaan kinerja dalam Indeks Hasil Evaluasi AKIP.
- v) Persentase dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah dan jangka pendek UO Kemhan/TNI yang dapat diimplementasikan.
- w) Persentase keselarasan dokumen perencanaan UO terhadap dokumen perencanaan Kemhan/TNI.
- x) Persentase kebijakan di bidang perencanaan program dan anggaran pertahanan yang diimplementasikan oleh UO Kemhan dan TNI.
- y) Persentase perencanaan program dan anggaran tahunan Kemhan, Mabes TNI, TNI AD, TNI AL, dan TNI AU yang terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu.

16) Ditjen Pothan Kemhan 25 (dua puluh lima) indikator:

- a) Persentase produk perencanaan dan penganggaran Ditjen Pothan yang akuntabel.
- b) Persentase capaian target program dan kegiatan sesuai Perjanjian Kinerja (PK).
- c) Persentase capaian target penyerapan anggaran yang tepat waktu.
- d) Nilai pelaksanaan Reformasi Birokrasi Ditjen Pothan.
- e) Nilai Laporan Akuntabilitas Kinerja Ditjen Pothan.
- f) Nilai Laporan Keuangan Ditjen Pothan.
- g) Presentase Temuan Materiil yang ditindaklanjuti.
- h) Persentase K/L yang mengimplementasikan kebijakan di bidang Keveteranan RI.
- i) Persentase Veteran RI yang memperoleh pelayanan secara akuntabel dan tepat waktu.
- j) Persentase penanganan pengaduan Veteran yang telah ditindak-lanjuti.
- k) Persentase K/L atau Pemda, dan Komponen Bangsa Lainnya yang mengimplementasikan kebijakan di bidang Bela Negara.
- l) Tingkat kesadaran dan pemahaman warga negara terhadap Bela Negara.
- m) Persentase kader Bela Negara yang terbentuk.
- n) Persentase kader Bela Negara yang telah tertata dan terbina.
- o) Persentase peraturan dan kebijakan di bidang Sumdahan yang telah diimplementasikan.
- p) Persentase rekomendasi potensi Komcad yang telah tertata dan terbina.
- q) Persentase potensi Sumber Daya Manusia (SDM) Pendukung Pertahanan yang telah tertata dan terbina.
- r) Persentase potensi Sumber Daya Alam dan Buatan (SDAB) Pendukung Pertahanan yang telah tertata dan terbina.
- s) Persentase potensi Sarpras Pendukung Pertahanan yang telah tertata dan terbina.
- t) Persentase K/L yang mengimplementasikan kebijakan di bidang Tekindhan.
- u) Persentase industri potensial yang dapat ditetapkan sebagai industri pertahanan.

- v) Persentase produksi Alpalhankam dalam negeri yang tepat waktu dan akuntabel.
- w) Persentase implementasi Kandungan Lokal dan Ofset (KLO) yang terlaksana dalam pengadaan Alpalhankam luar negeri.
- x) Persentase kerja sama industri pertahanan yang terealisasi.
- y) Persentase *First Article* (FA) yang ditindaklanjuti menjadi material yang digunakan *user* dan/atau dapat diproduksi massal.

17) Ditjen Kuathan Kemhan 26 (dua puluh enam) indikator:

- a) Persentase produk perencanaan dan penganggaran Ditjen Kuathan Kemhan yang akuntabel.
- b) Persentase capaian target program dan kegiatan sesuai Perjanjian Kinerja (PK).
- c) Persentase capaian target penyerapan anggaran yang tepat waktu.
- d) Nilai pelaksanaan Reformasi Birokrasi Ditjen Kuathan Kemhan.
- e) Nilai Laporan Akuntabilitas Kinerja Ditjen Kuathan Kemhan.
- f) Nilai Laporan Keuangan Ditjen Kuathan Kemhan.
- g) Presentase Temuan Materiil yang ditindaklanjuti.
- h) Persentase kebijakan di bidang fasilitas dan jasa yang dapat diimplementasikan.
- i) Persentase pangkalan dan daerah latihan yang siap digunakan oleh UO TNI dan Angkatan.
- j) Persentase fasilitas pangkalan tanah dan bangunan yang telah tersertifikasi.
- k) Persentase pemenuhan pelayanan LTGA dihadapkan dengan kebutuhan UO TNI dan Angkatan.
- l) Persentase kesiapan bidang fasilitas dan jasa pertahanan dalam bidang BBMP yang akuntabel di lingkungan Kemhan dan TNI.
- m) Tingkat kesiapan telekomunikasi dalam mendukung pertahanan negara di lingkungan Kemhan dan TNI.
- n) Persentase kebijakan di bidang kesehatan komponen utama pertahanan negara yang dapat diimplementasikan.
- o) Persentase tenaga kesehatan yang siap operasional dalam mendukung OMP dan OMSP.

- p) Persentase pemenuhan tenaga kesehatan dalam pelayanan kesehatan.
- q) Tingkat kesiapan fasilitas kesehatan dalam rangka dukungan kesehatan.
- r) Tingkat kesiapan fasilitas kesehatan dalam rangka pelayanan kesehatan.
- s) Persentase kebijakan di bidang pembinaan materiil komponen utama pertahanan yang diimplementasikan.
- t) Persentase pemenuhan Rencana Kebutuhan (Renbut) Alpalhankam dihadapkan pencapaian MEF aspek fisik bidang Alutsista.
- u) Persentase penghapusan dan hibah BMN selain tanah, bangunan dan BMP yang terealisasi.
- v) Persentase rekomendasi/ perizinan terhadap penggunaan senjata standar militer dan penggunaan bahan peledak yang ditindaklanjuti.
- w) Persentase rumusan Standar Militer Indonesia (SMI) yang dikeluarkan.
- x) Persentase kebijakan di bidang SDM Komponen Utama pertahanan negara yang diimplementasikan.
- y) Persentase sumber daya manusia Komponen Utama pertahanan negara yang profesional.
- z) Persentase pemenuhan sumber daya manusia Komponen Utama dihadapkan dengan kebutuhan.

18) Balitbang Kemhan 16 (enam belas) indikator:

- a) Persentase produk perencanaan dan penganggaran Balitbang Kemhan yang akuntabel.
- b) Persentase capaian target program dan kegiatan sesuai Perjanjian Kinerja (PK).
- c) Persentase capaian target penyerapan anggaran yang tepat waktu.
- d) Nilai pelaksanaan reformasi birokrasi Balitbang Kemhan.
- e) Nilai laporan akuntabilitas kinerja Balitbang Kemhan.
- f) Nilai laporan keuangan Balitbang Kemhan.
- g) Presentase temuan materiil yang ditindaklanjuti.
- h) Persentase hasil litbang Puslitbang Strahan yang dapat ditindaklanjuti.

- i) Persentase rekomendasi hasil litbang Puslitbang Strahan yang ditindaklanjuti.
- j) Persentase hasil litbang Puslitbang Alpalhan yang dapat ditindaklanjuti.
- k) Jumlah model dan atau prototipe hasil litbang yang dapat ditindaklanjuti sebagai *First Article* (FA).
- l) Jumlah kerja sama Puslitbang Alpalhan dengan Lembaga Litbang lain.
- m) Persentase hasil litbang Puslitbang Iptekhan yang dapat ditindaklanjuti.
- n) Jumlah inovasi teknologi dan model/ desain/komponen/sub komponen alat peralatan pertahanan yang sesuai kemajuan iptek serta dapat dilanjutkan menjadi prototipe.
- o) Persentase hasil litbang Puslitbang Sumdahan yang ditindaklanjuti.
- p) Persentase rekomendasi hasil litbang Puslitbang Sumdahan yang ditindaklanjuti.

19) Badiklat Kemhan 20 (dua puluh) indikator:

- a) Persentase produk perencanaan dan penganggaran Badiklat Kemhan yang akuntabel.
- b) Persentase capaian target program dan kegiatan sesuai Perjanjian Kinerja (PK).
- c) Persentase capaian target penyerapan anggaran yang tepat waktu.
- d) Nilai pelaksanaan Reformasi Birokrasi Badiklat Kemhan.
- e) Nilai Laporan Akuntabilitas Kinerja Badiklat Kemhan.
- f) Nilai Laporan Keuangan Badiklat Kemhan.
- g) Presentase Temuan Materiil yang ditindaklanjuti.
- h) Persentase peserta Diklat Bahasa yang lulus dengan kategori baik.
- i) Persentase Widyaiswara dan/atau tenaga pendidik yang bersertifikasi sebagai tenaga pengajar Bahasa.
- j) Persentase kelulusan Serdiklat Jemenhan dengan kategori baik.
- k) Persentase Tenaga Pendidik Pusdiklat Jemenhan yang tersertifikasi.
- l) Persentase kelulusan Serdiklat Tekfunghan dengan kategori baik.
- m) Persentase lulusan Diklat Tekfunghan yang mampu berkinerja lebih baik di Satker/Satuan asal.

- n) Persentase tenaga pendidik Pusdiklat Tekfunghan yang tersertifikasi.
- o) Persentase kelulusan Serdiklat Belneg dengan kategori baik.
- p) Persentase Tenaga Pendidik Belneg yang tersertifikasi.
- q) Persentase kelulusan Strata 2 bidang pertahanan yang sesuai standar nasional dan internasional dengan kategori "Sangat Memuaskan".
- r) Persentase kelulusan Strata 3 bidang pertahanan yang sesuai standar nasional dan internasional dengan kategori "Sangat Memuaskan".
- s) Persentase publikasi penelitian bidang pertahanan negara dan Belneg yang dimuat di Jurnal Nasional dan Internasional.
- t) Jumlah kegiatan pengabdian kepada masyarakat di bidang pertahanan negara sesuai standar nasional.

20) Baranahan Kemhan 23 (dua puluh tiga) indikator:

- a) Persentase produk perencanaan dan penganggaran Baranahan Kemhan yang akuntabel.
- b) Persentase capaian target program dan kegiatan sesuai Perjanjian Kinerja (PK).
- c) Persentase capaian target penyerapan anggaran yang tepat waktu.
- d) Nilai pelaksanaan Reformasi Birokrasi Baranahan Kemhan.
- e) Nilai Laporan Akuntabilitas Kinerja Baranahan Kemhan.
- f) Nilai Laporan Keuangan Baranahan Kemhan.
- g) Presentase Temuan Materiil yang ditindaklanjuti.
- h) Persentase aset BMN Kemhan dan TNI yang telah terinventarisir secara tepat dan akuntabel dalam SIMAK BMN.
- i) Persentase aset BMN Kemhan dan TNI yang tersertifikasi.
- j) Persentase UO yang tertib dalam pelaporan BMN dalam mendukung Laporan Keuangan (LK) Kemhan dan TNI.
- k) Persentase materiil pertahanan yang telah dikodifikasi.
- l) Jumlah K/L dan industri nasional yang telah menggunakan kodifikasi dengan sistem Nomor Sediaan Nasional (NSN).

- m) Persentase kerja sama di dalam dan luar negeri bidang kodifikasi yang ditindaklanjuti.
- n) Persentase perencanaan teknis yang terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu.
- o) Persentase pelaksanaan pengadaan jasa konstruksi yang terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu.
- p) Persentase hasil pelaksanaan konstruksi sarana pertahanan yang akuntabel dan tepat waktu.
- q) Persentase pengadaan jasa konstruksi sarana pertahanan yang telah *e-procurement*.
- r) Persentase hasil pembangunan sarana pertahanan di Wilayah Perbatasan yang akuntabel dan tepat waktu.
- s) Tingkat efektivitas pengadaan barang dan jasa Alpalhan.
- t) Persentase pemenuhan barang dan jasa alpalhan dihadapkan dengan rencana kebutuhan.
- u) Persentase capaian kinerja pengadaan alpalhan sesuai kontrak yang disepakati.
- v) Persentase peningkatan penggunaan alutsista produksi industri dalam negeri dalam rangka pertahanan negara.
- w) Persentase kebutuhan alutsista yang dapat dipenuhi dari pengembangan industri mandiri.

21) Bainstrahan Kemhan 16 (enam belas) indikator:

- a) Persentase produk perencanaan dan penganggaran Bainstrahan Kemhan yang akuntabel.
- b) Persentase capaian target program dan kegiatan sesuai Perjanjian Kinerja (PK).
- c) Persentase capaian target penyerapan anggaran yang tepat waktu.
- d) Nilai pelaksanaan reformasi birokrasi Bainstrahan Kemhan.
- e) Nilai laporan akuntabilitas kinerja Bainstrahan Kemhan.
- f) Nilai laporan keuangan Bainstrahan Kemhan.
- g) Presentase temuan materiil yang ditindaklanjuti.
- h) Persentase informasi strategis pertahanan dalam dan luar negeri yang ditindaklanjuti.

- i) Persentase kajian strategis pertahanan dalam dan luar negeri yang ditindaklanjuti.
- j) Persentase penyajian intelijen strategis pertahanan yang ditindaklanjuti.
- k) Persentase gangguan keamanan di kawasan instalasi strategis pertahanan yang dapat diatasi.
- l) Persentase aset kawasan instalasi strategis pertahanan yang terpelihara.
- m) Persentase kerja sama kawasan instalasi strategis pertahanan yang terealisasi.
- n) Persentase jaringan intranet Kemhan yang terlindungi oleh perimeter pertahanan siber dari serangan siber global.
- o) Persentase hasil pemantauan dan analisa terhadap serangan siber global yang ditindaklanjuti.
- p) Persentase kesiapan operasional infrastruktur siber.

7. Ikhtisar Perjanjian Kinerja.

Perjanjian kinerja UO Kemhan Tahun 2020 telah ditetapkan dan ditandatangani oleh Sekjen Kemhan selaku Ka UO Kemhan pada tanggal 29 Januari 2020 dalam bentuk surat pernyataan dan *table* perjanjian kinerja yang terdiri dari sasaran program/kegiatan, indicator kinerja dan target. Selanjutnya pada tahun berjalan terjadi pergantian pejabat Sekjen Kemhan selaku Ka UO Kemhan sehingga pada tanggal 3 Juni 2020 telah dilakukan *Review* Perjanjian Kinerja dan tidak mengubah Indikator Kinerja Utama (IKU). Susunan Pengembangan IKU mulai dari pejabat Eselon I, II, III dan IV, dimana hasil pengembangan tersebut telah digunakan sebagai dasar IKU dalam Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2020. Adapun bentuk Perjanjian Kinerja UO Kemhan tahun 2020 disajikan sebagai berikut:

- a. Pernyataan *Review* Perjanjian Kinerja.

REVIEW PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
UNIT ORGANISASI KEMENTERIAN PERTAHANAN
TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Donny Ermawan T., M.D.S.
Jabatan : Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan.

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 3 Juni 2020

Sekretaris Jenderal,

ttd

Donny Ermawan T., M.D.S.

Marsekal Madya TNI

REVIEW PERJANJIAN KINERJA
UNIT ORGANISASI KEMENTERIAN PERTAHANAN
TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Donny Ermawan T., M.D.S.
Jabatan : Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Prabowo Subianto
Jabatan : Menteri Pertahanan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 3 Juni 2020

Pihak Kedua

Menteri Pertahanan,

ttd

Prabowo Subianto

b. *Review Perjanjian Kinerja Unit Organisasi Kementerian Pertahanan tahun 2020.*

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Sekjen		
	Terwujudnya manajemen yang terintegrasi dan akuntabel berdasarkan data yang terkini dan akurat di lingkungan UO Kemhan	a Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Kemhan b Persentase Satker yang menerapkan Reformasi Birokrasi (RB) dengan baik c Indeks akuntabilitas kinerja UO Kemhan d Persentase Satker/Subsatker yang menerapkan manajemen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang terintegrasi dan akuntabel berdasarkan data yang terkini dan akurat UO Kemhan	73 80% 71 70%
1.1	Pusdatin		
	Terwujudnya pengelolaan Sisinfohanneg dan infrastrukturnya yang aman, handal dan terintegrasi	a Indek Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kemhan b Persentase kesiapan operasional aplikasi teknologi informasi dan komunikasi c Persentase kesiapan operasional infrastruktur jaringan d Tingkat keamanan sistem informasi pertahanan negara dan persandian	3 95% 95% 3

1.2	Puslapbinkuhan		
	Terwujudnya pengelolaan keuangan yang memadai dan berkelanjutan dalam rangka mendukung pertahanan negara	<ul style="list-style-type: none"> a Persentase Laporan Keuangan (LK) UO yang memadai 80% b Opini Laporan Keuangan (LK) Kemhan WTP c Nilai Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) 70 d Persentase kesesuaian antara neraca dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kemhan dan TNI 100% f Persentase kesesuaian nilai bidang keuangan dengan laporan BMN 80% g Persentase rekomendasi BPK atas laporan keuangan satker Puslapbinkuhan yang telah ditindaklanjuti 100% 	
1.3	Biro Hukum		
	Terwujudnya bantuan hukum yang akuntabel dan tepat waktu	<ul style="list-style-type: none"> a Persentase perkara hukum yang dapat diselesaikan. 45% b Persentase nasihat hukum ya yang ditindaklanjuti 50% c Tingkat pemahaman peserta terhadap Peraturan Perundang-undangan yang disuluhkan 3 	
1.4	Pusrehab		
	Meningkatnya penyandang disabilitas personel TNI dan PNS Kemhan yang memperoleh pelayanan rehabilitasi terpadu hingga menjadi SDM profesional, mandiri dan <i>entrepreneursip</i>	<ul style="list-style-type: none"> a Persentase penyandang disabilitas personel TNI dan PNS Kemhan yang berhasil direhabilitasi sampai profesional dan mandiri 35% b Persentase penyandang disabilitas personel TNI dan PNS Kemhan yang memiliki motivasi <i>entrepreneurship</i> (Kewirausahaan) 10% 	
	Meningkatnya pelayanan perumahsakitkan sesuai standar	<ul style="list-style-type: none"> a Kategori akreditasi SNARS dari Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS) Paripurna Bintang 5 b Persentase kesesuaian penarikan dana PNBK Rumah Sakit dr. Suyoto 85% 	

1.5	Biro Umum		
	Terwujudnya pelayanan umum terhadap Satker/ Subsatker di lingkungan Kemhan	a Indeks kepuasan pegawai terhadap pelayanan umum (<i>Employee Satisfaction Index</i>)	75%
		b Persentase penggunaan <i>e-procurement</i> terhadap belanja pengadaan barang dan jasa	40%
1.6	Biro Umum		
	Meningkatnya pengelolaan sarpras UO Kemhan	a Persentase aset BMN UO Kemhan yang terinventarisir dalam SIMAK BMN	100%
		b Persentase Sarpras UO Kemhan yang terpelihara	70%
		c Persentase kesesuaian nilai keuangan dengan laporan BMN	100%
1.7	Biro Kepegawaian		
	Terwujudnya pegawai Kemhan yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi berdasarkan <i>merit system</i>	a Indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Kemhan	71
		b Indeks kepuasan pegawai Kemhan	77
	Terwujudnya pegawai Kemhan yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi berdasarkan <i>merit system</i>	- Indeks <i>merit system</i>	0.63
1.8	Biro Perencanaan dan Keuangan		
	Terwujudnya perencanaan, pelaksanaan, pengendalian anggaran dan pelaporan keuangan UO Kemhan yang akuntabel dan tepat waktu	a Persentase dokumen perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian anggaran Satker/Subsatker dengan kualitas baik yang efektif dan efisien	100%
		b Nilai laporan keuangan Satker/Subsatker UO Kemhan	70
		c Nilai laporan keuangan UO Kemhan	85
1.9	Biro TU dan Prot		
	Terselenggaranya pelayanan administrasi umum, kearsipan dan ketatausahaan yang akuntabel dan tepat waktu	a Indeks kearsipan	77
		b Persentase Satker/Subsatker yang menerapkan administrasi	75%

	Terselenggaranya keprotokolan pimpinan UO Kemhan yang berjalan dengan lancar, aman dan tertib	<p>umum kearsipan dengan benar</p> <p>a Persentase kegiatan keprotokolan pimpinan yang berjalan dengan lancar, aman dan tertib</p> <p>b Persentase kegiatan keprotokolan pimpinan yang ditindaklanjuti oleh Satker/ Subsatker Kemhan dalam rangka kerja sama di suatu bidang</p>	<p>90%</p> <p>80%</p>
1.10	Biro Ortala		
	Terwujudnya penataan organisasi yang tepat ukuran, tepat fungsi dan tepat proses	<p>a Indeks Kelembagaan</p> <p>b Persentase Satker yang telah tertata secara kelembagaan yang memenuhi aspek: tepat ukuran, tepat fungsi dan tepat proses di lingkungan UO Kemhan</p>	<p>75</p> <p>75%</p>
	Terwujudnya ketatalaksanaan yang efektif, efisien dan akuntabel	<p>a Indeks Ketatalaksanaan</p> <p>b Persentase Standar Operasional Prosedur (SOP) administrasi Pemerintah UO Kemhan yang telah dilaksanakan secara efektif dan efisien</p>	<p>75</p> <p>75%</p>
	Terwujudnya reformasi birokrasi yang efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi dan berkelanjutan	<p>a Nilai pelaksanaan reformasi birokrasi Satker/Subsatker</p> <p>b Persentase satker yang telah melaksanakan reformasi birokrasi secara efektif dan efisien</p>	<p>73</p> <p>80%</p>
	Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang akuntabel dan tepat waktu	<p>a Nilai Penyelenggaraan SAKIP Satker/Subsatker</p> <p>b Persentase Satker yang menerapkan manajemen SAKIP secara terintegrasi dan akuntabel di lingkungan UO Kemhan</p>	<p>71</p> <p>70%</p>
	Tersusunnya regulasi di bidang pertahanan	a Persentase regulasi bidang pertahanan yang dapat diselesaikan	50%
	Terlaksananya asistensi	b Persentase pelaksanaan	50%

	hukum internasional bidang pertahanan	asistensi hukum internasional bidang pertahanan yang dapat diselesaikan secara tepat waktu	
1.11	Biro Humas		
	Meningkatnya citra positif Kemhan/TNI di masyarakat, dan forum internasional	<p>a Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan informasi pertahanan negara dan pengaduan masyarakat</p> <p>b Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)</p> <p>c Nilai kepatuhan pelaksanaan UU 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik</p> <p>d Jumlah <i>image building</i> yang dipublikasikan melalui media nasional</p> <p>e Indek keterbukaan informasi publik</p> <p>f Indek persepsi kualitas pelayanan publik</p>	<p>3</p> <p>88%</p> <p>101</p> <p>540</p> <p>79</p> <p>75</p>
1.12	Biro Turdang		
	Tersusunnya regulasi di bidang pertahanan	a Persentase regulasi bidang pertahanan yang dapat diselesaikan	50%
	Terlaksananya asistensi hukum internasional bidang pertahanan	b Persentase pelaksanaan asistensi hukum internasional bidang pertahanan yang dapat diselesaikan secara tepat waktu	50%
1.13	Puslaik		
	Terselenggaranya sertifikasi kelaikan sarana dan prasarana pertahanan serta personel Pusat Kelaikan Kemhan	<p>a Persentase sertifikasi kelaikan yang terlaksana sesuai dengan regulasi kelaikan</p> <p>b Persentase Sarpras yang mendapat sertifikasi kelaikan</p> <p>c Jumlah personel inspektur kelaikan yang memiliki sertifikasi kelaikan Kemhan</p>	<p>100%</p> <p>100%</p> <p>160%</p>
2.	Itjen Kemhan		
	Meningkatnya pengelolaan	a Opini BPK RI atas laporan	WTP

	keuangan dan kinerja aparatur Kemhan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel	<p>keuangan Kemhan</p> <p>b Persentase rekomendasi BPK atas laporan keuangan Kemhan yang ditindaklanjuti 40%</p> <p>c Persentase penurunan temuan material terhadap Satker/Subsatker UO Kemhan 15%</p> <p>d Persentase penurunan temuan material terhadap Satker/Subsatker UO Kemhan 85%</p> <p>e Persentase Satker/Subsatker yang tertib dalam pelaporan penyelenggaraan E-SAKIP 100%</p>	
2.1	Set Itjen		
	Terwujudnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Itjen yang terkini, akurat, terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu	<p>a Persentase produk perencanaan dan penganggaran Itjen yang akuntabel 100%</p> <p>b Persentase capaian target program dan kegiatan sesuai Perjanjian Kinerja (PK) 100%</p> <p>c Persentase capaian target penyerapan anggaran yang tepat waktu 100%</p>	
	Terwujudnya reformasi birokrasi yang efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi dan berkelanjutan	<p>a Nilai pelaksanaan reformasi birokrasi Itjen 80%</p> <p>b Nilai akuntabilitas kinerja Itjen 70%</p> <p>c Nilai laporan keuangan Itjen 70%</p> <p>d Persentase temuan materiil yang ditindaklanjuti 85%</p>	
2.2	Inspektorat I		
	Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas aparatur Kemhan di bidang pengawasan Inspektorat I	<p>a Presentase menurunnya temuan dibidang pengadaan barang dan jasa melalui audit, review, evaluasi, verifikasi dan pemantauan 10%</p> <p>b Presentase jawaban Satker yang sesuai dengan rekomendasi hasil pemeriksaan terhadap satker dalam pengawasan bidang pengadaan barang dan jasa. 95%</p>	
2.3	Inspektorat II		

	Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas aparatur Kemhan di bidang pengawasan Inspektorat II	<p>a Presentase menurunnya temuan dibidang keuangan dan penganggaran melalui audit, <i>review</i>, evaluasi, verifikasi dan pemantauan</p> <p>b Presentase jawaban Satker yang sesuai dengan rekomendasi hasil pemeriksaan terhadap Satker dalam pengawasan bidang keuangan dan penganggaran</p>	<p>10%</p> <p>95%</p>
2.4	Inspektorat III		
	Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas aparatur Kemhan di bidang Pengawasan Inspektorat III	<p>a Presentase menurunnya temuan dibidang SDM, hukum, manajemen dan layanan publik melalui audit, <i>review</i>, evaluasi, verifikasi dan pemantauan</p> <p>b Presentase jawaban satker yang sesuai dengan rekomendasi hasil pemeriksaan terhadap satker dalam pengawasan bidang SDM, hukum, manajemen dan layanan publik</p>	<p>10%</p> <p>95%</p>
2.5	Inspektorat IV		
	Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas aparatur Kemhan di bidang pengawasan Inspektorat IV	<p>a Presentase menurunnya temuan dibidang BMN dan logistik melalui audit, <i>review</i>, evaluasi, verifikasi dan pemantauan</p> <p>b Presentase jawaban satker yang sesuai dengan rekomendasi hasil pemeriksaan terhadap Satker dalam pengawasan bidang BMN dan logistik</p>	<p>10%</p> <p>95%</p>
2.6	Inspektorat V		
	Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas aparatur Kemhan di bidang pengawasan Inspektorat V	<p>a Presentase menurunnya temuan dibidang organisasi, tatalaksana, kinerja dan PDDT melalui audit, <i>review</i>, evaluasi, verifikasi dan pemantauan</p> <p>b Presentase jawaban satker yang sesuai dengan rekomendasi hasil pemeriksaann terhadap satker dalam pengawasan</p>	<p>15%</p> <p>95%</p>

		bidang organisasi, tatalaksana, kinerja dan PDTT	
		c Persentase satker yang tertib dalam melaksanakan PMPRB dan E-SAKIP <i>review</i> secara akuntabel dan tepat waktu	100%
3.	Ditjen Strahan		
	Terwujudnya kebijakan dan pelaksanaan strategi pertahanan negara yang terintegrasi dan memiliki efek dalam menghadapi ancaman, gangguan, hambatan, tantangan dan peluang baik nasional, regional dan global	a Persentase kebijakan di bidang strategi pertahanan yang ditindaklanjuti Kemhan, TNI dan K/L lainnya untuk mendukung kepentingan pertahanan negara	70%
		b Persentase K/L yang faham terhadap kebijakan bidang strategi pertahanan	80%
3.1	Setditjen Strahan		
	Terwujudnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen Strahan yang terkini, akurat, terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu	a Persentase produk perencanaan dan penganggaran Ditjen Strahan yang akuntabel	100%
		b Persentase capaian target program dan kegiatan sesuai Perjanjian Kinerja (PK)	100%
		c Persentase capaian target penyerapan anggaran yang tepat waktu	100%
	Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi dan berkelanjutan	a Nilai pelaksanaan Reformasi Birokrasi Ditjen Strahan	80
		b Nilai Akuntabilitas Kinerja Ditjen Strahan	70
		c Nilai Laporan Keuangan Ditjen Strahan	70%
		d Persentase temuan materiil yang ditindaklanjuti	85%
3.2	Dit Jakstra		
	Terwujudnya kebijakan strategis pertahanan negara yang dapat dipedomani dan diimplementasikan untuk kepentingan pertahanan negara	a Persentase kebijakan strategis pertahanan yang diimplementasikan K/L terkait untuk kepentingan pertahanan negara	80%
		b Persentase K/L yang faham terhadap kebijakan strategi pertahanan	83%

3.3	Dit Kersin		
	Terwujudnya peningkatan kualitas Diplomasi Pertahanan dalam rangka mencapai kepentingan nasional dalam pertahanan di forum internasional	<p>a Persentase perjanjian kerja sama bilateral dengan negara sahabat di bidang pertahanan yang terealisasi 85%</p> <p>b Persentase perjanjian kerja sama multilateral dengan negara sahabat di bidang pertahanan yang terealisasi 88%</p> <p>c Persentase kegiatan bilateral, regional dan multilateral di bidang pertahanan yang ditindaklanjuti dalam kerja sama antar negara 80%</p> <p>d Persentase negara sahabat yang melakukan pertukaran perwira siswa dengan Kemhan/TNI 90%</p>	
3.4	Dit Rah		
	Terwujudnya kebijakan pengerahan komponen pertahanan negara yang dapat dipedomani dan diimplementasikan untuk kepentingan pertahanan negara	<p>a Persentase K/L yang mengimplementasikan kebijakan pengerahan komponen pertahanan negara 65%</p> <p>b Tingkat pemahaman K/L terhadap kebijakan pengerahan komponen pertahanan negara 70</p> <p>c Persentase keberhasilan misi pemeliharaan perdamaian 100%</p>	
3.5	Dit Wilhan		
	Terwujudnya kebijakan wilayah pertahanan yang dapat dipedomani dan diimplementasikan untuk kepentingan pertahanan Negara	- Persentase K/L dan/atau Pemda yang mengimplementasikan kebijakan wilayah pertahanan 70%	
	Terwujudnya penataan wilayah pertahanan yang terintegrasi	<p>a Jumlah wilayah pertahanan (RWP dan RRWP) yang tertata dan terbina 6.190</p> <p>b Jumlah locus/fasilitas yang dinyatakan siap digunakan sebagai wilayah pertahanan 436</p>	
	Terwujudnya penetapan dan pengelolaan batas negara dan kawasan perbatasan	a Persentase batas wilayah negara di darat, laut dan udara yang telah disepakati 39%	

		b Persentase pelanggaran batas wilayah negara yang dapat diatasi	80%
4.	Ditjen Renhan		
	Terwujudnya tata kelola program dan anggaran pertahanan negara yang terintegrasi, efisien, efektif, akuntabel dan tepat waktu	a Persentase kebijakan di bidang perencanaan pertahanan yang diimplementasikan oleh UO Kemhan dan TNI	100%
		b Persentase produk perencanaan pembangunan dan pengelolaan penganggaran bidang pertahanan yang akuntabel dan tepat waktu	100%
		c Persentase keselarasan perencanaan pembangunan pertahanan negara dengan perencanaan pembangunan semua UO	100%
		d Tingkat pengendalian program dan anggaran	4
		e Persentase rencana pembangunan bidang pertahanan yang tercapai	100%
4.1	Setditjen Renhan		
	Terwujudnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen Renhan yang terkini, akurat, terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu	a Persentase perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta pelaporan Subsatker dengan kategori baik di lingkungan Ditjen Renhan Kemhan	100%
		b Persentase capaian target program dan kegiatan sesuai Perjanjian Kinerja (PK)	100%
		c Persentase capaian target penyerapan anggaran yang tepat waktu	100%
	Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi dan berkelanjutan	a Nilai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Ditjen Renhan	80
		b Nilai Akuntabilitas Kinerja Ditjen Renhan	70
		c Nilai Laporan Keuangan Ditjen Renhan	70

		d	Persentase temuan materiil yang ditindaklanjuti	85%
4.2	Dit Minlakgar			
	Terwujudnya kebijakan di bidang Administrasi pelaksanaan anggaran pertahanan UO Kemhan dan TNI yang terimplementasi	-	Persentase kebijakan di bidang Administrasi pelaksanaan anggaran pertahanan yang diimplementasikan oleh UO Kemhan dan TNI	100%
	Terwujudnya pelaksanaan dan fasilitasi kebijakan administrasi pelaksanaan anggaran yang terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu	-	Persentase pelaksanaan fasilitasi kebijakan di bidang administrasi pelaksanaan anggaran pertahanan yang terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu	100%
	Terwujudnya pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi pelaksanaan anggaran yang terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu	a	Persentase pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi pelaksanaan anggaran pertahanan yang terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu	100%
		b	Persentase realisasi pelaksanaan anggaran UO Kemhan dan TNI dihadapkan dengan target yang ditetapkan	80%
		c	Persentase UO yang telah memenuhi aspek pelaksanaan anggaran dalam rangka tertib administrasi	80%
4.3	Dit Dalprogar			
	Terwujudnya kebijakan di bidang pengendalian program dan anggaran pertahanan yang terimplementasikan	-	Persentase kebijakan di bidang pengendalian program dan anggaran pertahanan yang diimplementasikan oleh UO Kemhan dan TNI	80%
	Terwujudnya pengendalian program dan anggaran tahunan UO Kemhan dan TNI yang terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu	a	Persentase pengendalian terhadap pelaksanaan program dan anggaran tahunan UO Kemhan dan TNI yang terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu	100%
		b	Persentase penurunan revisi terhadap produk pengendalian program dan anggaran	15%
	Terwujudnya pola pengelolaan keuangan PNBPN UO Kemhan dan TNI	-	Persentase realisasi penerimaan negara bukan pajak UO Kemhan dan TNI	80%

	Terwujudnya akuntabilitas kinerja Kemhan dan TNI di bidang pelaksanaan anggaran yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku	a b	Persentase Laporan Kinerja UO yang akuntabel dan tepat waktu Nilai Laporan Kinerja Kemhan dan TNI dalam Indeks hasil evaluasi AKIP	100% 11
4.4	Dit Renbanghan			
	Terwujudnya kebijakan di bidang perencanaan pembangunan pertahanan yang implementatif	-	Persentase kebijakan di bidang perencanaan pembangunan yang diimplementasikan UO Kemhan dan TNI	100%
	Terwujudnya dokumen perencanaan pembangunan pertahanan negara jangka menengah (Renstra) dan jangka pendek (Renja tahunan) yang dapat di implementasikan oleh seluruh UO	a b c	Nilai produk perencanaan kinerja dalam Indeks Hasil Evaluasi AKIP Persentase dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah dan jangka pendek UO Kemhan/TNI yang dapat diimplementasikan Persentase keselarasan dokumen perencanaan UO terhadap dokumen perencanaan Kemhan/TNI	25 100% 100%
4.5	Dit Renprogar			
	Terwujudnya kebijakan di bidang perencanaan program dan anggaran pertahanan	-	Persentase kebijakan di bidang perencanaan program dan anggaran pertahanan yang diimplementasikan oleh UO Kemhan dan TNI	100%
	Terwujudnya perencanaan pembiayaan program pembangunan jangka pendek (tahunan) Kemhan, Mabes TNI, TNI AD, TNI AL dan TNI AU yang terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu	a b	Persentase perencanaan pembiayaan program pembangunan jangka pendek (tahunan) Kemhan, Mabes TNI, TNI AD, TNI AL, dan TNI AU yang terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu Persentase penurunan revisi terhadap produk perencanaan program dan anggaran	100% 15%
5.	Ditjen Pothan			
	Terwujudnya potensi pertahanan dalam rangka mewujudkan sistem pertahanan negara yang terintegrasi	a b	Persentase K/L yang menindaklanjuti kebijakan di bidang potensi pertahanan Indeks Bela Negara	45% 3
5.1	Setditjen Pothan			

	Terwujudnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen Pothan yang terkini, akurat, terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu	a	Persentase produk perencanaan dan penganggaran Ditjen Pothan yang akuntabel	100%
		b	Persentase capaian target program dan kegiatan sesuai Perjanjian Kinerja (PK)	100%
		c	Persentase capaian target penyerapan anggaran yang tepat waktu	100%
	Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi dan berkelanjutan	a	Nilai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Ditjen Pothan	80
		b	Nilai Akuntabilitas Kinerja Ditjen Pothan	70
		c	Nilai Laporan Keuangan Ditjen Pothan	70
		d	Persentase temuan materiil yang ditindaklanjuti	85%
5.2	Dit Veteran			
	Terwujudnya kebijakan di bidang Keveteranan RI yang implementatif	-	Persentase K/L yang mengimplementasikan kebijakan di bidang Keveteranan RI	65%
	Terwujudnya kesejahteraan Veteran RI	a	Persentase Veteran RI yang memperoleh pelayanan secara akuntabel dan tepat waktu	65%
		b	Persentase penanganan pengaduan Veteran yang telah ditindaklanjuti	65%
5.3	Dit Bela Negara			
	Terwujudnya kebijakan di bidang Bela Negara yang implementatif	-	Persentase K/L atau Pemda dan Komponen Bangsa Lainnya yang mengimplementasikan kebijakan di bidang Bela Negara	50%
	Terwujudnya kesadaran dan pemahaman warga negara terhadap Bela Negara	-	Tingkat kesadaran dan pemahaman warga negara terhadap Bela Negara	3
	Terwujudnya kesiapan kader Bela Negara	a	Persentase kader Bela Negara yang terbentuk	65%
		b	Persentase kader Bela Negara yang telah tertata dan terbina	85%

5.4	Dit Sumdahan		
	Terwujudnya Sumdahan yang siap digunakan untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama	<p>a Persentase peraturan dan kebijakan di bidang Sumdahan yang telah diimplementasikan</p> <p>b Persentase rekomendasi potensi Komcad yang telah tertata dan terbina</p> <p>c Persentase potensi Sumber Daya Manusia (SDM) pendukung pertahanan yang telah tertata dan terbina</p> <p>d Persentase potensi Sumber Daya Alam dan Buatan (SDAB) pendukung pertahanan yang telah tertata dan terbina</p> <p>e Persentase potensi Sarana Prasarana (Sarpras) pendukung pertahanan yang telah tertata dan terbina</p>	<p>10%</p> <p>13%</p> <p>25%</p> <p>13%</p> <p>15%</p>
5.5	Dit Tekindhan		
	Terwujudnya kebijakan di bidang Tekindhan yang implementatif	- Persentase K/L yang mengimplementasikan kebijakan di bidang Tekindhan	65%
	Tersedianya industri pertahanan yang dapat dikembangkan secara mandiri	- Persentase industri potensial yang dapat ditetapkan sebagai industri pertahanan	60%
	Terpenuhinya kebutuhan Alpalhankam produksi dalam negeri secara bertahap	<p>a Persentase produksi Alpalhankam dalam negeri yang tepat waktu dan akuntabel</p> <p>b Persentase implementasi Kandungan Lokal dan Ofset (KLO) yang terlaksana dalam pengadaan Alpalhankam luar negeri</p> <p>c Persentase kerja sama industri pertahanan yang terealisasi</p>	<p>25%</p> <p>25%</p> <p>50%</p>
6.	Ditjen Kuathan		
	Terwujudnya penyelenggaraan kekuatan komponen utama pertahanan negara yang terintegrasi	a Persentase kebijakan bidang kekuatan pertahanan yang diimplementasikan UO Kemhan dan TNI serta K/L	80%

		b Presentase kesiapan kekuatan komponen utama pertahanan Negara	70%
6.1	Setditjen Kuathan		
	Terwujudnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen Kuathan yang terkini, akurat, terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu	a Presentase produk perencanaan dan penganggaran Ditjen Kuathan yang akuntabel	100%
		b Presentase capaian target program dan kegiatan sesuai Perjanjian Kinerja (PK)	100%
		c Presentase capaian target penyerapan anggaran yang tepat waktu	100%
	Terwujudnya reformasi birokrasi yang efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi dan berkelanjutan	a Nilai pelaksanaan reformasi birokrasi Ditjen Kuathan	80
		b Nilai akuntabilitas kinerja Ditjen Kuathan Kemhan	70
		c Nilai laporan keuangan Ditjen Kuathan Kemhan	70
		d Presentase temuan materiil yang ditindaklanjuti	85%
6.2	Dit Kes		
	Terwujudnya kesiapan dukungan dan pelayanan kesehatan komponen utama pertahanan negara	a Presentase tenaga kesehatan yang siap operasional dalam mendukung OMP dan OMSP	80%
		b Presentase pemenuhan tenaga kesehatan dalam pelayanan kesehatan	80%
		c Tingkat kesiapan fasilitas kesehatan dalam rangka dukungan kesehatan	85
		d Tingkat kesiapan fasilitas kesehatan dalam rangka pelayanan kesehatan	80
6.3	Dit Fasjas		
	Terwujudnya kebijakan di bidang fasilitas dan jasa yang implementatif	- Presentase kebijakan di bidang fasilitas dan jasa yang dapat diimplementasikan	80%
	Terwujudnya kesiapan fasilitas dan jasa dalam rangka mendukung pertahanan	a Presentase pangkalan dan daerah latihan yang siap digunakan oleh UO TNI dan	85%

	negara	Angkatan	
		b	Persentase fasilitas pangkalan tanah dan bangunan yang telah tersertifikasi
		c	Persentase pemenuhan pelayanan LTGA dihadapkan dengan kebutuhan UO TNI dan Angkatan
		d	Persentase kesiapan bidang fasilitas dan jasa pertahanan dalam bidang BBMP yang akuntabel UO Kemhan dan TNI
		e	Tingkat kesiapan telekomunikasi dalam mendukung pertahanan negara di UO Kemhan dan TNI
6.4	Dit Materiil		
	Terwujudnya kebijakan di bidang pembinaan materiil komponen utama pertahanan yang implementatif	-	Persentase kebijakan di bidang pembinaan materiil komponen utama pertahanan yang diimplementasikan
	Terwujudnya pengelolaan alpalhankam (BMN selain tanah, bangunan dan BMP)	a	Persentase pemenuhan rencana kebutuhan alpalhankam dihadapkan pencapaian MEF aspek fisik bidang alutsista
		b	Persentase penghapusan dan hibah BMN selain tanah, bangunan dan BMP yang terealisasi
		c	Persentase rekomendasi/izinkan terhadap penggunaan senjata standar militer dan penggunaan bahan peledak yang ditindaklanjuti
		d	Persentase rumusan Standar Militer Indonesia (SMI) yang dikeluarkan
6.5	Dit SDM		
	Terwujudnya kebijakan di bidang Sumber Daya Manusia (SDM) Komponen Utama pertahanan Negara	-	Persentase kebijakan di bidang SDM Komponen Utama pertahanan negara yang diimplementasikan

	Terwujudnya sumber daya manusia komponen utama pertahanan negara yang profesional	a Persentase sumber daya manusia komponen utama pertahanan negara yang profesional b Persentase pemenuhan sumber daya manusia komponen utama dihadapkan dengan kebutuhan	80% 80%
7.	Balitbang		
	Terwujudnya teknologi dan sumber daya pertahanan sesuai kemajuan IPTEK dan mampu dikembangkan secara mandiri Meningkatnya pemanfaatan teknologi hasil Litbang Kemhan	- Persentase prototipe hasil Litbang yang dapat ditindaklanjuti menjadi <i>First Article (FA)</i> a Jumlah hasil penelitian (materiil dan non materiil/karya ilmiah) yang termanfaatkan b Jumlah <i>polic paper/</i> rekomendasi yang dimanfaatkan	85% 16 10
7.1	Set Balitbang		
	Terwujudnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Balitbang yang terkini, akurat, terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu Terwujudnya reformasi birokrasi yang efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi dan berkelanjutan	a Persentase produk perencanaan dan penganggaran Balitbang yang akuntabel b Persentase capaian target program dan kegiatan sesuai Perjanjian Kinerja (PK) c Persentase capaian target penyerapan anggaran yang tepat waktu a Nilai pelaksanaan reformasi birokrasi Balitbang Kemhan b Nilai akuntabilitas Kinerja Balitbang Kemhan c Nilai laporan keuangan Balitbang Kemhan d Presentase temuan materiil yang ditindaklanjuti	100% 100% 100% 80 70 70 85%
7.2	Litbang Strahan		
	Terwujudnya hasil litbang Puslitbang Strahan yang dapat digunakan dalam rangka kepentingan pertahanan negara	a Persentase hasil litbang Puslitbang Strahan yang dapat ditindaklanjuti b Persentase rekomendasi hasil litbang Puslitbang Strahan	85% 85%

		yang ditindaklanjuti	
7.3	Litbang Sumdahan		
	Terwujudnya hasil litbang Puslitbang Sumdahan yang dapat digunakan dalam rangka kepentingan pertahanan negara	<p>a Persentase hasil litbang Puslitbang Sumdahan yang dapat ditindaklanjuti</p> <p>b Persentase rekomendasi hasil litbang Puslitbang Sumdahan yang ditindaklanjuti</p>	<p>85%</p> <p>85%</p>
7.4	Litbang Iptekhan		
	Terwujudnya hasil litbang Puslitbang Iptekhan yang dapat digunakan dalam rangka kepentingan pertahanan negara	<p>a Persentase hasil litbang Puslitbang Iptekhan yang dapat ditindaklanjuti</p> <p>b Jumlah inovasi teknologi dan model/desain/komponen/sub komponen alat peralatan pertahanan yang sesuai kemajuan iptek serta dapat dilanjutkan menjadi prototipe</p>	<p>85%</p> <p>1</p>
7.5	Litbang Alpalhan		
	Terwujudnya hasil litbang Puslitbang Alpalhan yang dapat digunakan dalam rangka kepentingan pertahanan Negara	<p>a Persentase hasil litbang Puslitbang Alpalhan yang dapat ditindaklanjuti</p> <p>b Jumlah model dan atau prototipe hasil litbang yang dapat ditindaklanjuti sebagai <i>First Article (FA)</i></p> <p>c Jumlah Kerja sama Puslitbang Alpalhan dengan Lembaga Litbang lain</p>	<p>85%</p> <p>3</p> <p>3</p>
8.	Badiklat		
	Terwujudnya SDM bidang pertahanan yang memiliki kompetensi dan integritas yang unggul	<p>a Persentase peserta Diklat/kursus yang lulus dengan kategori baik</p> <p>b Persentase lulusan Diklat yang mampu berkinerja lebih baik di Satker/Satuan asal</p> <p>c Indek Kepuasan Peserta Diklat</p>	<p>85%</p> <p>80%</p> <p>3%</p>
8.1	Set Badiklat		

	<p>Terwujudnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Badiklat yang terkini, akurat, terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu</p> <p>Terwujudnya reformasi Birokrasi yang efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi dan berkelanjutan</p>	<p>a Persentase produk perencanaan dan penganggaran Badiklat yang akuntabel</p> <p>b Persentase capaian target program dan kegiatan sesuai Perjanjian Kinerja (PK)</p> <p>c Persentase capaian target penyerapan anggaran yang tepat waktu</p> <p>a Nilai pelaksanaan reformasi birokrasi Badiklat</p> <p>b Nilai akuntabilitas kinerja Badiklat</p> <p>c Nilai laporan keuangan Badiklat</p> <p>d Persentase temuan materiil yang ditindaklanjuti</p>	<p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>80</p> <p>70</p> <p>70</p> <p>85%</p>
8.2	Pus Bahasa		
	Terwujudnya SDM pertahanan yang memiliki kemampuan bahasa yang baik	<p>a Persentase peserta Diklat Bahasa yang lulus dengan kategori baik</p> <p>b Persentase Widyaiswara dan/ atau tenaga pendidik yang bersertifikasi sebagai tenaga pengajar Bahasa</p>	<p>80%</p> <p>80%</p>
8.3	Pus Jemen		
	Terwujudnya Serdiklat Pusdiklat Jemenhan Kemhan/TNI dan K/L lain yang memiliki kemampuan kepemimpinan dan manajerial bidang pertahanan	<p>a Persentase kelulusan Serdiklat Jemenhan dengan kategori baik</p> <p>b Persentase tenaga pendidik Pusdiklat Jemenhan yang tersertifikasi</p>	<p>80%</p> <p>80%</p>
8.4	Pus Tekfunghan		
	Terwujudnya Serdiklat Pusdiklat Tekfunghan Kemhan/TNI dan K/L lain yang memiliki kemampuan teknis dan fungsional pertahanan	<p>a Persentase kelulusan Serdiklat Tekfunghan dengan kategori baik</p> <p>b Persentase lulusan Diklat Tekfunghan yang mampu berkinerja lebih baik di Satker/Satuan asal</p> <p>c Persentase tenaga pendidik Pusdiklat Tekfunghan yang tersertifikasi</p>	<p>80%</p> <p>80%</p> <p>80%</p>

8.5	Pus Belneg		
	Terwujudnya Serdiklat Belneg Kemhan/TNI, K/L dan organisasi lain yang memiliki pengetahuan dan sikap perilaku bela negara	a Persentase kelulusan Serdiklat Belneg dengan kategori baik b Persentase Tenaga Pendidik Belneg yang tersertifikasi	80% 80%
8.6	Unhan		
	Tersedianya lulusan Strata 2 bidang pertahanan yang sesuai standar nasional dan internasional	- Persentase kelulusan Strata 2 bidang pertahanan yang sesuai standar nasional dan internasional dengan kategori "Sangat Memuaskan"	89%
	Tersedianya lulusan Strata 3 bidang pertahanan yang sesuai standar nasional dan internasional	- Persentase kelulusan Strata 3 bidang pertahanan yang sesuai standar nasional dan internasional dengan kategori "Sangat Memuaskan"	0%
	Terwujudnya publikasi penelitian bidang pertahanan Negara dan bela Negara yang sesuai standar mutu	- Persentase publikasi penelitian bidang pertahanan Negara dan bela Negara yang dimuat di Jurnal Nasional dan Internasional	5%
	Terwujudnya pengabdian kepada masyarakat di bidang pertahanan Negara dan Bela Negara sesuai standar nasional	- Jumlah kegiatan pengabdian kepada masyarakat di bidang pertahanan Negara sesuai standar nasional	6
9.	Baranahan		
	Terwujudnya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pertahanan	a Persentase pemenuhan sarana dan prasarana bidang pertahanan dihadapkan kebutuhan b Tingkat efektivitas pemanfaatan pengadaan sarana dan prasarana	95% 100%
9.1	Set Baranahan		
	Terwujudnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Baranahan yang terkini, akurat, terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu	a Persentase produk perencanaan dan penganggaran Baranahan yang akuntabel b Persentase capaian target program dan kegiatan sesuai Perjanjian Kinerja (PK) c Persentase capaian target penyerapan anggaran yang tepat waktu	100% 100% 100%
	Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi	a Nilai pelaksanaan Reformasi Birokrasi Baranahan	80

	dan berkelanjutan	<p>b Nilai akuntabilitas kinerja Baranahan</p> <p>c Nilai laporan keuangan Baranahan</p> <p>d Presentase temuan materiil yang ditindaklanjuti</p>	<p>70</p> <p>70</p> <p>85%</p>
9.2	Pus BMN		
	Terwujudnya pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Kemhan dan TNI yang akuntabel <i>dan up to date</i>	<p>a Persentase aset BMN Kemhan dan TNI yang telah terinventarisir secara tepat dan akuntabel dalam SIMAK BMN</p> <p>b Persentase aset BMN Kemhan dan TNI yang tersertifikasi</p>	<p>100%</p> <p>60%</p>
	Terlaksananya pelaporan BMN untuk mendukung Laporan Keuangan (LK) Kemhan dan TNI	- Persentase UO yang tertib dalam pelaporan BMN dalam mendukung Laporan Keuangan Kemhan dan TNI	100%
9.3	Puskod		
	Terwujudnya kodifikasi materiil pertahanan yang terintegrasi	<p>a Persentase materiil pertahanan yang telah dikodifikasi</p> <p>b Jumlah K/L dan industri nasional yang telah menggunakan kodifikasi dengan sistem Nomor Sediaan Nasional (NSN)</p> <p>c Persentase kerja sama di dalam dan luar negeri bidang kodifikasi yang ditindaklanjuti</p>	<p>79%</p> <p>5</p> <p>75%</p>
	Terwujudnya pengadaan jasa konstruksi pertahanan yang terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu	<p>a Persentase perencanaan teknis yang terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu</p> <p>b Persentase pelaksanaan pengadaan jasa konstruksi yang terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu</p> <p>c Persentase hasil pelaksanaan konstruksi sarana pertahanan yang akuntabel dan tepat waktu</p> <p>d Persentase pengadaan jasa konstruksi sarana pertahanan yang telah <i>e-procurement</i></p>	<p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p>
	Terwujudnya pembangunan sarana dan prasarana pertahanan di Wilayah Perbatasan	- Persentase hasil pembangunan sarana pertahanan di wilayah perbatasan yang akuntabel dan tepat waktu	100%

	Terwujudnya pengadaan barang dan jasa alpalhan yang efektif, efisien, transparan, menjamin kerahasiaan, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel	<p>a Tingkat efektivitas pengadaan barang dan jasa Alpalhan</p> <p>b Persentase pemenuhan barang dan jasa alpalhan dihadapkan dengan rencana kebutuhan</p> <p>c Persentase capaian kinerja pengadaan alpalhan sesuai kontrak yang disepakati</p>	<p>100</p> <p>100%</p> <p>100%</p>
10	Bangtekindhan		
	Terwujudnya pengadaan hasil pengembangan teknologi dan industri pertahanan dalam rangka produksi alutsista industri dalam negeri	- Persentase pengadaan alpalhan yang diperoleh dari kegiatan pemanfaatan hasil pengembangan teknologi dan industri pertahanan dalam negeri	80%
	Tersedianya alutsista industri dalam negeri dalam rangka pertahanan Negara	<p>a Persentase penggunaan alutsista produksi industri dalam negeri dalam rangka pertahanan negara</p> <p>b Persentase kebutuhan alutsista yang dapat dipenuhi dari pengembangan industri mandiri</p>	<p>100%</p> <p>75%</p>
	Terwujudnya pengembangan teknologi dan industri pertahanan dalam rangka <i>First Article</i> (FA)	- Persentase <i>First Article</i> (FA) yang ditindaklanjuti menjadi material yang digunakan user dan/atau dapat diproduksi massal	50%
11	Bainstrahan		
	Terwujudnya keamanan dan ketertiban dalam rangka penyelenggaraan seluruh kegiatan di kawasan instalasi strategis pertahanan	- Persentase gangguan keamanan terhadap penyelenggaraan kegiatan yang dapat diatasi di kawasan instalasi strategis pertahanan	95%
	Tersedianya informasi strategis pertahanan negara yang <i>up-to-date</i>	- Persentase informasi strategis pertahanan negara yang ditindaklanjuti	95%
	Terwujudnya sistem pertahanan siber dalam rangka pertahanan negara	- Persentase insiden siber yang dapat diatasi dalam rangka pertahanan negara	75%
11.1	Set Bainstrahan		
	Terwujudnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Bainstrahan yang terkini, akurat, terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu	<p>a Persentase produk perencanaan dan penganggaran Bainstrahan yang akuntabel</p> <p>b Persentase capaian target program dan kegiatan sesuai</p>	<p>100%</p> <p>100%</p>

		Perjanjian Kinerja (PK)	
	Terwujudnya reformasi birokrasi yang efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi dan berkelanjutan	c Persentase capaian target penyerapan anggaran yang tepat waktu	100%
		a Nilai pelaksanaan reformasi birokrasi Bainstrahan Kemhan	80
		b Nilai pelaksanaan reformasi birokrasi Bainstrahan	70
		c Nilai laporan keuangan Bainstrahan Kemhan	70
		d Presentase temuan materiil yang ditindaklanjuti	85%
11.2	Pus Pamhar		
	Terwujudnya pengamanan kawasan instalasi strategis pertahanan	- Persentase gangguan keamanan di kawasan instalasi strategis pertahanan yang dapat diatasi	95%
	Terwujudnya pemeliharaan dan pembangunan kawasan instalasi strategis pertahanan	- Persentase aset kawasan instalasi strategis pertahanan yang terpelihara	95%
	Terwujudnya kerja sama kawasan instalasi strategis pertahanan	- Persentase kerja sama kawasan instalasi strategis pertahanan yang terealisasi	95%
11.3	Pus Infostrahan		
	Terwujudnya pengelolaan informasi strategis pertahanan dalam dan luar negeri yang akurat, lengkap dan terkini	a Persentase informasi strategis pertahanan dalam dan luar negeri yang ditindaklanjuti	95%
		b Persentase kajian strategis pertahanan dalam dan luar negeri yang ditindaklanjuti	95%
		c Persentase penyajian intelijen strategis pertahanan yang ditindaklanjuti	95%
11.4	Pushan Siber		
	Terwujudnya sistem pertahanan siber dalam rangka pertahanan negara yang mampu menghadapi ancaman dan serangan siber global	a Persentase jaringan Intranet Kemhan yang terlindungi oleh perimeter pertahanan siber dari serangan siber global	60%
		b Persentase hasil pemantauan dan analisa terhadap serangan siber global yang ditindaklanjuti	60%

		c Persentase kesiapan operasional infrastruktur siber	30%
--	--	---	-----

- c. Jumlah Anggaran UO Kemhan Tahun 2020 sebesar Rp. 21.542.503.185.000,- dengan rincian sebagai berikut:

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
1	2	3
1.	Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kemhan	2.771.845.724.000,-
	a. Pengelolaan sistem informasi pertahanan negara	121.261.852.000,-
	b. Pelaksanaan, Administrasi pembiayaan, pembinaan, pengendalian dan pelaporan keuangan pertahanan	28.241.620.000,-
	c. Pelayanan bantuan hukum	13.812.374.000,-
	d. Pelayanan rehabilitasi dan perumahnyasakit	167.242.463.000,-
	e. Dukungan pelayanan umum UO Kemhan	330.897.315.000,-
	f. Dukungan peningkatan sarana dan prasarana aparatur UO Kemhan	39.591.959.000,-
	g. Dukungan pembinaan dan pengelolaan pegawai UO Kemhan	51.371.679.000,-
	h. Dukungan perencanaan anggaran dan keuangan UO Kemhan	1.869.061.569.000,-
	i. Dukungan administrasi pelayanan pimpinan dan keprotokolan UO Kemhan	81.296.996.000,-
	j. Pelayanan hubungan kemasyarakatan	31.131.856.000,-
	k. Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan, Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja UO Kemhan	15.204.063.000,-
	l. Pelaksanaan Kelaikan Sarana Pertahanan	11.095.572.000,-
	m. Penyusunan Perancangan Peraturan Perundang-undangan Bidang Pertahanan	11.636.406.000,-
2.	Program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Kemhan	67.742.459.000,-
	a. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Itjen Kemhan	62.887.393.000,-
	b. Pengawasan terhadap Ditjen Renhan, Kuathan, Baranahan, Badiklat, Bainstrahan, Puslaik, Pusrehab dan Kantor wilayah Barat	971.050.000,-
	c. Pengawasan terhadap Setjen, Ditjen Strahan, Pothan, Balitbang, Unhan, Pusdatin, Puslapbinkuhan dan Kantor wilayah Timur	971.050.000,-
	d. Pengawasan terhadap Manset UO Mabes TNI, UO TNI AU dan pengelolaan dana PNBPUO TNI AU	971.050.000,-
	e. Pengawasan terhadap Manset UO TNI AD dan pengelolaan dana PNBPUO TNI AD	971.050.000,-
	f. Pengawasan terhadap YKPP, PT. Asabri, Manset UO TNI AL dan pengelolaan PNBPUO TNI AL	970.866.000,-
3.	Program strategi pertahanan	100.188.717.000,-

	a. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen Strahan Kemhan	64.750.401.000,-
	b. Perumusan kebijakan strategis dan kebijakan implementatif	6.667.037.000,-
	c. Kerjasama Internasional	18.238.957.000,-
	d. Perumusan kebijakan pengeralahan komponen pertahanan	4.959.283.000,-
	e. Pengelolaan wilayah pertahanan	5.573.039.000,-
4.	Program perencanaan umum dan penganggaran pertahanan	78.811.952.000,-
	a. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen Renhan Kemhan	59.644.057.000,-
	b. Administrasi dan pelaksanaan anggaran	3.033.789.000,-
	c. Pengendalian program dan anggaran	4.926.503.000,-
	d. Perencanaan pembangunan pertahanan	4.807.268.000,-
	e. Perencanaan program dan anggaran	6.400.335.000,-
5.	Program potensi pertahanan	258.444.199.000,-
	a. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen Pothan Kemhan	65.490.384.000,-
	b. Pembinaan keveteteranan	7.737.601.000,-
	c. Pembinaan kesadaran bela negara	26.005.853.000,-
	d. Pembinaan potensi teknologi dan industri pertahanan	124.793.124.000,-
	e. Penyiapan Sumber Daya Pertahanan	9.213.628.000,-
	f. Program Pengembangan Teknologi dan Industri Pertahanan	25.203.609.000,-
6.	Program kekuatan pertahanan	116.131.034.000,-
	a. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen Kuathan Kemhan	57.959.477.000,-
	b. Pembinaan fasilitas dan jasa pertahanan	27.370.492.000,-
	c. Pembinaan kesehatan pertahanan	13.795.376.000,-
	d. Pembinaan materil pertahanan	3.884.102.000,-
	e. Pembinaan personel pertahanan	13.121.587.000,-
7.	Program penelitian dan pengembangan Kemhan	236.322.083.000,-
	a. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Balitbang Kemhan	50.678.413.000,-
	b. Penelitian dan pengembangan strategi pertahanan	2.878.377.000,-
	c. Penelitian dan pengembangan alat peralatan pertahanan	20.568.116.000,-
	d. Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pertahanan	9.648.325.000,-
	e. Penelitian dan pengembangan sumber daya pertahanan	152.548.852.000,-
8.	Program pendidikan dan pelatihan Kemhan/TNI	309.361.615.000,-
	a. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Badiklat Kemhan	90.845.509.000,-
	b. Pendidikan dan pelatihan Bahasa	10.113.331.000,-
	c. Pendidikan dan pelatihan manajemen pertahanan	8.129.699.000,-
	d. Pendidikan dan pelatihan teknis fungsional pertahanan	8.097.331.000,-
	e. Pendidikan dan pelatihan Bela Negara	4.933.200.000,-
	f. Penyelenggaraan pendidikan tinggi pertahanan	187.242.545.000,-

9.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Kemhan	15.092.270.227.000,-
	a. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Baranahan Kemhan	55.676.455.000,-
	b. Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)	11.366.622.000,-
	c. Kodifikasi materiil pertahanan	7.414.306.000,-
	d. Pengadaan jasa konstruksi pertahanan	260.443.090.000,-
	e. Pembangunan sarana dan prasarana pertahanan di wilayah perbatasan	186.000.000.000,-
	f. Pengadaan barang dan jasa militer	14.571.369.754.000,-
10.	Program pengembangan teknologi dan industri Pertahanan	2.469.150.000.000,-
	- Produksi Alutsista industri dalam negeri dan pengembangan Pinak industri pertahanan	2.469.150.000.000,-
11.	Program pembinaan instalasi strategis nasional	67.438.784.000,-
	a. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Bainstranas Kemhan	43.015.579.000,-
	b. Pengelolaan Informasi Strategis Pertahanan	4.574.969.000,-
	c. Pengelolaan Kawasan Instalasi Strategis	12.598.236.000,-
	d. Pengelolaan Pertahanan Siber	7.250.000.000,-

Jakarta, 3 Juni 2020

Pihak Kedua

Menteri Pertahanan,

ttd

Prabowo Subianto

Pihak Pertama

Sekretaris Jenderal

selaku

Kepala Unit Organisasi Kemhan,

ttd

Donny Ermawan T., M.D.S.
Marsekal Madya TNI

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

8. Capaian Kinerja Organisasi.

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja Unit Organisasi Kemhan (UO Kemhan) tahun 2020 telah melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Rancangan Renstra UO Kemhan tahun 2020-2024. Akuntabilitas Kinerja UO Kemhan merupakan wujud pertanggungjawaban UO Kemhan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai sasaran program dan kegiatan sesuai dengan tujuan, visi dan misi yang telah ditetapkan. Akuntabilitas Kinerja secara sistematis meliputi pengukuran

capaian indikator kinerja utama, evaluasi dan analisis capaian kinerja serta akuntabilitas keuangan. Selanjutnya pada tahun berjalan dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2020, terjadinya pergantian jabatan Sekjen Kemhan selaku Kepala UO Kemhan mengakibatkan dilakukan *review* Perjanjian Kinerja UO Kemhan Tahun 2020. Sehubungan adanya kebijakan Presiden Joko Widodo terkait Pandemi Covid 19 yang melanda seluruh dunia khususnya di Indonesia, maka dilakukan kebijakan penghematan anggaran (*refocussing*) bagi Kementerian dan Lembaga dalam rangka penanggulangan Covid 19, dan sebagai tindaklanjut kebijakan Presiden tersebut dalam hal ini UO Kemhan telah melakukan *refocussing* anggaran dengan adanya pengurangan dan penambahan anggaran tahun 2020 untuk digunakan penanggulangan Covid 19 di lingkungan Kemhan dan TNI. Sehubungan dengan adanya kebijakan *refocussing* anggaran UO Kemhan tersebut dilakukan dinamis sampai akhir triwulan III tahun 2020, maka Satker/Subsatker diwajibkan merevisi program dan kegiatan sesuai dengan Revisi Alokasi Anggaran. Mengingat pelaksanaan program dan kegiatan sudah masuk triwulan IV sehingga UO Kemhan lebih fokus terhadap pencapaian target kinerja, sehingga sampai akhir Triwulan IV belum dapat dilakukan *Review* Perjanjian Kinerja sesuai dengan *Refocussing* Anggaran tahun 2020.

Capaian kinerja UO Kemhan tahun 2020 merupakan informasi kinerja mengenai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan sasaran program dan kegiatan serta indikator kinerja utama sebagaimana tertuang dalam Perjanjian UO Kemhan tahun 2020 dapat diuraikan secara detail sebagai berikut:

a. Realisasi Kinerja UO Kemhan Tahun 2020 sesuai dengan IKU Kemhan

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja UO Kemhan Tahun 2020.

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2020 (%)	REALISASI 2020 (%)	CAPAIAN 2020 (%)
1.	Terwujudnya pengelolaan sisinfohaneg dan infrastrukturnya yang aman, handal dan terintegrasi	a. Indek Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kemhan	3	3	3
		b. Persentase kesiapan operasional aplikasi teknologi informasi dan komunikasi	95	95	95
		c. Persentase kesiapan operasional infrastruktur jaringan	95	95	95
		d. Tingkat keamanan sistem informasi pertahanan negara dan persandian	3	3	3
	Terwujudnya pengelolaan keuangan yang memadai dan berkelanjutan dalam rangka mendukung pertahanan negara	a. Persentase Laporan Keuangan (LK) UO yang memadai	80	93,31	100
		b. Opini Laporan Keuangan (LK) Kemhan	WTP	WTP	100
		c. Nilai Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	70	70	100
		d. Persentase kesesuaian antara neraca dan Laporan Realisasi Anggaran	100	100	100

		(LRA) Kemhan dan TNI			
		e Persentase kesesuaian nilai bidang keuangan dengan Laporan BMN	80	80	100
		d Persentase rekomendasi BPK atas laporan keuangan satker Puslapbinkuhan yang telah ditindaklanjuti	100	100	100
	Terwujudnya bantuan hukum yang akuntabel dan tepat waktu	a Persentase perkara hukum yang dapat diselesaikan.	45	45	45
		b Persentase nasihat hukum ya yang ditindaklanjuti	50	50	50
		c Tingkat pemahaman peserta terhadap Peraturan Perundang-undangan yang disuluhkan	3	3	3
	Meningkatnya penyandang disabilitas personel TNI dan PNS Kemhan yang memperoleh pelayanan rehabilitasi terpadu hingga menjadi SDM profesional, mandiri dan <i>entrepreneurship</i>	a Persentase penyandang disabilitas personel TNI dan PNS Kemhan yang berhasil direhabilitasi sampai profesional dan mandiri	35	35	100
		b Persentase penyandang disabilitas personel TNI dan PNS Kemhan yang memiliki motivasi <i>entrepreneurship</i> (kewirausahaan)	10	10	100
		c Persentase penyandang disabilitas personel TNI yang direhabilitasi medik paripurna <i>return to combat</i>	10	10	100
		d Tingkat kepuasan penyandang disabilitas personel TNI dan PNS Kemhan terhadap rehabilitasi yang diterima dari Pusrehab	90	90	100
	Meningkatnya pelayanan perumahsakitkan sesuai standar	a Kategori Akreditasi SNARS dari Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS)	Paripurna Bintang 5	Paripurna Bintang 5	100
		b Persentase kesesuaian penarikan dana PNBK Rumah Sakit dr. Suyoto	85	85	100
	Terwujudnya pelayanan umum terhadap Satker/ Subsatker di lingkungan Kemhan	a Indeks kepuasan pegawai terhadap pelayanan umum (<i>Employee Satisfaction Index</i>)	75	75	100
		b Persentase penggunaan <i>e-procurement</i> terhadap belanja pengadaan barang dan jasa	40	40	40
	Meningkatnya pengelolaan sarpras UO Kemhan	a Persentase aset BMN UO Kemhan yang terinventarisasi	100	100	100

		risir dalam SIMAK BMN			
		b Persentase sarpras UO Kemhan yang terpelihara	100	100	100
		c Persentase kesesuaian nilai keuangan dengan laporan BMN	100	100	100
	Terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) pegawai Kemhan yang profesional	a Indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Kemhan	71	72	101
		b Indeks kepuasan pegawai Kemhan	77	77	100
	Terwujudnya pegawai Kemhan yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi berdasarkan <i>merit system</i>	- Indeks <i>merit system</i>	0,63	0,63	0,63
	Terwujudnya perencanaan, pelaksanaan, pengendalian anggaran dan pelaporan keuangan UO Kemhan yang akuntabel dan tepat waktu	a Persentase dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian anggaran satker/ subsatker dengan kualitas baik yang efektif dan efisien	100	100	100
		b Nilai Laporan Keuangan Satker/Subsatker UO Kemhan	70	75	100
		c Nilai Laporan Keuangan UO Kemhan	85	85	100
	Terselenggaranya pelayanan administrasi umum, kearsipan dan ketatausahaan yang akuntabel dan tepat waktu	a Indeks kearsipan	77	77	100
		b Persentase satker yang menerapkan administrasi umum kearsipan dengan benar	75	75	100
	Terselenggaranya keprotokolan pimpinan UO Kemhan yang berjalan dengan lancar, aman dan tertib	a Persentase kegiatan keprotokolan pimpinan yang berjalan dengan lancar, aman dan tertib	90	90	100
		b Persentase kegiatan keprotokolan pimpinan yang ditindaklanjuti oleh Satker/ Subsatker Kemhan dalam rangka kerja sama di suatu bidang	80	80	100
	Terwujudnya penataan organisasi yang tepat ukuran, tepat fungsi dan tepat proses	a Indeks kelembagaan	75	75	100
		b Persentase satker yang telah tertata secara kelembagaan yang memenuhi aspek: tepat ukuran, tepat fungsi dan tepat proses di lingkungan UO Kemhan	75	75	100
	Terwujudnya ketatalaksanaan yang efektif,	a Indeks ketatalaksanaan	75	75	100

	efisien dan akuntabel	b Persentase Standar Operasional Prosedur (SOP) administrasi pemerintah UO Kemhan yang telah dilaksanakan secara efektif dan efisien	75	75	100
	Terwujudnya Reformasi Biro-krasi yang efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi dan berkelanjutan	a Nilai pelaksanaan reformasi birokrasi satker/subsatker	73	73	100
		b Persentase satker yang telah melaksanakan reformasi birokrasi secara efektif dan efisien	80	80	100
	Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang akuntabel dan tepat waktu	a Nilai Penyelenggaraan SAKIP satker/subsatker	71	71	100
		b Persentase satker yang menerapkan manajemen SAKIP secara terintegrasi dan akuntabel di lingkungan UO Kemhan	70	70	100
	Tersusunnya regulasi di bidang pertahanan	a Persentase regulasi bidang pertahanan yang dapat diselesaikan	50	100	100
	Terlaksananya asistensi hukum internasional bidang pertahanan	b Persentase pelaksanaan asistensi hukum internasional bidang pertahanan yang dapat diselesaikan secara tepat waktu	50	100	100
	Meningkatnya citra positif Kemhan/TNI di masyarakat, dan forum Internasional	a Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan informasi pertahanan negara dan pengaduan masyarakat	3	3	100
		b Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	89,2	89,2	98,65
		c Nilai kepatuhan pelaksanaan UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	101	101	100
		d Jumlah <i>image building</i> yang dipublikasikan melalui media nasional	540	540	100
		e Indeks Keterbukaan Informasi Publik	66,35	66,35	84
		f Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik	75	75	100
	Terselenggaranya sertifikasi kelaikan sarana dan prasarana pertahanan serta personel Puslaik Kemhan	a Persentase sertifikasi kelaikan yang terlaksana sesuai dengan regulasi kelaikan	100	100 93	100
		b Persentase sarpras yang mendapat sertifikasi kelaikan	100	100 93	100

		c Jumlah personel inspektur kelaikan yang memiliki sertifikasi kelaikan Kemhan	160 orang	100 orang	62,50
2	Terwujudnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Itjen yang terkini, akurat, terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu	a Persentase produk perencanaan dan penganggaran Itjen yang akuntabel b Persentase capaian target program dan kegiatan sesuai Perjanjian Kinerja (PK) c Persentase capaian target penyerapan anggaran yang tepat waktu	100 100 100	100 100 100	100 100 100
	Terwujudnya reformasi birokrasi yang efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi dan berkelanjutan	a Nilai pelaksanaan reformasi birokrasi Itjen b Nilai akuntabilitas kinerja Itjen c Nilai laporan keuangan Itjen d Persentase temuan materiil yang ditindaklanjuti	80 70 70 85	80 70 70 85	100 100 100 100
	Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas aparatur Kemhan dibidang Pengawasan Inspektorat I	a Presentase menurunnya temuan dibidang pengadaan barang dan jasa melalui audit, <i>review</i> , evaluasi, verifikasi dan pemantauan b Presentase jawaban satker yang sesuai dengan rekomendasi hasil pemeriksaan terhadap satker dalam pengawasan bidang pengadaan barang dan jasa	10 95	10 95	100 100
	Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas aparatur Kemhan di bidang Pengawasan Inspektorat II	a Presentase menurunnya temuan dibidang pengadaan barang dan jasa melalui audit, <i>review</i> , evaluasi, verifikasi dan pemantauan b Presentase jawaban satker yang sesuai dengan rekomendasi hasil pemeriksaan terhadap satker dalam pengawasan bidang pengadaan barang dan jasa	10 95	10 95	100 100

	Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas aparatur Kemhan di bidang Pengawasan Inspektorat III	<p>a Presentase menurunnya temuan dibidang SDM, hukum, manajemen dan layanan publik melalui audit, <i>review</i>, evaluasi, verifikasi dan pemantauan</p> <p>b Presentase jawaban satker yang sesuai dengan rekomendasi hasil pemeriksaan terhadap satker dalam pengawasan bidang SDM, hukum, manajemen dan layanan publik</p>	10	10	100
			10	10	100
	Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas aparatur Kemhan di bidang pengawasan Inspektorat IV	<p>a Presentase menurunnya temuan dibidang BMN dan logistik melalui audit, <i>review</i>, evaluasi, verifikasi dan pemantauan</p> <p>b Presentase jawaban satker yang sesuai dengan rekomendasi hasil pemeriksaan terhadap Satker dalam pengawasan bidang BMN dan logistik</p>	10	10	100
			95	95	100
	Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas aparatur Kemhan di bidang pengawasan Inspektorat V	<p>a Presentase menurunnya temuan dibidang organisasi, tatalaksana, kinerja dan PDTT melalui audit, <i>review</i>, evaluasi, verifikasi dan pemantauan</p> <p>b Presentase jawaban satker yang sesuai dengan rekomendasi hasil pemeriksaan terhadap satker dalam pengawasan bidang organisasi, tatalaksana, kinerja dan PDTT</p> <p>c Persentase satker yang tertib dalam melaksanakan PMPRB dan e-Sakip <i>review</i> secara akuntabel dan tepat waktu</p>	10	10	100
			95	95	100
			100	100	100
3	Terwujudnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen Strahan yang terkini, akurat, terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu	<p>a Persentase produk perencanaan dan penganggaran Ditjen Strahan yang akuntabel</p> <p>b Persentase capaian target program dan kegiatan sesuai Perjanjian Kinerja (PK)</p> <p>c Persentase capaian target penyerapan anggaran yang tepat waktu</p>	100	100	100
	Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang efektif,	a Nilai pelaksanaan reformasi birokrasi Ditjen	80	80	100

	efisien, terukur, konsisten, terintegrasi dan berkelanjutan	Strahan b Nilai akuntabilitas kinerja Ditjen Strahan c Nilai laporan keuangan Ditjen Strahan d Persentase temuan materiil yang ditindaklanjuti	70 70 85	70 70 85	100 100 100
	Terwujudnya kebijakan strategis pertahanan negara yang dapat dipedomani dan diimplementasikan untuk kepentingan pertahanan negara	a Persentase kebijakan strategis pertahanan yang diimplementasikan K/L terkait untuk kepentingan pertahanan negara b Persentase K/L yang faham terhadap kebijakan strategi pertahanan	80 83	80 83	100 100
	Terwujudnya peningkatan kualitas diplomasi pertahanan dalam rangka mencapai kepentingan nasional dalam pertahanan di forum internasional	a Persentase perjanjian kerja sama bilateral dengan negara sahabat di bidang pertahanan yang terealisasi b Persentase perjanjian kerja sama multilateral dengan negara sahabat di bidang pertahanan yang terealisasi c Persentase kegiatan bilateral, regional dan multilateral di bidang pertahanan yang ditindaklanjuti dalam kerja sama antar negara d Persentase negara sahabat yang melakukan pertukaran perwira siswa dengan Kemhan/TNI	85 88 80 90	85 88 80 90	100 100 100 100
	Terwujudnya kebijakan pengerahan komponen per tahanan negara yang dapat dipedomani dan diimplementasikan untuk kepentingan pertahanan negara	a Persentase K/L yang mengimplementasikan kebijakan pengerahan komponen pertahanan negara b Tingkat pemahaman K/L terhadap kebijakan pengerahan komponen pertahanan negara c Persentase keberhasilan misi pemeliharaan perdamaian	65 70 100	65 70 100	100 100 100
	Terwujudnya kebijakan wilayah pertahanan yang dapat dipedomani dan diimplementasikan untuk kepentingan pertahanan	- Persentase K/L dan/atau Pemda yang mengimplementasikan kebijakan wilayah pertahanan	70	70	100

	negara				
	Terwujudnya penataan wilayah pertahanan yang terintegrasi	a Jumlah wilayah pertahanan (RWP dan RRWP) yang tertata dan terbina	6.190	6.190	100
		b Jumlah locus/fasilitas yang dinyatakan siap digunakan sebagai wilayah pertahanan	436	436	100
	Terwujudnya penetapan dan pengelolaan batas negara dan kawasan perbatasan	a Persentase batas wilayah negara di darat, laut dan udara yang telah disepakati	39	39	100
		b Persentase pelanggaran batas wilayah negara yang dapat diatasi	80	80	100
4	Terwujudnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen Renhan yang terkini, akurat, terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu	a Persentase perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta pelaporan Sub-satker dengan kategori baik di lingkungan Ditjen Renhan Kemhan	100	100	100
		b Persentase capaian target program dan kegiatan sesuai Perjanjian Kinerja (PK)	100	100	100
		c Persentase capaian target penyerapan anggaran yang tepat waktu	100	100	100
	Terwujudnya reformasi birokrasi yang efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi dan berkelanjutan	a Nilai pelaksanaan reformasi birokrasi Ditjen Renhan	80	80	100
		b Nilai akuntabilitas kinerja Ditjen Renhan	70	70	100
		c Nilai laporan keuangan Ditjen Renhan	70	70	100
		d Persentase temuan materiil yang ditindaklanjuti	85	85	100
	Terwujudnya kebijakan di bidang administrasi pelaksanaan anggaran pertahanan UO Kemhan dan TNI yang terimplementasi	- Persentase kebijakan di bidang administrasi pelaksanaan anggaran pertahanan yang diimplementasikan oleh UO Kemhan dan TNI	100	100	100
	Terwujudnya pelaksanaan dan fasilitasi kebijakan administrasi pelaksanaan anggaran yang terintegrasi,	- Persentase pelaksanaan fasilitasi kebijakan di bidang administrasi pelaksanaan anggaran pertahanan yang terintegrasi, akuntabel dan	100	100	100

	akuntabel dan tepat waktu	tepat waktu			
	Terwujudnya pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi pelaksanaan anggaran yang terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu	a Persentase pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi pelaksanaan anggaran pertahanan yang terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu	100	100	100
		b Persentase realisasi pelaksanaan anggaran UO Kemhan dan TNI dihadapkan dengan target yang ditetapkan	100	100	100
		c Persentase UO yang telah memenuhi aspek pelaksanaan anggaran dalam rangka tertib administrasi	100	100	100
	Terwujudnya kebijakan di bidang pengendalian program dan anggaran pertahanan yang terimplementasikan	- Persentase kebijakan di bidang pengendalian program dan anggaran pertahanan yang diimplementasikan oleh UO Kemhan dan TNI	100 5 UO	100	100
	Terwujudnya pengendalian program dan anggaran tahunan UO Kemhan dan TNI yang terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu	a Persentase pengendalian terhadap pelaksanaan program dan anggaran tahunan UO Kemhan dan TNI yang terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu	100 5 UO	100	100
		b Persentase penurunan revisi terhadap produk pengendalian program dan anggaran	15	15	100
	Terwujudnya pola pengelolaan keuangan PNPB UO Kemhan dan TNI	- Persentase realisasi penerimaan negara bukan pajak UO Kemhan dan TNI	100	100	100
	Terwujudnya akuntabilitas kinerja Kemhan dan TNI di bidang pelaksanaan anggaran yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku	a Persentase laporan kinerja UO yang akuntabel dan tepat waktu	100	100	100
		b Nilai laporan kinerja Kemhan dan TNI dalam indeks hasil evaluasi AKIP	11	11	11
	Terwujudnya kebijakan di bidang perencanaan pembangunan pertahanan yang implementatif	- Persentase kebijakan di bidang perencanaan pembangunan yang diimplementasikan UO Kemhan dan TNI	100	100	100
	Terwujudnya dokumen perencanaan pembangunan pertahanan Negara jangka menengah (Renstra) dan jangka pendek (Renja tahunan) yang dapat di implementasikan oleh	a Nilai produk perencanaan kinerja dalam indeks Hasil evaluasi AKIP	25	25	100
		b Persentase dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah dan jangka pendek UO Kemhan/TNI	100	100	100

	seluruh UO	yang dapat diimplementasikan			
		c Persentase keselarasan dokumen perencanaan UO terhadap dokumen perencanaan Kemhan /TNI	100	100	100
	Terwujudnya kebijakan di bidang perencanaan program dan anggaran pertahanan	- Persentase kebijakan di bidang perencanaan program dan anggaran pertahanan yang diimplementasikan oleh UO Kemhan dan TNI	100	100	100
	Terwujudnya perencanaan pembiayaan program pembangunan jangka pendek (tahunan) Kemhan, Mabes TNI, TNI AD, TNI AL dan TNI AU yang terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu	a Persentase perencanaan pembiayaan program pembangunan jangka pendek (tahunan) Kemhan, Mabes TNI, TNI AD, TNI AL, dan TNI AU yang terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu	100	100	100
		b Persentase penurunan revisi terhadap produk perencanaan program dan anggaran	15	15	100
5	Terwujudnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen Pothan yang terkini, akurat, terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu	a Persentase produk perencanaan dan penganggaran Ditjen Pothan yang akuntabel	100	100	100
		b Persentase capaian target program dan kegiatan sesuai Perjanjian Kinerja (PK)	100	100	100
		c Persentase capaian target penyerapan anggaran yang tepat waktu	100	100	100
	Terwujudnya reformasi birokrasi yang efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi dan berkelanjutan	a Nilai Pelaksanaan reformasi birokrasi Ditjen Renhan	80	80	100
		b Nilai akuntabilitas kinerja Ditjen Pothan	70	70	100
		c Nilai laporan keuangan Ditjen Pothan	70	70	100
		d Persentase temuan materiil yang ditindaklanjuti	85	85	100
		Terwujudnya kebijakan di bidang Keveteranan RI yang implementatif	- Persentase K/L yang mengimplementasikan kebijakan di bidang Keveteranan RI	65	65
	Terwujudnya kesejahteraan Veteran RI	a Persentase Veteran RI yang memperoleh pelayanan secara	100	100	100

		akuntabel dan tepat waktu			
		b Persentase penanganan pengaduan Veteran yang telah ditindaklanjuti	100	100	100
	Terwujudnya kebijakan di bidang Bela Negara yang implementatif	- Persentase K/L atau pemda dan komponen bangsa lainnya yang mengimplementasikan kebijakan di bidang Bela Negara	50	40	80
	Terwujudnya kesadaran dan pemahaman warga negara terhadap Bela Negara	- Tingkat kesadaran dan pemahaman warga negara terhadap Bela Negara	25	-	-
	Terwujudnya kesiapan kader Bela Negara	a Persentase kader Bela Negara yang terbentuk	65	65	65
		b Persentase kader Bela Negara yang telah tertata dan terbina	85	85	85
	Terwujudnya sumdahan yang siap digunakan untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama	a Persentase peraturan dan kebijakan di bidang Sumdahan yang telah diimplementasikan	10	10	100
		b Persentase rekomendasi potensi komcad yang telah tertata dan terbina	13	13	100
		c Persentase potensi Sumber Daya Manusia (SDM) Pendukung Pertahanan yang telah tertata dan terbina	25	20	80
		d Persentase potensi Sumber Daya Alam dan Buatan (SDAB) pendukung pertahanan yang telah tertata dan terbina	13	10,4	80
		e Persentase potensi Sarana Prasarana (Sarpras) pendukung pertahanan yang telah tertata dan terbina	15	12	80
	Terwujudnya kebijakan di bidang tekndhan yang implementatif	- Persentase K/L yang mengimplementasikan kebijakan di bidang ekindhan	65	65	100
	Tersedianya industri pertahanan yang dapat dikembangkan secara mandiri	- Persentase industri potensial yang dapat ditetapkan sebagai industri pertahanan	60	60	100
	Terpenuhinya kebutuhan alpalhankam produksi dalam negeri secara bertahap	a Persentase produksi alpalhankam dalam negeri yang tepat waktu dan akuntabel	100	-	-
		b Persentase implementasi Kandungan Lokal dan	25	25	100

		Ofset (KLO) yang terlaksana dalam pengadaan alpalhankam luar negeri			
		c Persentase kerja sama industri pertahanan yang terealisasi	50	25	50
6	Terwujudnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen Kuathan yang terkini, akurat, terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu	a Persentase produk perencanaan dan penganggaran Ditjen Kuathan yang akuntabel	100	100	100
		b Persentase capaian target program dan kegiatan sesuai Perjanjian Kinerja (PK)	100	100	100
		c Persentase capaian target penyerapan anggaran yang tepat waktu	100	100	100
	Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi dan berkelanjutan	a Nilai pelaksanaan reformasi birokrasi Ditjen Kuathan	80	80	100
		b Nilai akuntabilitas kinerja Ditjen Kuathan Kemhan	70	70	100
		c Nilai laporan keuangan Ditjen Kuathan Kemhan	70	70	100
		d Presentase temuan materiil yang ditindaklanjuti	85	85	100
	Terwujudnya kesiapan dukungan dan pelayanan kesehatan komponen utama pertahanan negara	a Persentase tenaga kesehatan yang siap operasional dalam mendukung OMP dan OMSP	80	97	121,25
		b Persentase pemenuhan tenaga kesehatan dalam pelayanan kesehatan	80	68	85
		c Tingkat kesiapan fasilitas kesehatan dalam rangka dukungan kesehatan	85	62	72,94
		d Tingkat kesiapan fasilitas kesehatan dalam rangka pelayanan kesehatan	80	80	100
	Terwujudnya kebijakan di bidang pembinaan materiil komponen utama pertahanan yang implementatif	- Persentase kebijakan di bidang pembinaan materiil komponen utama pertahanan yang diimplementasikan	80	80	106,25
	Terwujudnya pengelolaan alpalhankam (BMN selain tanah, bangunan dan BMP)	a Persentase pemenuhan rencana kebutuhan alpalhankam dihadapkan pencapaian MEF aspek fisik bidang alutsista	75	62,57	83,42

		b Persentase penghapusan dan hibah BMN selain tanah, bangunan dan BMP yang terealisasi	80	91	113,75
		c Persentase rekomendasi/ perizinan terhadap penggunaan senjata standar militer dan penggunaan bahan peledak yang ditindaklanjuti	80	85	106,25
		d Persentase rumusan Standar Militer Indonesia (SMI) yang dikeluarkan	80	-	-
	Terwujudnya kebijakan di bidang fasilitas dan jasa yang implementatif.	- Persentase kebijakan di bidang fasilitas dan jasa yang dapat diimplementasikan.	80	80	100
	Terwujudnya kesiapan fasilitas dan jasa dalam rangka mendukung pertahanan negara.	a Persentase pangkalan dan daerah latihan yang siap digunakan oleh UO TNI dan Angkatan.	85	85	100
		b Persentase fasilitas pangkalan tanah dan bangunan yang telah tersertifikasi	60	71,5	119
		c Persentase pemenuhan pelayanan LTGA di bidang fasilitas dan jasa dihadapkan dengan kebutuhan Kemhan dan TNI	80	80	100
		d Persentase kesiapan bidang BBMP fasilitas dan jasa dihadapkan dengan kebutuhan Kemhan dan TNI	80	80	100
		e Tingkat kesiapan telekomunikasi dalam mendukung pertahanan negara di lingkungan Kemhan dan TNI	85	85	100
	Terwujudnya kebijakan di bidang sumber daya manusia komponen utama pertahanan negara	- Persentase kebijakan di bidang SDM komponen utama pertahanan negara yang diimplementasikan	90	87	96,66
	Terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) komponen utama pertahanan negara yang profesional	a Persentase sumber daya manusia Komponen Utama pertahanan negara yang profesional	80	80	100
		b Persentase pemenuhan sumber daya manusia komponen utama	80	75	93,75

		dihadapkan dengan kebutuhan			
7	Terwujudnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Balitbang yang terkini, akurat, terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu	a Persentase produk perencanaan dan penganggaran Balitbang yang akuntabel	100	100	100
		b Persentase capaian target program dan kegiatan sesuai Perjanjian Kinerja (PK)	100	100	100
		c Persentase capaian target penyerapan anggaran yang tepat waktu	100	100	100
	Terwujudnya reformasi birokrasi yang efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi dan berkelanjutan	a Nilai pelaksanaan reformasi birokrasi Balitbang Kemhan	80	80	100
		b Nilai akuntabilitas kinerja Balitbang Kemhan	70	70	100
		c Nilai laporan keuangan Balitbang Kemhan	70	70	100
		d Presentase temuan materiil yang ditindaklanjuti	85	85	100
	Terwujudnya hasil litbang Puslitbang Strahan yang dapat digunakan dalam rangka kepentingan pertahanan negara	a Persentase hasil litbang Puslitbang Strahan yang dapat ditindaklanjuti	85 (6)	100 (6)	100 (6)
		b Persentase rekomendasi hasil Litbang Puslitbang Strahan yang ditindaklanjuti	85 (6)	100 (6)	100 (6)
	Terwujudnya hasil litbang Puslitbang Sumdahan yang dapat digunakan dalam rangka kepentingan pertahanan negara	a Persentase hasil litbang Puslitbang Sumdahan yang dapat ditindaklanjuti	85 (7)	100 (7)	100 (7)
		b Persentase rekomendasi hasil litbang Puslitbang Sumdahan yang ditindaklanjuti	85 (7)	100 (7)	100 (7)
	Terwujudnya hasil litbang Puslitbang Iptekhan yang dapat digunakan dalam rangka kepentingan pertahanan negara	a Persentase hasil litbang Puslitbang Iptekhan yang dapat ditindaklanjuti	85 (4)	100 (4)	100 (4)
		b Jumlah inovasi teknologi dan model/desain/komponen/sub komponen alat peralatan pertahanan yang sesuai kemajuan Iptek serta dapat dilanjutkan menjadi prototipe	85 (4)	100 (4)	100 (4)

	Terwujudnya hasil litbang Puslitbang Alpalhan yang dapat digunakan dalam rangka kepentingan pertahanan negara	<p>a Persentase hasil litbang Puslitbang Alpalhan yang dapat ditindaklanjuti</p> <p>b Jumlah model dan atau prototipe hasil litbang yang dapat ditindaklanjuti sebagai <i>First Article</i> (FA)</p> <p>c Jumlah kerja sama Puslitbang Alpalhan dengan Lembaga Litbang lain</p>	<p>85 (3)</p> <p>85 (3)</p> <p>85 (3)</p>	<p>100 (3)</p> <p>100 (3)</p> <p>100 (3)</p>	<p>100 (3)</p> <p>100 (3)</p> <p>100 (3)</p>
8	<p>Terwujudnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Badiklat yang terkini, akurat, terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu</p> <p>Terwujudnya reformasi birokrasi yang efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi dan berkelanjutan</p>	<p>a Persentase produk perencanaan dan penganggaran Badiklat yang akuntabel</p> <p>b Persentase capaian target program dan kegiatan sesuai Perjanjian Kinerja (PK)</p> <p>c Persentase capaian target penyerapan anggaran yang tepat waktu</p> <p>a Nilai pelaksanaan reformasi birokrasi Badiklat</p> <p>b Nilai akuntabilitas kinerja Badiklat</p> <p>c Nilai laporan keuangan Badiklat</p> <p>d Persentase temuan materiil yang ditindaklanjuti</p>	<p>100</p> <p>100</p> <p>100</p> <p>80</p> <p>70</p> <p>70</p> <p>85</p>	<p>100</p> <p>100</p> <p>100</p> <p>80</p> <p>70</p> <p>70</p> <p>85</p>	<p>100</p> <p>100</p> <p>100</p> <p>100</p> <p>100</p> <p>100</p> <p>100</p>
	Terwujudnya SDM pertahanan yang memiliki kemampuan bahasa yang baik	<p>a Persentase peserta Diklat Bahasa yang lulus dengan kategori baik</p> <p>b Persentase Widyaiswara dan/atau tenaga pendidik yang bersertifikasi sebagai tenaga pengajar Bahasa</p>	<p>90</p>	<p>100</p>	<p>100</p>
	Terwujudnya Serdiklat Pusdiklat Jemenhan Kemhan/TNI dan K/L lain yang memiliki kemampuan kepemimpinan dan manajerial bidang pertahanan	<p>a Persentase kelulusan Serdiklat Jemenhan dengan kategori baik</p> <p>b Persentase tenaga pendidik Pusdiklat Jemenhan yang tersertifikasi</p>	<p>90</p> <p>90</p>	<p>100</p> <p>100</p>	<p>100</p> <p>100</p>
	Terwujudnya Serdiklat Pusdiklat Tekfunghan Kemhan/TNI dan K/L lain yang memiliki kemampuan teknis dan fungsional pertahanan	<p>a Persentase kelulusan Serdiklat Tekfunghan dengan kategori baik</p> <p>b Persentase lulusan Diklat Tekfunghan yang mampu berkinerja lebih baik di</p>	<p>90</p> <p>90</p>	<p>100</p> <p>100</p>	<p>100</p> <p>100</p>

		satker/satuan asal			
		c Persentase tenaga pendidik Pusdiklat Tekfunghan yang tersertifikasi	90	100	100
	Terwujudnya Serdiklat Belneg Kemhan/TNI, K/L dan organisasi lain yang memiliki pengetahuan dan sikap perilaku bela negara	a Persentase kelulusan Serdiklat Belneg dengan kategori baik b Persentase tenaga pendidik Belneg yang tersertifikasi	90	100	100
	Tersedianya lulusan Strata 2 bidang pertahanan yang sesuai standar nasional dan internasional	- Persentase kelulusan Strata 2 bidang pertahanan yang sesuai standar nasional dan internasional dengan kategori "Sangat Memuaskan"	89	91,60	100
	Tersedianya lulusan Strata 3 bidang pertahanan yang sesuai standar nasional dan internasional	- Persentase kelulusan Strata 3 bidang pertahanan yang sesuai standar nasional dan internasional dengan kategori "Sangat Memuaskan"	0	0	100
	Terwujudnya publikasi penelitian bidang pertahanan negara dan bela negara yang sesuai standar mutu	- Persentase publikasi penelitian bidang pertahanan negara dan bela negara yang dimuat di jurnal nasional dan internasional	5	15	100
	Terwujudnya pengabdian kepada masyarakat di bidang pertahanan negara dan bela negara sesuai standar nasional	- Jumlah kegiatan pengabdian kepada masyarakat di bidang pertahanan negara sesuai standar nasional	6	6	100
9	Terwujudnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Baranahan yang terkini, akurat, terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu	a Persentase produk perencanaan dan penganggaran Baranahan yang akuntabel b Persentase capaian target program dan kegiatan sesuai Perjanjian Kinerja (PK) c Persentase capaian target penyerapan anggaran yang tepat waktu	100 100 100	100 100 100	100 100 100
	Terwujudnya reformasi birokrasi yang efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi dan berkelanjutan	a Nilai pelaksanaan reformasi birokrasi Baranahan b Nilai akuntabilitas kinerja Baranahan c Nilai laporan keuangan Baranahan	80 70 70	80 70 70	100 100 100

		d Presentase temuan materiil yang ditindaklanjuti	85	85	100
	Terwujudnya pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Kemhan dan TNI yang akuntabel dan <i>up-to-date</i>	a Persentase aset BMN Kemhan dan TNI yang telah terinventarisir secara tepat dan akuntabel dalam SIMAK BMN	100	100	100
		b Persentase aset BMN Kemhan dan TNI yang tersertifikasi	60	71,64	119
	Terlaksananya pelaporan BMN untuk mendukung Laporan Keuangan (LK) Kemhan dan TNI	- Persentase UO yang tertib dalam pelaporan BMN dalam mendukung laporan keuangan Kemhan dan TNI	80	100	100
	Terwujudnya kodifikasi materiil pertahanan yang terintegrasi	a Persentase materiil pertahanan yang telah dikodifikasi	100	100	100
		b Jumlah K/L dan industri nasional yang telah menggunakan kodifikasi dengan sistem Nomor Sediaan Nasional (NSN)	5	5	100
		c Persentase kerja sama di dalam dan luar negeri bidang kodifikasi yang ditindaklanjuti	100	100	100
	Terwujudnya pengadaan jasa konstruksi pertahanan yang terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu	a Persentase perencanaan teknis yang terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu	100	100	100
		b Persentase pelaksanaan pengadaan jasa konstruksi yang terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu	100	100	100
		c Persentase hasil pelaksanaan konstruksi sarana pertahanan yang akuntabel dan tepat waktu	100	100	100
		d Persentase pengadaan jasa konstruksi sarana pertahanan yang telah <i>e-procurement</i>	100	2	0,02
	Terwujudnya pembangunan sarana dan prasarana pertahanan di wilayah perbatasan	- Persentase hasil pembangunan sarana pertahanan di wilayah perbatasan yang akuntabel dan tepat waktu	100	100	100

	Terwujudnya pengadaan barang dan jasa alpalhan yang efektif, efisien, transparan, menjamin kerahasiaan, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel	<p>a Tingkat efektivitas pengadaan barang dan jasa alpalhan</p> <p>b Persentase pemenuhan barang dan jasa alpalhan dihadapkan dengan rencana kebutuhan</p> <p>c Persentase capaian kinerja pengadaan alpalhan sesuai kontrak yang disepakati</p>	5 100 100	4 100 72	80 100 72
10	Tersedianya alutsista industri dalam negeri dalam rangka pertahanan negara	<p>a Persentase penggunaan alutsista produksi industri dalam negeri dalam rangka pertahanan negara</p> <p>b Persentase kebutuhan alutsista yang dapat dipenuhi dari pengembangan industri mandiri</p>	100 76	100 61	100 86
11	<p>Terwujudnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Bainsrahan yang terkini, akurat, terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu</p> <p>Terwujudnya reformasi birokrasi yang efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi dan berkelanjutan</p>	<p>a Persentase produk perencanaan dan penganggaran - an Bainsrahan yang akuntabel</p> <p>b Persentase capaian target program dan kegiatan sesuai Perjanjian Kinerja (PK)</p> <p>c Persentase capaian target penyerapan anggaran yang tepat waktu</p> <p>a Nilai pelaksanaan reformasi birokrasi Bainsrahan Kemhan</p> <p>b Nilai pelaksanaan reformasi birokrasi Bainsrahan</p> <p>c Nilai laporan keuangan Bainsrahan Kemhan</p> <p>d Presentase temuan materiil yang ditindaklanjuti</p>	100 100 100 80 70 70 85	100 100 100 80 70 70 85	100 100 100 100 100 100 100
	Terwujudnya pengamanan kawasan instalasi strategis pertahanan	- Persentase gangguan keamanan di kawasan instalasi strategis pertahanan yang dapat diatasi	95	95	100
	Terwujudnya pemeliharaan dan pembangunan kawasan instalasi strategis pertahanan	- Persentase aset kawasan instalasi strategis pertahanan yang terpelihara	95	95	100
	Terwujudnya kerja sama kawasan instalasi	- Persentase kerja sama kawasan instalasi strategis	95	95	100

	strategis pertahanan	pertahanan yang terealisasi			
	Terwujudnya pengelolaan informasi strategis pertahanan dalam dan luar negeri yang akurat, lengkap dan terkini	a Persentase informasi strategis pertahanan dalam dan luar negeri yang ditindaklanjuti	95	95	100
		b Persentase kajian strategis pertahanan dalam dan luar negeri yang ditindaklanjuti	95	95	100
		c Persentase penyajian intelijen strategis pertahanan yang ditindaklanjuti	95	95	100
	Terwujudnya sistem pertahanan siber dalam rangka pertahanan negara yang mampu menghadapi ancaman dan serangan siber global	a Persentase jaringan Intranet Kemhan yang terlindungi oleh perimeter pertahanan siber dari serangan siber global	80	80	100
		b Persentase hasil pemantauan dan analisa terhadap serangan siber global yang ditindaklanjuti	80	80	100
		c Persentase kesiapan operasional infrastruktur siber	80	80	100

- b. Perbandingan antara realisasi kinerja UO Kemhan serta capaian kinerja tahun 2019 sampai dengan Tahun 2020.

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI %		CAPAIAN %	
			2019	2020	2019	2020
Tahun 2019						
1.	Meningkatnya satuan kerja yang menerapkan teknologi informasi dan komunikasi yang handal, aman dan terintegrasi dalam sistem informasi pertahanan negara	a. Persentase satuan kerja yang menerapkan teknologi informasi dan komunikasi yang handal, aman dan terintegrasi dalam sistem informasi pertahanan negara	100		100	
	Meningkatnya pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan keuangan pertahanan yang berdasarkan data yang terkini, terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu	b. Jumlah laporan keuangan sesuai dengan SAP yang diselesaikan tepat waktu	100		100	
	Terwujudnya pemberian bantuan hukum, nasihat hukum dan penyuluhan hukum serta pelayanan hukum yang terintegrasi	c. Persentase perkara hokum, pendapat hukum dan pelayanan hukum yang akuntabel	83,33		83,33	

	secara akuntabel	d	Jumlah peraturan perundang-undangan yang disuluhkan	7		7	
	Meningkatnya penyandang disabilitas personel Kemhan dan TNI yang memperoleh pelayanan rehabilitasi hingga mandiri	e	Persentase penyandang disabilitas personel Kemhan dan TNI yang memperoleh pelayanan rehabilitasi hingga mandiri	100		100	
	Meningkatnya jenis layanan perumhaskitan sesuai standar	f	Persentase jenis layanan perumhaskitan kepada pegawai Kemhan beserta keluarga dan masyarakat sesuai standar	100		100	
	Terwujudnya pelayanan prima pada bidang pengamanan, perbekalan dan pemeliharaan kerumahtanggaan dan pelayanan kesehatan serta Barang Milik Negara	g	Persentase pelayanan prima pada bidang pengamanan, perbekalan dan pemeliharaan kerumahtanggaan dan pelayanan kesehatan serta Barang Milik Negara	100		100	
	Terwujudnya pengelolaan fasilitas bangunan UO Kemhan yang sesuai standar mutu	h	Persentase pengelolaan fasilitas bangunan UO Kemhan yang sesuai standar mutu	100		100	
	Terwujudnya pegawai Kemhan yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi berdasarkan <i>merit system</i>	i	Persentase pegawai yang lulus uji kompetensi dibidangnya	80		100	
	Terwujudnya perencanaan, pelaksanaan, pengendalian program dan anggaran jangka pendek dan menengah, penataan ketatalaksanaan dan kelembagaan UO Kemhan yang akurat, terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu	j	Persentase dokumen satker/ subsatker UO Kemhan dengan kualitas perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian anggaran baik	100		100	
		k	Persentase dokumen satker/subsatker UO Kemhan dengan penataan ketatalaksanaan dan kelembagaan yang efektif dan efisien	100		100	
	Terselenggaranya pelayanan tugas pimpinan dan tata usaha biro yang akuntabel dan tepat waktu	l	Persentase pelayanan tugas pimpinan dan tata usaha biro yang akuntabel dan tepat waktu	100		100	
	Meningkatnya citra positif Kemhan/TNI di masyarakat dan forum Internasional	m	Persentase responden yang puas terhadap layanan informasi pertahanan negara yang dipublikasikan secara aktual, akurat dan tepat	100		100	

		waktu					
2	Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian pelaporan dilaksanakan berdasarkan data yang terkini dan akurat secara terintegritas, akuntabel dan tepat waktu	a	Persentase perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian serta pelaporan subsatker dengan kategori baik di lingkungan Itjen Kemhan	100		100	
	Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas aparatur Kemhan di bidang umum	b	Persentase penurunan temuan bidang pengawasan umum	15		100	
	Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas aparatur Kemhan di bidang pengadaan barang/jasa pertahanan	c	Persentase penurunan temuan bidang pengawasan pengadaan barang/jasa pertahanan	20		100	
	Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas aparatur Kemhan di bidang keuangan pertahanan	d	Persentase penurunan temuan bidang pengawasan keuangan pertahanan	20		100	
	Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas aparatur Kemhan di bidang logistik pertahanan	e	Persentase penurunan temuan bidang pengawasan logistik pertahanan	15		100	
3	Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta pelaporan dilaksanakan berdasarkan data yang terkini dan akurat secara terintegritas, akuntabel dan tepat waktu	a	Persentase perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta pelaporan subsatker dengan kategori baik di lingkungan Ditjen Strahan Kemhan	100		100	
	Tersusunnya prediksi ancaman, gangguan, hambatan, tantangan dan peluang baik nasional, regional maupun global secara tepat waktu sesuai data yang terkini dan akurat	b	Persentase produk Analisa Strategis (Anstra) yang dimanfaatkan/dijadikan dasar kebijakan/ditindaklanjuti	100		100	
	Tersusunnya kelengkapan kebijakan pertahanan negara yang mampu memenuhi kebutuhan nasional dan tantangan global serta diimplementasikan secara sinergis lintas sektor	c	Jumlah kebijakan strategis yang diimplementasikan	100		100	
	Terwujudnya keberhasilan pencapaian kepentingan nasional dalam bidang pertahanan di forum internasional	d	Jumlah kerja sama bidang pertahanan dengan negara lain	100		100	
	Tersusunnya rumusan kebijakan pengerahan	e	Persentase rumusan kebijakan pengerahan	100		100	

	komponen pertahanan negara yang terintegrasi dalam menghadapi ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan baik nasional, regional maupun global		komponen pertahanan negara yang terintegrasi dalam menghadapi ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan baik nasional, regional maupun global				
	Tersusunnya rumusan kebijakan peraturan perundang-undangan bidang pertahanan negara yang terintegrasi dalam menghadapi ancaman, gangguan, hambatan, tantangan, dan peluang baik nasional, regional maupun global	f	Persentase rumusan kebijakan peraturan perundang-undangan bidang pertahanan negara yang terintegrasi dalam menghadapi ancaman, gangguan, hambatan, tantangan, dan peluang baik nasional, regional maupun global	100		100	
	Tersusunnya rumusan kebijakan wilayah pertahanan yang terintegrasi dalam menghadapi ancaman, gangguan, hambatan, tantangan, dan peluang baik nasional, regional maupun global	g	Persentase rumusan kebijakan wilayah pertahanan yang terintegrasi dalam menghadapi ancaman, gangguan, hambatan, tantangan, dan peluang baik nasional, regional maupun global	100		100	
4	Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta pelaporan dilaksanakan berdasarkan data yang terkini dan akurat secara terintegritas, akuntabel dan tepat waktu	a	Persentase perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta pelaporan subsatker dengan kategori baik di lingkungan Ditjen Renhan Kemhan	100		100	
	Tersusunnya analisis dan evaluasi administrasi pelaksanaan anggaran pertahanan yang terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu	b	Persentase laporan hasil analisis dan evaluasi administrasi pelaksanaan anggaran pertahanan yang akuntabel dan tepat waktu	100		100	
	Tersusunnya pemetaan faktor keberhasilan dan ketidakberhasilan unit organisasi dalam pelaksanaan program dan anggaran	c	Persentase unit organisasi yang dinilai berhasil dalam pelaksanaan program dan anggaran	100		100	
	Tersusunnya perencanaan pembangunan pertahanan jangka menengah dan jangka pendek yang terintegrasi, akuntabel, dan tepat waktu	d	Persentase dokumen perencanaan jangka menengah dan jangka pendek yang diselesaikan tepat waktu	100		100	
	Tersusunnya hasil perencanaan program dan anggaran tahunan Kemhan, Mabes TNI, TNI AD, TNI AL dan TNI AU yang terintegrasi,	e	Persentase dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang diselesaikan tepat waktu	100		100	

	akuntabel dan tepat waktu					
5	Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta pelaporan dilaksanakan berdasarkan data yang terkini dan akurat secara terintegritas, akuntabel dan tepat waktu	a	Persentase perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta pelaporan subsatker dengan kategori baik di lingkungan Ditjen Pothan Kemhan	100		100
	Terwujudnya kesejahteraan ke veteranan RI yang memperoleh pelayanan secara akuntabel dan tepat waktu	b	Persentase Veteran RI yang memperoleh pelayanan secara akuntabel dan tepat waktu	100		100
	Terwujudnya penerapan nilai-nilai bela negara pada lingkup pendidikan, masyarakat dan pekerjaan	c	Jumlah kader bela negara yang terbentuk di lingkup pendidikan, masyarakat dan pekerjaan	100		100
	Terwujudnya komponen cadangan yang sesuai postur pertahanan negara	d	Jumlah komponen cadangan yang terbentuk sesuai postur pertahanan negara	100		100
	Tertata dan terbina komponen pendukung secara terintegrasi	e	Persentase komponen pendukung yang tertata dan terbina secara terintegrasi	100		100
	Tersedianya teknologi industri pertahanan sesuai kebutuhan pengguna yang mengikuti perkembangan kemajuan IPTEK yang diupayakan dapat dikembangkan secara mandiri	f	Jumlah pengembangan industri pertahanan sesuai kemajuan IPTEK yang dikembangkan secara mandiri	100		100
	Terwujudnya hasil pengembangan teknologi (<i>First Article</i>) alpalhankam yang sesuai standar militer secara mandiri oleh industri pertahanan	g	Jumlah hasil pengembangan teknologi (<i>First Article</i>) alpalhankam yang sesuai standar militer secara mandiri oleh industri pertahanan (belum masuk dalam buku IKU Pothan)	100		100
6	Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta pelaporan dilaksanakan berdasarkan data yang terkini dan akurat secara terintegritas, akuntabel dan tepat waktu	a	Persentase perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta pelaporan subsatker dengan kategori baik di lingkungan Ditjen Kuathan Kemhan	100		100
	Tersusunnya kebijakan dan implementasinya dalam pengembangan sistem pertahanan negara di bidang fasilitas dan jasa	b	Persentase kebijakan pertahanan negara di bidang fasilitas dan jasa dengan pemetaan yang terintegrasi dan akuntabel	100		100
	Tersusunnya kebijakan	c	Persentase kebijakan	100		100

	dan implementasinya dalam pengembangan sistem pertahanan negara di bidang kesehatan		pertahanan negara dibidang kesehatan dengan pemetaan yang terkini dan akurat				
	Tersusunnya kebijakan dan implementasinya dalam pengembangan sistem pertahanan negara di bidang materiil komponen utama	d	Persentase kebijakan pertahanan negara di bidang materiil komponen utama pertahanan dengan pemetaan yang terkini dan akurat	100		100	
	Tersusunnya kebijakan dan implementasinya dalam pengembangan sistem komponen utama pertahanan negara di bidang sumber daya manusia	e	Persentase kebijakan pertahanan negara di bidang sumber daya manusia komponen utama pertahanan negara dengan pemetaan yang terkini dan akurat	100		100	
7	Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta pelaporan dilaksanakan berdasarkan data yang terkini dan akurat secara terintegritas, akuntabel dan tepat waktu	a	Persentase perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta pelaporan subsatker dengan kategori baik di lingkungan Balitbang Kemhan	100		100	
	Tersusunnya pemetaan terhadap potensi ancaman, gangguan, hambatan, tantangan dan peluang baik nasional, regional dan global	b	Jumlah rekomendasi terhadap potensi ancaman, gangguan, hambatan, tantangan dan peluang baik nasional, regional dan global	100		100	
	Terwujudnya model dan/atau prototipe alat peralatan pertahanan matra darat, laut, dan udara yang sesuai kemajuan iptek dan mampu dikembangkan secara mandiri	c	Jumlah model dan /atau prototipe alat peralatan pertahanan matra darat, laut dan udara yang sesuai kemajuan iptek yang mampu untuk dikembangkan secara mandiri menjadi produk massal	100		100	
	Terwujudnya inovasi teknologi dan model alat peralatan pertahanan yang sesuai kemajuan iptek serta mampu dijadikan prototipe	d	Jumlah rekomendasi inovasi teknologi dan model alat peralatan pertahanan yang sesuai kemajuan iptek serta mampu dijadikan prototipe	100		100	
	Tersusunnya pemetaan sumber daya pertahanan yang mampu memenuhi kebutuhan pertahanan sesuai kemajuan iptek	e	Jumlah rekomendasi sumber daya pertahanan yang mampu memenuhi kebutuhan pertahanan sesuai kemajuan iptek	100		100	
8	Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta pelaporan dilaksanakan berdasarkan	a	Persentase perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta pelaporan subsatker dengan kategori baik di	99,82		99,82	

	data yang terkini dan akurat secara terintegritas, akuntabel dan tepat waktu		lingkungan Badiklat Kemhan				
	Tersedianya lulusan yang memiliki kemampuan dan keterampilan berbahasa	b	Persentase peserta diklat yang memenuhi standar kompetensi guna mendukung pelaksanaan tugas kedinasan	99,78		99,78	
	Tersedianya lulusan yang mampu menjawab tantangan tugas di bidang manajemen pertahanan	c	Persentase lulusan peserta diklat manajemen pertahanan dengan katagori baik	100		100	
	Tersedianya lulusan yang mampu menjawab tantangan tugas di bidang fungsional pertahanan	d	Persentase lulusan peserta diklat tekfunghan dengan katagori baik sekali	99,41		99,41	
	Tersedianya lulusan yang memiliki sikap dan perilaku yang berjiwa nasionalisme dan patriotisme guna menjalankan hak dan kewajiban bela negara	e	Persentase peningkatan kompetensi lulusan Diklat Bela Negara yang berjiwa nasionalisme dan patriotisme sesuai dengan nilai-nilai dasar bela negara	100		100	
	Tersedianya lulusan strata 2 bidang pertahanan yang sesuai dengan standar nasional dan internasional	f	Persentase lulusan strata 2 bidang pertahanan yang sesuai dengan standar nasional dan internasional dengan kategori "dengan pujian/sangat memuaskan/memuaskan"	100		100	
	Tersedianya lulusan strata 3 bidang pertahanan yang sesuai dengan standar nasional dan internasional	g	Persentase lulusan strata 3 bidang pertahanan yang sesuai dengan standar nasional dan internasional dengan kategori "dengan pujian/sangat memuaskan/memuaskan"	100		100	
9	Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta pelaporan dilaksanakan berdasarkan data yang terkini dan akurat secara terintegritas, akuntabel dan tepat waktu	a	Persentase perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta pelaporan subsatker dengan kategori baik di lingkungan Baranahan Kemhan	98,26		100	
	Terkelolanya Barang Milik Negara (BMN) Kemhan dan TNI berdasarkan data terkini dan akurat yang terintegrasi, akuntabel, tertib dan tepat waktu	b	Persentase Barang Milik Negara (BMN) Kemhan dan TNI yang dikelola berdasarkan data terkini dan akurat yang terintegrasi, akuntabel, tertib dan tepat waktu	100		100	
	Terpenuhinya pengadaan alutsista yang akuntabel sesuai data dukung	c	Persentase pengadaan alutsista yang akuntabel sesuai data dukung	100		100	

	Tersusunnya kode NSN yang terintegrasi secara nasional dan internasional	d	Jumlah kode NSN yang terintegrasi secara nasional dan internasional	100		100	
	Terwujudnya pembangunan konstruksi sarana dan prasarana pertahanan yang terintegrasi, tepat waktu, dan akuntabel	e	Persentase pembangunan konstruksi sarana dan prasarana pertahanan yang terintegrasi, tepat waktu dan akuntabel	100		100	
	Terselenggaranya sertifikasi kelaikan sarana dan prasarana pertahanan serta personel inspektur kelaikan	f	Persentase pemenuhan penyelenggaraan sertifikasi kelaikan sarana dan prasarana pertahanan yang mampu memenuhi standar mutu, fungsi asasi dan keselamatan	99,78		100	
		g	Persentase personel inspektur kelaikan yang memenuhi kompetensi	44,40		69	
10	Meningkatnya kemandirian alutsista produksi dalam negeri dan pengembangan pinak industri pertahanan	-	Jumlah alutsista yang diadakan dari industri dalam negeri	30,09		20	
11	Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta pelaporan dilaksanakan berdasarkan data yang terkini dan akurat secara terintegritas, akuntabel dan tepat waktu	a	Persentase perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta pelaporan subsatker dengan kategori baik di lingkungan Bainstranas Kemhan	100		100	
	Terwujudnya pengamanan dan pemeliharaan kawasan instalasi strategis nasional IPSC Sentul	b	Persentase pengamanan dan ketertiban yang kondusif, terpeliharanya sarana dan prasarana kawasan serta pengelolaan keprotokolan di kawasan instalasi strategis nasional IPSC Sentul	100		100	
	Terwujudnya pengembangan dan kerja sama kawasan instalasi strategis nasional di Sentul	c	Persentase pengembangan dan kerja sama antar Kementerian/ Lembaga di kawasan instalasi strategis nasional di Sentul yang memenuhi standar sesuai tuntutan tugas	100		100	
	Terwujudnya sistem pertahanan siber yang mampu menghadapi ancaman dan serangan siber	d	Persentase keberhasilan pertahanan siber dalam penanganan serangan siber	100		100	
Tahun 2020							
1	Terwujudnya pengelolaan sisinfoteg dan infrastrukturnya yang aman, handal dan terintegrasi	a	Indek Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kemhan		3		3
		b	Persentase kesiapan		95		95

		operasional aplikasi teknologi informasi dan komunikasi				
		c Persentase kesiapan operasional infrastruktur jaringan		95		95
		d Tingkat keamanan sistem informasi pertahanan negara dan persandian		3		3
	Terwujudnya pengelolaan keuangan yang memadai dan berkelanjutan dalam rangka mendukung pertahanan negara	a Persentase Laporan Keuangan (LK) UO yang memadai		93,31		100
		b Opini Laporan Keuangan (LK) Kemhan		WTP		100
		c Nilai Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)		70		100
		d Persentase kesesuaian antara neraca dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kemhan dan TNI		100		100
		e Persentase kesesuaian nilai bidang keuangan dengan laporan BMN		80		100
		d Persentase rekomendasi BPK atas laporan keuangan satker Puslabinkuhan yang telah ditindaklanjuti		100		100
	Terwujudnya bantuan hukum yang akuntabel dan tepat waktu	a Persentase perkara hukum yang dapat diselesaikan.		45		45
		b Persentase nasihat hukum yang ditindaklanjuti		50		50
		c Tingkat pemahaman peserta terhadap peraturan perundang-undangan yang disuluhkan		3		3
	Meningkatnya penyandang disabilitas personel TNI dan PNS Kemhan yang memperoleh pelayanan rehabilitasi terpadu hingga menjadi SDM profesional, mandiri dan <i>entrepreneurship</i>	a Persentase penyandang disabilitas personel TNI dan PNS Kemhan yang berhasil direhabilitasi sampai profesional dan mandiri		35		100
		b Persentase penyandang disabilitas personel TNI dan PNS Kemhan yang memiliki motivasi <i>entrepreneurship</i> (kewirausahaan)		10		100

		c	Persentase penyandang disabilitas personel TNI yang direhabilitasi medik paripurna <i>return to combat</i>		10		100
		d	Tingkat kepuasan penyandang disabilitas personell TNI dan PNS Kemhan terhadap rehabilitasi yang diterima dari Pusrehab		90		100
	Meningkatnya pelayanan perumahsakitian sesuai standar	a	Kategori akreditasi SNARS dari Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS)		Paripurna Bintang		100
		b	Persentase kesesuaian penarikan dana PNBPN Rumah Sakit dr. Suyoto		85		100
	Terwujudnya pelayanan umum terhadap satker/ subsatker di lingkungan Kemhan	a	Indeks kepuasan pegawai terhadap pelayanan umum (<i>Employee Satisfaction Index</i>)		75		75
		b	Persentase penggunaan <i>e-procurement</i> terhadap belanja pengadaan barang dan jasa		40		40
	Meningkatnya pengelolaan Sarpras UO Kemhan	a	Persentase aset BMN UO Kemhan yang terinventarisir dalam SIMAK BMN		100		100
		b	Persentase sarpras UO Kemhan yang terpelihara		100		100
		c	Persentase kesesuaian nilai keuangan dengan laporan BMN		100		100
	Terwujudnya pegawai Kemhan yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi berdasarkan <i>Merit System</i>	a	Indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Kemhan		72		101
		b	Indeks kepuasan pegawai Kemhan		77		100
	Terwujudnya pegawai Kemhan yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi berdasarkan <i>merit system</i>	-	Indeks <i>merit system</i>		0,63		100
	Terwujudnya perencanaan, pelaksanaan, pengendalian anggaran dan pelaporan keuangan UO Kemhan yang akuntabel dan tepat waktu	a	Persentase dokumen perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian anggaran satker/ subsatker dengan kualitas baik yang efektif dan efisien		100		100
		b	Nilai laporan keuangan satker/subsatker UO Kemhan		75		100

		c	Nilai laporan keuangan UO Kemhan		85		100
	Terselenggaranya pelayanan administrasi umum, kearsipan dan ketatausahaan yang akuntabel dan tepat waktu	a	Indeks kearsipan		77		100
		b	Persentase satker/ subsatker yang menerapkan administrasi umum kearsipan dengan benar		75		100
	Terselenggaranya keprotokolan pimpinan UO Kemhan yang berjalan dengan lancar, aman dan tertib	a	Persentase kegiatan keprotokolan pimpinan yang berjalan dengan lancar, aman dan tertib		90		100
		b	Persentase kegiatan keprotokolan pimpinan yang ditindaklanjuti oleh satker/ subsatker Kemhan dalam rangka kerja sama di suatu bidang		80		100
	Terwujudnya penataan organisasi yang tepat ukuran, tepat fungsi dan tepat proses	a	Indeks kelembagaan		75		75
		b	Persentase satker yang telah tertata secara kelembagaan yang memenuhi aspek: tepat ukuran, tepat fungsi dan tepat proses di lingkungan UO Kemhan		75		75
	Terwujudnya ketatalaksanaan yang efektif, efisien dan akuntabel	a	Indeks ketatalaksanaan		75		75
		b	Persentase standar operasional prosedur administrasi pemerintah UO Kemhan yang telah dilaksanakan secara efektif dan efisien		75		75
	Terwujudnya reformasi birokrasi yang efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi dan berkelanjutan	a	Nilai pelaksanaan reformasi birokrasi satker/subsatker		73		73
		b	Persentase satker yang telah melaksanakan reformasi birokrasi secara efektif dan efisien		80		80
	Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang akuntabel dan tepat waktu	a	Nilai penyelenggaraan SAKIP satker/subsatker		71		71
		b	Persentase satker yang menerapkan manajemen SAKIP secara terintegrasi dan akuntabel di lingkungan UO Kemhan		70		70
	Tersusunnya regulasi di bidang pertahanan	a	Persentase regulasi bidang pertahanan yang dapat diselesaikan		100		100
	Terlaksananya asistensi hukum internasional	b	Persentase pelaksanaan asistensi hukum		100		100

	bidang pertahanan	internasional bidang pertahanan yang dapat diselesaikan secara tepat waktu				
	Meningkatnya citra positif Kemhan/TNI di masyarakat, dan forum Internasional	<p>a Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan informasi pertahanan negara dan pengaduan masyarakat</p> <p>b Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)</p> <p>c Nilai kepatuhan pelaksanaan UU 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik</p> <p>d Jumlah <i>image building</i> yang dipublikasikan melalui media nasional</p> <p>e Indek keterbukaan informasi publik</p> <p>f Indek persepsi kualitas pelayanan publik</p>		3		100
				89,2		98,65
				101		100
				540		100
				66,35		84
				75		100
	Terselenggaranya sertifikasi kelaikan sarana dan prasarana pertahanan serta personel Inspektur Kelaikan Kemhan.	<p>a Persentase sertifikasi kelaikan yang terlaksana sesuai dengan regulasi kelaikan</p> <p>b Persentase sarpras yang mendapat sertifikat kelaikan</p> <p>c Jumlah personel Inspektur Kelaikan yang memiliki sertifikat kelaikan Kemhan.</p>		100 93		100
				100 93		100
				100 orang		87
2	Terwujudnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya ltjen yang terkini, akurat, terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu	<p>a Persentase produk perencanaan dan penganggaran ltjen yang akuntabel</p> <p>b Persentase capaian target program dan kegiatan sesuai Perjanjian Kinerja (PK)</p> <p>c Persentase capaian target penyerapan anggaran yang tepat waktu</p>		100		100
				100		100
				100		100
	Terwujudnya reformasi birokrasi yang efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi dan berkelanjutan	<p>a Nilai pelaksanaan reformasi birokrasi ltjen</p> <p>b Nilai akuntabilitas kinerja ltjen</p> <p>c Nilai laporan keuangan ltjen</p>		80		100
				70		100
				70		100

		d	Persentase temuan materiil yang ditindak-lanjuti		85		100
	Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas aparatur Kemhan di bidang pengawasan Inspektorat I	a	Presentase menurunnya temuan dibidang pengadaan barang dan jasa melalui audit, <i>review</i> , evaluasi, verifikasi dan pemantauan		10		10
		b	Presentase jawaban satker yang sesuai dengan rekomendasi hasil pemeriksaan terhadap satker dalam pengawasan bidang pengadaan barang dan jasa		95		95
	Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas aparatur Kemhan di bidang Pengawasan Inspektorat II	a	Presentase menurunnya temuan dibidang keuangan dan penganggaran melalui audit, <i>review</i> , evaluasi, verifikasi dan pemantauan		10		10
		b	Presentase jawaban satker yang sesuai dengan rekomendasi hasil pemeriksaan terhadap satker dalam pengawasan bidang keuangan dan penganggaran		95		95
	Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas aparatur Kemhan di bidang Pengawasan Inspektorat III	a	Presentase menurunnya temuan dibidang SDM, hukum, manajemen dan layanan publik melalui audit, <i>review</i> , evaluasi, verifikasi dan pemantauan		10		10
		b	Presentase jawaban satker yang sesuai dengan rekomendasi hasil pemeriksaan terhadap satker dalam pengawasan bidang SDM, hukum, manajemen dan layanan publik		95		95
	Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas aparatur Kemhan di bidang Pengawasan Inspektorat IV	a	Presentase menurunnya temuan dibidang BMN dan logistik melalui audit, <i>review</i> , evaluasi, verifikasi dan pemantauan		10		10
		b	Presentase jawaban satker yang sesuai dengan rekomendasi hasil pemeriksaan terhadap satker dalam pengawasan bidang BMN dan logistik		95		95
	Meningkatnya kinerja	a	Presentase menurunnya		10		10

	dan akuntabilitas aparaturnya Kemhan di bidang Pengawasan Inspektorat V	<p>temuan dibidang organisasi, tatalaksana, kinerja dan PDDT melalui audit, <i>review</i>, evaluasi, verifikasi dan pemantauan</p> <p>b Presentase jawaban satker yang sesuai dengan rekomendasi hasil pemeriksaan terhadap satker dalam pengawasan bidang organisasi, tatalaksana, kinerja dan PDDT</p> <p>c Persentase satker yang tertib dalam melaksanakan PMPRB dan e-Sakip <i>Review</i> serta akuntabel dan tepat waktu</p>		95		95
				100		100
3	<p>Terwujudnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen Strahan yang terkini, akurat, terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu</p> <p>Terwujudnya reformasi birokrasi yang efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi dan berkelanjutan</p>	<p>a Persentase produk perencanaan dan penganggaran Ditjen Strahan yang akuntabel</p> <p>b Persentase capaian target program dan kegiatan sesuai Perjanjian Kinerja (PK)</p> <p>c Persentase capaian target penyerapan anggaran yang tepat waktu</p> <p>a Nilai pelaksanaan reformasi birokrasi Ditjen Strahan</p> <p>b Nilai akuntabilitas kinerja Ditjen Strahan</p> <p>c Nilai laporan keuangan Ditjen Strahan</p> <p>d Persentase temuan materiil yang ditindaklanjuti</p>		100		100
				100		100
				100		100
				80		100
	Terwujudnya kebijakan strategis pertahanan negara yang dapat dipedomani dan diimplementasikan untuk kepentingan pertahanan negara	<p>a Persentase kebijakan strategis pertahanan yang diimplementasikan K/L terkait untuk kepentingan pertahanan negara</p> <p>b Persentase K/L yang faham terhadap kebijakan strategi pertahanan</p>		83		100
	Terwujudnya peningkatan kualitas Diplomasi pertahanan dalam rangka mencapai kepentingan nasional	a Persentase perjanjian kerja sama bilateral dengan negara sahabat di bidang pertahanan yang terealisasi		85		100

	dalam pertahanan di forum internasional	<p>b Persentase perjanjian kerja sama multilateral dengan negara sahabat di bidang pertahanan yang terealisasi</p> <p>c Persentase kegiatan bilateral, regional dan multilateral di bidang pertahanan yang ditindaklanjuti dalam kerja sama antar negara</p> <p>d Persentase negara sahabat yang melakukan pertukaran perwira siswa dengan Kemhan/TNI</p>		88		100
	Terwujudnya kebijakan pengerahan komponen pertahanan negara yang dapat dipedomani dan diimplementasikan untuk kepentingan pertahanan negara	<p>a Persentase K/L yang mengimplementasikan kebijakan pengerahan komponen pertahanan negara</p> <p>b Tingkat pemahaman K/L terhadap kebijakan pengerahan komponen pertahanan negara</p> <p>c Persentase keberhasilan misi pemeliharaan perdamaian</p>		65		100
	Terwujudnya kebijakan wilayah pertahanan yang dapat dipedomani dan diimplementasikan untuk kepentingan pertahanan negara	- Persentase K/L dan/atau Pemda yang mengimplementasikan kebijakan-an wilayah pertahanan		70		100
	Terwujudnya penataan wilayah pertahanan yang terintegrasi	<p>a Jumlah wilayah pertahanan (RWP dan RRWP) yang tertata dan terbina</p> <p>b Jumlah lokus/fasilitas yang dinyatakan siap digunakan sebagai wilayah pertahanan</p>		6.190		100
	Terwujudnya penetapan dan pengelolaan batas negara dan kawasan perbatasan	<p>a Persentase batas wilayah negara di darat, laut dan udara yang telah disepakati</p> <p>b Persentase pelanggaran batas wilayah negara yang dapat diatasi</p>		39		100
4	Terwujudnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen Renhan yang terkini, akurat, terintegrasi, akuntabel dan tepat	a Persentase perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta pelaporan subsatker dengan kategori baik di lingkungan Ditjen Renhan		100		100

	waktu	Kemhan				
		b	Persentase capaian target program dan kegiatan sesuai Perjanjian Kinerja (PK)		100	100
		c	Persentase capaian target penyerapan anggaran yang tepat waktu		100	100
	Terwujudnya reformasi birokrasi yang efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi dan berkelanjutan	a	Nilai pelaksanaan reformasi birokrasi Ditjen Renhan		80	100
		b	Nilai akuntabilitas kinerja Ditjen Renhan		70	100
		c	Nilai laporan keuangan Ditjen Renhan		70	100
		d	Persentase temuan materiil yang ditindaklanjuti		85	100
	Terwujudnya kebijakan di bidang administrasi pelaksanaan anggaran pertahanan UO Kemhan dan TNI yang terimplementasi	-	Persentase kebijakan di bidang administrasi pelaksanaan anggaran pertahanan yang diimplementasikan oleh UO Kemhan dan TNI		100	100
	Terwujudnya pelaksanaan dan fasilitasi kebijakan administrasi pelaksanaan anggaran yang terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu	-	Persentase pelaksanaan fasilitasi kebijakan di bidang administrasi pelaksanaan anggaran pertahanan yang terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu		100	100
	Terwujudnya pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi pelaksanaan anggaran yang terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu	a	Persentase pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi pelaksanaan anggaran pertahanan yang terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu		100	100
		b	Persentase realisasi pelaksanaan anggaran UO Kemhan dan TNI dihadapkan dengan target yang ditetapkan		100	100
		c	Persentase UO yang telah memenuhi aspek pelaksanaan anggaran dalam rangka tertib administrasi		100	100
	Terwujudnya kebijakan di bidang pengendalian program dan anggaran pertahanan yang terimplementasikan	-	Persentase kebijakan di bidang pengendalian program dan anggaran pertahanan yang diimplementasikan oleh UO Kemhan dan TNI		100	100

	Terwujudnya pengendalian program dan anggaran tahunan UO Kemhan dan TNI yang terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu	a	Persentase pengendalian terhadap pelaksanaan program dan anggaran tahunan UO Kemhan dan TNI yang terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu		100		100
		b	Persentase penurunan revisi terhadap produk pengendalian program dan anggaran		100		100
	Terwujudnya pola pengelolaan keuangan PNBPN UO Kemhan dan TNI	-	Persentase realisasi penerimaan negara bukan pajak UO Kemhan dan TNI		100		100
	Terwujudnya akuntabilitas kinerja Kemhan dan TNI di bidang pelaksanaan anggaran yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku	a	Persentase laporan kinerja UO yang akuntabel dan tepat waktu		100		100
		b	Nilai laporan kinerja Kemhan dan TNI dalam indek hasil evaluasi AKIP		100		100
	Terwujudnya kebijakan di bidang perencanaan pembangunan pertahanan yang implementatif	-	Persentase kebijakan di bidang perencanaan pembangunan yang diimplementasikan UO Kemhan dan TNI		100		100
	Terwujudnya dokumen perencanaan pembangunan pertahanan negara jangka menengah (Renstra) dan jangka pendek (Renja tahunan) yang dapat di implementasikan oleh seluruh UO	a	Nilai produk perencanaan kinerja dalam indeks hasil evaluasi AKIP		100		100
		b	Persentase dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah dan jangka pendek UO Kemhan/TNI yang dapat diimplementasikan		100		100
		c	Persentase keselarasan dokumen perencanaan UO terhadap dokumen perencanaan Kemhan/TNI		100		100
	Terwujudnya kebijakan di bidang perencanaan program dan anggaran pertahanan	-	Persentase kebijakan di bidang perencanaan program dan anggaran pertahanan yang diimplementasikan oleh UO Kemhan dan TNI		100		100
	Terwujudnya perencanaan pembiayaan program pembangunan jangka pendek (tahunan) Kemhan, Mabes TNI, TNI AD, TNI AL, dan TNI AU yang terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu	a	Persentase perencanaan pembiayaan program pembangunan jangka pendek (tahunan) Kemhan, Mabes TNI, TNI AD, TNI AL, dan TNI AU yang terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu		100		100
		b	Persentase penurunan revisi terhadap produk		100		100

			perencanaan program dan anggaran			
5	Terwujudnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen Pothan yang terkini, akurat, terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu	a	Persentase produk perencanaan dan penganggaran Ditjen Pothan yang akuntabel		100	100
		b	Persentase capaian target program dan kegiatan sesuai Perjanjian Kinerja (PK)		100	100
		c	Persentase capaian target penyerapan anggaran yang tepat waktu		100	100
	Terwujudnya reformasi birokrasi yang efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi dan berkelanjutan	a	Nilai pelaksanaan reformasi birokrasi Ditjen Pothan		80	100
		b	Nilai akuntabilitas kinerja Ditjen Pothan		70	100
		c	Nilai laporan keuangan Ditjen Pothan		70	100
		d	Presentase temuan materiil yang ditindaklanjuti		85	100
	Terwujudnya kebijakan di bidang Keveteranan RI yang implementatif	-	Persentase K/L yang mengimplementasikan kebijakan di bidang Keveteranan RI		65	65
	Terwujudnya kesejahteraan Veteran RI	a	Persentase Veteran RI yang memperoleh pelayanan secara akuntabel dan tepat waktu		100	100
		b	Persentase penanganan pengaduan veteran yang telah ditindaklanjuti		100	100
	Terwujudnya kebijakan di bidang bela negara yang implementatif	-	Persentase K/L atau pemda dan komponen bangsa lainnya yang mengimplementasikan kebijakan di bidang bela negara		40	40
	Terwujudnya kesadaran dan pemahaman warga negara terhadap bela negara	-	Tingkat kesadaran dan pemahaman warga negara terhadap bela negara		-	-
	Terwujudnya kesiapan kader bela negara	a	Persentase kader bela negara yang terbentuk		65	65
		b	Persentase kader bela negara yang telah tertata dan terbina		85	85
	Terwujudnya sumdahan yang siap digunakan untuk meningkatkan kekuatan dan	a	Persentase peraturan dan kebijakan di bidang sumdahan yang telah diimplementasikan		10	100

	kemampuan komponen utama	b	Persentase rekomendasi potensi komcad yang telah tertata dan terbina		13		100
		c	Persentase potensi Sumber Daya Manusia (SDM) pendukung pertahanan yang telah tertata dan terbina		20		80
		e	Persentase potensi Sumber Daya Alam dan Buatan (SDAB) pendukung pertahanan yang telah tertata dan terbina		10,4		80
		e	Persentase potensi Sarana Prasarana (Sarpras) pendukung pertahanan yang telah tertata dan terbina		12		80
	Terwujudnya kebijakan di bidang tekndhan yang implementatif	-	Persentase K/L yang mengimplementasikan kebijakan di bidang tekndhan		65		100
	Tersedianya industri pertahanan yang dapat dikembangkan secara mandiri	-	Persentase industri potensial yang dapat ditetapkan sebagai industri pertahanan		60		100
	Terpenuhinya kebutuhan alpalhankam produksi dalam negeri secara bertahap	a	Persentase produksi alpalhankam dalam negeri yang tepat waktu dan akuntabel		-		-
		b	Persentase implementasi Kandungan Lokal dan Ofset (KLO) yang terlaksana dalam pengadaan alpalhankam luar negeri		25		100
		c	Persentase kerja sama industri pertahanan yang terealisasi		25		50
6	Terwujudnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen Kuathan yang terkini, akurat, terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu	a	Persentase produk perencanaan dan penganggaran Ditjen Kuathan yang akuntabel		100		100
		b	Persentase capaian target program dan kegiatan sesuai Perjanjian Kinerja (PK)		100		100
		c	Persentase capaian target penyerapan anggaran yang tepat waktu		100		100
	Terwujudnya reformasi birokrasi yang efektif,	a	Nilai pelaksanaan reformasi birokrasi Ditjen		80		100

	efisien, terukur, konsisten, terintegrasi dan berkelanjutan	Kuathan b Nilai akuntabilitas kinerja Ditjen Kuathan Kemhan c Nilai laporan keuangan Ditjen Kuathan Kemhan d Presentase temuan materiil yang ditindaklanjuti		70 70 85		100 100 100
	Terwujudnya kesiapan dukungan dan pelayanan kesehatan komponen utama pertahanan negara	a Persentase tenaga kesehatan yang siap operasional dalam mendukung OMP dan OMSP b Persentase pemenuhan tenaga kesehatan dalam pelayanan kesehatan c Tingkat kesiapan fasilitas kesehatan dalam rangka dukungan kesehatan d Tingkat kesiapan fasilitas kesehatan dalam rangka pelayanan kesehatan		97 68 62 80		121,25 85 72,94 100
	Terwujudnya kebijakan di bidang pembinaan materiil komponen utama pertahanan yang implementatif	- Persentase kebijakan di bidang pembinaan materiil komponen utama pertahanan yang implementatif		80		106,25
	Terwujudnya pengelolaan alpalhankam (BMN selain tanah, bangunan dan BMP)	a Persentase pemenuhan rencana kebutuhan alpalhankam dihadapkan pencapaian MEF aspek fisik bidang autsista b Persentase penghapusan dan hibah BMN selain tanah, bangunan dan BMP yang terealisasi c Persentase rekomendasi/ perizinan terhadap penggunaan senjata standar militer dan penggunaan bahan peledak yang ditindaklanjuti d Persentase rumusan Standar Militer Indonesia (SMI) yang dikeluarkan		62,57 91 85 -		83,42 113,75 106,25 -
	Terwujudnya kebijakan di bidang fasilitas dan jasa yang implementatif.	- Persentase kebijakan di bidang fasilitas dan jasa yang dapat diimplementasikan.		80		100
	Terwujudnya kesiapan fasilitas dan jasa dalam	a Persentase pangkalan dan daerah latihan yang		85		100

	rangka mendukung pertahanan negara.	siap digunakan oleh UO TNI dan Angkatan.				
		b Persentase fasilitas pangkalan tanah dan bangunan yang telah tersertifikasi		71,5		119
		c Persentase pemenuhan pelayanan LTGA di bidang fasilitas dan jasa dihadapkan dengan kebutuhan Kemhan dan TNI		80		100
		d Persentase kesiapan bidang BBMP fasilitas dan jasa dihadapkan dengan kebutuhan Kemhan dan TNI		80		100
		e Tingkat kesiapan telekomunikasi dalam mendukung pertahanan negara di lingkungan Kemhan dan TNI		85		100
	Terwujudnya kebijakan di bidang Sumber Daya Manusia (SDM) komponen utama pertahanan negara	- Persentase kebijakan di bidang SDM komponen utama pertahanan negara yang diimplementasikan		87		96,66
	Terwujudnya sumber daya manusia komponen utama pertahanan negara yang profesional	a Persentase sumber daya manusia Komponen Utama pertahanan negara yang professional		80		100
		b Persentase pemenuhan sumber daya manusia komponen utama dihadapkan dengan kebutuhan		75		93,75
7	Terwujudnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Balitbang yang terkini, akurat, terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu	a Persentase produk perencanaan dan penganggaran Balitbang yang akuntabel		100		100
		b Persentase capaian target program dan kegiatan sesuai Perjanjian Kinerja (PK)		100		100
		c Persentase capaian target penyerapan anggaran yang tepat waktu		100		100
	Terwujudnya reformasi birokrasi yang efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi dan berkelanjutan	a Nilai pelaksanaan reformasi birokrasi Balitbang Kemhan		80		100
		b Nilai akuntabilitas kinerja Balitbang Kemhan		70		100
		c Nilai laporan keuangan		70		100

		Balitbang Kemhan				
		d Presentase temuan materiil yang ditindaklanjuti		85		100
	Terwujudnya hasil litbang Puslitbang Strahan yang dapat digunakan dalam rangka kepentingan pertahanan negara	a Persentase hasil litbang Puslitbang Strahan yang dapat ditindaklanjuti		100 (6)		100 (6)
		b Persentase rekomendasi hasil litbang Puslitbang Strahan yang ditindaklanjuti		100 (6)		100 (6)
	Terwujudnya hasil litbang Puslitbang Sumdahan yang dapat digunakan dalam rangka kepentingan pertahanan negara	a Persentase hasil litbang Puslitbang Sumdahan yang dapat ditindaklanjuti		100 (7)		100 (7)
		b Persentase rekomendasi hasil litbang Puslitbang Sumdahan yang ditindaklanjuti		100		100
	Terwujudnya hasil litbang Puslitbang Iptekhan yang dapat digunakan dalam rangka kepentingan pertahanan negara	a Persentase hasil litbang Puslitbang Iptekhan yang dapat ditindaklanjuti		100 (4)		100 (4)
		b Jumlah inovasi teknologi dan model/desain/ komponen/sub komponen alat peralatan pertahanan yang sesuai kemajuan iptek serta dapat dilanjutkan menjadi prototipe		100		100
	Terwujudnya hasil litbang Puslitbang Alpalhan yang dapatdigunakan dalam rangka kepentingan pertahanan negara	a Persentase hasil litbang Puslitbang Alpalhan yang dapat ditindaklanjuti		100 (3)		100 (3)
		b Jumlah model dan atau prototipe hasil Litbang yang dapat ditindaklanjuti sebagai <i>First Article</i> (FA)		100		100
		c Jumlah kerja sama Puslitbang Alpalhan dengan Lembaga Litbang lain		100		100
8	Terwujudnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Badiklat yang terkini, akurat, terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu	a Persentase produk perencanaan dan penganggaran Badiklat yang akuntabel		100		100
		b Persentase capaian target program dan kegiatan sesuai Perjanjian Kinerja (PK)		100		100
		c Persentase capaian target penyerapan anggaran yang tepat waktu		100		100
	Terwujudnya reformasi birokrasi yang efektif, efisien, terukur,	a Nilai pelaksanaan reformasi birokrasi Badiklat		80		100

	konsisten, terintegrasi dan berkelanjutan	b	Nilai akuntabilitas kinerja Badiklat		70		100
		c	Nilai laporan keuangan Badiklat		70		100
		d	Persentase temuan materiil yang ditindaklanjuti		85		100
	Terwujudnya SDM pertahanan yang memiliki kemampuan bahasa yang baik	a	Persentase peserta Diklat Bahasa yang lulus dengan kategori baik		100		100
		b	Persentase Widyaiswara dan/atau tenaga pendidik yang bersertifikasi sebagai tenaga pengajar bahasa		70		100
	Terwujudnya Serdiklat Pusdiklat Jemenhan Kemhan/TNI dan K/L lain yang memiliki kemampuan kepemimpinan dan manajerial bidang pertahanan	a	Persentase kelulusan Serdiklat Jemenhan dengan kategori baik		100		100
		b	Persentase Tenaga Pendidik Pusdiklat Jemenhan yang tersertifikasi		100		100
	Terwujudnya Serdiklat Pusdiklat Tekfunghan Kemhan/TNI dan K/L lain yang memiliki kemampuan teknis dan fungsional pertahanan	a	Persentase kelulusan Serdiklat Tekfunghan dengan kategori baik		100		80
		b	Persentase lulusan Diklat Tekfunghan yang mampu berkinerja lebih baik di satker/satuan asal		100		80
		c	Persentase tenaga pendidik Pusdiklat Tekfunghan yang tersertifikasi		70		90
	Terwujudnya Serdiklat Belneg Kemhan/TNI, K/L dan organisasi lain yang memiliki pengetahuan dan sikap perilaku bela negara	a	Persentase kelulusan Serdiklat Belneg dengan kategori baik		100		80
		b	Persentase tenaga pendidik Belneg yang tersertifikasi		70		90
	Tersedianya lulusan Strata 2 bidang pertahanan yang sesuai standar nasional dan internasional	-	Persentase kelulusan Strata 2 bidang pertahanan yang sesuai standar nasional dan internasional dengan kategori "Sangat Memuaskan"		91.60		100
	Tersedianya lulusan Strata 3 bidang pertahanan yang sesuai standar nasional dan internasional	-	Persentase kelulusan Strata 3 bidang pertahanan yang sesuai standar nasional dan internasional dengan kategori "Sangat Memuaskan"		0		100
	Terwujudnya publikasi penelitian bidang pertahanan negara dan	-	Persentase publikasi penelitian bidang pertahanan negara dan		15		100

	bela negara yang sesuai standar mutu		bela negara yang dimuat di jurnal nasional dan internasional				
	Terwujudnya pengabdian kepada masyarakat di bidang pertahanan negara dan bela negara sesuai standar nasional	-	Jumlah kegiatan pengabdian kepada masyarakat di bidang pertahanan negara sesuai standar nasional		6		100
9	Terwujudnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Baranahan yang terkini, akurat, terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu	a	Persentase produk perencanaan dan penganggaran Baranahan yang akuntabel		100		100
		b	Persentase capaian target program dan kegiatan sesuai Perjanjian Kinerja (PK)		100		100
		c	Persentase capaian target penyerapan anggaran yang tepat waktu		100		100
	Terwujudnya reformasi birokrasi yang efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi dan berkelanjutan	a	Nilai pelaksanaan reformasi birokrasi Baranahan		80		100
		b	Nilai akuntabilitas kinerja Baranahan		70		100
		c	Nilai laporan keuangan Baranahan		70		100
		d	Presentase temuan materiil yang ditindak-lanjuti		85		100
	Terwujudnya pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Kemhan dan TNI yang akuntabel <i>dan up-to-date</i>	a	Persentase aset BMN Kemhan dan TNI yang telah terinventarisir secara tepat dan akuntabel dalam SIMAK BMN		100		100
		b	Persentase aset BMN Kemhan dan TNI yang tersertifikasi		71,64		119
	Terlaksananya pelaporan BMN untuk mendukung Laporan Keuangan (LK) Kemhan dan TNI	-	Persentase UO yang tertib dalam pelaporan BMN dalam mendukung laporan keuangan Kemhan dan TNI		100		100
	Terwujudnya kodifikasi materiil pertahanan yang terintegrasi	a	Persentase materiil pertahanan yang telah dikodifikasi		100		100
		b	Jumlah K/L dan industri nasional yang telah menggunakan kodifikasi dengan sistem Nomor Sediaan Nasional (NSN)		5		100

		c	Persentase kerja sama di dalam dan luar negeri bidang kodifikasi yang ditindaklanjuti		100		100
	Terwujudnya pengadaan jasa konstruksi pertahanan yang terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu	a	Persentase perencanaan teknis yang terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu		100		100
		b	Persentase pelaksanaan pengadaan jasa konstruksi yang terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu		100		100
		c	Persentase hasil pelaksanaan konstruksi sarana pertahanan yang akuntabel dan tepat waktu		100		100
		d	Persentase pengadaan jasa konstruksi sarana pertahanan yang telah <i>e-procurement</i>		100		100
	Terwujudnya pembangunan sarana dan prasarana pertahanan di Wilayah Perbatasan	-	Persentase hasil pembangunan sarana pertahanan di wilayah perbatasan yang akuntabel dan tepat waktu		100		100
	Terwujudnya pengadaan barang dan jasa alpalhan yang efektif, efisien, transparan, menjamin kerahasiaan, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel	a	Tingkat efektivitas pengadaan barang dan jasa alpalhan		4		80
		b	Persentase pemenuhan barang dan jasa alpalhan dihadapkan dengan rencana kebutuhan		100		100
		c	Persentase capaian kinerja pengadaan alpalhan sesuai kontrak yang disepakati		72		72
10	Tersedianya alutsista industri dalam negeri dalam rangka pertahanan negara	a	Persentase penggunaan alutsista produksi industri dalam negeri dalam rangka pertahanan negara		100		100
		b	Persentase kebutuhan alutsista yang dapat dipenuhi dari pengembangan industri mandiri		61		86
11	Terwujudnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Bainstrahan yang terkini, akurat, terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu	a	Persentase produk perencanaan dan penganggaran Bainstrahan yang akuntabel		100		100
		b	Persentase capaian target program dan kegiatan sesuai		100		100

		Perjanjian Kinerja (PK)				
	Terwujudnya reformasi birokrasi yang efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi dan berkelanjutan	c	Persentase capaian target penyerapan anggaran yang tepat waktu	100		100
		a	Nilai pelaksanaan reformasi birokrasi Bainstrahan Kemhan	80		100
		b	Nilai pelaksanaan reformasi birokrasi Bainstrahan	70		100
		c	Nilai laporan keuangan Bainstrahan Kemhan	70		100
		d	Presentase temuan materiil yang ditindaklanjuti	85		100
	Terwujudnya pengamanan kawasan instalasi strategis pertahanan	-	Persentase gangguan keamanan di kawasan instalasi strategis pertahanan yang dapat diatasi	95		100
	Terwujudnya pemeliharaan dan pembangunan kawasan instalasi strategis pertahanan	-	Persentase aset kawasan instalasi strategis pertahanan yang terpelihara	95		100
	Terwujudnya kerja sama kawasan instalasi strategis pertahanan	-	Persentase kerja sama kawasan instalasi strategis pertahanan yang terealisasi	95		100
	Terwujudnya pengelolaan informasi strategis pertahanan dalam dan luar negeri yang akurat, lengkap dan terkini	a	Persentase informasi strategis pertahanan dalam dan luar negeri yang ditindaklanjuti	95		100
		b	Persentase kajian strategis pertahanan dalam dan luar negeri yang ditindaklanjuti	95		100
		c	Persentase penyajian intelijen strategis pertahanan yang ditindaklanjuti	95		100
	Terwujudnya sistem pertahanan siber dalam rangka pertahanan negara yang mampu menghadapi ancaman dan serangan siber global	a	Persentase jaringan Intranet Kemhan yang terlindungi oleh perimeter pertahanan siber dari serangan siber global	80		100
		b	Persentase hasil pemantauan dan analisa terhadap serangan siber global yang ditindaklanjuti	80		100
		c	Persentase kesiapan operasional infrastruktur siber	80		100

- 3) Perbandingan realisasi kinerja UO Kemhan Tahun 2020 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI (%)	TARGET RENSTRA (%)
			2020	2020
1	Terwujudnya pengelolaan sisinfohaneg dan infrastrukturnya yang aman, handal dan terintegrasi	a Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kemhan	3	3
		b Persentase kesiapan operasional aplikasi teknologi informasi dan komunikasi	95	95
		c Persentase kesiapan operasional infrastruktur jaringan	95	95
		d Tingkat keamanan sistem informasi pertahanan negara dan persandian	3	3
	Terwujudnya pengelolaan keuangan yang memadai dan berkelanjutan dalam rangka mendukung pertahanan negara	a Persentase Laporan Keuangan (LK) UO yang memadai	93,31	80
		b Opini Laporan Keuangan (LK) Kemhan	WTP	WTP
		c Nilai Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	70	70
		d Persentase kesesuaian antara neraca dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kemhan dan TNI	100	100
		e Persentase kesesuaian nilai bidang keuangan dengan laporan BMN	80	80
		f Persentase rekomendasi BPK atas laporan keuangan satker Puslapbinkuhan	100	100

		yang telah ditindaklanjuti		
	Terwujudnya bantuan hukum yang akuntabel dan tepat waktu (Ro Hukum)	<p>a Persentase perkara hukum yang dapat diselesaikan</p> <p>b Persentase nasihat hukum yang ditindaklanjuti</p> <p>c Tingkat pemahaman peserta terhadap peraturan perundang-undangan yang disuluhkan</p>	<p>45</p> <p>50</p> <p>3</p>	<p>45</p> <p>50</p> <p>3</p>
	Meningkatnya penyandang disabilitas personel TNI dan PNS Kemhan yang memperoleh pelayanan rehabilitasi terpadu hingga menjadi SDM profesional, mandiri dan entrepreneurship. (Pusrehab)	<p>a Persentase penyandang disabilitas personel TNI dan PNS Kemhan yang berhasil direhabilitasi sampai profesional dan mandiri</p> <p>b Persentase penyandang disabilitas personel TNI dan PNS Kemhan yang memiliki motivasi entrepreneurship (kewirausahaan)</p> <p>c Persentase penyandang disabilitas personel TNI yang direhabilitasi medik paripurna <i>return to combat</i></p> <p>d Tingkat kepuasan penyandang disabilitas personel TNI dan PNS Kemhan terhadap rehabilitasi yang diterima dari Pusrehab</p>	<p>35</p> <p>10</p> <p>10</p> <p>90</p>	<p>35</p> <p>10</p> <p>10</p> <p>90</p>
	Meningkatnya pelayanan perumahsakitan sesuai standar (Pusrehab)	<p>a Kategori akreditasi SNARS dari Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS)</p> <p>b Persentase kesesuaian penarikan dana PNBPN Rumah Sakit dr. Suyoto</p>	<p>Paripurna Bintang 5</p> <p>85</p>	<p>Paripurna Bintang 5</p> <p>85</p>
	Terwujudnya pelayanan umum terhadap satker/ subsatker di	a Indeks kepuasan pegawai terhadap pelayanan umum (<i>Employee Satisfaction</i>)	75	75

	lingkungan Kemhan (Roum)	<i>Index</i>) b Persentase penggunaan <i>e-procurement</i> terhadap belanja pengadaan barang dan jasa	40	40
	Meningkatnya pengelolaan sarpras UO Kemhan	a Persentase aset BMN UO Kemhan yang terinventarisir dalam SIMAK BMN b Persentase sarpras UO Kemhan yang terpelihara c Persentase kesesuaian nilai keuangan dengan laporan BMN	100 100 100	100 100 100
	Terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) pegawai Kemhan yang profesional (Ropeg) Terwujudnya pegawai Kemhan yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi berdasarkan <i>Merit System</i>	a Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Kemhan b Indeks Kepuasan Pegawai Kemhan - Indeks <i>Merit System</i>	72 77 0,63	71 77 0,63
	Terwujudnya perencanaan, pelaksanaan, pengendalian anggaran dan pelaporan keuangan UO Kemhan yang akuntabel dan tepat waktu (Roren)	a Persentase dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian anggaran Satker/ Subsatker dengan kualitas baik yang efektif dan efisien b Nilai Laporan Keuangan Satker/ Subsatker UO Kemhan c Nilai Laporan Keuangan UO Kemhan	100 75 85	100 75 85
	Terselenggaranya pelayanan administrasi umum, kearsipan dan ketatausahaan yang	a Indeks Kearsipan b Persentase Satker/ Subsatker yang menerapkan adminis-	77 75	77 75

	akuntabel dan tepat waktu (Ro TU dan Protokol)	trasi umum kearsipan dengan benar		
	Terselenggaranya keprotokolan pimpinan UO Kemhan yang berjalan dengan lancar, aman dan tertib	a Persentase kegiatan keprotokolan pimpinan yang berjalan dengan lancar, aman dan tertib	90	90
		b Persentase kegiatan keprotokolan pimpinan yang ditindaklanjuti oleh Satker/Subsatker Kemhan dalam rangka kerja sama di suatu bidang	80	80
	Terwujudnya penataan organisasi yang tepat ukuran, tepat fungsi dan tepat proses (Ro Ortala)	a Indeks Kelembagaan	75	75
		b Persentase Satker yang telah tertata secara kelembagaan yang memenuhi aspek: tepat ukuran, tepat fungsi dan tepat proses di lingkungan UO Kemhan	75	75
	Terwujudnya ketatalaksanaan yang efektif, efisien dan akuntabel	a Indeks Ketatalaksanaan	75	75
		b Persentase Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah UO Kemhan yang telah dilaksanakan secara efektif dan efisien	75	75
	Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi dan berkelanjutan	a Nilai pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) Satker/ Subsatker	73	73
		b Persentase Satker yang telah melaksanakan Reformasi Birokrasi secara efektif dan efisien.	80	80
	Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang akuntabel dan tepat waktu	a Nilai Penyelenggaraan SAKIP Satker/ Subsatker	71	71
		b Persentase Satker yang menerapkan manajemen SAKIP secara terintegrasi dan	70	70

		akuntabel di lingkungan UO Kemhan		
	Tersusunnya regulasi di bidang pertahanan (Ro Turdang)	- Persentase regulasi bidang pertahanan yang dapat diselesaikan	100	50
	Terlaksananya asistensi hukum internasional bidang pertahanan	- Persentase pelaksanaan asistensi hukum internasional bidang pertahanan yang dapat diselesaikan secara tepat waktu	100	50
	Meningkatnya citra positif Kemhan/TNI di masyarakat dan forum internasional (Ro Humas)	a Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan informasi pertahanan negara dan pengaduan masyarakat	3	3
		b Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).	89,2	89,2
		c Nilai kepatuhan pelaksanaan UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	101	101
		d Jumlah <i>image building</i> yang dipublikasikan melalui media nasional.	540	540
		e Indeks keterbukaan informasi publik	66,35	66,35
		f Indek persepsi kualitas pelayanan publik	75	75
	Terselenggaranya sertifikasi kelaikan sarana dan prasarana pertahanan serta personel Inspektur Kelaikan Kemhan (Puslaik)	a Persentase sertifikasi kelaikan yang terlaksana sesuai dengan regulasi kelaikan	100 93	100
		b Persentase Sarpras yang mendapat sertifikasi kelaikan	100 93	100
		c Jumlah personel inspektur kelaikan yang memiliki sertifikasi kelaikan Kemhan	100 orang	160 orang
2	Terwujudnya dukungan manajemen dan	a Persentase produk perencanaan dan penganggaran Itjen	100	100

	<p>pelaksanaan tugas teknis lainnya Itjen yang terkini, akurat, terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu</p> <p>Terwujudnya reformasi birokrasi yang efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi dan berkelanjutan</p>	b	yang akuntabel Persentase capaian target program dan kegiatan sesuai Perjanjian Kinerja (PK)	100	100
		c	Persentase capaian target penyerapan anggaran yang tepat waktu	100	100
		a	Nilai pelaksanaan reformasi birokrasi Itjen	80	80
		b	Nilai akuntabilitas kinerja Itjen	70	70
		c	Nilai laporan keuangan Itjen	70	70
		d	Presentase temuan materil yang ditindaklanjuti	85	85
	<p>Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas aparatur Kemhan di bidang Pengawasan Inspektorat I</p>	a	Presentase menurunnya temuan dibidang pengadaan barang dan jasa melalui audit, <i>review</i> , evaluasi, verifikasi dan pemantauan	10	100
		b	Presentase jawaban satker yang sesuai dengan rekomendasi hasil pemeriksaan terhadap satker dalam pengawasan bidang pengadaan barang dan jasa	95	100
	<p>Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas aparatur Kemhan di bidang Pengawasan Inspektorat II</p>	a	Presentase menurunnya temuan dibidang keuangan dan penganggaran melalui audit, <i>review</i> , evaluasi, verifikasi dan pemantauan	10	100
		b	Presentase jawaban satker yang sesuai dengan rekomendasi hasil pemeriksaan terhadap satker dalam	95	100

		pengawasan bidang keuangan dan penganggaran		
	Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas aparatur Kemhan di bidang Pengawasan Inspektorat III	<p>a Presentase menurunnya temuan dibidang SDM, hukum, manajemen dan layanan publik melalui audit, <i>review</i>, evaluasi, verifikasi dan pemantauan</p> <p>b Presentase jawaban satker yang sesuai dengan rekomendasi hasil pemeriksaan terhadap satker dalam pengawasan bidang SDM, hukum, manajemen dan layanan publik</p>	10 95	100 100
	Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas aparatur Kemhan di bidang Pengawasan Inspektorat IV	<p>a Presentase menurunnya temuan dibidang BMN dan logistik melalui audit, <i>review</i>, evaluasi, verifikasi dan pemantauan</p> <p>b Presentase jawaban satker yang sesuai dengan rekomendasi hasil pemeriksaan terhadap satker dalam pengawasan bidang BMN dan logistik</p>	10 95	100 100
	Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas aparatur Kemhan di bidang Pengawasan Inspektorat V	<p>a Presentase menurunnya temuan dibidang organisasi, tatalaksana, kinerja dan PDDT melalui audit, <i>review</i>, evaluasi, verifikasi dan pemantauan</p> <p>b Presentase jawaban satker yang sesuai dengan rekomendasi hasil pemeriksaan terhadap satker dalam pengawasan bidang organisasi, tatalaksana, kinerja dan PDDT</p>	10 95	100 100

		c	Persentase satker yang tertib dalam melaksanakan PMPRB dan e-Sakip <i>review</i> serta akuntabel dan tepat waktu	100	100
3	Terwujudnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen Strahan yang terkini, akurat, terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu	a	Persentase produk perencanaan dan penganggaran Ditjen Strahan yang akuntabel	100	100
		b	Persentase capaian target program dan kegiatan sesuai Perjanjian Kinerja (PK)	100	100
		c	Persentase capaian target penyerapan anggaran yang tepat waktu	100	100
	Terwujudnya reformasi birokrasi yang efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi dan berkelanjutan	a	Nilai pelaksanaan reformasi birokrasi Ditjen Strahan	80	80
		b	Nilai akuntabilitas kinerja Ditjen Strahan	70	70
		c	Nilai laporan keuangan Ditjen Strahan	70	70
		d	Persentase temuan materiil yang ditindaklanjuti	85	85
	Terwujudnya kebijakan strategis pertahanan negara yang dapat dipedomani dan diimplementasikan untuk kepentingan pertahanan negara	a	Persentase kebijakan strategis pertahanan yang diimplementasikan K/L terkait untuk kepentingan pertahanan negara	80	80
b		Persentase K/L yang faham terhadap kebijakan strategi pertahanan	83	83	
Terwujudnya peningkatan kualitas Diplomasi Pertahanan dalam rangka mencapai kepentingan nasional dalam	a	Persentase perjanjian kerja sama bilateral dengan negara sahabat di bidang pertahanan yang terealisasi	85	85	
	b	Persentase perjanjian	88	88	

	pertahanan di forum internasional	<p>kerja sama multilateral dengan negara sahabat di bidang pertahanan yang terealisasi</p> <p>c Persentase kegiatan bilateral, regional dan multilateral di bidang pertahanan yang ditindaklanjuti dalam kerja sama antar negara</p> <p>d Persentase negara sahabat yang melakukan pertukaran perwira siswa dengan Kemhan/TNI</p>	<p>80</p> <p>90</p>	<p>80</p> <p>90</p>
	Terwujudnya kebijakan pengerahan komponen pertahanan negara yang dapat dipedomani dan diimplementasikan untuk kepentingan pertahanan negara.	<p>a Persentase K/L yang mengimplementasikan kebijakan pengerahan komponen pertahanan negara</p> <p>b Tingkat pemahaman K/L terhadap kebijakan pengerahan komponen pertahanan negara</p> <p>c Persentase keberhasilan misi pemeliharaan perdamaian</p>	<p>65</p> <p>70</p> <p>100</p>	<p>65</p> <p>70</p> <p>100</p>
	Terwujudnya kebijakan wilayah pertahanan yang dapat dipedomani dan diimplementasikan untuk kepentingan pertahanan negara	- Persentase K/L dan/atau Pemda yang mengimplementasikan kebijakan wilayah pertahanan	70	70
	Terwujudnya penataan wilayah pertahanan yang terintegrasi	<p>a Jumlah wilayah pertahanan (RWP dan RRWP) yang tertata dan terbina</p> <p>b Jumlah lokus/fasilitas yang dinyatakan siap digunakan sebagai wilayah pertahanan</p>	<p>6.190</p> <p>436</p>	<p>6.190</p> <p>436</p>
	Terwujudnya penetapan dan pengelolaan batas negara dan	a Persentase batas wilayah negara di darat, laut dan udara yang telah disepakati	39	39

	kawasan perbatasan	b	Persentase pelanggaran batas wilayah negara yang dapat diatasi	80	80
4	Terwujudnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen Renhan yang terkini, akurat, terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu	a	Persentase perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta pelaporan subsatker dengan kategori baik di lingkungan Ditjen Renhan Kemhan	100	100
		b	Persentase capaian target program dan kegiatan sesuai Perjanjian Kinerja (PK)	100	100
		c	Persentase capaian target penyerapan anggaran yang tepat waktu	100	100
	Terwujudnya reformasi birokrasi yang efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi dan berkelanjutan	a	Nilai pelaksanaan reformasi birokrasi Ditjen Renhan	80	80
		b	Nilai akuntabilitas kinerja Ditjen Renhan	70	70
		c	Nilai laporan keuangan Ditjen Renhan	70	70
		d	Persentase temuan materiil yang ditindaklanjuti	85	85
		Terwujudnya kebijakan di bidang administrasi pelaksanaan anggaran pertahanan UO Kemhan dan TNI yang terimplementasi (Minlakgar)	-	Persentase kebijakan di bidang administrasi pelaksanaan anggaran pertahanan yang diimplementasikan oleh UO Kemhan dan TNI	100
	Terwujudnya pelaksanaan dan fasilitasi kebijakan administrasi pelaksanaan	-	Persentase pelaksanaan fasilitasi kebijakan di bidang administrasi pelaksanaan anggaran	100	100

	anggaran yang terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu		pertahanan yang terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu		
	Terwujudnya pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi pelaksanaan anggaran yang terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu	a	Persentase pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi pelaksanaan anggaran pertahanan yang terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu	100	100
		b	Persentase realisasi pelaksanaan anggaran UO Kemhan dan TNI dihadapkan dengan target yang ditetapkan	100	100
		c	Persentase UO yang telah memenuhi aspek pelaksanaan anggaran dalam rangka tertib administrasi	100	100
	Terwujudnya kebijakan di bidang pengendalian program dan anggaran pertahanan yang terimplementasikan (Dalprogar)	-	Persentase kebijakan di bidang pengendalian program dan anggaran pertahanan yang diimplementasikan oleh UO Kemhan dan TNI	100	5 UO 100
	Terwujudnya pengendalian program dan anggaran tahunan UO Kemhan dan TNI yang terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu	a	Persentase pengendalian terhadap pelaksanaan program dan anggaran tahunan UO Kemhan dan TNI yang terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu	100	5 UO 100
		b	Persentase penurunan revisi terhadap produk pengendalian program dan anggaran	15	15
	Terwujudnya pola pengelolaan keuangan PNBP UO Kemhan dan TNI	-	Persentase realisasi penerimaan negara bukan pajak UO Kemhan dan TNI	100	100

Terwujudnya akuntabilitas kinerja Kemhan dan TNI di bidang pelaksanaan anggaran yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku	a	Persentase laporan kinerja UO yang akuntabel dan tepat waktu	100	100
	b	Nilai laporan kinerja Kemhan dan TNI dalam indek hasil evaluasi AKIP	11	11
Terwujudnya kebijakan di bidang perencanaan pembangunan pertahanan yang implementatif (Renbanghan)	-	Persentase kebijakan di bidang perencanaan pembangunan yang diimplementasikan UO Kemhan dan TNI	100	100
Terwujudnya dokumen perencanaan pembangunan pertahanan negara jangka menengah (Renstra) dan jangka pendek (Renja tahunan) yang dapat di implementasikan oleh seluruh UO	a	Nilai produk perencanaan kinerja dalam Indeks Hasil Evaluasi AKIP	25	25
	b	Persentase dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah dan jangka pendek UO Kemhan/ TNI yang dapat diimplementasikan	100	100
	c	Persentase keselarasan dokumen perencanaan UO terhadap dokumen perencanaan Kemhan/TNI	100	100
Terwujudnya kebijakan di bidang perencanaan program dan anggaran pertahanan (Renprogar)	-	Persentase kebijakan di bidang perencanaan program dan anggaran pertahanan yang diimplementasikan oleh UO Kemhan dan TNI	100	100
Terwujudnya perencanaan pembiayaan program pembangunan jangka pendek (tahunan) Kemhan, Mabes TNI, TNI AD, TNI AL, dan TNI AU yang terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu	a	Persentase perencanaan pembiayaan program pembangunan jangka pendek (tahunan) Kemhan, Mabes TNI, TNI AD, TNI AL, dan TNI AU yang terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu	100	100
	b	Persentase penurunan revisi terhadap produk	15	15

			perencanaan program dan anggaran		
5	Terwujudnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen Pothan yang terkini, akurat, terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu	a	Persentase produk perencanaan dan penganggaran Ditjen Pothan yang akuntabel	100	100
		b	Persentase capaian target program dan kegiatan sesuai Perjanjian Kinerja (PK)	100	100
		c	Persentase capaian target penyerapan anggaran yang tepat waktu	100	100
	Terwujudnya reformasi birokrasi yang efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi dan berkelanjutan	a	Nilai pelaksanaan reformasi birokrasi Ditjen Pothan	80	80
		b	Nilai akuntabilitas kinerja Ditjen Pothan	70	70
		c	Nilai laporan keuangan Ditjen Pothan	70	70
		d	Persentase temuan materiil yang ditindaklanjuti	85	85
	Terwujudnya kebijakan di bidang Keveteranan RI yang implementatif	-	Persentase K/L yang mengimplementasikan kebijakan di bidang Keveteranan RI	65	65
	Terwujudnya kesejahteraan Veteran RI	a	Persentase Veteran RI yang memperoleh pelayanan secara akuntabel dan tepat waktu	100	100
		b	Persentase penanganan pengaduan Veteran yang telah ditindaklanjuti	100	100
	Terwujudnya kebijakan di bidang bela negara yang implementatif	-	Persentase K/L atau Pemda dan Komponen Bangsa lainnya yang mengimplementasikan kebijakan di bidang bela negara	40	50
	Terwujudnya kesadaran dan	-	Tingkat kesadaran dan pemahaman warga	-	25

	pemahaman warga negara terhadap bela negara		negara terhadap bela negara		
	Terwujudnya kesadaran dan pemahaman warga negara terhadap bela negara	a	Persentase kader bela negara yang terbentuk	65	65
		b	Persentase kader bela negara yang telah tertata dan terbina	85	85
	Terwujudnya sumdahan yang siap digunakan untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama	a	Persentase peraturan dan kebijakan di bidang sumdahan yang telah diimplementasikan	10	10
		b	Persentase rekomendasi potensi komcad yang telah tertata dan terbina	13	13
		c	Persentase potensi Sumber Daya Manusia (SDM) pendukung pertahanan yang telah tertata dan terbina	20	25
		d	Persentase potensi Sumber Daya Alam dan Buatan (SDAB) pendukung pertahanan yang telah tertata dan terbina	10,4	13
		e	Persentase potensi Sarana Prasarana (Sarpras) pendukung pertahanan yang telah tertata dan terbina	12	15
	Terwujudnya kebijakan di bidang tekindhan yang implementatif	-	Persentase K/L yang mengimplementasikan kebijakan di bidang tekindhan	65	65
	Tersedianya industri pertahanan yang dapat dikembangkan secara mandiri	-	Persentase industri potensial yang dapat ditetapkan sebagai industri pertahanan	60	60
	Terpenuhinya kebutuhan alpalhankam produksi dalam negeri secara bertahap	a	Persentase produksi alpalhankam dalam negeri yang tepat waktu dan akuntabel	-	100
		b	Persentase implementasi	25	25

		Kandungan Lokal dan Ofset (KLO) yang terlaksana dalam pengadaan alpalhankam luar negeri	25	50
		c Persentase kerja sama industri pertahanan yang terealisasi		
6	Terwujudnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen Kuathan yang terkini, akurat, terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu	a Persentase produk perencanaan dan penganggaran Ditjen Kuathan yang akuntabel	100	100
		b Persentase capaian target program dan kegiatan sesuai Perjanjian Kinerja (PK)	100	100
		c Persentase capaian target penyerapan anggaran yang tepat waktu	100	100
	Terwujudnya reformasi birokrasi yang efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi dan berkelanjutan	a Nilai pelaksanaan reformasi birokrasi Ditjen Kuathan	80	80
		b Nilai akuntabilitas kinerja Ditjen Kuathan	70	70
		c Nilai laporan keuangan Ditjen Kuathan	70	70
		d Persentase temuan materiil yang ditindaklanjuti	85	85
	Terwujudnya kebijakan di bidang fasilitas dan jasa yang implementatif	- Persentase kebijakan di bidang fasilitas dan jasa yang dapat diimplementasikan	80	80
	Terwujudnya kesiapan fasilitas dan jasa dalam rangka mendukung pertahanan negara	a Persentase pangkalan dan daerah latihan yang siap digunakan oleh UO TNI dan Angkatan	85	85
		b Persentase fasilitas pangkalan tanah dan bangunan yang telah tersertifikasi	71,5	60
		c Persentase pemenuhan	80	80

		<p>elayanan LTGA dihadapkan dengan kebutuhan UO TNI dan Angkatan</p> <p>d Persentase kesiapan bidang fasilitas dan jasa pertahanan dalam bidang BBMP yang akuntabel di lingkungan Kemhan dan TNI</p> <p>e Tingkat kesiapan telekomunikasi dalam mendukung pertahanan negara di lingkungan Kemhan dan TNI</p>	<p>80</p> <p>85</p>	<p>80</p> <p>85</p>
	Terwujudnya kebijakan di bidang kesehatan komponen utama pertahanan negara yang implementatif	- Persentase kebijakan di bidang kesehatan komponen utama pertahanan negara yang dapat diimplementasikan	80	80
	Terwujudnya kesiapan dukungan dan pelayanan kesehatan komponen utama pertahanan negara	<p>a Persentase tenaga kesehatan yang siap operasional dalam mendukung OMP dan OMSP</p> <p>b Persentase pemenuhan tenaga kesehatan dalam pelayanan kesehatan</p> <p>c Tingkat kesiapan fasilitas kesehatan dalam rangka dukungan kesehatan</p> <p>d Tingkat kesiapan fasilitas kesehatan dalam rangka pelayanan kesehatan</p>	<p>97</p> <p>68</p> <p>62</p> <p>80</p>	<p>80</p> <p>80</p> <p>85</p> <p>80</p>
	Terwujudnya kebijakan di bidang pembinaan materiil komponen utama pertahanan yang implementatif	- Persentase kebijakan di bidang pembinaan materiil komponen utama pertahanan yang diimplementasikan	80	80
	Terwujudnya pengelolaan alpalhankam (BMN selain tanah,	a Persentase pemenuhan Rencana Kebutuhan (Renbut) alpalhankam dihadapkan pencapaian	62,57	75

	bangunan dan BMP)	MEF aspek fisik bidang alutsista		
		b Persentase penghapusan dan hibah BMN selain tanah, bangunan dan BMP yang terealisasi	91	80
		c Persentase rekomendasi/perizinan terhadap penggunaan senjata standar militer dan penggunaan bahan peledak yang ditindaklanjuti	85	80
		d Persentase rumusan Standar Militer Indonesia (SMI) yang dikeluarkan	-	80
	Terwujudnya kebijakan di bidang Sumber Daya Manusia (SDM) komponen utama pertahanan negara	- Persentase kebijakan di bidang SDM komponen utama pertahanan negara yang diimplementasikan	87	90
	Terwujudnya sumber daya manusia komponen utama pertahanan negara yang profesional	a Persentase sumber daya manusia komponen utama pertahanan negara yang profesional	80	80
		b Persentase pemenuhan sumber daya manusia komponen utama dihadapkan dengan kebutuhan	75	80
7	Terwujudnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Balitbang yang terkini, akurat, terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu	a Persentase produk perencanaan dan penganggaran Balitbang yang akuntabel	100	100
		b Persentase capaian target program dan kegiatan sesuai Perjanjian Kinerja (PK)	100	100
		c Persentase capaian target penyerapan anggaran yang tepat waktu	100	100

	Terwujudnya reformasi birokrasi yang efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi dan berkelanjutan	a	Nilai pelaksanaan reformasi Birokrasi Balitbang	80	80
		b	Nilai akuntabilitas kinerja Balitbang	70	70
		c	Nilai laporan keuangan Balitbang	70	70
		d	Presentase temuan materil yang ditindaklanjuti	85	85
	Terwujudnya hasil litbang Puslitbang Strahan yang dapat digunakan dalam rangka kepentingan pertahanan negara	a	Persentase hasil litbang Puslitbang Strahan yang dapat ditindaklanjuti	100	85
		b	Persentase rekomendasi hasil litbang Puslitbang Strahan yang ditindaklanjuti	100	85
	Terwujudnya hasil litbang Puslitbang Sumdahan yang dapat digunakan dalam rangka kepentingan pertahanan negara	a	Persentase hasil litbang Puslitbang Sumdahan yang dapat ditindaklanjuti	100	85
		b	Persentase rekomendasi hasil litbang Puslitbang Sumdahan yang ditindaklanjuti	100	85
	Terwujudnya hasil litbang Puslitbang Iptekhan yang dapat digunakan dalam rangka kepentingan pertahanan negara	a	Persentase hasil litbang Puslitbang Iptekhan yang dapat ditindaklanjuti	100	85
		b	Jumlah inovasi teknologi dan model/ desain/komponen/ sub komponen alat peralatan pertahanan yang sesuai kemajuan iptek serta dapat dilanjutkan menjadi prototipe	100	85
	Terwujudnya hasil litbang Puslitbang Alpalhan yang dapat digunakan dalam rangka	a	Persentase hasil litbang Puslitbang Alpalhan yang dapat ditindaklanjuti	100	85

	kepentingan pertahanan negara	b	Jumlah model dan atau prototipe hasil litbang yang dapat ditindaklanjuti sebagai <i>First Article (FA)</i>	100	85
		c	Jumlah kerja sama Puslitbang Alpalhan dengan Lembaga Litbang lain	100	85
8	Terwujudnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Badiklat yang terkini, akurat, terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu	a	Persentase produk perencanaan dan penganggaran Badiklat yang akuntabel	100	100
		b	Persentase capaian target program dan kegiatan sesuai Perjanjian Kinerja (PK)	100	100
		c	Persentase capaian target penyerapan anggaran yang tepat waktu	100	100
	Terwujudnya reformasi birokrasi yang efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi dan berkelanjutan	a	Nilai pelaksanaan reformasi birokrasi Badiklat	80	80
		b	Nilai akuntabilitas kinerja Badiklat	70	70
		c	Nilai laporan keuangan Badiklat	70	70
		d	Persentase temuan materiil yang ditindaklanjuti	85	85
	Terwujudnya SDM pertahanan yang memiliki kemampuan bahasa yang baik	a	Persentase peserta Diklat Bahasa yang lulus dengan kategori baik	100	90
		b	Persentase Widyaiswara dan/atau tenaga pendidik yang bersertifikasi sebagai tenaga pengajar Bahasa	70	80
	Terwujudnya Serdiklat Pusdiklat Jemenhan Kemhan/TNI dan	a	Persentase kelulusan Serdiklat Jemenhan dengan kategori baik	100	80

	K/L lain yang memiliki kemampuan kepemimpinan dan manajerial bidang pertahanan	b	Persentase tenaga pendidik Pusdiklat Jemenhan yang tersertifikasi	70	80
	Terwujudnya Serdiklat Pusdiklat Tekfunghan Kemhan/TNI dan K/L lain yang memiliki kemampuan teknis dan fungsional pertahanan	a	Persentase kelulusan serdiklat Tekfunghan dengan kategori baik	100	80
		b	Persentase lulusan Diklat Tekfunghan yang mampu berkinerja lebih baik di satker/satuan asal	100	80
		c	Persentase tenaga pendidik Pusdiklat Tekfunghan yang tersertifikasi	70	80
	Terwujudnya Serdiklat Belneg Kemhan/TNI, K/L dan organisasi lain yang memiliki pengetahuan dan sikap perilaku bela negara	a	Persentase kelulusan Serdiklat Belneg dengan kategori baik	100	80
		b	Persentase tenaga pendidik Belneg yang tersertifikasi	70	80
	Tersedianya lulusan Strata 2 bidang pertahanan yang sesuai standar nasional dan internasional	-	Persentase kelulusan Strata 2 bidang pertahanan yang sesuai standar nasional dan internasional dengan kategori "Sangat Memuaskan"	91,60	89
	Tersedianya lulusan Strata 3 bidang pertahanan yang sesuai standar nasional dan internasional	-	Persentase kelulusan Strata 3 bidang pertahanan yang sesuai standar nasional dan internasional dengan kategori "Sangat Memuaskan"	0	0
	Terwujudnya publikasi penelitian bidang pertahanan negara dan bela negara yang sesuai standar mutu	-	Persentase publikasi penelitian bidang pertahanan negara dan bela negara yang dimuat di Jurnal nasional dan internasional	15	5
	Terwujudnya pengabdian kepada masyarakat di	-	Jumlah kegiatan pengabdian kepada masyarakat di bidang	6	6

	bidang pertahanan negara dan bela negara sesuai standar nasional		pertahanan negara sesuai standar nasional		
9	Terwujudnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Baranahan yang terkini, akurat, terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu	a	Persentase produk perencanaan dan penganggaran Baranahan yang akuntabel	100	100
		b	Persentase capaian target program dan kegiatan sesuai Perjanjian Kinerja (PK)	100	100
		c	Persentase capaian target penyerapan anggaran yang tepat waktu	100	100
	Terwujudnya reformasi birokrasi yang efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi dan berkelanjutan	a	Nilai pelaksanaan reformasi birokrasi Baranahan	80	80
		b	Nilai akuntabilitas kinerja Baranahan	70	70
		c	Nilai laporan keuangan Baranahan	70	70
		d	Presentase temuan materiil yang ditindaklanjuti	85	85
	Terwujudnya pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Kemhan dan TNI yang akuntabel dan <i>up-to-date</i>	a	Persentase aset BMN Kemhan dan TNI yang telah terinventarisir secara tepat dan akuntabel dalam SIMAK BMN	100	100
		b	Persentase aset BMN Kemhan dan TNI yang tersertifikasi	71,64	60
	Terlaksananya pelaporan BMN untuk mendukung Laporan Keuangan (LK) Kemhan dan TNI	-	Persentase UO yang tertib dalam pelaporan BMN dalam mendukung Laporan Keuangan (LK) Kemhan dan TNI	100	80
	Terwujudnya kodifikasi materiil pertahanan yang terintegrasi	a	Persentase materiil pertahanan yang telah dikodifikasi	100	100

		b	Jumlah K/L dan industri nasional yang telah menggunakan kodifikasi dengan sistem Nomor Sediaan Nasional (NSN)	5	5
		c	Persentase kerja sama di dalam dan luar negeri bidang kodifikasi yang ditindaklanjuti	100	100
	Terwujudnya pengadaan jasa konstruksi pertahanan yang terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu	a	Persentase perencanaan teknis yang terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu	100	100
		b	Persentase pelaksanaan pengadaan jasa konstruksi yang terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu	100	100
		c	Persentase hasil pelaksanaan konstruksi sarana pertahanan yang akuntabel dan tepat waktu	100	100
		d	Persentase pengadaan jasa konstruksi sarana pertahanan yang telah <i>e-procurement</i>	2	100
	Terwujudnya pembangunan sarana dan prasarana pertahanan di wilayah perbatasan	-	Persentase hasil pembangunan sarana pertahanan di wilayah perbatasan yang akuntabel dan tepat waktu	100	100
	Terwujudnya pengadaan barang dan jasa alpalhan yang efektif, efisien, transparan, menjamin kerahasiaan, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel	a	Tingkat efektivitas pengadaan barang dan jasa alpalhan	4	5
		b	Persentase pemenuhan barang dan jasa alpalhan dihadapkan dengan rencana kebutuhan	100	100
		c	Persentase capaian kinerja pengadaan alpalhan sesuai kontrak	72	100

		yang disepakati			
10	Tersedianya alutsista industri dalam negeri dalam rangka pertahanan negara	a	Persentase penggunaan alutsista produksi industri dalam negeri dalam rangka pertahanan negara	100	100
		b	Persentase kebutuhan alutsista yang dapat dipenuhi dari pengembangan industri mandiri	61	76
	Terwujudnya pengembangan teknologi dan industri pertahanan dalam rangka <i>First Article (FA)</i>	-	Persentase <i>First Article (FA)</i> yang ditindaklanjuti menjadi material yang digunakan user dan/atau dapat diproduksi massal	-	25
11	Terwujudnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Bainstrahan yang terkini, akurat, terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu	a	Persentase produk perencanaan dan penganggaran Bainstrahan yang akuntabel	100	100
		b	Persentase capaian target program dan kegiatan sesuai Perjanjian Kinerja (PK)	100	100
		c	Persentase capaian target penyerapan anggaran yang tepat waktu	100	100
	Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi dan berkelanjutan	a	Nilai pelaksanaan reformasi birokrasi Bainstrahan	80	80
		b	Nilai akuntabilitas kinerja Bainstrahan	70	70
		c	Nilai laporan keuangan Bainstrahan	70	70
		d	Persentase temuan materiil yang ditindaklanjuti	85	85
	Terwujudnya pengamanan kawasan instalasi strategis pertahanan	-	Persentase gangguan keamanan di kawasan instalasi strategis pertahanan yang dapat diatasi	95	95

	Terwujudnya pemeliharaan dan pembangunan kawasan instalasi strategis pertahanan	-	Persentase aset kawasan instalasi strategis pertahanan yang terpelihara	95	95
	Terwujudnya kerja sama kawasan instalasi strategis pertahanan	-	Persentase kerja sama kawasan instalasi strategis pertahanan yang terealisasi	95	95
	Terwujudnya pengelolaan informasi strategis pertahanan dalam dan luar negeri yang akurat, lengkap dan terkini	a	Persentase informasi strategis pertahanan dalam dan luar negeri yang ditindaklanjuti	95	95
b		Persentase kajian strategis pertahanan dalam dan luar negeri yang ditindaklanjuti	95	95	
c		Persentase penyajian intelijen strategis pertahanan yang ditindaklanjuti	95	95	
	Terwujudnya sistem pertahanan siber dalam rangka pertahanan negara yang mampu menghadapi ancaman dan serangan siber global	a	Persentase jaringan intranet Kemhan yang terlindungi oleh perimeter pertahanan siber dari serangan siber global	80	80
b		Persentase hasil pemantauan dan analisa terhadap serangan siber global yang ditindaklanjuti	80	80	
c		Persentase kesiapan operasional infrastruktur siber	80	80	

c. Analisis Kinerja. Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja UO Kemhan serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

1) Program 1: Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kemhan. (Sekjen Kemhan)

Sasaran Program Sekretaris Jenderal Kemhan adalah terwujudnya manajemen yang terintegrasi dan akuntabel berdasarkan data yang terkini dan akurat dilingkungan UO Kemhan.

Sasaran Program tersebut dijabarkan lagi ke dalam kegiatan dan sasaran kegiatan masing eselon II serta didukung dengan IKU terdiri dari:

- a) Kegiatan: 13 (tiga belas)
- b) Sasaran kegiatan: 20 (dua puluh)
- c) Indikator kinerja utama: 53 (lima puluh tiga)

Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kemhan terlaksana dengan baik, hal ini dapat dilihat dari capaian kinerja telah mencapai 100% dan faktor keberhasilan capaiannya telah mencapai 94,93% serta penyerapan anggaran terealisasi sudah mencapai 92,56%.

Adapun tingkat keberhasilan dan kegagalan dari masing masing kegiatan dapat dijelaskan secara detail sebagai berikut :

- a) Kegiatan pengelolaan sistem informasi pertahanan negara, pagu anggaran yang telah direvisi sebesar Rp.108.810.593.000,- terealisasi Rp.107.377.973.919,- (98,68%) dan capaian kinerja telah mencapai (100%). Bila dilihat dari segi anggaran tersebut dalam realisasinya ada beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan faktor kegagalan.

Faktor keberhasilan dalam pelaksanaan program/kegiatan antara lain:

- (1) Komitmen para pejabat terkait, pejabat dan panitia pengadaan barang dan jasa serta pelaksana dalam menyelenggarakan kegiatan yang telah direncanakan sesuai jadwal dan waktu.
- (2) Melaksanakan koordinasi dan rekonsiliasi anggaran untuk semua jenis belanja dalam mencapai kinerja target daya serap.
- (3) Konsisten dalam menyelenggarakan program kerja dan anggaran, dan menghindari adanya perubahan atau revisi program/kegiatan yang berdampak mekanisme yang rumit dan target kinerja yang akan di capai kecuali revisi karena kebijakan pemerintah yang harus diikuti seperti kenaikan besaran tunjangan kinerja.

Dengan demikian kegiatan pengelolaan sistem informasi pertahanan negara menghasilkan kinerja (*outcome*) yaitu:

- (1) Pusdatin Kemhan telah menyiapkan infrastruktur jaringan yang dapat digunakan oleh seluruh Satker Kementerian Pertahanan.
- (2) Tersedianya data dan informasi, jaringan komunikasi data, sumber daya manusia dan perangkat keras serta perangkat lunak lainnya (aplikasi, server) yang digunakan untuk menganalisa atas kesiapan terhadap ancaman pertahanan khususnya terhadap aset strategis yang dimiliki oleh Kemhan.
- (3) Setiap permasalahan-permasalahan yang ada di masing - masing satker sesuai infrastruktur jaringan, komunikasi data serta data dan Informasi itu sendiri telah dapat direspon cepat dengan dilakukannya pengolahan informasi berbasis repositori informasi sehingga memperoleh pemaknaan lebih baik, termasuk kemampuan simulasi, prediksi dan analisa pola.

- (4) Proses pengambilan keputusan lebih cepat dan akurat berbasis kolaborasi dari pihak terkait, berdasarkan informasi dari intelejen hasil olahan yang bersumber dari internal dan external, terstruktur dan tak terstruktur. Pusdatin mengelola data dan informasi baik secara internal maupun eksternal UO Kemhan, Mabes TNI dan Angkatan serta kementerian lembaga lainnya, data tersebut diolah dan diproses sehingga memudahkan pimpinan dalam pengambilan keputusan secara cepat tepat dan aman.

Analisis terhadap faktor kegagalan.

Pelaksanaan seluruh kegiatan yang didukung dari anggaran pemerintah tahun 2020 sudah mencapai target kinerja sesuai yang direncanakan.

- b) Kegiatan pelaksanaan, administrasi pembiayaan, pembinaan, pengendalian dan pelaporan keuangan pertahanan, pagu anggaran yang telah direvisi sebesar Rp.26.511.987.000,- terealisasi Rp.24.737.710.812,- (93,31%) dan capaian kinerja telah mencapai (100%).

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan yang memadai dan berkelanjutan dalam rangka mendukung pertahanan negara, dihadapkan dengan kompleksitas permasalahan dan kendala yang dihadapi serta dukungan anggaran yang tersedia, maka prioritas sasaran yang dicapai adalah terlaksananya 1 (satu) indikator kinerja utama yang tercantum dalam perjanjian kinerja yang telah ditetapkan antara Kasatker Puslapbinkuhan Kemhan dengan Ka UO Kemhan (Sekjen), penyerapan anggaran (*input*) atau realisasi anggaran rata-rata 93,31% dan capaian keluaran (*output*) tercapai 100%, dengan analisa sebagai berikut:

- (1) Jumlah pelaporan bidang keuangan internal sesuai dengan ketentuan dan selesai tepat waktu, target 27 Laporan/Dokumen dapat terealisasi 27 laporan/dokumen (100%).
- (2) Jumlah pelaporan keuangan sesuai SAP dan selesai tepat waktu, target 15 laporan/dokumen/kegiatan dapat terealisasi 15 laporan/dokumen/kegiatan (100%).
- (1) Jumlah kegiatan layanan manajemen keuangan sesuai ketentuan dan selesai tepat waktu, target 12 bulan layanan dapat terealisasi 12 bulan layanan (100%)

Faktor keberhasilan. Faktor keberhasilan kegiatan mencapai 100% karena kegiatan tersebut telah mempedomani Program Kerja dan Anggaran serta Renlakgiat yang telah dibuat sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan serta setiap personel (pejabat perbendaharaan, pelaksana dan operator) memiliki komitmen dan kemauan yang tinggi serta mengetahui dan memahami tugas tanggung jawabnya masing-masing.

Dengan demikian kegiatan pengelolaan keuangan yang memadai dan berkelanjutan dalam rangka mendukung pertahanan negara menghasilkan kinerja (*outcome*) sebagai berikut:

- (1) Pada tahun 2020, LK Kemhan TA 2019 mendapat Opini terbaik “WTP” dari BPK RI. Berturut-turut opini BPK RI, sebagai berikut: tahun 2015: WTP DPP, tahun 2016: WDP, tahun 2017: WDP, dan tahun 2018: WDP, TA.2019 WTP.
- (2) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) sesuai aplikasi SPAN Kemkeu sebesar 87.57%.

Analisis terhadap faktor kegagalan. Nihil.

- c) Biro Hukum Setjen Kemhan dengan Kegiatan pelayanan Bantuan Hukum, pagu Alokasi Anggaran yang telah direvisi sebesar Rp.10.781.277.000,- dan realisasi sebesar Rp.10.394.625.231,- (96,41%) dan capaian kinerja telah mencapai (100%).

Faktor keberhasilan:

- (1) Terlaksananya kegiatan pemberian bantuan hukum dan nasihat hukum terkait gugatan terhadap aset BMN Kemhan/ TNI/Angkatan.
- (2) Terlaksananya kegiatan pemberian bantuan hukum dan nasihat hukum terkait kepemilikan dan hak penghunian rumah negara.
- (3) Terlaksananya kegiatan pemberian bantuan hukum dan nasihat hukum terkait permasalahan hukum kontrak pengadaan.
- (4) Terlaksananya pemberian penyuluhan hukum tentang peraturan perundangan bagi pegawai Kemhan serta penyuluhan hukum tentang bela negara dan cinta tanah air dari aspek hukum bagi masyarakat di wilayah perbatasan Kalimantan, Papua dan NTT.

Dengan demikian Kegiatan pelayanan bantuan hukum menghasilkan kinerja (*outcome*) sebagai berikut:

- (1) Berhasil mempertahankan aset Kemhan/TNI dan Angkatan dan memberikan dasar hukum yang kuat atas aset BMN Kemhan/TNI dan Angkatan.
- (2) Penghuni rumah dinas memahami hak dan kewajibannya sehingga meminimalisir gugatan terkait kepemilikan dan hak penghunian rumah dinas.
- (3) Kontrak pengadaan yang dilaksanakan di Kemhan/TNI sesuai ketentuan hukum, kepentingan Kemhan/TNI serta terhindar dari persoalan hukum kontrak.
- (4) Meningkatnya landasan dan kesadaran hukum pegawai di lingkungan Kemhan dan warga masyarakat di wilayah perbatasan Kalimantan, Papua dan NTT, sehingga pelanggaran hukum dapat diminimalisir, serta masyarakat perbatasan mencintai bela negara dan cinta tanah air untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan NKRI.

Analisis terhadap faktor kegagalan. Nihil.

- d) Kegiatan Pelayanan rehabilitasi dan perumhaskitan, pagu anggaran yang telah direvisi sebesar Rp.169.918.370.000,- terealisasi Rp.162.993.213.000,- (95,92%) dan capaian kinerja telah mencapai (100%). Meningkatnya penyandang disabilitas Kemhan dan TNI memperoleh pelayanan rehabilitasi hingga mandiri. Dan meningkatnya jenis layanan perumhaskitan sesuai standard di lingkungan Pusrehab Kemhan, target 100%, realisasi 100% dan capaian kinerja Satker 100%, dengan analisa dapat terlaksana sesuai indikator kinerja utama yang tercantum dalam perjanjian kinerja yang telah ditetapkan antara Pusrehab Kemhan dengan Ka UO Kemhan. Berdasarkan capaian kinerja pada kegiatan penyandang disabilitas Kemhan dan TNI memperoleh pelayanan rehabilitasi hingga mandiri. Dan meningkatnya jenis layanan perumhaskitan sesuai standar di lingkungan Pusrehab Kemhan keduanya telah mencapai kinerja 100%, sehingga dapat terlaksana dengan baik didukung berbagai faktor keberhasilan yaitu:

- (1) Pusrehab menghasilkan *outcome*: Penyandang disabilitas yang memiliki rasa percaya diri, produktif, mandiri dan mampu bersosialisasi dengan masyarakat.
- (2) RS. dr Suyoto menghasilkan *outcome*: Pelayanan rumah sakit yang memiliki pelayanan prima dari berbagai jenis layanan serta mampu memberikan tingkat kepuasan pasien hingga menjadi sehat tanpa keluhan yang berkelanjutan dan telah dinyatakan lulus akreditasi SNARS dengan tingkat kelulusan Paripurna Bintang Lima.

Faktor keberhasilan Pusrehab Kemhan:

- (1) Terselenggaranya pelayanan Rehabilitasi Medik meliputi pelayanan kesehatan preventif, promotif dan rehabilitatif, pembuatan/pemberian *orthotik prostetik* kepada Penyandang Disabilitas peserta rehabilitasi terpadu di Pusrehab Kemhan, serta terselenggaranya Rehabilitasi Medik Keliling di daerah bagi para penyandang pisabilitas baik TNI maupun PNS.
- (2) Terselenggaranya Rehabilitasi Medik Paripurna *Return to Combat* (RTC) bagi para penyandang disabilitas TNI.
- (3) Terselenggaranya pelayanan rehabilitasi terpadu penyandang disabilitas personel TNI dan PNS Kemhan tingkat terampil, akselerasi rehabilitasi terpadu serta rehabilitasi vokasional kelas jauh.
- (4) Terselenggaranya pelayanan rehabilitasi sosial dengan kegiatan penelaahan kasus, pemberian paket kerja mandiri bagi peserta rehabilitasi terpadu dan peserta akselerasi rehabilitasi terpadu, kegiatan *Home Visit* dan bimbingan lanjut, serta bimbingan olahraga prestasi tenis kursi roda.

- (5) Pusrehab Kemhan mendapatkan penghargaan zona integritas sebagai satker yang telah dinyatakan lulus dalam melaksanakan program kegiatan dari Kemen PAN dan RB yaitu Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Dengan demikian kegiatan Pelayanan Rehabilitasi dan Perumahsakitkan menghasilkan kinerja (*outcome*) yang dihasilkan dari kegiatan Rehabilitasi yaitu:

- (1) Penyandang disabilitas yang memiliki rasa percaya diri, produktif, inovatif, mandiri dan mampu berkarya.
- (2) Dapat meraih penghargaan kompetisi pada kejuaraan berstandar nasional maupun Internasional.

Faktor keberhasilan perumahsakitkan dr. Suyoto Pusrehab Kemhan:

- (1) Terselenggaranya pelayanan perumahsakitkan dengan kekhususan rehabilitasi medik bagi penyandang disabilitas personel Kemhan dan TNI, personel UO Kemhan beserta keluarga dan masyarakat peserta BPJS.
- (2) Terlaksananya pelayanan medis rawat jalan dan rawat inap yang tepat, cepat dan akurat bagi anggota Kemhan beserta keluarga dan masyarakat, terselenggaranya penyajian data system informasi rumah sakit yang berkesinambungan secara *up-to-date* dan akurat, terlaksananya pelayanan unit Diagnosis, ESWT, laser dan psikologi bagi penyandang disabilitas, anggota Kemhan dan beserta keluarga dan masyarakat.
- (3) Terlaksananya pelayanan unit *orthotik prostetik* bagi pasien umum dan personel Kemhan dan TNI.
- (4) Terlaksananya pelayanan kesehatan gawat darurat medik dan bedah.
- (5) Terlaksananya penyediaan dan pendistribusian obat secara terencana dan tepat.
- (6) Terlaksananya *medical checkup* bagi anggota Kemhan dan TNI secara berkala.
- (7) Terlaksananya kegiatan pertanggungjawaban keuangan PNPB dan pelayanan masyarakat umum secara tepat waktu dan tepat sasaran.

Dengan demikian kegiatan pelayanan RS. dr Suyoto menghasilkan *outcome* yaitu:

- (1) Memiliki pelayanan prima dari berbagai jenis layanan
- (2) Tingkat kepuasan pasien hingga menjadi sehat tanpa keluhan yang berkelanjutan

- (3) Berhasil meraih dan dinyatakan lulus akreditasi Standar Nasional Rumah Sakit (SNARS) dengan tingkat kelulusan Paripurna Bintang Lima.

Analisis faktor kegagalan. Nihil

- e) Kegiatan dukungan pelayanan umum UO Kemhan, pagu anggaran yang telah direvisi Rp.343.465.446.000,- terealisasi Rp.339.896.425.795,- (98,96%) dan capaian kinerja telah mencapai (100%).

Faktor keberhasilan:

- (1) Mampu melaksanakan kegiatan pengamanan baik personel maupun materiil UO Kemhan (100%).
- (2) Mampu melaksanakan pelayanan umum untuk dukungan pimpinan dan dukungan kegiatan satker/subsatker serta mampu melaksanakan pelayanan kesehatan bagi pegawai UO Kemhan (100%).
- (3) Mampu melaksanakan pengadaan bekal perlengkapan baik untuk perorangan maupun perkantoran (100%).
- (4) Mampu melaksanakan inventarisir dan mengamankan aset barang milik negara (100%).

Dengan demikian kegiatan dukungan pelayanan umum UO Kemhan menghasilkan kinerja (*outcome*) adalah tercapainya kepuasan pegawai terhadap pelayanan umum dan penggunaan *e-procurement* terhadap belanja pengadaan barang dan jasa.

Faktor kegagalan Nihil.

- f) Kegiatan dukungan peningkatan sarana dan prasarana aparatur UO Kemhan, pagu anggaran yang telah direvisi sebesar Rp.39.591.959.000.- terealisasi Rp. 39.478.718.475,-(100%) dan capaian kinerja telah mencapai (100%).

Faktor keberhasilan kinerja:

- (1) Mampu melaksanakan perawatan dan pemeliharaan fasilitas bangunan dan sarana prasarana sesuai standar mutu (100%).
- (2) Mampu melaksanakan dukungan, perawatan dan pemeliharaan *mechanical electrical* di lingkungan perkantoran Kemhan sesuai standar mutu (100%).

Dengan demikian kegiatan dukungan peningkatan sarana dan prasarana aparatur UO Kemhan menghasilkan kinerja (*outcomes*) adalah pengelolaan aset BMN UO. Kemhan yang terinventarisir dalam Simak BMN, dapat sarpras UO. Kemhan yang terpelihara sehingga mendapatkan kesesuaian nilai keuangan dengan laporan BMN.

- g) Kegiatan pembinaan dan pengelolaan pegawai UO Kemhan, pagu anggaran yang telah direvisi Rp.49.818.728.000,- terealisasi Rp.47.307.468.246,- (94,96%) dan capaian kinerja telah mencapai (97%).

Untuk mewujudkan sasaran kegiatan pembinaan dan pengelolaan pegawai UO Kemhan adalah terwujudnya SDM pegawai Kemhan yang Profesional dan terwujudnya pegawai Kemhan memenuhi kualifikasi dan kompetensi berdasarkan *merit system*.

Dari sasaran kegiatan tersebut memiliki 3 (tiga) indikator kinerja utamanya yang pada tahun 2020 merupakan awal penerapan Indikator Kinerja utama yang berbeda dengan indikator kinerja utama pada tahun 2019 sebagai berikut:

- (2) Indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Kemhan.

Rekapitulasi hasil pengukuran indeks profesionalitas ASN di Biro Kepegawaian Setjen Kemhan dengan indeks penilaian Per jenis kelamin, per jenis jabatan dan per jenjang jabatan serta per tingkat pendidikan menghasilkan indeks profesionalitas ASN dengan nilai: 72.21 (data terlampir), realisasi ini telah mencapai dari target yang ditentukan 71 sehingga dapat terealisasi dan tercapai sesuai target 101%.

- (3) Indeks Kepuasan Pegawai Kemhan.

Hasil indeks kepuasan pegawai dalam kegiatan yang dilaksanakan Biro Kepegawaian Setjen Kemhan pada tahun 2020 dilakukan dengan memberikan survei dalam setiap akhir dari kegiatan yang dilaksanakan seperti pelaksanaan kegiatan uji kompetensi dan pelaksanaan *assessment*, serta pelaksanaan kegiatan lainnya. Realisasi indeks kepuasan pegawai Kemhan telah mencapai target yang ditentukan yaitu 77 sehingga pencapaian target indeks kepuasan pegawai Kemhan mencapai 100%.

- (4) Indeks *Merit System*

Sasaran kegiatan dari Indikator tersebut adalah terwujudnya pegawai Kemhan yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi berdasarkan *merit system*. Oleh karena itu uji kompetensi dilaksanakan melalui dua jenis uji kompetensi yaitu uji kompetensi Manajerial dan uji kompetensi Teknis. Adapun indikator kelulusan penilaian *asesment* dalam uji kompetensi Manajerial berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Kemhan Nomor 12 Tahun 2015 tentang *Assessment Center* terdapat perbedaan penilaian hasil rekomendasi yang diterapkan pada tahun 2013-2016 dan tahun 2017 s.d. 2020 sebagai berikut:

Pada tahun 2013 s.d. 2016 yaitu:

- 1) Direkomendasikan.
- 2) Direkomendasikan dengan pertimbangan.

- 3) Dipertimbangkan.
- 4) Tetap dalam jabatan.

Pada tahun 2017 s.d. 2020 yaitu:

- 1) Direkomendasikan.
- 2) Dipertimbangkan.
- 3) Tetap dalam jabatan.

Sedangkan untuk uji kompetensi Teknis adalah terpenuhi persyaratan dengan katagori yang mencerminkan tingkat kesenjangan pegawai UO Kemhan yang di-assess terhadap jabatan yang diduduki.

Hal ini terlihat dari pelaksanaan uji kompetensi yang dilaksanakan pada tahun 2020 dari target 0.63 dapat terealisasi dan tercapai sesuai target 100%. Nilai tersebut diperoleh dari personel yang direkomendasikan dari 74 pegawai yang di-asess pada tahun 2020.

Variabel capaian kinerja individu juga didapat dari nilai Sasaran Kerja Pegawai (SKP) terhadap pegawai UO Kemhan yaitu nilai SKP sebesar 80 yang berarti bahwa kinerja individu masih dalam kriteria penilaian baik.

Dengan demikian kegiatan pembinaan dan pengelolaan pegawai UO Kemhan menghasilkan kinerja (*outcome*) yaitu:

- (1) Menghasilkan peta tingkat profesionalitas ASN di Biro Kepegawaian Setjen Kemhan berdasarkan standar profesional tertentu.
- (2) Telah dapat meningkatkan proses analisa kebutuhan diklat dan pengembangan pegawai guna meningkatkan pelayanan kepegawaian.
- (3) Telah dapat meningkatkan proses penempatan dalam jabatan pegawai yang didasarkan atas rekomendasi yang diperoleh dari adanya hasil uji kompetensi manajerial dan uji kompetensi teknis yang sesuai dengan profil kompetensi yang dibutuhkan dalam sebuah jabatan.

Beberapa alternatif solusi atau rencana aksi yang telah dilakukan oleh Biro Kepegawaian Setjen Kemhan pada tahun 2020 dalam rangka peningkatan Kinerja yaitu:

- (1) Terlaksananya kegiatan *Assessment Center*.
- (2) Terlaksananya kegiatan *Development Center*.
- (3) Terlaksananya Sistem Informasi Absensi WFH/WFO *Mobile* Pegawai Kemhan yaitu salah satunya dalam rangka meningkatkan kinerja dan disiplin pegawai.
- (4) Terlaksananya Pembangunan Sistem informasi laporan kesehatan pegawai secara *Online*.

Selain itu keberhasilan Biro Kepegawaian Setjen Kemhan disebabkan terlaksananya seluruh kegiatan yang telah dianggarkan sesuai program kerja yang telah direncanakan.

- h) Kegiatan dukungan perencanaan anggaran dan keuangan UO Kemhan, pagu anggaran yang telah direvisi Rp. 1.714.995.311.000,- terealisasi Rp. 1.703.375.051.308,- (99,32%) dan capaian kinerja telah mencapai (100%). Untuk mendukung sasaran program Sekjen Kemhan, Biro Perencanaan dan Keuangan Setjen Kemhan mempunyai sasaran kegiatan yakni terwujudnya perencanaan, pelaksanaan, pengendalian anggaran dan pelaporan keuangan UO Kemhan yang akuntabel dan tepat waktu.

Faktor Keberhasilan:

Persentase capaian kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan Setjen Kemhan telah mencapai 100% karena pelaksanaan kegiatan tersebut mempedomani jadwal kegiatan (Progjagar, Renlakgiat) yang telah direncanakan pada Tahun 2020 dengan menghasilkan kinerja (*outcome*) yaitu:

- (1) Terlaksananya perencanaan anggaran Satker UO Kemhan yang sesuai dengan norma indeks yang berlaku dan tepat waktu.
 - (2) Tersedianya laporan keuangan yang tepat waktu Satker/Subsatker.
 - (3) Penggunaan anggaran yang akuntabel sesuai dengan alokasi anggaran UO Kemhan.
- i) Kegiatan dukungan administrasi pelayanan pimpinan dan keprotokolan UO Kemhan, pagu anggaran yang telah direvisi Rp.75.986.384.000,- terealisasi Rp.74.991.234.588,- (98,69%) dan capaian kinerja telah mencapai (100%).

Faktor keberhasilan:

- (1) Dalam mendukung kelancaran kegiatan dukungan administrasi pelayanan pimpinan Kemhan diperlukan koordinasi secara intensif dengan satker terkait adanya kepastian anggaran dan konsistensi perencanaan, agar menghindari adanya revisi program dan kegiatan pada tahun berjalan sehingga capaian kinerja dapat memenuhi target sesuai dengan waktu yang direncanakan.
- (2) Diperlukan kerja sama dan koordinasi secara intensif dengan satker terkait lainnya dalam rangka tertib administrasi umum dan ketatausahaan UO Kemhan.

Dengan demikian kegiatan dukungan administrasi pelayanan pimpinan dan keprotokolan UO Kemhan Tahun 2020 menghasilkan kinerja (*outcome*) yaitu:

- (1) Meningkatnya tertib administrasi umum, ketatausahaan dan pengelolaan kearsipan di lingkungan Kemhan sesuai dengan pedoman administrasi umum dan kearsipan yang berlaku.
- (2) Meningkatnya ketepatan waktu dan kualitas bahan/materi sidang/rapat Kabinet/DPR RI dan Rakor Polhukam untuk keperluan pimpinan.
- (3) Meningkatnya kualitas pelayanan pimpinan di bidang keprotokolan.
- (4) Meningkatnya efisiensi perencanaan program dan anggaran serta akuntabilitas dalam pembuatan laporan.

Faktor kegagalan: Nihil

- j) Kegiatan meningkatnya citra positif Kemhan/TNI di masyarakat dan forum internasional, pagu anggaran yang telah direvisi sebesar Rp.23.074.994.000,- terealisasi Rp. 21.645.865.585,- (93,81%) dan capaian kinerja telah mencapai (100%).

Faktor keberhasilan kinerja Biro Humas Setjen Kemhan adalah sebagai berikut:

- (1) Biro Humas telah melaksanakan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).
- (2) Dalam rangka penilaian Keterbukaan Informasi Publik oleh Komisi Informasi Pusat, Kegiatan Pelayanan Publik Kemhan Tahun 2021 menghasilkan target kinerja (*outcome*) yaitu katagori Menuju Informatif.
- (3) Mempertahankan predikat kepatuhan dalam standar pelayanan publik pada kategori zona hijau.

Faktor Peningkatan:

- (1) Telah disusun buku Perpustakaan dengan menggunakan aplikasi *Opac Slim* Perpustakaan.
- (2) Terlaksananya penayangan kegiatan Pimpinan Kemhan terkait fungsi Pertahanan melalui media eletronik dan media cetak (koran dan majalah).

Dengan demikian kegiatan meningkatnya citra positif Kemhan/TNI di masyarakat dan forum Internasional menghasilkan kinerja (*outcome*) yaitu dalam rangka penilaian Keterbukaan Informasi Publik oleh Komisi Informasi Pusat, Kegiatan Pelayanan Publik Kemhan Tahun 2021 menghasil target kinerja (*outcome*) yaitu:

- (1) Meningkatnya kepercayaan dan serta merasa puas terhadap pelayanan informasi (hasil jawaban) dari Kemhan.
- (2) Informasi Kemhan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

- (3) Masyarakat dapat mengetahui perencanaan program kerja pemerintah maupun keuangan yang dikelola oleh dana APBN.

Faktor kegagalan. Nihil.

- k) Kegiatan Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan, Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja UO Kemhan, pagu anggaran yang telah direvisi sebesar Rp.10.447.933.000,- terealisasi Rp. 10.185.581.856,- (97,49%) dan capaian kinerja telah mencapai (100%).

Faktor keberhasilan Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan, Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja UO Kemhan adalah sebagai berikut:

- (1) Persentase Satker yang telah tertera secara kelembagaan yang memenuhi aspek: tepat fungsi, tepat proses dan tepat ukuran di lingkungan Kemhan menggambarkan sejauhmana organisasi dapat berjalan secara baik yang ditandai dengan struktur organisasi yang dibuat sesuai kebutuhan, kesesuaian fungsi dengan tugas pokok organisasi dan pola kerja yang dibangun sesuai prosedur dan bisnis proses organisasi. Satker yang telah tertata secara kelembagaan memenuhi aspek:
- (a) Tepat fungsi yaitu kesesuaian fungsi dengan tugas pokok organisasi.
 - (b) Tepat proses yaitu pola kerja yang dibangun sesuai prosedur dan bisnis proses organisasi.
 - (c) Tepat ukuran yaitu struktur organisasi yang dibuat sesuai kebutuhan.

Dengan demikian kegiatan Kelembagaan dan Analisa Jabatan di lingkungan Kemhan telah menghasilkan kinerja (*outcome*) yaitu tertatanya organisasi atau kelembagaan di Kemhan yang tepat fungsi, tepat proses dan tepat ukuran.

- (2) Persentase Tata Laksana Satker UO Kemhan yang efektif dan efisien adalah aktifitas yang dilaksanakan di seluruh Satker sebagai pedoman dalam setiap pelaksanaan tugas. Berdasarkan evaluasi terhadap ketatalaksanaan di seluruh Satker yang menggambarkan sejauhmana pelaksanaan tata laksana yang efektif dan efisien. Adapun aspek yang menjadi perhatian pelaksanaan tata laksana adalah proses bisnis dan pelaksanaan *e-government*.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas ke di seluruh Satker/Subsatker di lingkungan Kemhan dengan melakukan kegiatan sebagai berikut:

- (a) Penyusunan pedoman dan evaluasi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di lingkungan Kemhan.
- (b) Kegiatan evaluasi SOP AP di lingkungan Kemhan.

- (c) Penyusunan dokumen peta rencana penataan Sistem Aplikasi Berbasis Elektronik (SPBE) dan monitoring penataan SPBE di lingkungan Kemhan.

Dengan demikian kegiatan Ketatalaksanaan meningkatnya Nilai SPBE UO Kemhan dari tahun sebelumnya dengan menghasilkan kinerja (*outcome*) yaitu Meningkatnya indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kemhan sebesar 2,74 dengan Predikat Baik.

Sesuai dengan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/36/KT-03/2021 tanggal 20 Januari 2021 tentang hasil evaluasi SPBE Kementerian Pertahanan mendapatkan indeks SPBE sebesar 2,74 (Predikat Baik).

- (3) Persentase Satker yang telah melaksanakan reformasi birokrasi secara efektif dan efisien. Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi Satker/Subsatker di lingkungan UO Kemhan ditinjau dari aspek:
 - (a) *Road map* reformasi birokrasi dan renja reformasi birokrasi di Satker.
 - (b) Organisasi pelaksanaan reformasi birokrasi.
 - (c) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi.
 - (d) Pembangunan zona integritas.

Pelaksanaan reformasi birokrasi Satker/Subsatker di lingkungan UO Kemhan adalah dengan upaya internalisasi terkait pelaksanaan reformasi birokrasi di masing-masing Satker/ Subsatker UO Kemhan yang dilakukan secara terus menerus guna mencapai hasil yang optimal. Adapun upaya yang perlu dilakukan untuk mencapai hasil yang diharapkan adalah adanya komitmen pimpinan maupun partisipasi dari seluruh pegawai Kemhan.

Adapun langkah-langkah yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di seluruh Satker/Subsatker di lingkungan Kemhan sebagai berikut:

- (a) Kegiatan asistensi pelaksanaan program RB bagi penanggung jawab kegiatan reformasi birokrasi UO Kemhan.
- (b) Kegiatan sosialisasi terhadap 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi di seluruh Satker/subsatker di lingkungan Kemhan.
- (c) Pembangunan Unit Kerja Zona Integritas menuju WBK/WBBM.

Adapun 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi, yaitu:

- (a) Manajemen perubahan
- (b) Penguatan organisasi

- (c) Penguatan tata laksana
- (d) Penguasaan peraturan perundang-undangan
- (e) Penguatan sumber daya manusia
- (f) Penguatan pengawasan
- (g) Penguatan akuntabilitas
- (h) Pelayanan publik.

Dengan demikian kegiatan reformasi birokrasi UO Kemhan tahun 2019 menghasilkan kinerja (*outcome*) yaitu Meningkatnya Nilai Indeks RB UO Kemhan sebesar 69,05 dengan predikat B, sesuai Surat Kemenpan RB Nomor: B/235/M.RB.06/2019 tanggal 30 Desember 2019 tentang Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) UO Kemhan tahun 2019. Namun Nilai RB UO Kemhan Tahun 2020 sampai bulan Februari 2021 belum keluar dari Kemen PAN dan RB.

- (4) Persentase Satker yang menerapkan manajemen SAKIP secara terintegrasi dan akuntabel di lingkungan UO Kemhan meliputi:
 - (a) Menyusun rencana strategis.
 - (b) Menyusun rencana kerja/rencana kinerja tahunan.
 - (c) Menyusun indikator kinerja utama.
 - (d) Menyusun perjanjian kinerja.
 - (e) Melakukan monitoring perjanjian kinerja.

Dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja yang akuntabel dan tepat waktu, telah dilakukan berbagai upaya dalam meningkatkan penerapan sistem akuntabilitas kinerja Satker/Subsatker di lingkungan Kemhan diantaranya melalui kegiatan sebagai berikut:

- (a) Menyelenggarakan kegiatan asistensi SAKIP di lingkungan UO Kemhan dengan narasumber dari Kementerian PAN dan RB.
- (b) Melakukan pengembangan Indikator Kinerja Utama Eselon I, II, III dan IV di lingkungan UO Kemhan.
- (c) Melakukan asistensi dan pendampingan pada Satker/Subsatker dalam menyusun dokumen perencanaan kinerja seperti Rencana Kerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja (PK) dan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LKjIP).

Dengan demikian kegiatan manajemen SAKIP telah ada peningkatan dari tahun sebelumnya dengan menghasilkan kinerja (*outcome*) yaitu Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) UO Kemhan tahun 2019 memperoleh nilai sebesar 65,22 dengan predikat B, sesuai dengan surat Kementerian PAN dan RB Nomor B/100/M.AA.05/2019 tanggal 30 Desember 2019. Namun sampai bulan Februari 2021 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) UO Kemhan tahun 2020 belum keluar dari Kementerian PAN dan RB. Nilai Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya. Hal ini disebabkan oleh pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintah yang berorientasi pada hasil di Kemhan sudah berjalan dan menunjukkan hasil yang baik namun perlu ditingkatkan.

Analisis Faktor Kegagalan.

Kegiatan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja UO Kemhan tahun 2020, secara umum faktor kegagalan hampir tidak ada karena kegiatan tersebut telah terlaksana dengan baik sesuai dengan yang direncanakan di Biro Organisasi dan Tata Laksana Setjen Kemhan telah mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 100% dan realisasi anggaran 100%.

- i) Kegiatan penyusunan perancangan peraturan perundang-undangan bidang pertahanan, pagu anggaran yang telah direvisi sebesar Rp. 8.485.769.000,- terealisasi Rp. 8.284.731.016,- (97,63%) dan capaian kinerja telah mencapai (100%).

Faktor Keberhasilan:

- (1) Terlaksananya pembahasan RUU tentang Pemasarakatan Militer.
- (2) Terlaksananya pembahasan RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah RI dan Pemerintah Republik Fiji tentang Kerja Sama Bidang Pertahanan.
- (3) Terlaksananya pengharmonisasian, pembulatan dan pematapan rancangan peraturan Menteri Pertahanan.
- (4) Terlaksananya penyusunan peta legislasi dan penghimpunan peraturan perundang-undangan.
- (5) Terlaksananya kegiatan pengelolaan dokumentasi dan informasi Hukum dalam rangka pelaksanaan Sistem Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (SJDIH).

Dengan demikian kegiatan perumusan perundang-undangan Strategis Pertahanan menghasilkan kinerja (*outcome*) yaitu tersusunnya rumusan kebijakan peraturan perundang-undangan di bidang pertahanan negara

yang terintegrasi dalam menghadapi ancaman, gangguan, hambatan, tantangan dan peluang baik nasional, regional dan global.

Faktor Kegagalan. Nihil.

- m) Kegiatan pelaksanaan Kelaikan Sarana Pertahanan, pagu anggaran yang telah direvisi sebesar Rp. 11.230.708.000,- terealisasi Rp. 10.773.537.885,- (95,93%) dan capaian kinerja telah mencapai (100%).

Faktor keberhasilan.

Beberapa faktor mempengaruhi keberhasilan dalam melaksanakan program/kegiatan antara lain:

- (1) Komitmen para pejabat terkait, pejabat dan panitia pengadaan barang dan jasa serta pelaksana dalam menyelenggarakan kegiatan yang telah direncanakan sesuai jadwal dan waktu.
- (2) Melaksanakan koordinasi dan rekonsiliasi anggaran untuk semua jenis belanja dalam mencapai kinerja target daya serap.
- (3) Pengajuan renlakgiat terstruktur sesuai kebutuhan untuk keberhasilan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Dengan demikian Kegiatan Pelaksanaan Kelaikan Sarana Pertahanan menghasilkan kinerja (*outcome*) yaitu:

- (1) Meningkatnya pemahaman Penyedia dan Pengguna terhadap Peraturan Kelaikan sehingga menimbulkan rasa nyaman dan percaya diri penyedia dan pengguna Alpalhan hasil pengadaan dan produksi dalam negeri.
- (2) Alat Peralatan Pertahanan (Alpalhan) hasil pengadaan serta produk dalam negeri memenuhi standar kualitas yang telah ditentukan.
- (3) Meningkatnya kualitas personel inspektur kelaikan Kemhan.

Faktor Kegagalan sebagai berikut:

- (1) Adanya pandemi Covid -19 dan pemotongan anggaran sebesar 30% sehingga mempengaruhi realisasi target yang tercantum di dalam Perjanjian Kinerja.
 - (2) Adanya penambahan anggaran belanja alpalhan di akhir tahun pada Satker diluar puslaik sehingga mempengaruhi jumlah sertifikat yang diterbitkan.
 - (3) Keterlambatan penyelesaian pekerjaan kontrak pengadaan Alpalhan.
- 2) Sasaran Program Inspektorat Jenderal Kemhan (Sararan Program yang ke-2) adalah Meningkatnya pengelolaan keuangan dan kinerja aparatur Kemhan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Sasaran Program Inspektorat Jenderal Kemhan yang ke-2 didukung dengan 6 (enam) sasaran kegiatan dan 6 (enam) indikator kinerja utama terlaksana dengan baik, hal ini dapat dilihat dari capaian kinerja telah mencapai 100% sesuai dengan target yang direncanakan, faktor keberhasilan ini didukung karena dari 6 (enam) indikator kinerja utama tersebut seluruhnya telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan tepat waktu, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 53.409.973.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 53.157.153.931,- (99,53%) dan capaian kinerja telah mencapai (100%).

Dengan demikian Sasaran Program Inspektorat Jenderal Kemhan yang ke-2 meningkatnya pengelolaan keuangan dan kinerja aparatur Kemhan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dengan menghasilkan (*outcome*) yaitu:

- a) Terwujudnya penilaian atas laporan keuangan Kemhan dan TNI mendapat opini WTP.
- b) Terwujudnya paradigma pada pengawasan melalui *pre, post, curren* audit.
- c) Meningkatnya kualitas SDM sesuai dengan kompetensi masing-masing di bidang pengawasan.
- d) Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) berdasarkan Surat Kemenpan RB Nomor: B/235/M.RB.06/2019 tanggal 30 Desember 2019 Kementerian Pertahanan mendapatkan nilai Indeks RB sebesar 69,05 (Predikat B).
- e) Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) berdasarkan Surat Kemenpan RB Nomor: B/100/M.AA.05/2019 tanggal 30 Desember 2019 Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) tahun 2019 nilai sebesar 65,22 (Predikat B). Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kerjanya. Hal ini disebabkan oleh pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintah yang berorientasi pada hasil di Kemhan sudah berjalan dan menunjukkan hasil yang baik, namun masih perlu ditingkatkan.

Adapun tingkat keberhasilan dan kegagalan dari masing masing kegiatan dapat dijelaskan secara detail sebagai berikut:

- a) Kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Itjen Kemhan, Pagu Anggaran sebesar Rp. 49.294.830.000,- dan yang terealisasi sebesar Rp. 49.042.010.931,- (99,49%) dan capaian kinerja telah mencapai (100%).

Faktor keberhasilan antara lain:

- (1) Terlaksananya kegiatan pengawasan pemeriksaan (*wasrik*) yang meliputi *pre audit, current audit dan post audit*.
- (2) Terlaksananya Tindak Lanjut temuan audit internal dan eksternal.

- (3) Terlaksananya kegiatan Review RKA K/L, LAKIP, PBJ, Pengelolaan Anggaran, Hibah BMN, RKBMN, BMP, LTGA, LK Kemhan dan TNI Semester-I dan Semester-II.
- (4) Terlaksananya kegiatan terhadap BPK RI (monitoring, evaluasi tindak lanjut, pendampingan).
- (5) Terlaksananya kegiatan terhadap Kemenpan RB (PMPRB, SAKIP, ZI, UPG, SPBE, WBS) Itjen Kemhan.
- (6) Terlaksananya kegiatan Verifikasi, Monitoring, TPTGR, PDTT dan TKTM (Transfer Masuk Transfer Keluar).
- (7) Terlaksananya peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) sebagai *quality assurance*, *consulting partner* dan *early warning system*.
- (8) Terlaksananya pembayaran gaji, tunjab, tunjangan dan belanja barang Itjen Kemhan TA. 2020.
- (9) Terlaksananya penyusunan Program Kegiatan Pengawasan Tahunan (PKPT) Itjen Kemhan TA. 2020.
- (10) Terlaksananya pengendalian anggaran yang tertib sesuai dengan dukungan alokasi anggaran yang terdapat dalam DIPA sehingga tidak menyimpang dari kegiatan yang telah direncanakan.
- (11) Terlaksananya sistem informasi Itjen Kemhan berdasarkan data yang terkini dan akurat secara manual maupun elektronik.
- (12) Terlaksananya administrasi kepegawaian, ketatausahaan dan kerumahtanggaan Itjen Kemhan yang akuntabel dan tepat waktu.
- (13) Terlaksananya administrasi umum/tata usaha Itjen, administrasi keuangan, pencocokan dan perhitungan anggaran (rekonsiliasi), evaluasi dan laporan program kerja dan anggaran sesuai dengan jadwal dan waktu yang telah ditetapkan.
- (14) Terlaksananya penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja (PK) Itjen Kemhan TA. 2020.

Dengan demikian kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Itjen Kemhan menghasilkan kinerja (*outcome*) yaitu sebagai berikut:

- (1) Terlaksananya wasrik *pre*, *current* dan *post* audit di UO Kemhan, yayasan dan pemanfaatan aset di lingkungan TNI.
- (2) Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan Tahun 2020 sebesar Rp.19.458.146.376,- pembayaran tunjangan khusus/kegiatan/kinerja sebesar Rp.13.923.755.555,- lembur Rp.23.720.000,00, dan belanja barang sebesar Rp.15.443.230.000,-.

- (3) Terlaksananya pengendalian anggaran yang tertib sesuai dengan dukungan alokasi anggaran yang terdapat dalam DIPA sampai dengan revisi - 6 sebesar Rp.53.409.973.000,00 sehingga tidak menyimpang dari kegiatan yang telah direncanakan.
- (4) Terlaksananya kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan Internal oleh APIP Itjen Kemhan sebanyak 721 temuan dan pemeriksaan oleh Eksternal (BPK) sebanyak 16 temuan, yaitu 11 temuan untuk lemahnya Sistem Pengendalian Internal (SPI) serta 5 temuan untuk Kepatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan.
- (5) Terlaksananya kegiatan review anggaran satker di lingkungan UO Kemhan.
- (6) Terlaksananya peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) sebagai *Quality Assurance*, *Consulting Partner* dan *Early Warning System* pada audit kewajaran harga pengadaan barang jasa Covid-19.
- (7) Terlaksananya penataan dan kelengkapan dosir personel yang tersimpan sejumlah 205 buah dosir, dibuat sesuai file dan disimpan menurut bagian.
- (8) Terlaksananya sistem informasi berdasarkan data yang terkini dan akurat baik secara manual maupun elektronik, diantaranya:
 - (a) Terlaksananya penyimpanan data dan penyajian informasi dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy*.
 - (b) Paparan rencana dan evaluasi Wasrik Tahun 2020.
 - (c) Terlaksananya *update* anti virus, pemeliharaan hardware dan software komputer, pemeliharaan jaringan lokasi area network Itjen Kemhan.
 - (d) Telah selesai melaksanakan kegiatan *Quality Assurance* atas penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP di lingkungan UO Kemhan oleh Tim dari BPKP.
 - (e) Telah selesai melaksanakan *Entry Meeting* oleh Tim Evaluator Kementerian PAN-RB dalam rangka pelaksanaan survei internal reformasi birokrasi secara *online* dan evaluasi reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Zona Integritas (ZI) Tahun 2020.
 - (f) Telah melaksanakan kegiatan monitoring evaluasi terkait Aplikasi SIMWAS.
 - (g) Telah melaksanakan Submit LHKASN di lingkungan UO Kemhan.

- b) Kegiatan pengawasan Inspektorat I, pagu anggaran yang telah direvisi sebesar Rp. 902.307.000,- dan yang terealisasi Rp. 902.307.000,- (100%) dan capaian kinerja telah mencapai (100%).

Faktor Keberhasilan:

- (1) Terlaksananya bimtek tentang pengadaan barang dan jasa melalui Program Pinjaman Dalam Negeri (PDN) dan Pinjaman Luar Negeri (PLN) di lingkungan Kemhan.
- (2) Terlaksananya bimtek tentang jenis-jenis kontrak dan tata cara pembayaran kontrak.
- (3) Terlaksananya peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) sebagai *Quality Assurance, Consulting Partner* dan *Early Warning System* pada audit kewajaran harga pengadaan barang jasa Covid-19.
- (4) Terlaksananya pengawasan dan pemeriksaan di bidang pengawasan Inspektorat I TA. 2020 sesuai Progjagar Itjen Kemhan.
- (5) Terlaksananya dengan baik dan sesuai ketentuan pengawasan di bidang pengadaan Barang dan Jasa.
- (6) Terlaksananya urusan administrasi Inspektorat I TA. 2020.

Dengan demikian kegiatan pengawasan Inspektorat I Itjen Kemhan/TNI menghasilkan kinerja (*outcome*) yaitu terlaksananya pengawasan dan pemeriksaan di bidang pengadaan Barang dan Jasa sebagai berikut:

- (1) Pengawasan dan pemeriksaan di bidang pengawasan pengadaan barang dan jasa TA. 2020 sesuai Progjagar Itjen Kemhan pada kegiatan:
 - (a) Wasrik terhadap *post* audit Semester I dan *current* audit terhadap UO Kemhan, Manset BMN di lingkungan TNI AD, TNI AL dan TNI AU.
 - (b) *Review* terhadap Laporan Keuangan Kemhan/TNI TA. 2020.
- (2) Bimbingan teknis terhadap Personel Auditor Itjen Kemhan dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan memelihara keterampilan auditor, yaitu:
 - (a) Bimbingan Teknis tentang Pengadaan Barang dan Jasa melalui Program Pinjaman Dalam Negeri (PDN) dan Pinjaman Luar Negeri (PLN) di lingkungan Kemhan.
 - (b) Bimbingan Teknis tentang Jenis-Jenis Kontrak dan Tata Cara Pembayaran Kontrak.
- (3) *Quality Assurance, Consulting Partner* dan *Early Warning System* pada audit kewajaran harga pengadaan barang jasa Covid-19 di alpalhan Baranahan Kemhan.

- (4) Urusan administrasi Inspektorat I TA. 2020 berjalan dengan lancar untuk mendukung tugas dan fungsi Inspektorat I.
- c) Kegiatan Pengawasan Inspektorat II, pagu anggaran telah direvisi sebesar Rp. 803.255.000,- terealisasi Rp. 803.255.000,- (100%) dan capaian kinerja mencapai (100%).

Faktor Keberhasilan:

- (1) Terlaksananya penyusunan Permenhan tentang Perubahan Permenhan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi di lingkungan Kemhan dan TNI.
- (2) Terlaksananya kegiatan LK Kemhan dan TNI Semester-II TA. 2019 dan Semester-I TA. 2020.
- (3) Terlaksananya kegiatan *Review* RKA K/L, Reviu Revisi Anggaran di Lingkungan Kemhan.
- (4) *Current Audit* terhadap pengadaan Barang/Jasa dalam rangka penanggulangan Covid - 19 di Unit Organisasi Kemhan.
- (5) Terlaksananya pengawasan dan pemeriksaan di bidang pengawasan Inspektorat II TA. 2020 sesuai Progjagar Itjen Kemhan.
- (6) Terlaksananya dengan baik dan sesuai ketentuan pengawasan di bidang keuangan dan penganggaran.
- (7) Terlaksananya urusan administrasi Inspektorat II TA. 2020.

Dengan demikian kegiatan pengawasan Inspektorat II Itjen Kemhan/TNI menghasilkan kinerja (*outcome*) yaitu terlaksananya pengawasan dan pemeriksaan di bidang keuangan dan penganggaran sebagai berikut:

- (1) Pengawasan dan pemeriksaan di bidang pengawasan pengadaan barang dan jasa TA. 2020 sesuai Progjagar Itjen Kemhan pada kegiatan post audit Semester I dan *current audit* terhadap UO Kemhan, Manset BMN di lingkungan TNI AD, TNI AL dan TNI AU.
- (2) Telah disusunnya Permenhan tentang Perubahan Permenhan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi di Lingkungan Kemhan dan TNI, sebagai payung hukum yang akuntabel dalam pelaksanaan Tutben dan Tutgi di lingkungan Kemhan dan TNI.
- (3) LK Kemhan dan TNI Semester-II TA. 2019 dan Semester-I TA. 2020 dapat disajikan sesuai dengan ketentuan.
- (4) *Review* RKA K/L, Review Revisi Anggaran di lingkungan Kemhan untuk memberikan jaminan terhadap pelaksanaan anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- (5) *Current Audit* terhadap pengadaan barang/jasa dalam rangka penanggulangan Covid-19 di UO Kemhan untuk memberikan keyakinan dan jaminan pelaksanaan pengadaan sudah sesuai ketentuan yang berlaku.
 - (6) Urusan administrasi Inspektorat II TA. 2020 berjalan dengan lancar untuk mendukung tugas dan fungsi Inspektorat II.
- d) Kegiatan pengawasan Inspektorat III, pagu anggaran yang telah direvisi sebesar Rp. 803.255.000,- dan yang telah terealisasi sebesar Rp. 803.255.000,- (100%) dan capaian kinerja mencapai (100).

Faktor Keberhasilan:

- (1) Terlaksananya bimbingan teknis tentang tata cara wasrik pengelolaan keuangan PNBP rumah sakit.
- (2) Terlaksananya kegiatan verifikasi memorandum dalam rangka serah terima jabatan di lingkungan Kemhan.
- (3) Terlaksananya pengawasan dan pemeriksaan di bidang pengawasan Inspektorat III TA. 2020 sesuai Progjagar Itjen Kemhan.
- (4) Terlaksananya dengan baik dan sesuai ketentuan mengenai pengawasan di bidang SDM, hukum, manajemen dan layanan publik.
- (5) Terlaksananya urusan administrasi Inspektorat III TA. 2020.

Dengan demikian kegiatan pengawasan Inspektorat III Itjen Kemhan/TNI menghasilkan kinerja (*outcome*) yaitu terlaksananya pengawasan dan pemeriksaan di bidang SDM, hukum, manajemen dan layanan publik sebagai berikut:

- (1) Pengawasan dan pemeriksaan di bidang pengawasan SDM, hukum, manajemen dan layanan publik TA. 2020 sesuai Progjagar Itjen Kemhan pada kegiatan *post audit* Semester I dan *current audit* terhadap UO Kemhan, Manset BMN di Lingkungan TNI AD, TNI AL dan TNI AU.
- (2) Bimbingan teknis tentang tata cara wasrik pengelolaan keuangan PNBP rumah sakit terhadap personel Auditor Itjen Kemhan dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan memelihara keterampilan auditor.
- (3) Verifikasi memorandum dalam rangka serah terima jabatan di lingkungan Kemhan dalam rangka memberikan jaminan bahwa pelaksanaan tugas dan program kerja dan anggaran dilaksanakan sesuai ketentuan.
- (4) Urusan administrasi Inspektorat III TA. 2020 berjalan dengan lancar untuk mendukung tugas dan fungsi Inspektorat III.

- e) Kegiatan Pengawasan Inspektorat IV, pagu anggaran yang telah direvisi sebesar Rp. 803.255.000,- dan yang terealisasi sebesar Rp. 803.255.000,- (100%) dan capaian kinerja mencapai (100%).

Faktor Keberhasilan:

- (1) Terlaksananya bimbingan teknis tata cara *review* revaluasi BMN di lingkungan Kementerian Pertahanan.
- (2) Terlaksananya kegiatan revaluasi BMN Tahun 2017 - 2018 di lingkungan Kemhan dan TNI, serta kegiatan cokit data revaluasi BMN.
- (3) Terlaksananya pengawasan dan pemeriksaan di bidang pengawasan Inspektorat IV TA. 2020 sesuai Projjagar Itjen Kemhan.
- (4) Terlaksananya dengan baik dan sesuai ketentuan mengenai pengawasan di bidang BMN dan logistik.
- (5) Terlaksananya urusan administrasi Inspektorat IV TA. 2020.

Dengan demikian kegiatan pengawasan Inspektorat IV Itjen Kemhan/TNI menghasilkan kinerja (*outcome*) yaitu terlaksananya pengawasan dan pemeriksaan di bidang BMN dan logistik sebagai berikut:

- (1) Pengawasan dan pemeriksaan di bidang BMN dan logistik TA. 2020 sesuai Projjagar Itjen Kemhan pada kegiatan *post audit* Semester I dan *current audit* terhadap UO Kemhan, Manset BMN di lingkungan TNI AD, TNI AL dan TNI AU.
 - (2) Bimbingan teknis tata cara *review* revaluasi BMN di lingkungan Kemhan terhadap personel Auditor Itjen Kemhan dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan memelihara keterampilan auditor.
 - (3) Kegiatan revaluasi BMN Tahun 2017 - 2018 di lingkungan Kemhan dan TNI, serta kegiatan cokit data revaluasi BMN dalam rangka pemutakhiran data aset BMN di lingkungan Kemhan dan TNI.
 - (4) Urusan administrasi Inspektorat IV TA. 2020 berjalan dengan lancar untuk mendukung tugas dan fungsi Inspektorat IV.
- f) Kegiatan Pengawasan Inspektorat V, pagu anggaran yang telah direvisi sebesar Rp. 803.071.000,- dan yang terealisasi sebesar Rp. 803.071.000,- (100%) dan capaian kinerja mencapai (100%).
Faktor keberhasilan antara lain:

- (1) Terlaksananya penyusunan Permenhan tentang *Whistleblowing System* (WBS) di lingkungan Kemhan.
- (2) Terlaksananya Review atas LKj IP UO Kemhan TA. 2019.
- (3) Terlaksananya pengawasan dengan tujuan tertentu atas penugasan Menteri pada PT. ASABRI (Persero).

- (4) Terlaksananya pengawasan dan pemeriksaan di bidang pengawasan Inspektorat V TA. 2020 sesuai Progjagar Itjen Kemhan.
- (5) Terlaksananya dengan baik dan sesuai ketentuan pengawasan di bidang organisasi, tatalaksana, kinerja dan PDTT.
- (6) Terlaksananya urusan administrasi Inspektorat V TA. 2020.

Dengan demikian kegiatan pengawasan Inspektorat V Itjen Kemhan/TNI menghasilkan kinerja (*outcome*) yaitu terlaksananya pengawasan dan pemeriksaan di bidang organisasi, tatalaksana, kinerja dan PDTT sebagai berikut:

- (1) Pengawasan dan pemeriksaan di bidang pengawasan organisasi, tata laksana, kinerja dan PDTT TA. 2020 sesuai Progjagar Itjen Kemhan pada kegiatan *post* audit Semester I dan *current* audit terhadap UO Kemhan, Manset BMN di Lingkungan TNI AD, TNI AL dan TNI AU.
 - (2) Telah disusunnya Permenhan tentang tentang *Whistleblowing System (WBS)* di Lingkungan Kemhan, sebagai payung hukum yang akuntabel dalam pelaksanaan WBS di lingkungan Kemhan dan TNI.
 - (3) Memberikan penilaian atas LKJIP UO Kemhan TA. 2019 kepada Satker.
 - (4) Telah diberikan masukan kepada Menteri atas pelaksanaan Pengawasan dengan tujuan tertentu pada PT. ASABRI (Persero).
 - (5) Urusan administrasi Inspektorat V TA. 2020 berjalan dengan lancar untuk mendukung tugas dan fungsi Inspektorat V.
- 3) Sasaran Program Direktorat Strategi Pertahanan Kemhan (Sasaran Program yang ke-3) adalah terwujudnya kebijakan dan pelaksanaan strategi pertahanan negara yang terintegrasi dan memiliki efek dalam menghadapi ancaman, gangguan, hambatan, tantangan dan peluang baik nasional, regional dan global.

Sasaran Program yang ke-3 didukung dengan 5 (lima) Sasaran kegiatan dan 22 (dua puluh dua) indikator kinerja utama terlaksana dengan baik, hal ini dapat dilihat dari capaian kinerja telah mencapai 100% sesuai dengan target yang direncanakan. Faktor keberhasilan ini didukung karena dari 22 (dua puluh dua) indikator kinerja utama tersebut seluruhnya 100% telah dilaksanakan dengan baik dalam kondisi pandemi Covid-19, serta penyerapan anggaran sudah terealisasi mencapai 95,68%. Adapun tingkat keberhasilan dan kegagalan dari masing-masing kegiatan dapat dijelaskan secara detail sebagai berikut :

- a) Kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen Strahan Kemhan, pagu anggaran yang telah direvisi sebesar Rp.60.601.035.000,- terealisasi Rp.57.535.183.908,- atau 94,94% dan capaian kinerja telah mencapai (100%). Dilihat dari capaian kinerja

(100%) seluruh kegiatan dapat dilaksanakan sesuai rencana dan dapat diselesaikan dengan baik, dengan *output* 9 (sembilan) Laporan Dukungan Manajemen, 26 (dua puluh enam) Laporan Manajemen perencanaan dan pelaporan, sedangkan realisasi mencapai (98,13%) karena adanya kelebihan alokasi dan pengembalian gaji dan tunjangan kinerja serta perjalanan dinas luar negeri.

Faktor Keberhasilan:

- (1) Kegiatan dapat terlaksana sesuai jadwal karena didukung oleh SDM yang mumpuni di bidangnya.
- (2) Penarikan dapat terlaksana sesuai jadwal, karena didukung perencanaan yang baik.
- (3) Terlaksananya dukungan alokasi anggaran sesuai DIPA sehingga tidak menyimpang dari kegiatan yang telah dilaksanakan.
- (4) Terlaksananya system informasi berdasarkan data yang terkini dan akurat sesuai secara manual maupun elektronik.
- (5) Terlaksananya administrasi kepegawaian, ketatausahaan dan kerumahtanggan Ditjen Strahan Kemhan yang akuntabel dan tepat waktu.

Dengan demikian kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen Strahan Kemhan menghasilkan kinerja (*outcome*) yang baik walaupun mengalami pengurangan anggaran sebesar Rp. 27.887.857.000,- namun kegiatan Ditjen Strahan Kemhan dengan baik pada setiap kegiatan, pembinaan personel dan materiil serta terselenggaranya penyaluran gaji dan tunjangan sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga 309 (tiga ratus sembilan) pegawai Ditjen Strahan Kemhan terpelihara kesejahteraan, moril dan etos kerjanya.

Faktor Kegagalan:

Terdapat beberapa kegiatan Setditjen yang tidak dapat terlaksana karena *refocusing* anggaran dan dialihkan tahun berikutnya.

- b) Kegiatan perumusan kebijakan strategis dan kebijakan implementatif, pagu anggaran yang telah direvisi sebesar Rp.3.175.396.000,- terealisasi Rp.3.171.352.661,- (99,87%) dan capaian kinerja telah mencapai (100%). Dilihat dari capaian kinerja (100%) dapat dilaksanakan sesuai rencana dan dapat diselesaikan dengan baik, dengan *output* 19 (sembilan belas) naskah rekomendasi kebijakan strategis pertahanan, 4 (empat) peraturan dan 2 dokumen regulasi strategis pertahanan *outcome* tersedianya dokumen kebijakan strategis untuk meningkatkan kelengkapan kebijakan pertahanan negara sehingga dapat memenuhi kepentingan nasional serta mampu menghadapi setiap ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan global.

Faktor Keberhasilan:

Produk-produk kebijakan strategis pertahanan negara dapat di-selesaikan dan diimplementasikan dan hal ini akan berpengaruh kepada pembuatan dan penyusunan kebijakan strategis pertahanan negara kedepan.

Dengan demikian kegiatan perumusan kebijakan strategis dan kebijakan implementatif menghasilkan kinerja (*outcome*) yaitu:

- (1) Persentase kebijakan strategis pertahanan yang diimplemen- tasikan kebijakan strategis K/L terkait untuk kepentingan pertahanan negara, target pencapaian sasaran 80%.
- (2) Tingkat pemahaman K/L terhadap yang faham terhadap kebijakan pertahanan, target pencapaian sasaran 83%.

Faktor Kegagalan antara lain:

Produk-produk kebijakan strategis pertahanan negara belum dapat diimplementasikan secara menyeluruh kepada K/L terkait karena kondidi Covid-19 sehingga K/L terkait belum dapat menindaklanjuti produk-produk strategis yang dibuat oleh Strahan Kemhan.

- c) Kegiatan Kerjasama Internasional Bidang Pertahanan (Ditkersinhan), pagu revisi anggaran sebesar Rp. 4.593.121.000,- terealisasi sebesar Rp. 4.578.014.350,- atau 99,67% dan capaian kinerja telah mencapai 100%. Dilihat dari capaian kinerja (100%) dapat dilaksanakan sesuai rencana dan dapat diselesaikan dengan baik, dengan *output* 12 (dua belas) laporan rekomendasi kebijakan kerja sama internasional.

Faktor Keberhasilan antara lain:

Kegiatan di Subsatker Ditkersinhan Ditjen Strahan Kemhan TA.2020 adalah kegiatan yang dilaksanakan di awal tahun yang tidak terkena pemotongan. Selain itu terdapat beberapa negara sahabat yang tidak memberlakukan *lockdown* di negaranya sehingga kegiatan dapat tetap dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan negara-negara sahabat. Kegiatan multilateral dan bilateral sebagian besar dapat dilaksanakan secara virtual dengan beberapa negara-negara sahabat menggunakan anggaran *refocusing*.

Dengan demikian kegiatan kerja sama internasional menghasilkan kinerja (*outcome*) terwujudnya peningkatan kualitas Diplomasi Pertahanan dalam rangka mencapai kepentingan nasional dalam pertahanan di forum internasional, yaitu:

- (1) Persentase perjanjian kerja sama bilateral dengan negara di bidang pertahanan yang terealisasi, target pencapaian sasaran 85%.
- (2) Persentase perjanjian kerja sama multilateral dengan negara sahabat di bidang pertahanan yang terealisasi, target pencapaian sasaran 88%.

- (3) Persentase kegiatan bilateral, regional dan multilateral di bidang pertahanan yang ditindaklanjuti dalam kerja sama antar negara, target pencapaian sasaran 80%.
- (4) Persentase negara sahabat yang melakukan pertukaran Perwira siswa dengan Kemhan/TNI, target pencapaian sasaran 90%.

Faktor Kegagalan:

Kegiatan di Subsatker Ditkersinhan Ditjen Strahan Kemhan TA.2020 dikarenakan adanya pemotongan anggaran kegiatan yang mengakibatkan beberapa kegiatan ditunda pelaksanaannya sampai dengan tahun depan. Situasi dunia yang masih dalam masa pandemi Covid-19 mengakibatkan beberapa negara sahabat memberlakukan *lockdown* terhadap segala aktivitas sehingga beberapa kegiatan Ditkersinhan Ditjen Strahan Kemhan terhambat dan tidak dapat dilaksanakan. Selain itu masih ada beberapa kegiatan yang tidak terdukung anggarannya sehingga mengakibatkan kegiatan tersebut belum dapat dilaksanakan.

- d) Kegiatan perumusan kebijakan pengerahan komponen pertahanan (Ditrahkomhan), pagu revisi anggaran sebesar Rp. 2.146.425.000,- terealisasi Rp. 2.128.227.115,- atau (99,15%) dan capaian kinerja telah mencapai (100%). Dilihat dari capaian kinerja (100%) dapat dilaksanakan sesuai rencana dan dapat diselesaikan dengan baik dengan *output* 12 (dua belas) laporan rekomendasi kebijakan pengerahan dan 1 (satu) peraturan regulasi kebijakan pengerahan.

Faktor Keberhasilan:

- (1) Adanya pemahaman dari Pemda/*stakeholder* terkait mengenai pentingnya Bela Negara.
- (2) Adanya hubungan baik antara Indonesia dengan dunia Internasional Terlaksananya Kajian tentang Satgas Konga MONUSCO Kongo TA. 2020, pencapaian sasaran kegiatan 100%.

Dengan demikian kegiatan perumusan kebijakan pengerahan komponen pertahanan negara menghasilkan kinerja (*outcome*) terwujudnya kebijakan pengerahan komponen pertahanan negara yang dipedomani dan diimplementasikan untuk kepentingan pertahanan negara, yaitu:

- (1) Persentase K/L yang mengimplementasikan kebijakan pengerahan komponen pertahanan negara, target pencapaian sasaran 65%.
- (2) Tingkat pemahaman K/L terhadap kebijakan pengerahan komponen pertahanan negara, target pencapaian sasaran 70%.
- (3) Persentase keberhasilan misi pemeliharaan perdamaian dunia, target pencapaian sasaran 100%.

- (4) Telah dilaksanakan pelatihan Bela Negara (Komcad) oleh beberapa Pemda/Mahasiswa di Indonesia serta pengiriman pasukan perdamaian melalui PBB.

Faktor Kegagalan:

Masih kurangnya pelaksanaan Bela Negara (Komcad) oleh Pemda dikarenakan belum adanya anggaran dan Peraturan Pemerintah yang mewadahi hal tersebut.

- f) Kegiatan pengelolaan wilayah pertahanan, pagu anggaran sebesar Rp. 1.784.883.000,- terealisasi Rp. 1.767.184.226,- atau (99,01%) dan capaian kinerja telah mencapai (100%). Dilihat dari capaian kinerja (100%) dapat rencana dan dapat diselesaikan dengan baik, dengan *output* 6 (enam) Rekomendasi kebijakan wilayah pertahanan dan 2 (dua) Regulasi kebijakan wilayah pertahanan. Adapun hambatan selama kegiatan penanganan wilayah perbatasan terutama untuk pelaksanaan pertemuan dengan negara lain tergantung kepada jadwal dari Kementerian Luar Negeri.

Faktor Keberhasilan:

- (1) Kebijakan wilayah pertahanan telah diimplementasikan di K/L/Pemda karena merupakan salah satu dasar aturan dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah.
- (2) Produk Rencana Wilayah Pertahanan (RWP) merupakan wilayah pertahanan yang terintegrasi dengan K/L maupun pemda yang menggambarkan tentang seberapa banyak wilayah pertahanan yang telah terakomodir dalam RTRW, RZ, RTR KSN yang harus dipedomani K/L atau Pemda.

Dengan demikian kegiatan pengelolaan wilayah pertahanan menghasilkan kinerja (*outcome*) yaitu:

- (1) Terwujudnya batas wilayah darat, laut dan udara yang jelas, sehingga mengurangi jumlah kasus pelanggaran batas baik oleh militer maupun sipil.
- (2) Terwujudnya penataan wilayah pertahanan yang terintegrasi.
- (3) Terwujudnya penetapan dan pengelolaan batas negara dan kawasan perbatasan.

Faktor Kegagalan:

- (1) Adanya kemungkinan ketidaktahuan K/L dan/atau Pemda yang mengimplementasikan kebijakan wilayah pertahanan.
- (2) Kurangnya kegiatan sosialisasi dalam pengimplementasian kebijakan wilayah pertahanan, sehingga menyebabkan kegiatan

penyelenggaraan pertahanan negara kurang terakomodir oleh K/L dan Pemda.

- (3) Belum adanya persamaan persepsi dalam Perumusan Analisa Ancaman antara K/L dan Pemda dengan Kepentingan Pertahanan, yang mengakibatkan sulitnya penataan wilayah pertahanan yang tertata dan terbina.
 - (4) Kurangnya kegiatan sosialisasi dalam pengimplementasian penataan wilayah pertahanan, sehingga menyebabkan kegiatan penataan wilayah pertahanan menjadi kurang terintegrasi.
 - (5) Belum terumuskannya secara pasti Penataan wilayah pertahanan yang meliputi penetapan, perencanaan, pemanfaatan, pengendalian pemanfaatan wilayah pertahanan dengan Pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerah.
 - (6) Adanya perbedaan kepentingan dari masing-masing negara dalam keinginan penyelesaian perbatasan antar negara.
 - (7) Adanya perbedaan dalam interpretasi terhadap dasar hukum dalam penyelesaian permasalahan perbatasan.
 - (8) Adanya dua kepentingan yang tidak dapat diakomodir dari kedua belah pihak dalam penyelesaian permasalahan penetapan garis batasnya.
 - (9) Terdapat perbedaan kepentingan antara Pemerintah Pusat (dalam membuat strategi penyelesaian) dengan pemerintah daerah.
- 4) Sasaran Program Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan (Sasaran Program yang ke 4) adalah terwujudnya perencanaan umum dan penganggaran pertahanan yang terintegrasi, akuntabel, tepat waktu dan mampu memenuhi kebutuhan.

Sasaran Program Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan yang ke 4 (empat) didukung dengan 5 (lima) sasaran kegiatan dan 25 (dua puluh lima) indikator kinerja utama terlaksana dengan baik, hal ini dapat dilihat dari capaian kinerja telah mencapai 100% sesuai dengan target yang direncanakan, faktor keberhasilan ini didukung karena dari 5 (lima) kegiatan tersebut seluruhnya telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan tepat waktu dengan *output* telah menyusun 7(tujuh) regulasi dan 66 (enam puluh enam) dokumen jangka pendek serta penyerapan anggaran sudah mencapai terealisasi 98,0%, dan sisa anggaran telah dikembalikan ke kas negara.

Adapun tingkat keberhasilan dan kegagalan dari masing-masing kegiatan dapat dijelaskan secara detail sebagai berikut :

- a) Kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen Renhan Kemhan, pagu anggaran yang telah direvisi sebesar Rp.57.704.281.000,- terealisasi Rp. 56.447.152.092,- (97,82%) dan capaian kinerja telah mencapai (100%). Kinerja yang dicapai dalam fasilitas perkantoran dengan *output* sebanyak 1 paket serta 25 layanan.

Faktor Keberhasilan:

- (1) Terlaksananya administrasi umum, pengendalian keuangan, pembukuan, pencocokan dan penghitungan anggaran, pengelolaan administrasi keuangan, evaluasi laporan program kerja dan anggaran sesuai jadwal.
- (2) Terlaksananya perencanaan anggaran sesuai dengan indeks dan standar biaya.
- (3) Terlaksananya dukungan alokasi anggaran sesuai DIPA sehingga tidak menyimpang dari kegiatan yang telah dilaksanakan.
- (4) Terlaksananya sistem informasi berdasarkan data yang terkini dan akurat sesuai secara manual maupun elektronik.
- (5) Terlaksananya administrasi kepegawaian, ketatausahaan dan kerumahtanggaan Ditjen Renhan yang akuntabel dan tepat waktu.

Dengan demikian kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen Renhan Kemhan menghasilkan kinerja (*outcome*) yaitu:

- (1) Terselenggaranya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen Renhan yang akurat, terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu. Salah satunya diwujudkan dengan pelaksanaan penyusunan laporan keuangan Ditjen Renhan yang efektif, akuntabel, transparan dan dilaporkan secara tepat waktu pada akhir tahun anggaran.
 - (2) Terselenggaranya program kerja dan penyerapan anggaran kegiatan Ditjen Renhan TA. 2020 secara lancar dan sesuai target yang diharapkan (mendekati 100%).
 - (3) Tersusunnya Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan DIPA Satker Ditjen Renhan TA 2021 yang sesuai harapan dengan menerapkan standar biaya dan norma indeks yang berlaku.
 - (4) Terwujudnya sistem absensi dan pengawasan personel Ditjen Renhan yang teratur dan lebih baik dalam rangka antisipasi kondisi pandemi dengan penerapan absensi secara online melalui pemanfaatan teknologi maupun aplikasi media sosial.
- b) Kegiatan administrasi pelaksanaan anggaran, pagu anggaran yang telah direvisi sebesar Rp.1.422.320.000,- terealisasi Rp.1.406.589.750,- (98,89%) dan capaian kinerja telah mencapai (100%). Kinerja yang dicapai adalah dengan telah menyusun 2 regulasi dan 6 dokumen.

Faktor Keberhasilan:

- (1) Meningkatnya tertib administrasi dalam penyelesaian pelaksanaan kegiatan pelaporan.

- (2) Meningkatnya koordinasi dengan Kudam dan Lanud di daerah dalam rangka pencocokan dan penelitian di bidang anggaran.
- (3) Terlaksananya cokit PAM dan LTGA di wilayah DKI dan Jawa Barat.

Dengan demikian kegiatan administrasi pelaksanaan anggaran menghasilkan kinerja (*outcome*) yaitu:

- (1) Tercapainya penyusunan laporan pelaksanaan anggaran, laporan realisasi anggaran dan laporan rekonsiliasi di bidang administrasi pelaksanaan anggaran pertahanan UO Kemhan dan TNI yang sesuai dengan perencanaan dan memenuhi unsur-unsur dalam rangka tertib administrasi.
 - (2) Terwujudnya laporan pelaksanaan anggaran pada masing-masing tingkatan Satker hingga ke tingkat Kementerian untuk selanjutnya dipergunakan sebagai bahan rekonsiliasi dalam penyusunan Laporan Realisasi Anggaran.
 - (3) Terwujudnya kemudahan dalam pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang akun Belanja Barang, Belanja Modal maupun Belanja Pegawai di lingkungan Ditjen Renhan lainnya, administrasi pelaksanaan anggaran yang terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu.
- c) Kegiatan pengendalian program dan anggaran, pagu anggaran yang telah direvisi sebesar Rp.2.666.455.000,- terealisasi Rp.2.637.855.600.- (98,93%) dan capaian kinerja telah mencapai (100%). Kinerja yang dicapai adalah *output* nya telah menyusun 3 regulasi dan 13 laporan.

Faktor Keberhasilan:

- (1) Terlaksananya penggunaan anggaran Satker/Subsatker yang akuntabel dan tepat waktu.
- (2) Meningkatnya koordinasi dengan rumkit TNI di daerah dalam pelaksanaan kegiatan PNBP.

Dengan demikian kegiatan pengendalian program dan anggaran menghasilkan kinerja (*outcome*) yaitu:

- (1) Tersedianya piranti lunak (seperti : Aplikasi e-Monev3, Aplikasi SMART dan Aplikasi Lapkin) dan dokumen pengendalian program dan anggaran (Permenhan tentang Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar negeri serta Perdirjen tentang Tata Cara Revisi Anggaran di lingkungan Kemhan & TNI), dalam rangka pengawasan dan akuntabilitas pelaksanaan anggaran di lingkungan Kemhan dan TNI.
- (2) Terwujudnya implementasi pola pengelolaan keuangan dan rencana perkiraan PNBP UO Kemhan dan TNI untuk tahun 2021.

- (3) Terwujudnya Direktorat Pengendalian Program dan Anggaran Ditjen Renhan Kemhan sebagai Subsatker WBK/WBBM sebagai wujud akuntabilitas kinerja bidang Penganggaran Pertahanan Kemhan dan TNI.
- d) Kegiatan perencanaan pembangunan pertahanan, pagu anggaran yang telah direvisi sebesar Rp.2.768.437.000,- terealisasi Rp.2.748.220.766,- (99,27%) dan capaian kinerja telah mencapai (100%). Kinerja yang dicapai adalah *output* nya telah menyusun 2 regulasi dan 9 dokumen.

Faktor keberhasilan terwujudnya perencanaan di bidang perencanaan pertahanan jangka menengah dan jangka pendek yang dijadikan pedoman dalam pembangunan pertahanan Kemhan dan TNI.

Dengan demikian kegiatan perencanaan pembangunan pertahanan menghasilkan kinerja (*outcome*) yaitu:

- (1) Tersedianya dokumen peranti lunak bidang perencanaan pembangunan pertahanan negara yang meliputi perencanaan jangka panjang (Postur Kemhan), jangka sedang (Renstra TA 2020-2024) dan jangka pendek (Renja Tahun 2020) serta sistem akuntabilitas kinerja pertahanan negara.
 - (2) Tersedianya pedoman (Perdirjen Renhan) terkait penyusunan Rencana Kebutuhan di lingkungan Kemhan dan TNI serta tata cara penyusunan pengelolaan prioritas pertahanan negara.
- e) Kegiatan perencanaan program dan anggaran, pagu anggaran yang telah direvisi sebesar Rp.3.136.505.000,- terealisasi Rp.3.123.352.270,- (100%) dan capaian kinerja telah mencapai (100%). Kinerja yang dicapai membuat dokumen perencanaan jangka pendek *output* sebanyak 13 (tiga belas) dokumen.

Faktor keberhasilan meningkatnya koordinasi dalam rangka perencanaan program dan anggaran Kemhan, TNI AD, TNI AL, dan TNI AU.

Dengan demikian kegiatan perencanaan program dan anggaran menghasilkan kinerja (*outcome*) yaitu:

- (1) Tersedianya peranti lunak (Standar Biaya Keluaran dan Norma Indeks) sebagai pedoman penyusunan perencanaan program dan anggaran Tahun 2021 di lingkungan Kemhan dan TNI.
- (2) Terselenggaranya kegiatan penentuan rencana kebutuhan anggaran pemeliharaan materil dan fasilitas guna mendukung penyusunan perencanaan program dan anggaran masing-masing Satker di lingkungan Kemhan dan TNI TA 2021.
- (3) Terselenggaranya kegiatan penelitian RKA dan revisi anggaran UO Kemhan dan TNI dalam rangka penyempurnaan dokumen perencanaan program dan anggaran TA 2021.

- (4) Terselenggaranya dokumen evaluasi sebagai bentuk penjabaran melaksanakan kegiatan perencanaan program dan anggaran Kemhan dan TNI tahun 2020 yang terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu.
- 5) Sasaran Program Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kemhan (Sasaran Program yang ke 5) adalah seluruh masyarakat, sumber daya alam/buatan dan sarana/prasarana nasional berdayaguna secara optimal dalam rangka penyelenggaraan pertahanan negara.

Sasaran Program Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kemhanyang ke 5 didukung Pencapaian sasaran program 5 didukung dengan 5 (lima) sasaran kegiatan dan 3 (lima) indikator kinerja utama terlaksana dengan baik, hal ini dapat dilihat dari capaian kinerja sudah mencapai 100% sesuai dengan target yang direncanakan. Faktor keberhasilan ini didukung karena dari 5 (lima) kegiatan tersebut seluruhnya telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan tepat waktu serta penyerapan anggaran sudah mencapai terealisasi 97,72%, dan sisa anggaran telah dikembalikan ke kas negara.

Adapun tingkat keberhasilan dan kegagalan dari masing masing kegiatan dapat dijelaskan secara detail sebagai berikut :

- a) Kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen Potan Kemhan pagu anggaran yang telah direvisi sebesar Rp.61.618.430.000,- terealisasi Rp.56.882.604.302,- (92.31%) dan capaian kinerja telah mencapai (100%).

Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan berdasarkan data yang terkini dan akurat secara terintegrasi akuntabel dan tepat waktu. Dalam rangka mencapai sasaran tersebut didukung dengan indikator kinerja. Persentase perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan berdasarkan data yang terkini dan akurat secara terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu di lingkungan Ditjen Potan, dapat terlaksana dengan baik.

Faktor Keberhasilan:

- (1) Pelaksanaan administrasi umum, pengendalian keuangan, pembukuan, pencocokan dan penghitungan anggaran, pengelolaan administrasi keuangan, evaluasi laporan program kerja dan anggaran sesuai jadwal.
- (2) Perencanaan anggaran sesuai dengan indeks dan standar biaya.
- (3) Dukungan alokasi anggaran sesuai DIPA sehingga tidak menyimpang dari kegiatan yang telah dilaksanakan.
- (4) Terlaksananya sistem informasi berdasarkan data yang terkini dan akurat sesuai secara manual maupun elektronik.
- (5) Pelaksanaan administrasi kepegawaian, ketatausahaan dan kerumahtanggaan Ditjen Potan yang akuntabel dan tepat waktu.

Dengan demikian kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen Pothan Kemhan menghasilkan kinerja (*outcome*) yaitu:

- (1) Tersusunnya produk perencanaan yang akuntabel dan tepat waktu.
- (2) Tersusunnya produk pelaporan yang akuntabel dan tepat waktu.
- (3) Terselenggaranya pembinaan personel dan materiil yang akuntabel dan tepat waktu.
- (4) Terwujudnya akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi efektif dan efisien.

- b) Kegiatan Pembinaan Keveteranan, pagu anggaran sebesar Rp.5.019.748.000,- terealisasi Rp.5.006.222.025,- (99,73%) dan capaian kinerja telah mencapai (100%).

Faktor keberhasilan. Adanya payung hukum yang mengatur tentang pembinaan keveteranan dan sinergitas antar kementerian/lembaga, pemda dan pemangku kepentingan lainnya terkait dengan keveteranan RI.

Output pembinaan keveteranan adalah meningkatnya kesejahteraan Veteran RI yang telah diupayakan melalui pemberian hak-hak kepada Veteran yang meliputi:

- (1) Penyelesaian Keputusan tahor, dahor, tuvet dan tundayatu.
- (2) Bantuan biaya upacara pemakaman Veteran RI seluruh Indonesia.
- (3) Penetapan dan penerbitan tanda kehormatan Veteran Republik Indonesia TA. 2019.
- (4) Bantuan pembinaan DPP LVRI.

Dengan demikian kegiatan pembinaan keveteranan menghasilkan kinerja (*outcome*) yaitu:

- (1) Meningkatnya jumlah K/L yang menindaklanjuti kebijakan tentang Keveteranan.
- (2) Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.
- (3) Meningkatnya jumlah Veteran RI yang dapat terpenuhi hak-haknya.

- c) Kegiatan pembinaan kesadaran bela negara, pagu anggaran sebesar Rp.10.543.449.000,- terealisasi Rp.10.368.257.600,- (98,34%) dan capaian kinerja telah mencapai (100%).

Faktor Keberhasilan.

Adanya sinergi dengan Kementerian Lembaga, Pemda, dalam rangka melaksanakan pembinaan kesadaran bela negara bagi seluruh warga negara dan penyelesaian peraturan perundangan sebagai payung hukum Pembinaan Kesadaran bela negara.

Output pembinaan kesadaran bela negara merupakan bagian dari upaya transformasi sumber daya nasional khususnya sumber daya manusia potensi pertahanan negara yang tangguh. Implementasi kegiatan pembinaan kesadaran bela negara meliputi:

- (1) Sosialisasi pembinaan kader bela negara di daerah.
- (2) Rakornis forum bela negara tingkat pusat TA. 2020.
- (3) Pembinaan kesadaran bela negara pada lingkup pendidikan, pemukiman dan pekerjaan.
- (4) Pengawasan dan Evaluasi TMMD ke 107, 108 dan 109.
- (5) Dialog dan konser kebangsaan tentang bela negara melalui media.

Dengan demikian kegiatan pembinaan kesadaran bela negara menghasilkan kinerja (*outcome*) yaitu:

- Meningkatnya kesadaran bela negara melalui kegiatan pembentukan bela negara.

Faktor Kegagalan.

Terdapat dua sasaran kegiatan yang tidak mencapai target dalam pelaksanaan yaitu Persentase K/L, pemda dan komponen bangsa lainnya yang mengimplementasi kebijakan di bidang bela negara dan tingkat kesadaran dan pemahaman warga negara terhadap bela negara dikarenakan adanya *refocusing* anggaran yang berdampak pada pelaksanaan kegiatan yang terhenti.

- d) Kegiatan Pembinaan Potensi Teknologi dan Industri Pertahanan, pagu anggaran sebesar Rp. 119.659.234.000,- terealisasi Rp. 119.562.644.910,- (99,92%) dan capaian kinerja telah mencapai (100%).

Faktor Keberhasilan.

Adanya sinergi dengan Kementerian/Lembaga, BUMN/BUMS dalam pembinaan terhadap industri pertahanan.

Output Pembinaan Potensi Teknologi Industri Pertahanan diimplementasikan melalui:

- (1) Implementasikan Regulasi kandungan lokal dan offset.
- (2) Monitoring Perjanjian Ekspor/Impor Alpalhankam.

- (3) *Reverse Engineering System* Rudal.
- (4) *Tank Boat*.
- (5) *Joint Production PTTA Mission System* (Clas MALE).
- (6) Kerjasama Industri Pertahanan dengan Korea Selatan, Turki, Rusia dan RRT.

Dengan demikian kegiatan pembinaan potensi teknologi dan industri pertahanan menghasilkan kinerja (*outcome*) yaitu:

- (1) Meningkatnya kemampuan industri pertahanan dalam memproduksi Alusista seperti Kapal Selam, Rudal, Roket dan *Medium Tank*.
- (2) Meningkatnya jumlah kandungan lokal dan ofset yang digunakan dalam industri pertahanan.

Faktor Kegagalan. Adanya *refocusing* anggaran untuk menangani pandemik Covid-19 mengakibatkan beberapa kegiatan dihapus sehingga tidak dilaksanakan dan pagu yang berkurang menyebabkan kegiatan tidak dapat dilaksanakan secara optimal.

- e) Kegiatan Penyiapan Sumber Daya Pertahanan Pagu anggaran yang telah di revisi sebesar Rp. 26.072.654.000,- terealisasi Rp. 26.012.833.910,- (99,77 %) dan capaian kinerja telah mencapai (100%).

Faktor Keberhasilan. Adanya sinergi dengan kementerian dan lembaga, Pemda, TNI, dan Polri serta pihak swasta dalam rangka merumuskan kebijakan di bidang Potensi Pertahanan dan pengelolaan sumber daya nasional untuk Pertahanan.

Output penyiapan sumber daya pertahanan diimplementasikan melalui:

- (1) Penyusunan regulasi untuk Komponen Cadangan dan Komponen pendukung, *Grand Design* Postur Komponen Cadangan dan Rancangan Kerja Strategis pengelolaan Komponen Cadangan dan Penataan Sumber Daya Manusia Komponen Pendukung.
- (2) Penyiapan Anggota Komponen Pendukung bidang Kesehatan dalam rangka penanganan Covid-19.
- (3) Pendataan Potensi Sumber Alam dan Buatan, Garda Bangsa, Tenaga Ahli Profesi dan warga negara serta Potensi Sarana Prasarana di daerah-daerah.

Dengan demikian Kegiatan Sumber Daya Pertahanan menghasilkan kinerja (*outcome*) yaitu:

- (1) Terwujudnya Komponen Pendukung Bidang Kesehatan dalam rangka penanganan Covid-19.

- (2) Tersusunnya Peraturan Perundangan turunan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Pertahanan Negara.
- (3) Meningkatnya jumlah potensi sumber daya manusia, sumber daya alam/buatan dan sarana prasarana pendukung pertahanan yang tertata dan terbina.

Faktor Kegagalan. Dampak dari adanya *refocusing* anggaran mengakibatkan kegiatan tidak dapat dilaksanakan, sehingga berakibat pula pada pencapaian target yang menjadi tidak tercapai.

- 6) Sasaran Program Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan (Sasaran Program yang ke 6) adalah terwujudnya kekuatan pertahanan negara yang mampu mengidentifikasi, menangkal, menindak ancaman secara terintegrasi dan tepat waktu.

Sasaran Program Ditjen Kuathan Kemhan yang ke-6 didukung dengan 5 (lima) sasaran kegiatan dan 28 (dua puluh delapan) indikator kinerja utama terlaksana sesuai dengan target yang direncanakan hal ini dapat dilihat dari capaian kinerja telah mencapai 100% sesuai dengan target yang direncanakan. Faktor keberhasilan ini didukung karena dari 5 (lima) kegiatan tersebut seluruhnya telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan tepat waktu serta penyerapan anggaran sudah mencapai terealisasi 95,06%, dan sisa anggaran telah dikembalikan ke kas negara.

Adapun tingkat keberhasilan dan kegagalan dari masing masing kegiatan dapat dijelaskan secara detail sebagai berikut:

- a) Kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen Kuathan Kemhan, pagu awal sebesar Rp. 57.959.477.000,- pagu anggaran yang telah direvisi sebesar Rp.57.777.446.000,- terjadi pengurangan sebesar Rp.182.031.000,- terealisasi Rp.53.040.067.134,- (91,80%) dan capaian kinerja telah (100%)
Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan berdasarkan data yang terkini dan akurat secara terintegrasi akuntabel dan tepat waktu. Dalam rangka mencapai sasaran tersebut didukung dengan indikator kinerja. Persentase perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan berdasarkan data yang terkini dan akurat secara terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu di lingkungan Ditjen Kuathan, dapat terlaksanan dengan baik.

Faktor Keberhasilan:

- (1) Terlaksananya administrasi umum, pengendalian keuangan, pembukuan, pencocokan dan penghitungan anggaran, pengelolaan administrasi keuangan, evaluasi laporan program kerja dan anggaran sesuai jadwal.
- (2) Terlaksananya perencanaan anggaran sesuai dengan indeks dan standar biaya.

- (3) Terlaksananya dukungan alokasi anggaran sesuai DIPA sehingga tidak menyimpang dari kegiatan yang telah dilaksanakan.
- (4) Terlaksananya sistem informasi berdasarkan data yang terkini dan akurat sesuai secara manual maupun elektronik.
- (5) Terlaksananya administrasi kepegawaian, ketatausahaan dan kerumahtanggaan Ditjen Kuathan yang akuntabel dan tepat waktu.

Dengan demikian kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen Kuathan Kemhan menghasilkan kinerja (*outcome*) yaitu terselenggaranya kegiatan Ditjen Kuathan Kemhan dengan baik pada setiap kegiatan, pembinaan personel dan materiil serta terselenggaranya penyaluran gaji dan tunjangan sesuai dengan aturan yang berlaku. Sehingga 287 pegawai Ditjen Kuathan Kemhan terpelihara kesejahteraan, moril dan etos kerjanya.

- b) Kegiatan pembinaan SDM pertahanan, pagu awal sebesar Rp.13.121.587.000,- pagu anggaran yang telah direvisi sebesar Rp.7.045.486.000,- terjadi pengurangan anggaran sebesar Rp. 6.076.101.000,- terealisasi Rp.6.974.595.210 (98,99%) capaian kinerja telah mencapai 100%.

Faktor keberhasilan:

- (1) Peraturan Menteri Pertahanan tentang Tes Kesamaptaaan Jasmani Prajurit TNI dari Tes Kesegaran Jasmani PNS Kemhan Penyandang Disabilitas.
- (2) Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua Bagi Prajurit TNI.
- (3) Rancangan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Biaya Perjalanan dan Akomodasi Warga Negara selama Pengujian untuk menjadi Prajurit Sukarela Tentara Nasional Indonesia.
- (4) Martikulasi Ketahanan Nasional untuk Peserta Tugas Belajar (Patubel) S2 dan S3 Program Beasiswa Kementerian Pertahanan.
- (5) Sosialisasi Permenhan Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pengembalian Prajurit Siswa yang diberhentikan tidak dengan Hormat ke daerah Asal Penerimaan.
- (6) Beasiswa Pendidikan Tinggi bagi SDM Kemhan dan Tentara Nasional Indonesia

Dengan demikian Kegiatan pembinaan SDM pertahanan menghasilkan kinerja (*outcome*) yaitu:

- (1) Memberikan kesempatan bagi Prajurit TNI dan PNS Kemhan penyandang Disabilitas untuk mengikuti Pendidikan dan Kenaikan Pangkat.

- (2) Meningkatkan manfaat pensiun yang memadai kehidupan yang layak dan berkeadilan dan mengurangi beban fiskal dalam jangka panjang mengingat pemerintah tidak harus membayar manfaat pensiun tetapi hanya membayar iuran.
- (3) Memudahkan warga negara yang mengikuti pengujian penerimaan Prajurit Sukarela di tingkat Pusat dapat sampai tujuan.
- (4) Meningkatnya pemahaman para patubel terkait pertahanan dan keamanan nasional.
- (5) Menurunnya prajurit siswa yang diberhentikan tidak dengan hormat.
- (6) Meningkatkan kualitas atau kemampuan SDM pertahanan dengan meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai investasi bagi organisasi yang sangat bernilai.

Faktor kegagalan:

Realisasi capaian *output* setelah penghematan anggaran pada kegiatan regulasi terdapat 11 (sebelas) peraturan dan 5 (lima) yang tidak mencapai sasaran kegiatan dihentikan karena *Refocusing* Anggaran untuk penanganan Covid-19.

- c) Kegiatan pembinaan materiil pertahanan, Pagu awal sebesar Rp.3.884.102.000,- pagu anggaran yang telah direvisi sebesar Rp.2.663.258.000,- terjadi pengurangan anggaran sebesar Rp.1.220.844.000,- terealisasi Rp. 2.651.068.200,- (99,54%) dan capaian kinerja telah mencapai (100%).

Faktor keberhasilan:

- (1) Kepmenhan RI Nomor:KEP/391/M/IV/2020 tanggal 2 April 2020 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Barang di lingkungan Kemhan dan TNI.
- (2) Kepmenhan RI Nomor: KEP/1233/M/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020 tentang Prosedur Mekanisme Perizinan Senjata Api dan Amunisi Standar Militer di luar lingkungan Kemhan dan TNI
- (3) Revisi Permenhan Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembinaan Material dan Pengembangan Material Pertahanan Negara di lingkungan Departemen Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia, kegiatan dilaksanakan Harmonisasi Naskah Permenhan kedua Kemenkumham.
- (4) Revisi Permenhan Nomor 33 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kelaikan Militer untuk mendukung Pertahanan Negara, kegiatan dilaksanakan Harmonisasi Naskah Permenhan kedua Kemenkumham.
- (5) Seminar tentang Pemeliharaan Alutsista TNI dalam rangka menyusun Permenhan tentang Penyelenggaraan Pemeliharaan

Alutsista TNI.

- (6) Kajian Pemeliharaan Alutsista TNI dalam rangka menyusun Permenhan tentang Pemeliharaan Alutsista TNI
- (7) Monitoring dan Evaluasi Urgensi Litbang di lingkungan Kemhan dan TNI
- (8) Seminar tentang Perumusan Standar Militer Indonesia di lingkungan Kemhan dan TNI.
- (9) Penyusunan Dokumen Penghapusan hibah.
- (10) *Focus Group Discussion* (FGD) Sistem Informasi Kesiapan Tempur Alpalhankam TNI.
- (11) Kerjasama Indonesia-Amerika dalam mendukung kegiatan *Basic Capability Planner Course*.
- (12) Dokumen Perencanaan Kebutuhan Materiil TNI AD TA. 2020.
- (13) Dokumen Perencanaan Kebutuhan Materiil TNI AL TA. 2020.
- (14) Dokumen Perencanaan Kebutuhan Materiil TNI AU TA. 2020.
- (15) Dokumen Perencanaan Kebutuhan Materiil Mabes TNI TA. 2020.
- (16) Rapat Kerja Teknis Bidang Materiil Ditjen Kuathan Kemhan TA. 2020.

Dengan demikian kegiatan pembinaan materiil pertahanan meng-hasilkan kinerja (*outcome*) yaitu:

- (1) Tersedianya peraturan tentang Penetapan Kuasa Pengguna Barang di Lingkungan Kemhan dan TNI serta laporan keuangan yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Tersedianya Peraturan mengenai prosedur mekanisme penerbitan perizinan senjata api standar militer di luar lingkungan instansi Kemhan dan TNI dan efisiensi proses pelaksanaan perizinan senjata api dan amunisi standar militer di luar Lingkungan Kemhan dan TNI.
- (3) Terwujudnya kegiatan Litbang Alpalhan yang menghasilkan output sesuai dengan kebutuhan satuan pengguna.
- (4) Terwujudnya kegiatan kelaikan yang dapat menjamin keselamatan serta memenuhi fungsi asasi objek kelaikan.
- (5) Tersedianya masukan dan solusi dalam pembuatan aplikasi Satu Data Pertahanan yang diprogramkan oleh Pusdatin Kemhan pada TA. 2021.

- (6) Tersedianya dokumen pendukung dan referensi dalam penyusunan Permenhan tentang Penyelenggaraan Pemeliharaan Alpalhankam di Lingkungan Kemhan dan TNI.
- (7) Terwujudnya sinkronisasi regulasi dan implementasi kegiatan Litbang di Lingkungan Kemhan dan TNI guna menghasilkan *output* Litbang sesuai kebutuhan pengguna.
- (8) Terwujudnya Standar Militer Indonesia yang menjadi pedoman bagi pengadaan, Litbang dan Kelaikan Alpalhankam.
- (9) Tersedianya pedoman pelaksanaan hibah berupa kajian dan perjanjian hibah.
- (10) Tersedianya masukan dan solusi dalam pembuatan aplikasi Satu Data Pertahanan yang diprogramkan oleh Pusdatin Kemhan pada TA. 2021.
- (11) Terjalannya hubungan bilateral antara Indonesia dengan AS dibidang Pertahanan dan peningkatan kapabilitas personel Kemhan dan TNI di bidang perencanaan kemampuan dan perencanaan kebutuhan sumber daya manusia Kemhan dan TNI .
- (12) Terwujudnya proses pengadaan Alpalhankam TNI AD yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
- (13) Tersedianya dasar hukum dalam proses pengadaan Alpalhankam sesuai dengan rencana yang diajukan oleh Mabes TNI AD dalam pemenuhan kekuatan pokok TNI AD.
- (14) Terwujudnya proses pengadaan Alpalhankam TNI AL yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
- (15) Tersedianya dasar hukum dalam proses pengadaan Alpalhankam sesuai dengan rencana yang diajukan oleh Mabes TNI AL dalam pemenuhan kekuatan pokok TNI AL.
- (16) Terwujudnya proses pengadaan Alpalhankam TNI AU yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
- (17) Tersedianya masukan, ide dan solusi terhadap pemecahan masalah atas kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Ditmat Ditjen Kuathan Kemhan pada tahun 2019.

Faktor Kegagalan.

Realisasi capaian *output* setelah penghematan anggaran pada kegiatan regulasi terdapat 2 (dua) peraturan dan 4 (empat) laporan kegiatan rekomendasi yang tidak mencapai sasaran. Kegiatan dihentikan karena *Refocusing* Anggaran untuk penanganan Covid-19.

- d) Kegiatan pembinaan kesehatan pertahanan, Pagu awal sebesar Rp.13.795.376.000,-, pagu anggaran yang telah direvisi sebesar Rp.8.817.344.000,- terjadi pengurangan sebesar Rp. 4.978.032.000,- terealisasi Rp.8.768.716.600,- (99,45%) dan capaian kinerja telah mencapai (100%).

Faktor keberhasilan:

- (1) Permenhan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pengendalian Resistensi Antimikroba.
- (2) Keppres tentang Penetapan Keanggotaan Indonesia pada Organisasi International ASEAN *Center of Military Medicine* (ACMM).
- (3) Pembayaran Iuran Tahunan keanggotaan ASEAN *Center of Military Medicine* (ACMM),
- (4) Rapat Evaluasi Rumah Sakit yang belum PK BLU di Faskes Kemhan dan TNI.
- (5) Beasiswa Pendidikan Kesehatan di lingkungan Kemhan dan TNI.
- (6) Pengembangan Kemampuan *Advanced Cardiovascular Life Support* (ACLS) di Faskes Kemhan dan TNI.

Dengan demikian kegiatan pembinaan kesehatan pertahanan menghasilkan kinerja (*outcome*) yaitu:

- (1) Sebagai payung hukum dalam mengatur pengendalian resistensi antimikroba di rumah sakit Kemhan dan TNI sesuai karakteristik serta kebutuhan pelayanan Kesehatan dan kebutuhan hukum.
- (2) Sebagai payung hukum dan dasar dalam melaksanakan kegiatan Iuran Tahunan Keanggotaan Indonesia pada Organisasi International ASEAN *Center of Military Medicine* (ACMM).
- (3) Terwujudnya peran serta Indonesia dalam peningkatan kerja sama pada keanggotaan ASEAN *Center of Military Medicine* (ACMM).
- (4) Terwujudnya informasi pelaksanaan PK BLU Rumah Sakit di Lingkungan Kemhan dan TNI dan juga kendala-kendala apa saja yang dihadapi Rumah Sakit Kemhan dan TNI selama menjadi PK BLU.
- (5) Meningkatnya ilmu pengetahuan dan keterampilan tenaga kesehatan untuk mendukung tugas pokok kesehatan Kemhan dan TNI yaitu memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas di fasilitas pelayanan kesehatan Kemhan dan TNI serta mendukung kegiatan operasional TNI baik dalam OMP dan OMSP.

- (6) Meningkatnya keterampilan Dokter dalam penanganan henti jantung pada pasien.

Faktor Kegagalan.

Realisasi capaian *output* terjadi penghematan anggaran pada kegiatan regulasi terdapat 1 (satu) peraturan dan 4 (empat) Laporan serta kegiatan Layanan Kesehatan Masyarakat terdapat 1 (satu) layanan yang tidak mencapai sasaran. Kegiatan dihentikan karena *Refocusing* Anggaran untuk penanganan Covid-19.

- e) Kegiatan pembinaan fasilitas dan jasa pertahanan, Pagu awal sebesar Rp.27.370.492.000,-, pagu anggaran yang telah direvisi sebesar Rp.23.786.668.000,- terjadi pengurangan sebesar Rp.3.583.824.000.- terealisasi Rp.23.717.239.064,- (99,71%) dan capaian kinerja telah mencapai (100%).

Faktor keberhasilan:

- (1) Kepmenhan tentang Perubahan atas Kepmenhan Nomor : KEP/1409/M/XII/2013 tentang ketentuan Penetapan Satuan Pemakaian Bahan Bakar Minyak dan Pelumas di lingkungan Kemhan dan TNI.
- (2) Rakernis Ditfasjas Ditjen Kuathan Kemhan TA.2020.
- (3) Kebutuhan Daya dan Jasa LTGA di lingkungan Kemhan dan TNI.
- (4) Rapat Kerja tentang Pencocokan dan penelitan tagihan jasa di lingkungan Kemhan dan TNI.
- (5) Pencocokan dan penelitian penggunaan BMP bulanan Satkai III di lingkungan Kemhan dan TNI
- (6) Rapat rencana Kebutuhan BMP tahunan di lingkungan Kemhan dan TNI.
- (7) Rapat permasalahan terhadap tanah dan/ atau bangunan di lingkungan Kemhan dan TNI.
- (8) Rapat Pembahasan Permasalahan Sengketa Faslan dan Rahlat.
- (9) Supervisi penggunaan kawasan hutan untuk daerah latihan TNI.
- (10) Rakornis Ditjen Kuathan TA. 2020.
- (11) Rekonsiliasi data rumah negara dan rumah susun di lingkungan Kemhan dan TNI.

Dengan demikian kegiatan pembinaan fasilitas dana jasa pertahanan menghasilkan kinerja (*outcome*) yaitu:

- (1) Memberikan dasar regulasi dalam Prosedur Adminstrasi Pengelolaan BMP di lingkungan Kemhan dan TNI.

- (2) Tercapainya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi semua kegiatan, baik yang sudah dilaksanakan maupun yang belum dilaksanakan antara Kemhan dan TNI.
- (3) Tersedianya data yang akurat kebutuhan daya dan jasa LGA pada tahun berjalan .
- (4) Terhimpunnya data yang valid terhadap penggunaan daya dan jasa LGA di lingkungan Kemhan dan TNI yang menjadi beban tanggungan Negara.
- (5) Tercapainya pemantauan pelaksanaan pencocokan dan penelitian di Satkai III dalam rangka, pengawasan dan pengendalian sebagai bahan evaluasi dan pelaporan di bidang sistem dan metode serta pengendalian inventori penggunaan BMP bulanan dalam rangka mendukung efisiensi dan efektifitas penggunaan BMP di lingkungan Kemhan dan TNI.
- (6) Tercapainya rencana kebutuhan BMP tahunan masing-masing UO untuk menyamakan persepsi tata kelola BMP di lingkungan Kemhan dan TNI dalam rangka efisiensi dan efektifitas penggunaan BMP.
- (7) Tercapainya Penanganan terhadap permasalahan tanah dan/atau bangunan yang timbul/terjadi di lingkungan UO yang memerlukan penanganan oleh Kemhan sehingga dapat dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait untuk mendapatkan solusi penyelesaian.
- (8) Tersedianya data permasalahan faslan dan daerah latihan di lingkungan Kemhan dan TNI yang terbaru dan akurat.
- (9) Penggunaan kawasan hutan sebagai daerah pembangunan sarana dan prasarana latihan tempur untuk meningkatkan kemampuan prajurit TNI yang terlatih dan profesional.
- (10) Tercapainya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi semua kegiatan, baik yang sudah dilaksanakan maupun yang belum dilaksanakan antara Kemhan dan TNI.
- (11) Tersedianya data laporan rumah negara dan rumah susun yang akurat.

Faktor Kegagalan.

Realisasi capaian *output* setelah penghematan anggaran terdapat 2 (dua) peraturan pada kegiatan regulasi 8 (delapan) kegiatan rekomendasi yang tidak mencapai sasaran. Kegiatan dihentikan karena *Refocusing Anggaran* untuk penanganan Covid-19.

- 7) Sasaran Program Badan Penelitian dan Pengembangan Kemhan (Sasaran Program yang ke-7) adalah terwujudnya teknologi dan sumber daya pertahanan sesuai kemajuan Iptek dan mampu dikembangkan secara mandiri.

Sasaran program Badan Penelitian dan Pengembangan Kemhan yang ke-7 (tujuh) didukung dengan 5 (lima) sasaran kegiatan dengan indikator kinerja utama yaitu dengan telah terwujudnya teknologi dan sumber daya pertahanan sesuai dengan kemajuan iptek dan mampu dikembangkan secara mandiri sesuai dengan target yang direncanakan hal ini dapat dilihat dari capaian kinerja telah mencapai 100%. Faktor keberhasilan ini dipengaruhi karena dari 5 (lima) indikator kinerja utama tersebut seluruhnya telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan tepat waktu, serta penyerapan anggaran yang terealisasi sebesar 99,57%. Namun terkoreksi pengembalian anggaran ke Kas Negara sebesar 0,43% menjadi realisasi akhir sebesar 99,14%.

Adapun tingkat keberhasilan dan kegagalan dari masing masing kegiatan dapat dijelaskan secara detail sebagai berikut:

- a) Kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Balitbang Kemhan, pagu anggaran setelah direvisi sebesar Rp.47.675.052.000,- terealisasi Rp.46.870.482.910,- (98,31%) dan capaian kinerja telah mencapai (100%). Program kegiatan tersebut telah berhasil dilaksanakan dengan telah terwujudnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Balitbang yang terkini, akurat, terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu.

Faktor Keberhasilan:

- (1) Terlaksananya administrasi umum, pengendalian keuangan, pembukuan, pencocokan dan penghitungan anggaran, pengelolaan administrasi keuangan, evaluasi laporan program kerja dan anggaran sesuai jadwal.
- (2) Terlaksananya perencanaan anggaran sesuai dengan indeks dan standar biaya.
- (3) Terlaksananya dukungan alokasi anggaran sesuai DIPA sehingga tidak menyimpang dari kegiatan yang telah dilaksanakan.
- (4) Terlaksananya sistem informasi berdasarkan data yang tkini dan akurat secara manual maupun elektronik.
- (5) Terlaksananya administrasi kepegawaian, ketatausahaan dan kerumahtanggaan Balitbang Kemhan yang akuntabel dan tepat waktu.



Gambar 1.1. Rakernis Balitbang 2020

Dengan demikian kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Balitbang Kemhan menghasilkan kinerja (*outcome*) yaitu terselenggaranya kegiatan Balitbang Kemhan dengan baik pada setiap kegiatan, pembinaan personel dan materiil serta terselenggaranya penyaluran gaji dan tunjangan sesuai dengan aturan yang berlaku. Sehingga 255 pegawai Balitbang Kemhan terpelihara kesejahteraan, moril dan etos kerjanya.

- b) Kegiatan penelitian dan pengembangan strategi pertahanan, pagu anggaran setelah direvisi sebesar Rp.763.538.000,- terealisasi Rp.724.298.643,- (94,86%) dan capaian kinerja telah mencapai (100 %). Program kegiatan tersebut telah berhasil dilaksanakan.

Faktor keberhasilan:

- (1) Terlaksananya Litbang Pemberdayaan Potensi Maritim Indonesia dalam Pertahanan Negara guna mendukung kepentingan nasional di wilayah nasional bagian barat.
- (2) Terlaksananya Litbang Analisa Strategi Pertahanan Indonesia dalam mengantisipasi perkembangan politik negara-negara Indo Pasifik.
- (3) Terlaksananya Litbang Pembangunan Kekuatan Kogabwilhan di wilayah Indonesia Bagian Barat dihadapkan pada ancaman.
- (4) Terlaksananya Litbang Pembangunan Kekuatan Kogabwilhan di wilayah Indonesia Bagian Timur dihadapkan pada ancaman.



Gambar 1.2 FGD Litbang Strahan

- (5) Terlaksananya Litbang Penataan Wilayah Pertahanan dihadapkan pada Kawasan Rawan Bencana.
- (6) Terlaksananya Litbang Analisa Pertahanan Wilayah dalam Menghadapi Ancaman di Papua.

Dengan demikian kegiatan penelitian dan pengembangan strategis pertahanan menghasilkan kinerja (*outcome*) yaitu terwujudnya hasil Litbang Puslitbang Strahan yang dapat digunakan dalam rangka

kepentingan pertahanan Negara. Manfaat dari output berupa hasil penelitian yang dapat digunakan sebagai rekomendasi guna menyusun kebijakan pimpinan.

- c) Kegiatan penelitian dan pengembangan alat peralatan pertahanan, pagu anggaran setelah direvisi sebesar Rp.15.175.537.000,- terealisasi Rp.15.130.268.000,- (99,70%) dan capaian kinerja telah mencapai (100%). Program kegiatan tersebut telah berhasil dilaksanakan.

Faktor keberhasilan:

- (1) Terlaksananya Litbang Sistem Persenjataan *Sentry Gun* pada Ranpur Robotik (*Unmanned Ground Combat Vehicle*) Tahap II-II.



Gambar 1.3. Prototipe *Sentry Gun*

- (2) Terlaksananya Pengembangan Prototipe Rudal Petir Tahap IV – IV.
- (3) Terlaksananya Litbang Penyempurnaan Prototipe Radar Pasif.



Gambar 1.4 Prototipe Radar pasif

Dengan demikian kegiatan penelitian dan pengembangan alat peralatan pertahanan menghasilkan kinerja (*outcome*) yaitu terwujudnya hasil Litbang Puslitbang Alpalhan yang dapat digunakan dalam rangka kepentingan pertahanan negara. Manfaat dari *output* berupa prototipe

yang memenuhi syarat untuk dapat ditindaklanjuti sebagai *First Article* (FA).

- d) Kegiatan penelitian dan pengembangan iptek pertahanan, pagu anggaran setelah direvisi sebesar Rp.8.430.757.000,- terealisasi Rp.8.402.006.500 (99,66%) dan capaian kinerja telah mencapai (100%). Program kegiatan tersebut telah berhasil dilaksanakan.

Faktor keberhasilan:

- (1) Terlaksananya Rancang Bangun Pembangkit Listrik Berbasis Magnet Tanpa Bahan Bakar untuk Operasional TNI Tahap I-II.
- (2) Terlaksananya Rancang Bangun Sistem Power dan Sistem Kendali pada *Combat Swimmer Vehicle*.



Gambar 1.5 Prototipe CSV

- (3) Terlaksananya Rancang Bangun PTTA *Medium Altitude Long Endurance* (MALE) Konsorsium Tahap I-V.



Gambar 1.6. Prototipe MALE

- (4) Terlaksananya Pengembangan Pembangkit Daya Berbasis Thorium Tahap V-VIII.

Dengan demikian kegiatan penelitian dan pengembangan iptek pertahanan menghasilkan kinerja (*outcome*) yaitu terwujudnya hasil

Litbang Puslitbang Iptekhan yang dapat digunakan dalam rangka kepentingan pertahanan Negara. Manfaat dari *output* berupa desain dan rancang bangun yang memenuhi syarat untuk dilanjutkan menjadi prototipe.

- e) Kegiatan penelitian dan pengembangan sumber daya pertahanan, pagu anggaran setelah direvisi sebesar Rp.148.790.268.000,- terealisasi Rp.148.752.540.100,- (99,97%) dan capaian kinerja telah mencapai (100%). Program kegiatan tersebut telah berhasil dilaksanakan.

Faktor keberhasilan:

- (1) Terlaksananya Litbang SDM Bidang Teknologi Propelan.
- (2) Terlaksananya Litbang Pemberdayaan Masyarakat Pesisir untuk Mendukung Pembangunan Pertahanan Negara yang Handal.
- (3) Terlaksananya Litbang Model Pengelolaan Potensi Kekayaan Laut Pulau-pulau Terdepan Ditinjau dari Kepentingan Pertahanan Negara.
- (4) Terlaksananya Litbang Bahan Alternatif Laras Senjata.
- (5) Terlaksananya Litbang Dampak Pembangunan Pabrik Propelan terhadap Lingkungan Masyarakat di Subang.
- (6) Terlaksananya Litbang Sarana dan Prasarana Wilayah Indonesia Bagian Barat untuk Mendukung Pertahanan Negara.
- (7) Terlaksananya Litbang Sarana dan Prototipe *Spherical Powder* Propelan Tahap III.



Gambar 1.7. Sarpras Propelan

Dengan demikian kegiatan penelitian dan pengembangan sumber daya pertahanan menghasilkan kinerja (*outcome*) yaitu terwujudnya hasil Litbang Puslitbang Sumdahan yang dapat digunakan dalam rangka kepentingan Pertahanan Negara. Manfaat dari *output* berupa penelitian digunakan sebagai rekomendasi guna menyusun kebijakan pimpinan.

- 8) Sasaran Program Badan Pendidikan dan Pelatihan Kemhan (Sasaran Program yang ke-8) adalah tersedianya lulusan pendidikan dan pelatihan Kemhan/TNI memenuhi standar mutu.

Sasaran Program Badan Pendidikan dan Pelatihan Kemhan yang ke 8 didukung dengan 5 (lima) sasaran kegiatan dan 5 (lima) indikator kinerja utama sudah terlaksana dengan baik, kegiatan didukung pagu anggaran setelah direvisi sebesar Rp. 290.142.952.000,- dengan realisasi Rp. 276.726.777.900,-. Hal ini dapat dilihat dari capaian kinerja yang mencapai 100%, dan penyerapan anggaran sebesar 95,38%. Adapun faktor keberhasilan ini didukung karena dari 5 (lima) indikator kinerja utama tersebut seluruhnya telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan tepat waktu.

Adapun tingkat keberhasilan dan kegagalan dari masing-masing kegiatan dapat dijelaskan secara detail sebagai berikut :

- a) Kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Set Badiklat Kemhan, pagu anggaran yang telah revisi sebesar Rp. 89.174.351.000,- terealisasi Rp. 77.621.948.726,- (87,05 %) dan capaian kinerja telah mencapai (100%).

Faktor Keberhasilan:

- (1) Terlaksananya administrasi umum, pengendalian keuangan, pembukuan, pencocokan dan penghitungan anggaran, pengelolaan administrasi keuangan, evaluasi laporan program kerja dan anggaran sesuai jadwal.
- (2) Terlaksananya perencanaan anggaran sesuai dengan indeks dan standar biaya.
- (3) Terlaksananya dukungan alokasi anggaran sesuai DIPA sehingga tidak menyimpang dari kegiatan yang telah dilaksanakan.
- (4) Terlaksananya pendukung Diklat yang akuntabel dan tepat waktu.
- (5) Terlaksananya sistem informasi berdasarkan data yang terkini dan akurat sesuai secara manual maupun elektronik.
- (6) Terlaksananya administrasi kepegawaian, ketata usahaan dan kerumah tanggaan dan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu.

Faktor kegagalan tidak terserapnya anggaran antara lain: Belanja Modal, Belanja Barang Non Operasional, Belanja Barang Operasional dan Belanja Pegawai Rp. 11.552.402.274,-.

Dengan demikian kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Set Badiklat Kemhan menghasilkan kinerja (*outcome*) yaitu:

- (1) Pelaksanaan tugas teknis Badiklat dapat berjalan sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku, akurat dan bersinergi dengan fungsi pelayanan pendidikan dan pelatihan.
- (2) Terwujudnya birokrasi satuan yang efektif dan efisien dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Badiklat.

- b) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional Pertahanan, pagu anggaran yang telah revisi sebesar Rp. 3.226.166.000,- terealisasi Rp. 3.217.990.550,- (99,75%) dan capaian kinerja mencapai (99,75%).

Faktor keberhasilan terakreditasinya 2 (dua) Diklat Teknis s.d tahun 2022 dengan Akreditasi B, meliputi:

- (1) Diklat Teknis Fungsional Pertahanan.
- (2) Diklat Teknis Latihan Dasar CPNS Gol. II dan III.

Faktor kegagalan alokasi siswa tidak sesuai dengan kehadiran peserta Diklat Teknis Substansi Audit BMN, Diklat Teknisi Komputer dan Diklat Teknis Administrasi Umum Tingkat III di Pusdiklat Tekfunghan Badiklat Kemhan, sehingga tidak terserapnya anggaran sebesar Rp. 8.175.450,-.

- c) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Pertahanan pagu anggaran yang telah revisi sebesar Rp. 3.813.987.000,- terealisasi Rp. 3.813.987.000,- (100%) dan capaian kinerja telah mencapai (100%).

Faktor keberhasilan:

- (1) Lulusan Diklat Pim Rengar untuk TNI banyak peminat karena untuk salah satu persyaratan untuk menduduki jabatan perencanaan dan kenaikan pangkat Pamen.
- (2) Diklat Pim Tingkat III dan IV untuk PNS banyak peminatnya karena salah satu persyaratan untuk menduduki jabatan struktural di lingkungan Kemhan.

Dengan demikian kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Pertahanan menghasilkan kinerja (*outcome*) yaitu peserta didik Pusdiklat Jemenhan sekembalinya ke satuan asal dapat menerapkan hasil pembelajaran yang diterima sehingga dapat menjadi pegawai yang profesional di bidang tugas dan fungsi sesuai jabatannya. Manfaatnya untuk prajurit TNI/PNS Kemhan dalam pengembangan karir lebih meningkat dan dapat untuk menduduki jabatan.

- d) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Bahasa, pagu anggaran yang telah revisi sebesar Rp. 4.168.847.000,- terealisasi Rp. 4.168.844.200,- (100%) dan capaian kinerja mencapai (100%).

Faktor keberhasilan untuk meningkatkan kemampuan dan kerampilan berbahasa asing. Dengan demikian kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Bahasa menghasilkan kinerja (*outcome*) yaitu:

- (1) Meningkatnya kemampuan personel untuk berbahasa asing dan sebagai persyaratan Wajib mengikuti Kursus Bahasa Inggris bagi anggota akan melaksanakan seleksi Diklat Kepemimpinan.
- (2) Peserta didik Pusdiklat Bahasa sekembalinya ke satuan asal dapat menerapkan hasil pembelajaran yang diterima sehingga dapat menjadi pegawai yang profesional di bidang tugas dan fungsi sesuai jabatannya.

Dengan demikian kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Bahasa menghasilkan kinerja (*outcome*) yaitu peserta didik Pusdiklat Bahasa sekembalinya ke satuan asal dapat menerapkan hasil pembelajaran yang diterima sehingga dapat menjadi pegawai yang profesional dibidang tugas dan fungsi sesuai jabatannya.

Manfaatnya untuk prajurit TNI/PNS Kemhan dalam pengembangan karir lebih meningkat dan dapat untuk menduduki jabatan.

- e) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Bela Negara, pagu anggaran yang telah revisi sebesar Rp. 2.517.056.000,- terealisasi Rp 2.517.056.000,- (100%) dan capaian kinerja mencapai (100%).

Faktor keberhasilan meliputi terselenggaranya kegiatan Diklat Bela Negara yang diikuti peserta didik yang berasal dari masyarakat, pelajar, pegawai K/L dan tokoh Ormas dan Parpol.

Dengan demikian kegiatan Bela Negara menghasilkan kinerja (*outcome*) yaitu meningkatnya kesadaran berbangsa dan bernegara bagi peserta didik (masyarakat, pelajar, pegawai K/L dan tokoh Ormas dan Parpol) ketaatan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar.

- f) Kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi pertahanan, pagu anggaran yang telah direvisi sebesar Rp.187.242.545.000,- realisasi Rp.185.366.951.424,- (99%) dan capaian kinerja telah mencapai (100%).

Faktor Keberhasilan capaian kinerja Kegiatan Penyelenggaraan pendidikan Tinggi Pertahanan tersebut yaitu lulusan Strata 2 bidang pertahanan yang sesuai standar nasional dan internasional dengan kategori "Sangat Memuaskan" dapat tercapai 89%, lulusan Strata 3 bidang pertahanan yang sesuai standar nasional dan internasional dengan kategori "Sangat Memuaskan" belum ada kelulusan dikarenakan masih dalam proses perkuliahan, publikasi penelitian bidang pertahanan negara dan Belneg yang dimuat di Jurnal Nasional dan Internasional, dapat tercapai 15%. pengabdian kepada masyarakat di bidang pertahanan negara sesuai standar nasional, dapat tercapai 6 kegiatan. Capaian volume output 231 atau 100%, terdiri dari 177 Layanan Pendidikan Tinggi Pertahanan, 20 Laporan Manajemen Perencanaan dan Pelaporan, 22 Layanan Sarana dan Prasarana Internal, dan 12 bulan layanan atau 100%. dengan *outcome* sebagai berikut:

- (1) Lulusan Unhan menempati posisi strategis di lingkungan pemerintah pusat, daerah dan lembaga strategis lainnya dan atau mampu mengaplikasikan ilmunya dalam berbagai aktivitas di kemasyarakatan dan dunia kerja.
- (2) Unhan sebagai institusi Perguruan Tinggi sudah terakreditasi "A" dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) sesuai dengan Kep BAN-PT Nomor: 3126/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2016 sehingga dapat bermanfaat memberikan jaminan bahwa institusi perguruan tinggi yang terakreditasi telah memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh BAN-PT, mampu memberikan perlindungan

bagi masyarakat dari penyelenggaraan perguruan tinggi yang tidak memenuhi standar, dan mendorong perguruan tinggi untuk terus menerus melakukan perbaikan dan mempertahankan mutu yang tinggi serta dapat dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan dalam transfer kredit perguruan tinggi, pemberian bantuan dan alokasi dana, serta pengakuan dari badan atau instansi lain.

- (3) Hasil penelitian yang terpublikasi jurnal nasional dan internasional yang mampu menjawab persoalan nasional, regional maupun internasional.
- (4) Sivitas akademika Unhan yang berperan aktif dalam mengaplikasikan iptek pertahanan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (5) Unhan menjadi *think tank* dan pelopor yang mampu menjawab persoalan bangsa di bidang pertahanan dan bela negara.
- (6) Unhan aktif dalam jaringan nasional, regional, dan global dalam pengembangan keilmuan dan teknologi bidang pertahanan

Untuk mewujudkan *outcome* tersebut di atas alternatif solusi yang telah dilakukan yaitu:

- (1) Peningkatan mutu lulusan Unhan dengan menerapkan standar kompetensi lulusan.
 - (2) Jenjang akreditasi merupakan aktualisasi dari kualitas kinerja yang dicapai berdampak pada keberlangsungannya Unhan, maka Unhan secara terus menerus melakukan peningkatan kualitas kelembagaan dan tata kelola, Peningkatan kualitas dosen, kualitas penelitian, kualitas Pengabdian Kepada Masyarakat, kualitas mahasiswa, kualitas sarpras, peningkatan sistem manajemen kepastakaan dan penjaminan mutu, pengembangan kurikulum, pembelajaran dan suasana akademik yang efektif serta peningkatan administrasi.
 - (3) Mendorong penerapan standar penelitian dan publikasi hasil penelitian Unhan.
 - (4) Penggalangan keterlibatan civitas akademik dalam program pengabdian kepada masyarakat.
 - (5) Penggalangan Pemikir/Pakar bangsa yang ahli di bidang pertahanan negara dalam forum akademik.
 - (6) Peningkatan jaringan untuk membangun kerjasama nasional dan internasional dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang pertahanan.
- 9) Sasaran Program Badan Sarana Pertahanan Kemhan (Sasaran Program yang ke-9 terwujudnya sarana dan prasarana pertahanan yang memenuhi kebutuhan dan standar mutu sesuai kemajuan iptek serta dapat dikembangkan secara mandiri.

Sasaran Program Badan Sarana Pertahanan Kemhan yang ke-9 didukung dengan 6 (enam) sasaran kegiatan dan 6 (enam) indikator kinerja utama terlaksana dengan baik, hal ini dapat dilihat dari capaian kinerja baru mencapai 95% belum sesuai dengan target yang direncanakan, disebabkan karena didukung faktor keberhasilan yaitu 5 (lima) indikator kinerja utama capaian kinerjanya telah mencapai 100% dan adapun faktor penurunan kinerjanya karena masih terdapat 1 (satu) indikator kinerja utama capaian kinerjanya belum mencapai 100 % serta penyerapan anggaran baru mencapai terealisasi 81,32% disebabkan adanya 1(satu) kegiatan belum sepenuhnya selesai secara optimal dari anggaran RM dan PLN, pencapaian tersebut sangat di pengaruhi oleh kegiatan pengadaan Alutsista yang sebagian besar merupakan produk pengadaan dari luar negeri yang menjadi kendala.

Adapun tingkat keberhasilan dan kegagalan dari masing-masing kegiatan dapat dijelaskan secara detail sebagai berikut:

- a) Kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Badan Ranahan Kemhan, pagu anggaran Rp.54.943.457.000,- terealisasi Rp. 54.682.523.709,- (99,53%) dan capaian kinerja 100% kegiatan tersebut telah berhasil dilaksanakan dengan terwujudnya seluruh perencanaan, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan anggaran secara terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu, menunjukkan bahwa semua kegiatan yang tertuang dalam program kerja Baranahan sudah berjalan sesuai dengan manajemen organisasi , dimana masing- masing kegiatan di subsatker Baranahan dapat melaksanakan kegiatannya mulai perencanaan sampai kegiatan pengawasan dan pengendalian sehingga tujuan dan sasaran tercapai. Dibuktikan juga dengan tersedianya data dukung berupa produk perencanaan dan laporan yang lengkap dan tepat waktu.

Faktor keberhasilan:

- (1) Terlaksananya administrasi umum, pengendalian keuangan, pembukuan, pencocokan dan penghitungan anggaran, pengelolaan administrasi keuangan, evaluasi laporan program kerja dan anggaran sesuai jadwal.
- (2) Terlaksananya perencanaan anggaran sesuai dengan indeks dan standar biaya.
- (3) Terlaksananya dukungan alokasi anggaran sesuai DIPA sehingga tidak menyimpang dari kegiatan yang telah dilaksanakan.
- (4) Terlaksananya sistem informasi berdasarkan data yang terkini dan akurat sesuai secara manual maupun elektronik.
- (5) Terlaksananya administrasi kepegawaian, ketatausahaan dan kerumahtanggaan Baranahan Kemhan yang akuntabel dan tepat waktu.

Dengan demikian kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Baranahan Kemhan menghasilkan kinerja (*outcome*) yaitu terselenggaranya kegiatan Baranahan Kemhan dengan baik pada setiap kegiatan, pembinaan personel dan materiil serta terselenggaranya penyaluran gaji dan tunjangan sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga pegawai Baranahan Kemhan terpelihara kesejahteraan, moril dan etos kerjanya

- b) Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Militer dengan pagu anggaran Rp.29.562.348.804.000,- terealisasi sebesar Rp.24.015.234.717.349,- (81,24%) dan Capaian kinerja (72%) kegiatan ini terbagi dengan 2 kegiatan yang di biayai melalui fasilitas Kredit Ekspor (KE) PLN dan pengadaan dukungan Alutsista dengan anggaran (RM), untuk kegiatan pendukung Alutsista yang dibiayai anggaran RM capaian kinerjanya sudah (100%) namun untuk kegiatan Alutsista yang dibiayai melalui fasilitas KE baru mencapai (34%) di karenakan pengadaan Alutsista sebagian besar produk luar negeri, proses kegiatan pengadaannya mulai perencanaan sampai tersedianya barang atau terbitnya sertifikat akhir (capaian 100%) sebagian besar lintas tahun, sementara penilaian kinerja yang harus dilaporkan di batasi sampai dengan akhir tahun. Terjadinya lintas tahun dalam kegiatan pengadaan di karenakan produk alutsista memerlukan perhitungan matang dalam prosesnya (*Opsreq*, pemilihan spektek , waktu pembuatan atau produksi barang yang harus pesan terlebih dahulu dan aturan lainnya yang berpengaruh).

Faktor Keberhasilan:

- (1) Terpenuhinya pengadaan barang dan jasa Alpalhan dihadapkan dengan rencana kebutuhan
- (2) Terpenuhi pemenuhan Alat dan Materiil Kesehatan (Almatkes) untuk 110 RS Kemhan dan TNI dalam rangka penanganan pandemi *Covid-19*.
- (3) Tercapainya capaian kinerja pengadaan Alpalhan sesuai dengan kontrak.

Dengan demikian kegiatan pengadaan barang dan jasa militer menghasilkan kinerja (*outcome*) yaitu terwujudnya peningkatan Alpalhan yang modern dan mandiri yang dapat digunakan untuk kepentingan pertahanan negara, manfaat dari output kegiatan pengadaan barang dan jasa militer berupa Alpalhan yang dapat digunakan oleh matra darat, matra laut dan matra udara sebagai sarana pertahanan negara. Disisi lain, dalam menghadapi Pandemi *Covid-19*, kegiatan pemenuhan alat dan materiil kesehatan menghasilkan kinerja (*outcome*) peningkatan kesiapan RS Kemhan dan TNI dalam menangani pandemi.

- c) Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana pertahanan di wilayah perbatasan, pagu anggaran Rp.3.896.401.000,- terealisasi Rp.3.896.399.000,- (100%) dan capaian kinerja (100%) dengan demikian pembangunan sarana dan prasarana pertahanan di wilayah perbatasan terlaksana dengan baik.

Faktor Keberhasilan:

Terpenuhinya pembangunan Jalur Inspeksi dan Patroli Perbatasan (JIPP) di Kalimantan.

Dengan demikian kegiatan sarana prasarana pertahanan di wilayah perbatasan menghasilkan (*outcome*) mempercepat dan mempermudah dalam distribusi logistik menuju pos-pos perbatasan serta meningkatnya akses masyarakat sekitar JIPP yang dapat digunakan untuk peningkatan perekonomian masyarakat sekitar.

- d) Kegiatan pengadaan jasa konstruksi pertahanan, pagu anggaran Rp. 66.263.280.000,- terealisasi Rp.66.063.183.524,- (99,70%) dan capaian kinerja (100%) dengan demikian Presentase pembangunan konstruksi sarana dan prasarana pertahanan yang terintegrasi, tepat waktu dan akuntabel dapat terlaksana dengan baik hal tersebut dapat dilihat dari capaian kinerja 100%. dengan analisa semua rencana kegiatan yang tertuang dalam program dapat di dipertanggung jawabkan secara fisik dilapangan atau dalam bentuk laporan tertulis serta dokumentasi sebagai bukti yang hasilnya diharapkan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pertahanan Negara, kesejahteraan prajurit ataupun masyarakat secara umum. Kegiatan yang dilaksanakan oleh satker Puskon baranahan juga telah melalui proses perencanaan dengan baik, dapat dilaksanakan tepat waktu di tunjang dengan adanya pengawasan dan pengendalian terpadu dari semua pihak terkait.

Faktor Keberhasilan:

- (1) Terlaksananya pembangunan lanjutan gedung parkir dan ruang isolasi RS Kepresidenan (RSGS) Jakarta.
- (2) Terlaksananya pembangunan Sarpras RS. dr. Suyoto Pusrehab Kemhan.
- (3) Terpenuhinya 17 kegiatan perencanaan teknis (DED) konstruksi sarana dan prasarana pertahanan.
- (4) Terpenuhinya pengadaan jasa konstruksi sarana pertahanan yang telah *e- Procurement*.

Dengan demikian kegiatan pengadaan jasa konstruksi pertahanan menghasilkan kinerja (*outcome*) yakni meningkatnya fasilitas RS dalam menghadapi pandemi dan terciptanya kenyamanan dan keamanan bagi pengunjung dan pengguna RS. Disisi lain, telah terpenuhinya perencanaan teknis (DED) dalam rangka membangun konstruksi pertahanan serta terwujudnya transparansi dalam proses pengadaan barang jasa konstruksi melalui *e-procurement*.

- e) Kegiatan kodifikasi materiil pertahanan pagu anggaran Rp.4.442.075.000,- terealisasi Rp.4.414.083.227,- (99,37%) dan capaian kinerja (100%) dengan demikian Jumlah pemberian kode NSN yang terintegrasi secara nasional dan Internasional terlaksana dengan baik hal ini dapat dilihat dari capai kinerja telah mencapai 100% dengan

analisa semua kegiatan dapat tercapai sesuai rencana waktu serta penyerapan anggaran dapat terlaksana secara optimal dan dipakai Satker.

Faktor Keberhasilan:

- (1) Terpenuhinya penggunaan kodifikasi dengan sistem (NSN).
- (2) Terlaksananya pengelolaan data dan pengoperasional kodifikasi.
- (3) Terlaksananya kerja sama dalam negeri dan luar negeri di bidang kodifikasi.
- (4) Terlaksananya sosialisasi jabatan fungsional kataloger di lingkungan Kemhan dan TNI.

Dengan demikian kegiatan kodifikasi materiil pertahanan menghasilkan kinerja (*outcome*) yakni; terintegrasinya data kodifikasi dalam mendukung logistik serta pembinaan materiil sistem NSN dalam rangka mendukung industri pertahanan dalam negeri.

- f) Kegiatan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), pagu anggaran Rp.3.855.742.000,- terealisasi Rp.3.687.115.607,- (95.63%) dan capaian kinerja (100%) dengan demikian kegiatan pengelolaan Barang Milik Negara Kemhan dan TNI yang terkelola berdasarkan data terkini dan akurat yang terintegrasi, akuntabel, tertib dan tepat waktu dapat terlaksana dengan baik hal ini dapat dilihat dari capaian kinerja 100% dengan analisa semua kegiatan dapat tercapai sesuai program, rencana waktu serta penyerapan anggaran yang optimal.

Faktor Keberhasilan:

- (1) Terlaksananya pengelolaan BMN tanah dan bangunan.
- (2) Terlaksananya pengelolaan BMN selain tanah dan bangunan.
- (3) Terlaksananya verifikasi dan evaluasi data BMN tanah dan bangunan.

Dengan demikian kegiatan pengelolaan BMN menghasilkan kinerja (*outcome*) terkelolanya aset BMN melalui pemanfaatan BMN dalam rangka mendukung pertahanan negara.

- 10) Sasaran Program Pengembangan Teknologi Industri Pertahanan Kemhan (Sasaran Program yang ke-10) adalah Meningkatnya Alutsista produksi dalam negeri terpenuhi secara bertahap dan pengembangan Pinak Industri pertahanan.

Sasaran program yang ke-10 didukung dengan 1 (satu) sasaran kegiatan dan 1 (satu) indikator kinerja utama belum terlaksana dengan baik, hal ini dapat dilihat dari capaian kinerja baru mencapai 49% belum sesuai dengan target yang direncanakan. Hal ini disebabkan karena belum didukung faktor keberhasilan dengan indikator kinerja utama capaian kerjanya baru mencapai

49% serta penyerapan anggaran masih rendah baru mencapai terealisasi 59%, disebabkan adanya kegiatan belum sepenuhnya selesai secara optimal.

Adapun tingkat keberhasilan dan kegagalan dari masing masing kegiatan dapat dijelaskan secara detail sebagai berikut:

Kegiatan produksi Alutsista industri dalam negeri dan pengembangan piranti lunak industri pertahanan, pagu anggaran Rp.3.779.062.750.000,- terealisasi Rp.2.221.851.362.998,- (59%) dengan capaian kinerja (49%) Pencapaian sasaran dengan menggunakan 1 (satu) indikator kinerja utama belum terlaksana dengan baik hal ini dapat dilihat dari capaian kinerja yang baru mencapai 49%, hal tersebut dikarenakan masih banyak kegiatan belum tercapai sesuai rencana waktu serta penyerapan anggaran, sehingga belum terlaksana secara optimal. Kegiatan yang dibiayai dengan anggaran PDN sebagian besar akan berakhir pada bulan Maret Tahun 2021 dan PDN bersifat *Multi-years*.

Faktor Keberhasilan:

- (1) Terpenuhinya pengadaan Alpalhan yang diperoleh dari kegiatan pemanfaatan hasil pengembangan teknologi dan industri pertahanan dalam negeri.
- (2) Terwujudnya peningkatan penggunaan Alutsista produksi industri dalam negeri.

Dengan demikian, kegiatan produksi alutsista dalam negeri dan pengembangan piranti lunak industri pertahanan menghasilkan (*outcome*) meningkatnya produktivitas industri pertahanan dalam negeri dalam rangka mendukung pertahanan negara dan meningkatkan pendapatan negara.

- 11) Sasaran Program Badan Instalasi Strategis Nasional Kemhan (Sasaran Program yang ke-11) adalah Terwujudnya keamanan dan ketertiban dalam rangka penyelenggaraan seluruh kegiatan di kawasan instalasi strategis pertahanan.

Sasaran program yang ke-11 didukung dengan 3 (tiga) sasaran kegiatan dan 5 (Lima) indikator kinerja utama terlaksana dengan baik, hal ini dapat dilihat dari capaian kinerja telah mencapai 100% sesuai dengan target yang direncanakan.

Faktor keberhasilan ini dipengaruhi karena dari 3 (tiga) indikator kinerja utama tersebut seluruhnya telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan tepat waktu. Faktor keberhasilan ini didukung karena dari 5 (Lima) indikator kinerja utama tersebut seluruhnya telah dilaksanakan sesuai rencana dan tepat waktu, serta penyerapan anggaran sudah terealisasi mencapai 98.34% dan sisa anggaran telah dikembalikan ke kas negara,

Adapun tingkat keberhasilan dan kegagalan dari masing masing kegiatan dapat dijelaskan secara detail sebagai berikut :

- a) Kegiatan Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Bainstrahan Kemhan, pagu anggaran yang telah direvisi sebesar Rp. 44.506.690.000,- terealisasi Rp. 43.489.868.749,- (97,72%) dan capaian kinerja telah mencapai 100%. Dilihat dari capaian kinerja (100 %) seluruh kegiatan dapat dilaksanakan sesuai rencana dan dapat diselesaikan dengan baik, dengan *output* 36 laporan, 1 layanan dan 12 bulan layanan. Faktor keberhasilan:

- (1) Terlaksananya persentase produk perencanaan dan penganggaran Bainstrahan yang akuntabel.
- (2) Terlaksananya persentase pencapaian perencanaan anggaran sesuai dengan indeks dan standar biaya.
- (3) Terlaksananya persentase capaian target penyerapan anggaran yang tepat waktu.

Dengan demikian kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Bainstrahan Kemhan menghasilkan kinerja (*outcome*) yaitu:

- (1) Produk regulasi Bainstrahan Kemhan digunakan sebagai pedoman pimpinan dalam melaksanakan program kerja dan anggaran.
- (2) Produk laporan anggaran Bainstrahan Kemhan digunakan sebagai evaluasi dan monitoring pelaksanaan program dan kegiatan.
- (3) Laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu.
- (4) Hasil temuan materiil dari audit Itjen dan BPK sebagai bahan masukan dan perbaikan administrasi personel, keuangan dan Barang Milik Negara (BMN).

Faktor Kegagalan: Nihil

- b) Kegiatan Pengelolaan Kawasan Instalasi Strategis Pertahanan, pagu yang telah direvisi sebesar Rp. 9.662.384.000,- terealisasi Rp. 9.634.522.050,- (100%) dan capaian kinerja telah mencapai (100%). Dilihat dari capaian kinerja (100%) seluruh kegiatan dapat dilaksanakan sesuai rencana dan dapat diselesaikan dengan baik, dengan *output* 7 laporan dan 12 bulan layanan.

Faktor keberhasilan:

- (1) Terlaksananya persentase gangguan keamanan di kawasan instalasi strategis pertahanan yang dapat diatasi.
- (2) Terlaksananya persentase aset kawasan instalasi strategis pertahanan yang terpelihara.
- (3) Terlaksananya persentase kerja sama kawasan instalasi strategis pertahanan yang terealisasi.

Dengan demikian kegiatan pengelolaan kawasan strategis pertahanan menghasilkan kinerja (*outcome*) yaitu:

- (1) Berkurangnya tingkat kecelakaan di kawasan Instalasi Strategis Pertahanan.
- (2) Meningkatnya ketertiban dan keamanan di Kawasan Instalasi IPSC Sentul.
- (3) Terpeliharanya sarana dan prasarana yang ada di Kawasan IPSC Sentul.
- (4) Peningkatan kualitas air bersih bagi Kementerian/Lembaga di Kawasan IPSC Sentul.
- (5) Pemanfaatan sarana ibadah bagi Kementerian/Lembaga serta masyarakat di kawasan IPSC Sentul.

Faktor Kegagalan:

Realisasi capaian *output* setelah penghematan anggaran terdapat 14 (empat belas) kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena pemotongan anggaran/refocusing untuk penanganan *Covid-19* sebagai berikut:

- (1) Melaksanakan pelatihan dan simulasi pemadam kebakaran di Kawasan IPSC.
- (2) Melaksanakan Pengamanan Terpadu di Kawasan IPSC.
- (3) Menyusun Revisi Perkabadan Nomor 7 Tahun 2016 tentang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.
- (4) Melaksanakan Sosialisasi Organisasi Bainstrahan Kemhan di lingkungan Satker/Subsatker Kemhan.
- (5) Melaksanakan Sosialisasi Organisasi Bainstrahan Kemhan di lingkungan Kawasan IPSC Sentul Bogor.
- (6) Melaksanakan perjanjian dan pengaturan penggunaan Sarpras Kawasan IPSC.
- (7) Melaksanakan Revisi terbatas Perkabainstrahan Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Kawasan IPSC Sentul Bogor.
- (8) Melaksanakan Forum Diskusi tentang Pencegahan Masuknya Paham Radikalisme di Kawasan IPSC.
- (9) Melaksanakan Forum Diskusi tentang Pencegahan Bahaya Narkoba di Kawasan IPSC.

- (10) Penyusunan Konsep Perpanjangan Kesempatan Bersama antara Kemhan dengan BNB, BNPT, PPSDK tentang penggunaan sementara sebagian tanah Kemhan di Kawasan IPSC.
 - (11) Melaksanakan Bakti Sosial Pembagian Sembako bagi Masyarakat sekitar di Kawasan IPSC.
 - (12) Melaksanakan Bakti Sosial Sunatan Massal bagi Masyarakat sekitar di Kawasan IPSC.
 - (13) Melaksanakan Peningkatan Kemampuan SDM di Kawasan IPSC bidang Kebahasaan bekerjasama dengan PPSDK Kemdikbud.
 - (14) Melaksanakan Peningkatan Kemampuan SDM di Kawasan IPSC bidang Kebencanaan bekerjasama dengan BPBD Kab. Bogor.
- c) Kegiatan Pengelolaan Pertahanan Siber, pagu yang telah direvisi sebesar Rp. 7.250.000.000,- terealisasi Rp. 7.247.291.000,- (99,96%) dan capaian kinerja telah mencapai (100%). Dilihat dari capaian kinerja (100%) seluruh kegiatan dapat dilaksanakan sesuai rencana dan dapat diselesaikan dengan baik, dengan *output* 12 bulan layanan perkantoran.

Faktor keberhasilan:

- (1) Terlaksananya jaringan internet Kemhan yang terlindungi oleh parameter pertahanan siber dari serangan siber global.
- (2) Terlaksananya hasil pemantauan dan analisa terhadap serangan siber global.
- (3) Terlaksananya kesiapan operasional infrastruktur siber.

Dengan demikian kegiatan Pengelolaan Pertahanan Siber dalam rangka Pertahanan Negara yang mampu menghadapi ancaman serangan siber global, menghasilkan kinerja (*outcome*) yaitu:

- (1) Terlindunginya jaringan intranet Kemhan dari serangan siber global.
- (2) Hasil analisa terhadap serangan siber global dapat digunakan oleh pimpinan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

Faktor Kegagalan:

- Nihil

- d) Kegiatan Pengelolaan Informasi Strategis Pertahanan, pagu yang telah direvisi sebesar Rp. 1.649.947.000,- terealisasi Rp. 1.649.284.500,- (100%), Dilihat dari capaian kinerja (100%) seluruh kegiatan dapat dilaksanakan sesuai rencana dan dapat diselesaikan dengan baik, dengan *output* 6 laporan dan 12 bulan layanan perkantoran.

Faktor keberhasilan:

- (1) Terlaksananya Informasi strategis pertahanan dalam dan luar negeri yang ditindaklanjuti.
- (2) Terlaksananya kajian strategis pertahanan dalam dan luar negeri yang ditindaklanjuti.
- (3) Terlaksananya penyajian intelijen strategis pertahanan yang ditindaklanjuti.

Dengan demikian kegiatan Pengelolaan Informasi Strategis Pertahanan dalam dan luar negeri yang akurat, lengkap dan terkini menghasilkan kinerja (*outcome*) yaitu:

- (1) Tersedianya informasi strategis pertahanan dari dalam dan luar negeri sebagai bahan pengambilan keputusan pimpinan dan masukan bagi satker terkait.
- (2) Hasil analisa data dan informasi intelijen pertahanan dalam dan luar negeri dapat digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan bagi pimpinan dan satker terkait.

Faktor Kegagalan:

Realisasi capaian *output* setelah penghematan anggaran terdapat 7 (tujuh) kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena pemotongan anggaran/refocusing untuk penanganan *Covid-19* sebagai berikut:

- (1) Melaksanakan kajian tentang Prediksi ancaman menghadapi revolusi industri 4.0. dan dampaknya terhadap Pertahanan Negara.
- (2) Melaksanakan Kajian tentang Penggunaan Transaksi Elektronik ditinjau dari Perspektif Keamanan Nasional.
- (3) Melaksanakan Kajian tentang Kontestasi Strategis Kekuatan Global dalam membentuk tatanan baru di Timur Tengah.
- (4) Melaksanakan Kajian tentang Transformasi Pertahanan Indonesia sebagai adaptasi Indonesia terhadap Konsep Indo Pasifik.
- (5) Melaksanakan Kajian tentang Strategi Pertahanan Udara Indonesia dengan mengadopsi teknologi Eropa dan AS: Tinjauan Industri Pertahanan Bidang Persenjataan Angkatan Udara.
- (6) Melaksanakan Kajian tentang Peningkatan Keberadaan Personel Wanita TNI dalam Misi Perdamaian Dunia: Peran Gender Issue dan Capacity Building.
- (6) Melaksanakan Kajian tentang Prospek dan tantangan Kerjasama Trilateral Indomalphi
- (7) Melaksanakan Kajian tentang Dinamika perkembangan Lingkungan Strategis 2020 dan Pengaruhnya terhadap Pertahanan negara.

d. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Segala sumber daya nasional yang berupa sumber daya manusia, sumber daya alam dan buatan, nilai-nilai, teknologi, sarana prasarana dan dana, dapat didayagunakan untuk meningkatkan kemampuan pertahanan negara. Potensi sumber daya nasional dapat didayagunakan melalui proses transformasi menjadi potensi kekuatan pertahanan negara yang pada saatnya diperlukan dan dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan pertahanan negara.

- 1) Sumber daya anggaran. Pada TA. 2020 sumber daya anggaran UO Kemhan terjadi beberapa kali revisi dimulai dari tahap perencanaan dan tahap pelaksanaan. Pada tahap perencanaan dari Pagu Indikatif semula sebesar Rp. 21.542.503.185.000,- berubah menjadi Pagu Anggaran sebesar Rp. 20.117.503.185.000,- pada tahap pelaksanaan DIPA awal sebesar Rp. 20.117.503.185.000,- berubah pada DIPA Revisi sebesar Rp. 37.158.391.641.000,- dengan adanya revisi dari tahap perencanaan dan tahap pelaksanaan program dan kegiatan UO Kemhan tetap berjalan sesuai yang dijadwalkan sehingga kegiatan pokok UO Kemhan tetap terlaksana dengan baik dengan capaian kinerja 94,93%.
- 2) Sumber Daya Manusia (Personel). Secara kualitas jumlah personel yang memenuhi persyaratan administrasi dan memiliki kompetensi masih dirasakan kurang sehingga beberapa jabatan baik struktural maupun fungsional belum terisi, begitu pula secara kuantitas personel UO Kemhan masih kurang terutama untuk jabatan Analis Madya, Analis Muda dan Jabatan Fungsional Umum serta Jabatan Fungsional Tertentu terutama untuk jabatan yang sesuai dengan Struktur Organisasi yang baru yaitu Permenhan Nomor 14 dan Kepmenhan Nomor: Kep/745/M/2019. DSP UO Kemhan berjumlah 4.781 orang.
- 3) Sumber Daya Materiiil, Fasilitas dan Jasa. Kegiatan-kegiatan UO Kemhan telah mencapai 100% meskipun ada beberapa kegiatan yang masih belum terwadahi untuk mendukung tugas pokok UO Kemhan.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Analisis program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja UO Kemhan, secara umum telah dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Perjanjian Kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Satker/Subsatker. Sedangkan program dan kegiatan pencapaian kinerja UO Kemhan belum dapat sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan target, dari 61 (enam puluh satu) kegiatan dalam 11 (sebelas) program secara umum sudah terealisasi dengan baik dimana 59 (lima puluh sembilan) kegiatan capaian kinerjanya telah mencapai 100% dan masih terdapat 2 (dua) kegiatan capaian kinerja belum sepenuhnya mencapai 100%, hal ini disebabkan masih terdapat 2 (dua) *output* kegiatan capaian kinerjanya di bawah 85% disebabkan beberapa hal:

- 1) Kegiatan pengadaan barang dan jasa militer capaian kinerjanya baru mencapai 72%, karena masih terdapat 1 (satu) *output* kegiatan yaitu dukungan pengadaan Alutsista capaian kinerjanya masih rendah baru mencapai 17%, karena output kegiatan tersebut belum terlaksana semuanya dan akan berakhir pada akhir bulan Maret 2020 dan bersifat multi-years.

- 2) Kegiatan produksi Alutsista industri dalam negeri dan pengembangan piranti lunak industri pertahanan capaian kinerjanya baru mencapai 49% yaitu dukungan Pengadaan Alutsista baru mencapai 49% karena *output* kegiatan Pengadaan Alutsista melalui PDN kegiatan masih terlaksana dalam kontrak dan memerlukan proses produksi yang cukup lama sehingga berpengaruh kepada capaian kinerja serta realisasi anggaran. Pengajuan wabku sampai dengan pembayaran memerlukan waktu 6 sampai dengan 8 bulan karena *output* kegiatan tersebut belum terlaksana semuanya dan akan berakhir pada akhir bulan Maret 2021 dan bersifat *multi-years*.

Untuk lebih detail akan diuraikan faktor keberhasilan dan faktor kegagalan dari setiap program Eselon I sebagai berikut:

- 1) Pencapaian kinerja program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kemhan yang didukung 13 (tiga belas) kegiatan terlaksana dengan baik, hal ini dapat dilihat dari semua kegiatan terlaksana dengan baik sesuai rencana waktu.
- 2) Pencapaian kinerja program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Kemhan yang didukung 6 (enam) kegiatan terlaksana dengan baik, hal ini dapat dilihat dari semua kegiatan terlaksana dengan baik sesuai rencana waktu.
- 3) Pencapaian kinerja program strategi pertahanan dengan kegiatan yang didukung 5 (lima) kegiatan terlaksana dengan baik, hal ini dapat dilihat dari semua kegiatan terlaksana dengan baik sesuai rencana waktu.
- 4) Pencapaian kinerja program perencanaan umum dan penganggaran pertahanan yang didukung 5 (lima) kegiatan terlaksana dengan baik, hal ini dapat dilihat dari semua kegiatan terlaksana dengan baik sesuai rencana waktu.
- 5) Pencapaian kinerja program potensi pertahanan yang didukung 5 (lima) kegiatan terlaksana dengan baik, hal ini dapat dilihat dari semua kegiatan terlaksana dengan baik sesuai rencana waktu.
- 6) Pencapaian kinerja program kekuatan pertahananyang didukung 5 (lima) kegiatan belum terlaksana sepenuhnya dengan baik, hal ini dapat dilihat adanya 1 (satu) *output* kegiatan pembinaan SDM pertahanan yang tidak terlaksana dengan baik, namun kegiatan ini tidak mempengaruhi kinerjaprogram kekuatan pertahanan
- 7) Pencapaian kinerja program penelitian dan pengembangan Kemhan yang didukung 5 (lima) kegiatan terlaksana dengan baik, hal ini dapat dilihat dari semua kegiatan terlaksana dengan baik sesuai rencana waktu.
- 8) Pencapaian kinerja program pendidikan dan pelatihan Kemhan/TNI yang didukung 6 (enam) kegiatan belum terlaksana sepenuhnya dengan baik, hal ini dapat dilihat adanya 1 (satu) *output* kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Bahasa,yang tidak terlaksana dengan baik, namun kegiatan ini tidak mempengaruhi kinerja program pendidikan dan pelatihan Kemhan/TNI

- 9) Pencapaian kinerja program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Kemhan yang didukung 6 (enam) kegiatan belum terlaksana sepenuhnya dengan baik, hal ini dapat dilihat adanya 1 (satu) *output* kegiatan Pengadaan barang dan jasa militer yang belum terlaksana dengan baik, karena masih dapat diselesaikan sampai bulan Maret 2021 sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga kegiatan ini tidak mempengaruhi kinerja program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Kemhan.
- 10) Pencapaian kinerja program pengembangan teknologi dan industri pertahanan yang didukung 1 (satu) kegiatan belum sepenuhnya terlaksana dengan baik, hal ini dapat dilihat dari beberapa kegiatan masih ada capaian kinerjanya belum mencapai 100% masih di bawah 40%, hal ini dipengaruhi adanya batas penyelesaian sampai bulan Maret 2020.
- 11) Pencapaian kinerja program pembinaan instalasi strategis nasional yang didukung 4 (empat) kegiatan terlaksana dengan baik, hal ini dapat dilihat semua kegiatan terlaksana dengan baik sesuai rencana waktu.

9. Realisasi Anggaran.

Dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan UO Kemhan tahun 2020 telah didukung dengan alokasi pagu anggaran sebesar Rp. 21.542.503.185.000,- dan pada tahun berjalan telah diadakan revisi pagu anggaran menjadi sebesar Rp. 37.158.391.641.000,- dan Realisasi Anggaran telah terserap sebesar Rp. 29.991.588.572.004,-. Setelah adanya pagu revisi anggaran UO Kemhan Tahun 2020, program dan kegiatan secara umum telah dilaksanakan dengan baik dan daya serap anggaran sudah mencapai 80,71%. Hal ini disebabkan masih ada *output* kegiatan capaian kinerjanya masih rendah di bawah 85%.

Akuntabilitas Keuangan (Realisasi anggaran) dapat diuraikan lebih detail dalam tabel sebagai berikut:

AKUNTABILITAS KEUANGAN

NO	PROGRAM	PAGU ANGGARAN	REVISI ANGGARAN	REALISASI	PERSEN TASE REALISASI (%)
1.	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	2.771.845.724.000	2.593.119.459.000	2.561.439.137.746	98,78
2.	Pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Kemhan	67.742.459.000	53.409.973.000	53.157.153.931	99,53

3.	Strategi pertahanan	100.188.717.000	72.300.860.000	69.179.962.260	95,68
4.	Perencanaan umum dan penganggaran pertahanan	78.811.952.000	67.697.998.000	66.363.170.478	98,0
5.	Potensi pertahanan	233.240.590.000	222.913.515.000	217.832.562.747	97,72
6.	Kekuatan pertahanan	116.131.034.000	100.090.202.000	95.143.344.018	95,06
7.	Penelitian dan pengembangan Kemhan	236.322.083.000	220.835.152.000	219.879.596.153	99,57
8.	Pendidikan dan pelatihan	309.361.615.000	290.142.952.000	276.706.777.900	95,38
9.	Peningkatan sarana prasarana aparatur Kemhan	15.092.270.227.000	29.695.749.759.000	24.147.994.537.474	81,32
10.	Pengembangan teknologi dan industri pertahanan	2.469.150.000.000	3.779.062.750.000	2.221.851.362.998	59
11.	Pembinaan Instalasi Strategis Nasional	67.438.784.000	63.069.021.000	62.020.966.299	98,34
	Jumlah	21.542.503.185.000	37.158.391.641.000	29.991.588.572.004	80,71
	Presentase rata-rata program				80,71

BAB IV PENUTUP

10. Kesimpulan dan penekanan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah UO Kemhan tahun 2020 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban tahun pertama atas pelaksanaan Program dan Kegiatan sesuai dengan Rancangan Renstra UO Kemhan Tahun 2020-2024. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah UO Kemhan tahun 2020, adalah untuk memberikan gambaran atas upaya yang telah dilaksanakan, termasuk hambatan atau kendala, serta langkah-langkah perbaikan yang telah dilakukan sehingga dapat menjadi landasan dalam menentukan rencana aksi selanjutnya dalam pencapaian Visi, Misi dan Tujuan Organisasi. Berdasarkan hasil pengukuran atas seluruh target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2020, bahwa UO Kemhan tahun 2020 telah banyak peningkatan dengan menghasilkan *outcome* dan *output* pada capaian kinerja dalam tahun 2020 UO Kemhan.

a. Kesimpulan.

Sesuai dengan hasil analisis Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) UO Kemhan tahun 2020 dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan program dan kegiatan UO Kemhan tahun 2020 yang terdiri dari 11 (sebelas) program dan 62 (enam puluh dua) kegiatan dengan didukung 261 (dua ratus enam puluh satu) indikator kinerja utama secara umum telah dilaksanakan dengan baik dari target kinerja yang ditetapkan, walaupun masih terdapat beberapa permasalahan pada penyerapan anggaran maupun capaian

kinerja belum sepenuhnya terlaksana sesuai target kinerja dalam Perjanjian Kinerja UO Kemhan tahun 2020. Hal tersebut dipengaruhi adanya pandemi *Covid-19* sehingga pimpinan UO Kemhan merubah kebijakan selaras dengan kebijakan Presiden dalam rangka penanggulangan wabah/virus *Covid-19* dengan diberlakukannya *refocusing* anggaran, yang berdampak pada perubahan revisi program dan kegiatan UO Kemhan tahun 2020

- 2) Pada tahun berjalan semester I tahun 2020 terjadi pergantian Sekjen Kemhan selaku Ka UO Kemhan dan *refocusing* anggaran sehingga merevisi Perjanjian Kinerja UO Kemhan tahun 2020.
- 3) Tingkat capaian kinerja UO Kemhan Tahun 2020 telah mencapai 94,93%.
- 4) Tingkat penyerapan anggaran UO Kemhan Tahun 2020 telah mencapai 92.88%.
- 5) Maka bila dibandingkan capaian kinerja UO Kemhan tahun 2019 dengan capaian kinerja tahun 2020, terdapat kenaikan capaian kinerja sebesar 1,51%. yaitu semula dari tahun sebelumnya 93,42% meningkat menjadi 94,93%. Dan kenaikan daya serap anggaran sebesar 2,73% yaitu semula tahun sebelumnya 90,15% meningkat menjadi 92.88%.

b. Penekanan.

Dalam rangka upaya mendorong pencapaian target kinerja dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam rangka mencapai tujuan strategis UO Kemhan tahun 2020-2024 sebagai berikut: UO Kemhan telah menindaklanjuti hasil evaluasi kinerja tahun 2019 untuk perbaikan pengelolaan kinerja antara lain pengintegrasian antara pengelolaan kinerja organisasi dan indikator kinerja utama, meningkatkan kompetensi SDM pengelola kinerja dan perbaikan dalam perencanaan dan penganggaran sebagai berikut:

- 1) Menindaklanjuti hasil evaluasi akuntabilitas kinerja UO Kemhan tahun 2019 untuk perbaikan pengelolaan kinerja antara lain pengintegrasian antara pengelolaan kinerja organisasi dan indikator kinerja utama.
- 2) Melaksanakan Asistensi SAKIP untuk meningkatkan kompetensi SDM pengelola kinerja dan perbaikan dalam perencanaan dan penganggaran.
- 3) Melakukan peningkatan komunikasi antara pihak-pihak yang terkait, baik di lingkungan internal maupun eksternal UO Kemhan dengan instansi terkait.
- 4) Melakukan Monev capaian kinerja Satker/Subsatker secara triwulan pada tahun berjalan.
- 5) Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi melalui Aplikasi e-Lapkin.
- 6) Agar Kasatker/Kasubsatker melakukan koordinasi dengan baik pada tahap perencanaan anggaran program dan kegiatan untuk menghindari revisi anggaran yang berulang-ulang.

- 7) Perhatikan kegiatan pengadaan Alutsista yang dibiayai dari PLN/KE dan PDN terutama dalam akselerasi dan paralellisasi pengadaan barang dan jasa terutama yang bersifat lintas sektoral.

- 8) Agar revisi Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kemhan dan TNI sebagai pedoman penyusunan perencanaan kinerja UO Kemhan dipercepat.

Jakarta, 3 Februari 2021

a.n. Menteri Pertahanan RI
Sekretaris Jenderal,

ttd

Donny Ermawan T., M.D.S.
Marsekal Madya TNI

REVIU PERJANJIAN KINERJA
ESELON I DAN II UNIT ORGANISASI KEMENTERIAN PERTAHANAN
TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Donny Ermawan T., M.D.S.
Jabatan : Sekjen selaku Kepala Unit Organisasi Kemhan

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 3 Juni 2020

Sekretaris Jenderal
selaku
Kepala Unit Organisasi Kemhan,

ttd

Donny Ermawan T., M.D.S.
Marsekal Madya TNI

REVIU PERJANJIAN KINERJA
ESELON I DAN II UNIT ORGANISASI KEMENTERIAN PERTAHANAN
TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Donny Ermawan T., M.D.S.
Jabatan : Sekjen selaku Kepala Unit Organisasi Kemhan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Prabowo Subianto
Jabatan : Menteri Pertahanan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 3 Juni 2020

Pihak Kedua

Menteri Pertahanan,

ttd

Prabowo Subianto

Pihak Pertama

Sekretaris Jenderal
selaku
Kepala Unit Organisasi Kemhan,

ttd

Donny Ermawan T., M.D.S.
Marsekal Madya TNI

DALAM RANGKA MENINGKATKAN PEMAHAMAN TENTANG SISTEM AKUNTANSI KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) BAGI PEJABAT KEMHAN, TELAH MELAKSANAKAN BEBERAPA KEGIATAN SEPERTI DIBAWAH INI

- 1. Pada Rapim UO Kemhan tanggal 5 Februari 2020, Kemhan Bapak Didit Ses Deputi Bidang Program dan Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PAN dan RB dengan menyampaikan Paparan tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Rapim UO Kemhan Tahun 2020.**

Bapak Didit Ses Deputy Bidang Program dan Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PAN dan RB dengan menyampaikan paparan tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)



Sekjen Kemhan Laksamana Madya Agus Setiadji menyerahkan cinderamata kepada Bapak Didit Ses Deputi Bidang Program dan Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PAN dan RB



Irjen Kemhan Letjen TNI Ida Bagus Purwalaksana menyampaikan terima kasih atas kehadiran dan kesediaan Ses Deputi Bidang Program dan Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PAN dan RB sebagai Narasumber pada pelaksanaan Rapim UO Kemhan Tahun 2020



2. PENYERAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 MULAI DARI PEJABAT ESELON IV, III, II, I PADA RAPIM UO KEMHAN TAHUN 2020.

Pejabat Eselon IV (Kasubbag Akuntabilitas Kinerja Biro Ortala) menyerahkan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 kepada Pejabat Eselon III (Kabag Fas RB dan Akin) Biro Ortala Setjen Kemhan



Pejabat Eselon III Kabag TU Pusdatin menyerahkan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 kepada Pejabat Eselon II KapusdatinKemhan



Pejabat Eselon II Kapus Konstruksi menyerahkan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 kepada Pejabat Eselon I Kabaranaan diwakili oleh Ses Baranahan Kemhan



Pejabat Eselon I Dirjen Strahan menyerahkan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 kepada Sekjen Kemhan selaku Kepala Unit Organisasi Kemhan



Foto Bersama Penyerahan Perjanjian Kinerja mulai dari Pejabat Eselon I, II, III dan IV dihadiri Sekjen Kemhan, Irjen Kemhan, Rektor Unhan dan Ses Deputi Bidang Program dan Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kemen PAN dan RB pada Rapim UO Kemhan Tahun 2020



Pada Penutupan Rapim UO Kemhan Tahun 2020 Sekjen Kemhan bersalaman dengan peserta Rapim, Kabag Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Biro Ortala Setjen Kemhan



ACARA PENANDATANGANAN

**PERJANJIAN KINERJA PEJABAT ESELON IV DAN III TAHUN 2020
DIHADAPAN KEPALA BIRO ORGANISASI DAN TATA LAKSANA SETJEN
KEMHAN**



Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun Eselon IV Kasubbag Akin dengan Kabag Fas RB dan Akin dihadapan Karo Ortala Setjen Kemhan Tahun 2020



Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun Eselon IV Kasubbag Fas dan RB dengan Kabag Fas RB dan Akin dihadapan Karo Ortala Setjen Kemhan Tahun 2020



Kabag Fas RB dan Akin menandatangani dan mengesahkan Perjanjian Kinerja Eselon IV Kasubbag Fas dan RB dengan dihadapan Karo Ortala Setjen Kemhan Tahun 2020



Penandatanganan Perjanjian Kinerja Eselon IV Kasubbag Talem
dengan Kabag Baglem dan Anjab dihadapan Karo Ortala Setjen Kemhan Tahun 2020



Penandatanganan Perjanjian Kinerja Eselon IV Kasubbag Anjab
dengan Kabag Baglem dan Anjab dihadapan Karo Ortala Setjen Kemhan Tahun 2020



Penandatanganan Perjanjian Kinerja Eselon IV Kasubbag TU Biro
dengan Kabag Baglem dan Anjab dihadapan Karo Ortala Setjen Kemhan Tahun 2020



Kabag Lem dan Anjab menandatangani dan mengesahkan Perjanjian Kinerja Eselon IV
Kasubbag Talem dengan dihadapan Karo Ortala Setjen Kemhan Tahun 2020



Penandatanganan Perjanjian Kinerja Kabag Fas RB dan Akin sebagai Eselon III dengan Karo Ortala Setjen Kemhan Tahun 2020



Karo Ortala Setjen Kemhan menandatangani dan mengesahkan Perjanjian Kinerja Eselon III Kabag Fas RB dan Akin Biro Ortala Setjen Kemhan Tahun 2020



Penandatanganan Perjanjian Kinerja Kabag Lem dan Anjab sebagai Eselon III dengan Karo Ortala Setjen Kemhan Tahun 2020



Karo Ortala Setjen Kemhan menandatangani dan mengesahkan Perjanjian Kinerja Eselon III Kabag Lem dan Anjab Biro Ortala Setjen Kemhan Tahun 2020



PERSONIL BIRO ORTALA SETJEN KEMHAN YANG MENGIKUTI ACARA
PENANDATANGANAN PERJANJIAN KINERJA PEJABAT ESELON III DAN IV
TAHUN 2020

